



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG**

TAHUN 2014

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN

**Nomor : 36A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015
Tanggal : 19 MEI 2015**

DAFTAR ISI

1. DAFTAR ISI
2. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
3. LAPORAN KEUANGAN POKOK
4. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4.3.1 dan 4.3.9 atas Laporan Keuangan, saldo Kas dan saldo Ekuitas per 31 Desember 2014 masing-masing disajikan sebesar Rp1.086.300.120.262,00 dan Rp15.147.458.705.353,00. Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2008 mengalami kas tekor yang terakumulasi jumlahnya per 31 Desember 2014 minimal sebesar Rp22.109.541.062,00. Ketekoran kas tersebut antara lain disebabkan oleh kecurangan pihak ketiga dan kelemahan sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas dan pendapatan yaitu layanan *cash pick up* tanpa disertai jaminan keamanan dari bank, setoran tunai ke bank tanpa ada validasi dari pihak bank, *Treasury Single Account* belum diterapkan dan mekanisme rekonsiliasi dengan bank yang hanya melalui satu orang *person in charge* yang ditunjuk bank serta layanan penerimaan dan setoran kas tunai dilakukan

oleh UPTD Kas Daerah yang bukan Bendahara Penerimaan. Proses penyelesaian kerugian daerah yang timbul dari ketekoran kas tersebut hingga pemeriksaan berakhir belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Ketekoran kas tersebut mempengaruhi kewajaran saldo kas dan saldo ekuitas, yang menurut opini BPK, jumlah tersebut seharusnya dikoreksi agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jika proses penyelesaian kerugian daerah sudah *in kracht*, pada tanggal 31 Desember 2014, saldo Kas dan saldo Ekuitas pada Neraca, Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas, Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih saji minimal sebesar Rp22.109.541.062,00; Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas, Saldo Awal Kas pada Laporan Arus Kas, Penggunaan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih saji minimal sebesar Rp19.261.780.197,00; Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah pada Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih saji minimal sebesar Rp2.000.000.000,00.

Menurut opini BPK, kecuali untuk pengaruh ketekoran kas terhadap saldo Kas dan saldo Ekuitas pada Neraca, Ekuitas Awal dan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas, Saldo Awal Kas, Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah, Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas, Penggunaan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, seperti yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, serta realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 36B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2014 dan Nomor 36C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2014 tanggal 19 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 19 Mei 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.A., C.I.A., C.F.E.
Akuntan, Register Negara No. D-17.698



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Audited)

No	Uraian	Ref	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Bertambah / (Berkurang)		Realisasi 2013
					Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	PENDAPATAN						
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
03	Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1.a.1	642,700,000,000	791,509,586,089	148,809,586,089	123.15%	683,708,489,950
04	Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.1.a.2	104,484,420,000	110,491,080,293	6,006,660,293	105.75%	102,785,108,993
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.1.a.3	7,989,867,000	8,036,099,560	46,232,560	100.58%	7,650,778,888
06	Lain-lain PAD yang Sah	4.1.1.a.4	136,106,418,000	228,330,462,551	92,224,044,551	167.76%	131,774,932,675
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		891,280,705,000	1,138,367,228,493	247,086,523,493	127.72%	925,919,310,506
08							
09	PENDAPATAN TRANSFER						
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN						
11	Dana Bagi Hasil Pajak	4.1.1.b.1.a	120,850,000,000	137,759,893,153	16,909,893,153	113.99%	120,223,608,244
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.1.1.b.1.b	2,059,000,000	3,031,059,126	972,059,126	147.21%	1,878,324,513
13	Dana Alokasi Umum	4.1.1.b.1.c	1,104,739,473,000	1,104,739,473,000	-	100.00%	1,054,002,569,000
14	Dana Alokasi Khusus	4.1.1.b.1.d	38,982,620,000	29,236,965,000	(9,745,655,000)	75.00%	14,993,022,000
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		1,266,631,093,000	1,274,767,390,279	8,136,297,279	100.64%	1,191,097,523,757
16							
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA						
18	Dana Otonomi Khusus	4.1.1.b.2	283,917,499,000	283,917,499,000	-	0.00%	266,894,650,000
19	Dana Penyesuaian		283,917,499,000	283,917,499,000	-	100.00%	266,894,650,000
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)						
21							
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI						
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.1.1.b.3	345,255,000,000	399,557,971,017	54,302,971,017	115.73%	329,977,231,976
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		345,255,000,000	399,557,971,017	54,302,971,017	115.73%	329,977,231,976
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)		1,895,803,592,000	1,958,242,860,296	62,439,268,296	103.29%	1,787,969,405,733
26	Totol Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)						
27							
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
29	Pendapatan Hibah	4.1.1.c	78,425,281,000	69,405,952,776	(9,019,328,224)	88.50%	82,682,010,621
30	Pendapatan Dana Darurat		78,425,281,000	69,405,952,776	(9,019,328,224)	88.50%	82,682,010,621
31	Pendapatan Lainnya		2,865,509,578,000	3,166,016,041,565	300,506,463,565	110.49%	2,796,570,726,860
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)						
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)						
34							
35	BELANJA						
36	BELANJA OPERASI						
37	Belanja Pegawai	4.1.2.1.a	1,408,794,186,232	1,306,934,922,575	(101,859,263,657)	92.77%	1,290,880,031,132
38	Belanja Barang	4.1.2.1.b	928,942,801,796	727,399,487,313	(201,543,314,483)	78.30%	545,272,678,680
39	Bunga	4.1.2.1.c	250,000,000	250,000,000	-	100.00%	378,295,400
40	Subsidi		57,956,904,850	113,718,345,363	55,761,440,513	196.21%	41,621,315,866
41	Hibah	4.1.2.1.d	7,794,905,000	6,301,500,000	(1,493,405,000)	80.84%	2,731,600,000
42	Bantuan Sosial	4.1.2.1.e	870,105,000	870,104,900	(100)	100.00%	788,567,000
42a	Bantuan Keuangan	4.1.2.1.f					
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)		2,404,608,902,878	2,155,474,360,151	(249,134,542,727)	89.64%	1,881,672,488,078
44							
45	BELANJA MODAL						
46	Belanja Tanah	4.1.2.2	456,326,615,700	66,806,647,024	(389,519,968,676)	14.64%	55,557,059,733
47	Belanja Peralatan dan Mesin	4.1.2.2	194,294,982,988	168,484,419,664	(25,810,563,324)	86.72%	132,632,841,323
48	Belanja Gedung dan Bangunan	4.1.2.2	415,308,746,454	380,386,931,387	(34,921,815,067)	91.59%	143,715,016,979
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.1.2.2	210,334,568,580	175,596,020,355	(34,738,548,225)	83.48%	252,075,125,515
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2	34,174,413,400	8,850,992,477	(25,323,420,923)	25.90%	7,031,368,712
51	Belanja Aset Lainnya			56,220,000	56,220,000	0.00%	
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)		1,310,439,327,122	800,181,230,907	(510,258,096,215)	61.06%	591,011,412,262
53							
54	BELANJA TAK TERDUGA						
55	Belanja Tak Terduga	4.1.2.3	22,461,480,000	1,777,048,020	(20,684,431,980)	7.91%	806,709,097
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)		22,461,480,000	1,777,048,020	(20,684,431,980)	7.91%	806,709,097

No	Uraian	Ref	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Bertambah / (Berkurang)		Realisasi 2013
					Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)		3,737,509,710,000	2,957,432,639,078	(780,077,070,922)	79.13%	2,473,490,609,437
58							
59	TRANSFER						
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA						
61	Bagi Hasil Pajak		-	-	-	0.00%	-
62	Bagi Hasil Retribusi		-	-	-	0.00%	-
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	0.00%	-
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)		-	-	-	0.00%	-
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)		3,737,509,710,000	2,957,432,639,078	(780,077,070,922)	79.13%	2,473,490,609,437
66							
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	4.1.3	(872,000,132,000)	208,583,402,487	1,080,583,534,487	-23.92%	323,080,117,423
68							
69	PEMBIAYAAN						
70							
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
72	Penggunaan SILPA	4.1.4.a	912,721,021,842	912,721,021,842	-	100.00%	635,457,569,772
73	Pencairan Dana Cadangan	4.1.4.a	7,458,024,158	-	(7,458,024,158)	0.00%	-
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	0.00%	-
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-	-	0.00%	-
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	0.00%	-
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	0.00%	-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	0.00%	-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-	0.00%	-
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	-	0.00%	-
81	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-	-	0.00%	-
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-	0.00%	-
83	Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	0.00%	-
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)		920,179,046,000	912,721,021,842	(7,458,024,158)	99.19%	635,457,569,772
85							
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
87	Pembentukan Dana Cadangan	4.1.4.b.1	25,439,914,000	25,439,914,000	-	100.00%	15,000,000,000
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.1.4.b.2	20,839,000,000	20,839,000,000	-	100.00%	29,000,000,000
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-	-	0.00%	-
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	0.00%	-
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	4.1.4.b.3	1,900,000,000	1,816,665,353	(83,334,647)	95.61%	1,816,665,353
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	0.00%	-
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-	0.00%	-
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	-	0.00%	-
94A	Pengembalian Sisa Dana DPPID		-	-	-	0.00%	-
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-	0.00%	-
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-	0.00%	-
97	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	0.00%	-
98	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)		48,178,914,000	48,095,579,353	(83,334,647)	99.83%	45,816,665,353
99	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)		872,000,132,000	864,625,442,489	(7,374,689,511)	99.15%	589,640,904,419
100			-	1,073,208,844,976	1,073,208,844,976	0.00%	912,721,021,842
101	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)	4.1.5	-				





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (*Audited*)

NO	URAIAN	Ref	2014	2013
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	4.2.a	912,721,021,842	635,457,569,772
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.2.b	912,721,021,842	635,457,569,772
3.	Sub Total (1 - 2)		-	-
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	4.2.c	1,073,208,844,976	912,721,021,842
5.	Sub Total (3 + 4)	4.2.d	1,073,208,844,976	912,721,021,842
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
7.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	4.2.e	1,073,208,844,976	912,721,021,842





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Audited)

No	Uraian	Ref	2014 (Rp)	2013 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)	Tren %
1	2	3	4	5	6	7
01	ASET					
02						
03	ASET LANCAR					
04	Kas di Kas Daerah	4.3.1.a	310,926,359,944	656,050,079,880	(345,123,719,936)	0.00%
04a	Bank	4.3.1.a.1	310,926,359,944	656,050,079,880	(345,123,719,936)	-52.61%
04b	Deposito	4.3.1.a.2	725,705,769,509	249,000,000,000	476,705,769,509	191.45%
05	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.b	9,135,385,241	978,269,516	8,157,115,725	833.83%
06	Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.c	24,431,500	65,432,500	(41,001,000)	-62.66%
06a	Kas di BLUD	4.3.1.d	31,939,365,576	11,656,105,709	20,283,259,867	174.01%
06b	Kas di Bendahara Dana BOS	4.3.1.e	8,568,808,492	5,001,829,739	3,566,978,753	71.31%
07	Investasi Jangka Pendek					0.00%
08	Piutang Pajak	4.3.2.a	306,224,578,799	271,832,216,871	34,392,361,928	12.65%
09	Piutang Retribusi	4.3.2.b	9,792,767,879	8,865,794,451	926,973,428	10.46%
10	Penyisihan Piutang	4.3.2.c	(276,344,961,400)	(245,564,896,340)	(30,780,065,060)	12.53%
10a	Penyisihan Piutang Dana Bergulir					0.00%
11	Belanja Dibayar Dimuka	4.3.2.d	7,241,621,151	3,170,117,701	4,071,503,450	128.43%
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-	0.00%
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-	0.00%
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	0.00%
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	0.00%
16	Bgaian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-	-	0.00%
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-	-	0.00%
18	Piutang Lainnya	4.3.2.e	51,195,303,117	16,335,377,691	34,859,925,426	213.40%
18a	Penyisihan Piutang Lainnya	4.3.2.f	(4,745,083,753)	(5,873,609,198)	1,128,525,445	-19.21%
19	Persediaan	4.3.3	30,795,854,733	44,361,323,750	(13,565,469,017)	-30.58%
19a	RK Dinas					0.00%
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19a)		1,210,460,200,788	1,015,878,042,270	194,582,158,518	19.15%
21						
22	INVESTASI JANGKA PANJANG					
23	Investasi Non Permanen					
24	Pinjaman Jangka Panjang		-	-	-	0.00%
25	Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-	-	0.00%
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-	-	0.00%
27	Investasi Non Permanen Lainnya	4.3.4.a	4,700,000,000	4,700,000,000	-	0.00%
27a	Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	4.3.4.b	(918,887,033)	(1,080,620,762)	161,733,729	-14.97%
28	Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 27)		3,781,112,967	3,619,379,238	161,733,729	4.47%
29	Investasi Permanen					
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.3.4.c	74,324,769,768	62,846,543,502	11,478,226,266	18.26%
31	Investasi Permanen Lainnya		-	-	-	0.00%
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)		74,324,769,768	62,846,543,502	11,478,226,266	18.26%
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 +32)		78,105,882,735	66,465,922,740	11,639,959,995	17.51%
34						
35	ASET TETAP					
36	Tanah	4.3.5.a	10,809,811,533,805	3,623,084,124,539	7,186,727,409,266	198.36%
37	Peralatan dan Mesin	4.3.5.b	957,835,854,744	989,497,933,801	(31,662,079,057)	-3.20%
38	Gedung dan Bangunan	4.3.5.c	1,656,851,392,286	1,457,131,509,262	199,719,883,024	13.71%
39	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.5.d	1,654,555,357,306	1,279,544,234,937	375,011,122,369	29.31%
40	Aset Tetap Lainnya	4.3.5.e	73,945,990,040	62,232,661,307	11,713,328,733	18.82%
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.3.5.f	102,732,023,730	109,950,402,504	(7,218,378,774)	-6.57%
42	Akumulasi Penyusutan	4.3.5.g	(1,537,847,035,780)	(1,401,823,977,729)	(136,023,058,051)	9.70%
42a	RK Dinas Aset		-	-	-	0.00%
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42a)		13,717,885,116,131	6,119,616,888,621	7,598,268,227,510	124.16%
44						

✓

No	Uraian	Ref	2014 (Rp)	2013 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)	Tren %
1	2	3	4	5	6	7
45	DANA CADANGAN					
46	Dana Cadangan	4.3.6	75,671,777,153	47,183,424,649	28,488,352,504	60.38%
47	Jumlah Dana Cadangan (46)		75,671,777,153	47,183,424,649	28,488,352,504	60.38%
48						
49	ASET LAINNYA					
50	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-	-	0.00%
51	Tuntutan Ganti Rugi		-	-	-	0.00%
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.3.7.a	11,056,831,000	66,053,931,000	(54,997,100,000)	-83.26%
53	Aset Tak Berwujud	4.3.7.b	18,358,331,532	18,095,485,406	262,846,126	1.45%
54	Aset Lain-lain	4.3.7.c	74,449,767,898	111,085,904,808	(36,636,136,910)	-32.98%
54a	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	4.3.7.d	(11,460,149,453)	(14,571,270,036)	3,111,120,583	-21.35%
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)		92,404,780,977	180,664,051,178	(88,259,270,201)	-48.85%
56						
57	JUMLAH ASET (20 + 33 + 43 + 47 + 55)		15,174,527,757,784	7,429,808,329,458	7,744,719,428,326	104.24%
58						
59	KEWAJIBAN					
60						
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.3.8.a.1	4,522,375,560	4,442,638,263	79,737,297	1.79%
63	Utang Bunga	4.3.8.a.2	874,741	62,604,529	(61,729,788)	-98.60%
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	4.3.8.a.3	-	1,816,665,353	(1,816,665,353)	-100.00%
65	Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.8.a.4	2,054,073,350	1,964,887,805	89,185,545	4.54%
66	Utang Belanja	4.3.8.a.5	20,489,728,780	19,105,494,255	1,384,234,525	7.25%
67	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-	-	0.00%
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)		27,067,052,431	27,392,290,205	(325,237,774)	-1.19%
69						
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-	-	0.00%
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-	0.00%
73	Premium (Diskonto) Obligasi		-	-	-	0.00%
73a	Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.8.b	2,000,000	23,000,000	(21,000,000)	-91.30%
74	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-	-	0.00%
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)		2,000,000	23,000,000	(21,000,000)	-91.30%
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68 + 75)		27,069,052,431	27,415,290,205	(346,237,774)	-1.26%
77						
78	EKUITAS DANA					
79	Ekuitas Dana	4.3.9	15,147,458,705,353	7,402,393,039,253	7,745,065,666,100	104.63%
79a	JUMLAH EKUITAS DANA (79)		15,147,458,705,353	7,402,393,039,253	7,745,065,666,100	104.63%
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76 + 79d)		15,174,527,757,784	7,429,808,329,458	7,744,719,428,326	104.24%



✓



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Audited)

No	Uraian	Ref	2014 (Rp.)	2013 (Rp.)	Kenaikan / Penurunan (Rp.)	Tren %
1	2	3	4	5	6	7
1	EKUITAS AWAL	4.4.1	7,402,393,039,253.00	6,627,536,114,977.00	774,856,924,276.00	11.69%
2	Surplus / Defisit - LO	4.4.2	835,566,043,649.00	545,398,785,926.00	290,167,257,723.00	53.20%
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :	4.4.3	6,909,499,622,451.00	229,458,138,350.00	6,680,041,484,101.00	2911.22%
	Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar	4.4.3.a	(1,501,654,758.00)	(21,867,789,622.00)	20,366,134,864.00	-93.13%
	Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap	4.4.3.b	57,656,228,202.00	247,620,621,591.00	(189,964,393,389.00)	-76.72%
	Koreksi Nilai Persediaan	4.4.3.c	71,962,150.00	-	71,962,150.00	0.00%
	Penilaian Aset Tetap	4.4.3.d	6,894,102,110,567.00	26,380,298,000.00	6,867,721,812,567.00	26033.53%
	Koreksi Klaim Jamkesmas		-	(113,000.00)	113,000.00	-100.00%
	Penyesuaian Akumulasi Aset Lainnya	4.4.3.e	(5,636,843,022.00)	(12,309,564,949.00)	6,672,721,927.00	-54.21%
	Penyesuaian Eliminasi RK Dinas dan RK Kasda	4.4.3.f	1,959,062,115.00	(3,729,394,848.00)	5,688,456,963.00	-152.53%
	Koreksi Piatang	4.4.3.g	(1,580,246,451.00)	11,302,400.00	(1,591,548,851.00)	-14081.51%
	Koreksi Penyisihan Piatang		-	15,400,000.00	(15,400,000.00)	-100.00%
	Koreksi Nilai Penyisihan Piatang Lainnya		-	(251,502,225.00)	251,502,225.00	-100.00%
	Koreksi Nilai Investasi Permanen	4.4.3.h	(9,166,592,070.00)	(11,160,863,349.00)	1,994,271,279.00	-17.87%
	Penyesuaian Nilai Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen		-	264,114,274.00	(264,114,274.00)	-100.00%
	Penyesuaian Hasil Sensus Aset Tetap		-	34,258,876,238.00	(34,258,876,238.00)	-100.00%
	Penyesuaian Jamkesmaskot		-	(3,078,309,187.00)	3,078,309,187.00	-100.00%
	Koreksi Persediaan Ternak Menjadi Piatang Lainnya		-	(499,822,775.00)	499,822,775.00	-100.00%
	Koreksi Aset Tanah Krn Pembatalan Pembelian Tanah dari Masyarakat		-	(664,028,000.00)	664,028,000.00	-100.00%
	Koreksi Nilai Pendapatan Pajak	4.4.3.i	(1,635,000.00)	1,149,733,010.00	(1,151,368,010.00)	-100.14%
	Koreksi Nilai Aset Tetap dalam Proses Penelusuran	4.4.3.j	(303,863,487.00)	(23,810,958,969.00)	23,507,095,482.00	-98.72%
	Penyesuaian Inventaris Non Aset	4.4.3.k	(26,098,905,795.00)	(2,869,860,239.00)	(23,229,045,556.00)	809.41%
4	EKUITAS AKHIR		15,147,458,705,353.00	7,402,393,039,253.00	7,745,065,666,100.00	104.63%





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Audited)

No	Uraian	Ref	Saldo 2014 (Rp)	Saldo 2013 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN OPERASIONAL						
01 PENDAPATAN						
02 PENDAPATAN ASLI DAERAH						
03 Pendapatan Pajak Daerah	4.5.1.a.1	823,847,715,745.00	735,254,951,589.81	88,592,764,155.19	12.05%	
04 Pendapatan Retribusi Daerah	4.5.1.a.2	110,046,031,286.00	103,248,367,515.00	6,797,663,771.00	6.58%	
05 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.5.1.a.3	7,841,917,896.00	7,862,169,853.00	(20,251,957.00)	-0.26%	
06 Pendapatan Asli Daerah Lainnya	4.5.1.a.4	264,664,161,223.00	149,576,802,039.00	115,087,359,184.00	76.94%	
07 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		1,206,399,826,150.00	995,942,290,996.81	210,457,535,153.19	21.13%	
08						
09 PENDAPATAN TRANSFER						
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN						
11 Dana Bagi Hasil Pajak	4.5.1.b.1	137,759,893,153.00	120,223,608,244.00	17,536,284,909.00	14.59%	
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.5.1.b.1	3,031,059,126.00	1,878,324,513.00	1,152,734,613.00	61.37%	
13 Dana Alokasi Umum	4.5.1.b.1	1,104,739,473,000.00	1,054,002,569,000.00	50,736,904,000.00	4.81%	
14 Dana Alokasi Khusus	4.5.1.b.1	29,236,965,000.00	14,993,022,000.00	14,243,943,000.00	95.00%	
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		1,274,767,390,279.00	1,191,097,523,757.00	83,669,866,522.00	7.02%	
16						
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA						
18 Dana Otonomi Khusus					0.00%	
19 Dana Penyesuaian	4.5.1.b.2	283,917,499,000.00	266,894,650,000.00	17,022,849,000.00	6.38%	
20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)		283,917,499,000.00	266,894,650,000.00	17,022,849,000.00	6.38%	
21						
22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI						
23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.5.1.b.3	399,557,971,017.00	329,977,231,976.00	69,580,739,041.00	21.09%	
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-	-	0.00%	
25 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)		399,557,971,017.00	329,977,231,976.00	69,580,739,041.00	21.09%	
26 Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)		1,958,242,860,296.00	1,787,969,405,733.00	170,273,454,563.00	9.52%	
27						
28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
29 Pendapatan Hibah		-	-	-	0.00%	
29a Pendapatan Hibah Aset	4.5.1.c.1	21,616,740,913.00	47,770,317,510.00	(26,153,576,597.00)	-54.75%	
30 Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	0.00%	
30a Pendapatan Dana BOS	4.5.1.c.2	-	97,076,605,014.00	(97,076,605,014.00)	-100.00%	
31 Pendapatan Lainnya	4.5.1.c.3	209,465,934,463.00	82,682,010,621.00	126,783,923,842.00	153.34%	
32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)		231,082,675,376.00	227,528,933,145.00	3,553,742,231.00	1.56%	
33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)		3,395,725,361,822.00	3,011,440,629,874.81	384,284,731,947.19	12.76%	
34						
35 BEBAN						
36 Beban Pegawai	4.5.2.a	1,341,906,817,099.00	1,293,506,353,307.00	48,400,463,792.00	3.74%	
37 Beban Persediaan	4.5.2.b	249,581,635,790.00	215,591,805,185.00	33,989,830,605.00	15.77%	
38 Beban Jasa	4.5.2.c	277,171,233,494.00	218,830,676,896.00	58,340,556,598.00	26.66%	
39 Beban Pemeliharaan	4.5.2.d	109,156,015,063.00	58,266,171,067.00	50,889,843,996.00	87.34%	
40 Beban Perjalanan Dinas	4.5.2.e	73,428,310,367.00	41,554,300,158.00	31,874,010,209.00	76.70%	
41 Beban Bunga	4.5.2.f	188,270,212.00	253,270,899.00	(65,000,687.00)	-25.66%	
42 Beban Subsidi		-	-	-	0.00%	
43 Beban Hibah	4.5.2.g	113,718,345,363.00	41,621,315,866.00	72,097,029,497.00	173.22%	
44 Beban Bantuan Sosial	4.5.2.h	6,301,500,000.00	2,731,600,000.00	3,569,900,000.00	130.69%	
44a Beban Bantuan Keuangan	4.5.2.i	870,104,900.00	788,567,000.00	81,537,900.00	10.34%	

No	Uraian	Ref	Saldo 2014 (Rp)	Saldo 2013 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	2	3	4	5	6	7
45	Beban Penyusutan	4.5.2.j	206,083,547,868.00	451,136,318,529.00	(245,052,770,661.00)	-54.32%
45a	Beban Penyiihan Piutang	4.5.2.k	26,413,599,749.00	53,086,103,433.00	(26,672,503,684.00)	-50.24%
45b	Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	4.5.2.l	-	-	-	0.00%
46	Beban Transfer	4.5.2.m	1,778,238,020.00	1,044,000.00	1,777,194,020.00	170229.31%
46a	Beban Penghapusan Aset	4.5.2.n	7,389,372,091.00	-	7,389,372,091.00	0.00%
46b	Beban Hibah Aset	4.5.2.o	13,032,215,745.00	738,891,572.00	12,293,324,173.00	1663.75%
46c	Beban Dibayar di Muka		-	-	-	0.00%
47	Beban Lain-lain	4.5.2.p	156,069,707.00	1,167,404,129.00	(1,011,334,422.00)	-86.63%
47a	Beban Dana BOS	4.5.2.q	132,984,057,705.00	86,768,024,408.00	46,216,033,297.00	53.26%
48	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)		2,560,159,333,173.00	2,466,041,846,449.00	94,117,486,724.00	3.82%
49						
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 - 48)		835,566,028,649.00	545,398,783,425.81	290,167,245,223.19	8.94%
51						
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-	-	0.00%
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	0.00%
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	-	-	0.00%
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	0.00%
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.5.4	15,000.00	2,500.00	12,500.00	500.00%
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPEASIONAL (53 s/d 57)		15,000.00	2,500.00	12,500.00	500.00%
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)		835,566,043,649.00	545,398,785,925.81	290,167,257,723.19	53.20%
60						
61	POS LUAR BIASA					
62	Pendapatan Luar Biasa	4.5.5	-	-	-	0.00%
63	Beban Luar Biasa		-	-	-	0.00%
64	POS LUAR BIASA (62 - 63)		-	-	-	0.00%
65	SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)	4.5.6	835,566,043,649.00	545,398,785,925.81	290,167,257,723.19	53.20%





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Audited)

(dalam rupiah)

No	Uraian	2014	2013	Lebih/kurang
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah	4.6.1.a.1.a	791,509,586,089	683,708,489,950
4	Penerimaan Retribusi Daerah	4.6.1.a.1.b	110,196,510,293	102,403,979,493
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.6.1.a.1.c	8,036,099,560	7,650,778,888
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	4.6.1.a.1.d	114,171,390,681	67,255,939,165
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	4.6.1.a.1.e	137,759,893,153	120,223,608,244
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.6.1.a.1.f	3,031,059,126	1,878,324,513
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	4.6.1.a.1.g	1,104,739,473,000	1,054,002,569,000
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	4.6.1.a.1.h	29,236,965,000	14,993,022,000
11	Penerimaan Dana Oltonomi Khusus		-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	4.6.1.a.1.i	283,917,499,000	266,894,650,000
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.6.1.a.1.j	399,557,971,017	329,977,231,976
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
15	Penerimaan Hibah		-	-
16	Penerimaan Dana Darurat		-	-
17	Penerimaan Lainnya		-	-
18	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.6.1.a.1.k	69,405,952,776	82,682,010,621
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	(13,276,057,845)
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)	3,051,562,399,695	2,731,670,603,850	319,891,795,845
21	Arus Kas Keluar			
22	Pembayaran Pegawai	4.6.1.a.2	1,302,613,230,285	1,267,469,470,717
23	Pembayaran Barang	4.6.1.a.2	643,227,950,410	510,700,352,490
24	Pembayaran Bunga	4.6.1.a.2	250,000,000	378,295,400
25	Pembayaran Subsidi		-	(128,295,400)
26	Pembayaran Hibah	4.6.1.a.2	113,718,345,363	41,621,315,866
27	Pembayaran Bantuan Sosial	4.6.1.a.2	6,301,500,000	2,731,600,000
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	4.6.1.a.2	870,104,900	788,567,000
29	Pembayaran Tak Terduga	4.6.1.a.2	1,777,048,020	806,709,097
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
34	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33)	2,068,758,178,978	1,824,496,310,570	244,261,868,408
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34)		982,804,220,717	907,174,293,280
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			75,629,927,437
37	Arus Masuk Kas			
38	Pencairan Dana Cadangan		-	-
39	Penjualan Atas Tanah		-	-
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	4.6.1.b	795,290,500	1,435,318,450
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	4.6.1.b		96,698,000
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	(96,698,000)
43	Penjualan Aset Tetap		-	-
44	Penjualan Aset Lainnya		-	-
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
47	Jumlah Arus masuk Kas (38 s/d 46)	795,290,500	1,532,016,450	(736,725,950)
48	Arus Keluar Kas			
49	Pembentukan Dana Cadangan	4.6.1.b	25,439,914,000	15,000,000,000
50	Perolehan Tanah	4.6.1.b	66,806,647,024	55,557,059,733
51	Perolehan Peralatan dan Mesin	4.6.1.b	163,602,557,355	130,101,104,575
52	Perolehan Gedung dan Bangunan	4.6.1.b	380,386,931,387	141,312,080,049
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.6.1.b	175,596,020,355	252,075,125,515
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.6.1.b	8,850,992,477	7,030,993,712
55	Perolehan Aset lainnya	4.6.1.b	56,220,000	56,220,000
56	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	4.6.1.b	20,839,000,000	29,000,000,000
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	(8,161,000,000)
58	Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)	841,578,282,598	630,076,363,584	211,501,919,014
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 58)		(840,782,992,098)	(628,544,347,134)

he

60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
61	Arus Masuk Kas				
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lemaga Keuangan Bank		-	-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lemaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-
71	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 70)		-	-	-
72	Arus Keluar Kas				
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	4.6.1.c.2	1,816,665,353	1,816,665,353	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lemaga Keuangan Bank		-	-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lemaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	-
79	Pengembalian Sisa Dana DPPID		-	-	-
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-
82	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-
83	Jumlah Arus Keluar Kas (73 s/d 82)		1,816,665,353	1,816,665,353	-
84	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (71 - 83)		(1,816,665,353)	(1,816,665,353)	-
85	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris				
86	Arus Masuk Kas				
87	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4.6.1.d.1	81,556,478,940	76,437,543,777	5,118,935,163
88	Kiriman uang masuk		-	-	-
89	Jumlah Arus Masuk Kas (87 + 88)		81,556,478,940	76,437,543,777	5,118,935,163
90	Arus Keluar Kas				
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4.6.1.d.2	81,997,445,408	78,839,214,721	3,158,230,687
92	Kiriman uang keluar		-	-	-
93	Jumlah Arus Keluar Kas (91 + 92)		81,997,445,408	78,839,214,721	3,158,230,687
94	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (89 - 93)		(440,966,468)	(2,401,670,944)	1,960,704,476
95	Kenaikan/Penurunan Kas (35+59+84+94)		139,763,596,798	274,411,609,849	(134,648,013,051)
96	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		906,028,349,396	631,616,739,547	274,411,609,849
97	Saldo akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	4.6.1.e.1	1,045,791,946,194	906,028,349,396	139,763,596,798
98	Kas di Bendahara Penerimaan		-	65,432,500	(65,432,500)
99	Kas di BLUD	4.6.1.e.2	31,939,365,576	11,656,105,709	20,283,259,867
100	Kas BOS	4.6.1.e.3	8,568,808,492	5,001,829,739	3,566,978,753
101	Saldo Akhir Kas (97+98+99+100)		1,086,300,120,262	922,751,717,344	163,548,402,918





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

DAFTAR ISI

BAB I.	Pendahuluan	1
1.1.	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
1.2.	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	2
1.3.	Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II.	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian	
	Target Kinerja APBD	6
2.1.	Ekonomi makro	6
2.2.	Kebijakan keuangan	7
2.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	7
2.2.1.1	Kebijakan Pendapatan Murni	7
2.2.1.2	Kebijakan Pendapatan Perubahan	8
2.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	9
2.2.2.1	Kebijakan Belanja Daerah Murni.....	9
2.2.2.2	Kebijakan Belanja Daerah Perubahan	10
2.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	13
2.2.3.1	Kebijakan Pembiayaan Murni.....	13
2.2.3.2	Kebijakan Pembiayaan Perubahan	13
2.2.4	Faktor-faktor yang melatar belakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh Pemerintah Daerah	14
2.2.4.1	Faktor yang melatar belakangi kebijakan Pendapatan Daerah	14
2.2.4.2	Faktor yang melatar belakangi Kebijakan Belanja Daerah	14
2.2.4.3	Faktor yang melatar belakangi Kebijakan Pembiayaan Daerah	16
2.3.	Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi Permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah Ditetapkan	17
BAB III.	Kebijakan Akuntansi	42
3.1.	Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah	45
3.1.1	Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	46
3.1.1.1	Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO	46
3.1.1.2	Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban	50
3.1.1.3	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	51
3.1.1.4	Kebijakan Akuntansi Aset	52
3.1.1.5	Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas	54
3.1.1.6	Kebijakan Akuntansi Konsolidasi	56
3.2.	Penerapan Kebijakan Akuntansi	57
BAB IV.	Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan	61
4.1.	Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pendapatan dan Belanja.....	61
4.1.1 Pendapatan	61
4.1.2 Belanja	72
4.1.3 Surplus(Defisit) Realisasi Anggaran	85
4.1.4 Pembiayaan	85
4.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA)	88
4.2. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.	89
4.3. Penjelasan atas pos-pos Neraca.....	93
4.3.1 Kas	93
4.3.2 Piutang	101
4.3.3 Persediaan	105
4.3.4 Investasi Jangka Panjang	109
4.3.5 Aset Tetap	111
4.3.6 Dana Cadangan.....	125
4.3.7 Aset Lainnya	126
4.3.8 Kewajiban	130
4.3.9 Ekuitas	132
4.4. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	133
4.5. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional	136
4.5.1 Pendapatan – LO	136
4.5.2 Beban – LO	142
4.5.3 Surplus/Defisit dari Operasi	154
4.5.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	154
4.5.5 Pos Luar Biasa	154
4.5.6 Surplus/Defisit – LO	154
4.6. Penjelasan atas pos-Pos Laporan Arus Kas.....	155
4.7. Penjelasan atas dana non-APBD Kota Semarang	163
4.7.1 Dana Dekonsentrasi.....	163
4.7.2 Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	164
4.7.3 Dana urusan bersama	167
4.7.4 Dana Jamkesmas, Jampersal dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	175
4.7.5 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	177
4.7.6 Dana Blockgrant	177
4.7.7 Dana Komite Sekolah / Dana Sumbangan dari Orang Tua	177
BAB VI. Penutup	178



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB I
PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Semarang sesuai dengan visinya yaitu “*terwujudnya Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju masyarakat sejahtera*” terus menerus diupayakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang bersama dengan DPRD telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 dan sebagai akuntabilitas terhadap masyarakat dan perbaikan manajemen pemerintahan maka dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang kewajiban Gubernur, Walikota dan Bupati Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Semarang telah menyusun dan menyajikan LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2014.

Peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah antara lain ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Mengenai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan demikian, laporan keuangan Kota Semarang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok di atas, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD Kota Semarang (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dana urusan bersama, dana Jamkesmas, Jampsersal, dan Bantuan Operasional Kesehatan/BOK, dan dana Bantuan Operasional Sekolah/BOS).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

-
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 di bagian yang mengatur tentang keuangan negara;
2. Undang-Undang nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
5. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
6. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
7. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2014 nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

13. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4584);
18. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 92) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5533;
20. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 5) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 83);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 12 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2013 nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 16 tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 5 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2007 nomor 11 Seri E. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 9 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 3 tahun 2008) Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
31. Peraturan Walikota semarang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan walikota Semarang Nomor 11 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang tahun Anggaran 2014 (Berita daerah kota Semarang Tahun 2014 Nomor 11); dan
32. Peraturan Walikota nomor 32 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 32);.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan urutan sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan**
- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
- 2.1. Ekonomi makro
 - 2.2. Kebijakan keuangan
 - 2.3. Ikhtisar pencapaian target keuangan
 - 2.3.1. Hambatan dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
 - 2.3.2. Indikator capaian kinerja target APBD
- BAB III. Kebijakan Akuntansi**
- 3.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
 - 3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 3.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 3.4. Penerapan kebijakan akuntansi



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB IV.**Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan**

- 4.1. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 4.2. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 4.3. Penjelasan atas pos-pos Neraca
- 4.4. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.5. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional
- 4.6. Penjelasan atas pos-Pos Laporan Arus Kas
- 4.7. Penjelasan atas dana non-APBD Kota Semarang
 - 4.7.1 Dana dekonsentrasi
 - 4.7.2 Dana tugas pembantuan
 - 4.7.3 Dana urusan bersama
 - 4.7.4 Dana Jamkesmas, Jampersal dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
 - 4.7.5 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BAB V.**Pengungkapan Penting Lainnya****BAB VI.****Penutup**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Sesuai amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dilakukan melalui kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai kinerja pemerintah daerah yang baik. Kinerja yang baik bisa terwujud jika pertumbuhan ekonomi daerah berjalan secara efektif dan efisien. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut akan menjadi modal kemandirian daerah, sehingga aktivitas perekonomian Kota Semarang akan mengarah pada peningkatan investasi pembangunan perekonomian daerah. Pada hakekatnya, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan tingkat pemerataan pendapatan yang baik.

Perkembangan perekonomian Kota Semarang tahun 2014 sangat dipengaruhi kondisi dan perkembangan perekonomian nasional. Hubungan perekonomian ini terkait dengan aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah sebagai bentuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Aliran dana ini menjadi bagian investasi pembangunan di daerah, selain investasi yang bersumber dari dunia usaha.

Kondisi umum perekonomian Kota Semarang tahun 2014 berdasarkan data Semarang Dalam Angka 2013, secara makro dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Investasi, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian suatu wilayah adalah angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi.

PDRB Kota Semarang di tahun 2014 menurut harga berlaku adalah sebesar Rp. 68.441.7,97 juta, meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp. 61.062.825,55 juta. Sedangkan apabila menurut harga konstan 2000 nilai di tahun 2013 adalah sebesar Rp. 27.252.371,67 juta rupiah, naik dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp. 25.697.338,39 juta.

Berdasarkan sumbangan atau kontribusi terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014, terlihat bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran masih merupakan sektor yang memberi kontribusi terbesar, yaitu 29,03%, disusul kemudian sektor pengolahan sebesar 24,75%, sektor bangunan sebesar 18,96% dan sektor jasa-jasa sebesar 12,81%. Sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,14%.

Kondisi makro ekonomi di Kota Semarang tidak akan terlepas dan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro di tingkat Provinsi dan Nasional maupun kondisi global.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pusat (misalnya kenaikan harga BBM, kenaikan BI *rate*, pelemahan rupiah terhadap dolar, dan lain-lain) akan ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kota Semarang.

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Perkembangan inflasi di Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh kebijakan makro ekonomi dari pemerintah pusat yang memengaruhi kenaikan harga-harga. Inflasi Kota Semarang di tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 8,53% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar 8,19%. Angka inflasi Kota Semarang ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 8,22%.

Kenaikan inflasi di tahun 2014 disumbang antara lain oleh kenaikan harga BBM di bulan November yang memicu kenaikan harga komoditi, baik itu yang terdampak langsung maupun yang terdampak lanjutan. Hal ini terlihat selama tahun 2014 inflasi tertinggi terjadi pada bulan November dan Desember setelah ada kenaikan harga BBM.

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.1.1 Kebijakan Pendapatan Murni

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentapkan Kebijakan Pendapatan Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
2. Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun propinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Propinsi.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Secara umum Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2014 diarahkan pada :

Optimalisasi penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah dengan menitik beratkan pada :

1. Optimalisasi potensi pendapatan dengan tetap tidak memberatkan masyarakat;
2. Menjaga iklim investasi yang kondusif;
3. Mudah diterapkan dan dilaksanakan;
4. Tidak merusak lingkungan;
5. Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kota.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2.2.1.2. Kebijakan Pendapatan Perubahan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Semarang, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Semarang diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2014;
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi;
3. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diakibatkan adanya kenaikan dana bagi hasil pajak dari Provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Semarang TA 2014 ;
4. Penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang;
5. Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana kapitalisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pendapatan daerah pada perubahan APBD TA 2014 diperkirakan akan meningkat sebesar Rp. 227.968.917.000,- atau meningkat sebesar 9,13%. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 31,58% , Pos Pendapatan Asli Daerah yang meningkat 7,97%. Secara rinci proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2014 dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Proyeksi peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD TA 2014 adalah sebesar Rp. 65.357.114.000,- sehingga PAD menjadi sebesar Rp. 885.099.355.000,- Peningkatan tersebut ditunjang dari sektor Pajak Daerah yang naik sebesar Rp. 53.600.000.000,- (9,10%) serta dari sektor Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 21.833.317.000,- (19,5%). Sedangkan dari sektor retribusi terdapat penurunan sebesar Rp. 10.076.2013.000,- (9,11%). Untuk sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan.

Peningkatan Pajak Daerah antara lain berasal dari Pajak hotel yang meningkat Rp. 5.000.000.000,- (12,82%) , pajak restoran yang meningkat Rp. 5.000.000.000,- (12,5%), pajak hiburan yang meningkat Rp. 2.312.500.000,- (12,5%), pajak reklame yang meningkat Rp. 2.312.500.000(12,5%), pajak penerangan jalan yang meningkat Rp. 15.187.500.000,- (12,5%), pajak parkir meningkat Rp. 350.000.000,- (6,67%), pajak air tanah meningkat Rp. 500.000.000,- (12,5%), Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang meningkat Rp. 13.000.000.000 (7,43%) serta PBB perkotaan yang meningkat Rp. 11.000.000. (6,29%).

Secara keseluruhan, dari sektor retribusi daerah mengalami penurunan pada perubahan APBD TA 2014 yang antara lain berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin gangguan /keramaian, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penggantian biaya KTP dan akte capil, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sementara retribusi yang mengalami kenaikan pada obyek retribusi pelayanan persampahan dan ijin pemakaian kekayaan daerah serta obyek retribusi baru yaitu retribusi ijin perpanjangan tenaga kerja asing.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Peningkatan pendapatan diproyeksikan juga berasal dari Dana Perimbangan yaitu pada sektor dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 23.750.000,000,- (24,46%) yang berasal dari Pajak Penghasilan ps.21, Pajak Penghasilan 25/29 serta DBHCHT dan dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 1.501.500.000,- yang berasal dari ekplorasi dan ekploitasi

Pada Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp. 137.360.000.000,- (31,6%) yang berasal dari Obyek Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Rokok. Kenaikan juga berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 35.508.303.000,- yang merupakan penyesuaian karena bantuan tersebut diterima setelah APBD TA 2014 ditetapkan sehingga harus dilakukan penyesuaian pada Perubahan APBD TA 2014.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

2.2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah Murni

Belanja daerah penganggarannya disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta tetap memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari input yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang maka perlu diambil kebijakan Belanja Daerah. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pelaksanaan urusan pada tahun 2014 terdiri atas 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Banyaknya Kebutuhan pembangunan maka belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2014 dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015, capaian Millennium Development Goals (MDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dijabarkan dalam RKPD 2014.

Secara langsung Belanja Daerah di tahun 2014 terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung

1. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) penganggarannya berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Tahun 2014 Gaji PNSD telah diproyeksikan meningkat rata-rata 10 persen, termasuk *access*.
 - b. Belanja Hibah adalah anggaran yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

- c. Belanja Bantuan Sosial merupakan anggaran yang digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat (pemberian bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan tertentu serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selektif dalam arti bahwa bantuan diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- d. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang bersifat tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah, diberikan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenrtaman dan ketertiban masyarakat serta tidak diharapkan secara berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Penetapan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2014 dilakukan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Belanja Langsung meliputi :

- a. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Kebijakan belanja berdasarkan urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang menurut urusan wajib dan urusan pilihan di tahun 2014 diarahkan untuk mendukung prioritas percepatan pencapaian Sapta Program dan pencapaian target-target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- b. Kebijakan Belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan belanja berdasarkan SKPD diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Belanja yang direncanakan oleh SKPD harus memenuhi prinsip-prinsip *Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Timely* (SMART) dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitasnya.

2.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Perubahan

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Semarang Tahun 2014, diarahkan pada :

1. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD, apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA. Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan yaitu, untuk kegiatan yang terkait dengan pengadaan tanah dan lahan;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD;



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian Sapta Program dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2014;
4. Program kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

a. Kebijakan belanja tidak langsung.

Dalam perubahan APBD TA 2014 meningkat sebesar Rp. 47.396.2424.000,00 atau 3,8% sehingga total belanja tidak langsung menjadi Rp. 1.279.749.668.000,00 sebagai berikut:

1. Belanja pegawai yang mengalami kenaikan sebesar 0,5% atau Rp5.681.223.600,00 disebabkan oleh kenaikan pada gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS serta biaya pemungutan pajak daerah;
2. Belanja hibah mengalami kenaikan sebesar Rp7.729.591.400,00 kenaikan ini untuk mengakomodasi usulan proposal dari masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan Kota Semarang. Pemberian hibah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3. Belanja bantuan sosial meningkat sebesar Rp258.427.000,00 yang disebabkan karena adanya tambahan bantuan kepada korban bencana. Pemberian bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan;
4. Belanja bunga meningkat sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Semarang terhadap pembayaran bunga utang pinjaman;
5. Belanja Bantuan Keuangan tidak mengalami perubahan;
6. Belanja Tidak Terduga meningkat Rp. 10.475.400.000,00 yang akan dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung pada program dan kegiatan SKPD. Prosedur dan tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

b. Kebijakan belanja langsung.

Jumlah Belanja Langsung pada perubahan APBD tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.339.498.316.292,00 kebijakan Belanja Langsung pada Perubahan APBD TA 2014 diarahkan sebagai berikut:

1. Penambahan, pengurangan dan pergeseran program/kegiatan dan anggarannya dilaksanakan dengan memperhatikan :

a) Penambahan anggaran dan penambahan program/kegiatan

Dilaksanakan untuk program/kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan factual serta dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Sapta Program serta target-target kinerja pada RPJMD Tahun 2010-2015 dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Penambahan anggaran tersebut terdiri dari :

- 1) Penambahan anggaran untuk program/kegiatan yang merupakan kelanjutan dari program/kegiatan yang telah dianggarkan dan atau telah dilaksanakan pada APBD TA 2014 sebesar Rp. 488.387.709.806,00. Jumlah tersebut



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

termasuk untuk penyesuaian biaya langganan listrik karena kenaikan Tarif Dasar Listrik sebesar Rp. 34.924.255.730,00

2) Penambahan anggaran untuk program/kegiatan baru yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2014, yaitu sebesar Rp. 153.523.208.689,00

3) Penyesuaian anggaran untuk program/kegiatan yang bersumber dari Pemerintah pusat atau Pemerintah provinsi sebesar Rp. 39.242.678.848,00 dengan perincian :

- Kegiatan bantuan keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 35.249.876.000,00
- Sisa anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 1.700.978.848,00
- Sisa Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang belum teranggarkan pada APBD TA 2014, sebesar Rp. 2.291.824.000,00

b) Pengurangan anggaran dan pengurangan program/kegiatan

Dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

1) Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan, yaitu sebesar Rp. 8.142.806.501,00

2) Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena penyesuaian dengan regulasi dan prioritas serta sasaran pembangunan, yaitu sebesar Rp. 11.309.208.550,00

c) Pergeseran anggaran dan pergeseran program/kegiatan

Dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

1) Adanya penyesuaian dengan regulasi, yaitu kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk kepentingan umum. Jumlah anggaran yang digeser antar SKPD adalah sebesar Rp. 28.735.441.000,00

2) Adanya perubahan lokasi sasaran kegiatan, yaitu sebesar Rp. 1.762.500.000,00

2. Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan prosentase belanja modal. Pada perubahan APBD TA 2014 belanja modal direncanakan akan bertambah sebesar Rp. 474.467.667.249,00 yang dipergunakan antara lain untuk belanja modal pengadaan lahan; belanja modal yang terkait dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan; belanja modal pembangunan konstruksi; belanja modal pengadaan kendaraan bermotor penunjang operasional dan pelayanan public; serta belanja modal penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.
3. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik konstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan di akhir tahun 2014 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada perubahan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2014 mengalami defisit belanja sebesar Rp. 872.000.131.292,00 yang disebabkan karena proyeksi pendapatan (Rp. 2.724.046.253.000,00) yang lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja (Rp. 3.596.046.384.292,00).



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Murni

a. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Munculnya pembiayaan dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran.

Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut penerimaan pembiayaan sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2014 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2014 berasal dari Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.

Untuk tahun 2014, Dana Cadangan dialokasikan sebesar Rp. 25.439.914.000,00, serta penyertaan modal pada perusahaan daerah yaitu Bank Jateng sebesar Rp. 8.339.000.000,00, PDAM sebesar Rp. 10.000.000.000,00, BPR/BKK sebesar Rp. 1.000.000.000,00 Perusda RPH dan BHP Rp. 1.500.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang Rp. 1.816.665.353,00

2.2.3.2 Kebijakan Pembiayaan Perubahan

a. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada perubahan APBD Kota Semarang Pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut

Peningkatan penerimaan pembiayaan dari sebelumnya Rp. 439.512.738.000,00 menjadi sebesar Rp. 920.179.045.292,00 atau meningkat sebesar Rp. 480.666.307.292,00 yang berasal dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 480.396.307.292,00 serta peningkatan penerimaan Pembiayaan yang beraal dari Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 270.000.000,00. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan serta menutup defisit belanja.

Selain SiLPA, penerimaan pembiayaan di tahun 2014 direncanakan akan didapatkan dari pencairan dana cadangan sebesar Rp. 7.188.023.450,00 yang akan dimanfaatkan untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD TA 2014 meningkat sebesar Rp. 22.739.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 48.178.914.000,00. Peningkatan pengeluaran pembiayaan tersebut diarahkan untuk pembayaran pokok hutang sebesar Rp. 1.900.000.000,00 serta sebagai penyertaan modal kepada Bank Jateng dan perusahaan daerah Pemerintah Kota Semarang dengan perincian :

1. Penyertaan modal untuk BPD Jateng Rp. 8.339.000.000,00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

-
2. Penyertaan modal untuk PDAM Tirta Moedal Rp. 10.000.000.000,00
 3. Penyertaan modal BPR/BKK Rp. 1.000.000.000,00
 4. Penyertaan modal untuk RPH & BHP Rp. 1.500.000.000,00

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka pembiayaan daerah mengalami surplus pembiayaan sebesar Rp. 872.000.131.292,00. Surplus pembiayaan ini dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah sebesar Rp. 872.000.131.292,00, sehingga kondisi perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah anggaran berimbang.

2.2.4 Faktor-faktor yang melatar belakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh Pemerintah Daerah.

Penentuan arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota Semarang dilandasi dan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

2.2.4.1.Faktor yang melatar belakangi Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014, terutama dari sisi pendapatan, secara umum faktor yang melatarbelakangi kebijakan pendapatan daerah Kota Semarang diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan menitik beratkan pada optimalisasi potensi pendapatan dengan tetap tidak memberatkan masyarakat serta menjaga iklim investasi yang kondusif, mudah diterapkan dan dilaksanakan, tidak merusak lingkungan dan penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi asset dan kekayaan Pemerintah Kota Semarang.

Penetapan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan pada kondisi riil yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2014, dapat ditempuh melalui:

- a. Penyusunan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sederhana dan akuntabel;
- b. Meningkatkan ketataan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah;
- c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- d. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
- e. Penyusunan regulasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi)
- f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni PDAM Tirta Moedal, Perusda Percetakan, Perusda BPR Bank Pasar, Perusda BPR/BKK dan Perusda RPH dan BHP untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

2.2.4.2. Faktor yang melatar belakangi Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah penganggarannya disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta tetap memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Rumusan prioritas belanja pembangunan daerah pada tahun 2014 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan mempertimbangkan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Selaras dengan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam kebijakan umum RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Semarang 2010-2015, maka prioritas program pembangunan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2014 melalui SAPTA PROGRAM adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui kegiatan, pemugaran rumah tidak layak huni, perbaikan kualitas dan penyediaan rumah layak huni serta penyediaan air bersih masyarakat;
- b. Pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan, penyuluhan serta penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi kelompok masyarakat kurang mampu;
- c. Pemberian akses permodalan, pemasaran dan peralatan usaha melalui fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah dan akses permodalan Kelompok Usaha Menengah Kecil/Mikro (KUMKM) ;
- d. Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelatihan ketrampilan kewirausahaan, pengembangan bakat serta pemberian santunan;
- e. Pemerataan jangkauan jaminan playan kesehatan;
- f. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di 48 kelurahan melalui kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat, pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat (PNPM), fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah kelurahan;
- g. Menurunkan angka pengangguran melalui pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas angkatan kerja serta padat karya produktif;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produktifitas UKM/IKM dan pengembangan agrobisnis peternakan/perikanan.

2. Penanganan Rob dan Banjir

- a. Penyelesaian Polder Banger melalui pembebasan tanah kali tenggang tahap II, pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul, pembangunan sisa polder kali Banger, Pembebasan lahan Paket C Kali Semarang dan Kali Asin;
- b. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui pemanfaatan dan penanganan sumberdaya pesisir, pengadaan lahan pesisir dan pengelolaan/rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
- c. Normalisasi sungai dan drainase kota melalui kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan jaringan irigasi, operasional dan pemeliharaan drainase kota dan peningkatan pembangunan ousat pengendalian bair;
- d. Peningkatan kapasitas pompa melalui kegiatan operasional dan pemeliharaan pompa banjir, operasional sistem polder kali Semarang dan operasional pemeliharaan pintu air dan polder;



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- e. Penyediaan air baku melalui kegiatan peningkatan sumur dalam dan pembangunan instalasi pengolahan air minum sederhana.

3. Peningkatan Pelayanan publik:

- a. Mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang melalui peningkatan manajemen aset daerah, optimalisasi dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan keterbukaan informasi publik melalui pembangunan e-Gov dan optimalisasi Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Daerah (P5D);
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan;
- d. Dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2014 melalui Pengamanan Tidak Langsung (PAM TAKSUNG), fasilitasi sukses pemeliharaan preseiden dan legislatif 2014 dan pencanangan kampanye damai;
- e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penggalian potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah;
- f. Optimalisasi pemanfaatan Tekhnologi Informasi melalui pembuatan bank data center kota Semarang serta pemantapan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

4. Peningkatan Infrastruktur:

- a. Pembebasan lahan Jangli-Undip dan lahan underpass Jatingaleh;
- b. Pembebasan lahan pembangunan TPU Jabungan;
- c. Pengadaan lahan perluasan TPA Jatibarang;
- d. Perbaikan lingkungan pemukiman;
- e. Peningkatan Jalan & jembatan wilayah pengembangan & penyangga;
- f. Pembangunan sarana perekonomian;
- g. Pembangunan ruang terbuka hijau baru.

5. Pengarustamaan Gender:

Prioritas program dalam program kesetaraan gender pada tahun 2013 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, serta penyediaan data pilah *gender*;

6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan:

- a. Rehabilitasi sedang/berat bangunan SD dan pengadaan sarana prasarana;
- b. Pendampingan bantuan operasional sekolah SD dan SMP;
- c. Pembangunan SMP Negeri baru;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SMP dan SMA/SMK.

7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan:

Prioritas program dalam peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2014 diarahkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat di puskesmas dan puskesmas pembantu, pemantapan pelaksanaan Total Coverage, peningkatan derajat kesehatan, dan pencegahan penyakit menular.

2.2.4.3. Faktor yang melatar belakangi Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Munculnya pembiayaan dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SilPA, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga besar kecilnya pembiayaan daerah tergantung dari keempat komponen tersebut. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2014 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2013 sebesar Rp. 912.721.021.158,- dan pencairan Dana Cadangan.

Pengeluaran pembiayaan tahun 2014 digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang diwajibkan menyediakan dana sebesar Rp. 25.439.914.000,00, Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jateng Rp. 8.339.000.000,- Penyertaan modal PDAM sebesar Rp. 10.000.000.000,- penyertaan modal BPR/BKK Rp. 1.000.000.000,- penyertaan modal Perusda RPH dan BHP Rp. 1.500.000.000,-

Surplus pembiayaan tahun 2014 ini dipergunakan untuk menutup deficit belanja daerah sebesar Rp. 872.000.131.292,00 , sehingga kondisi perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah anggaran berimbang.

2.3. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pendidikan

- a. Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan urusan pendidikan di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan wajib pendidikan adalah:
 - 1) Terbatasnya jumlah dan SDM yang handal dan kompeten dalam hal pengadaan barang-jasa khususnya sarana prasarana fisik, baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi Jawa Tengah (Bantuan Keuangan/Bankeu Bidang Pendidikan), maupun dari APBN (Dana Alokasi Khusus/DAK Bidang Pendidikan).
 - 2) Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tidak dapat dilaksanakan pada Triwulan I, II dan III dan baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV melalui APBD Perubahan dikarenakan APBD Kota disahkan mendahului APBD Provinsi, sehingga pengadaan barang-jasa yang dilakukan dengan mekanisme lelang tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu.
 - 3) Perubahan kebijakan dan regulasi, khususnya terkait dengan Buku dan Kurikulum 2013.
- b. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengusulkan untuk melakukan penambahan jumlah pegawai dan peningkatan kompetensi SDM pengadaan barang dan jasa, melalui : (a). bimbingan teknis pengadaan barang-jasa khusus bidang pendidikan, maupun (b). pergeseran pegawai dalam rangka *tour of duty* dari dan ke Pemerintah Kota – Dinas Pendidikan, agar kegiatan
 - 2) sarana-prasarana fisik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dapat dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi dan tepat waktu.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- 3) Melakukan : (i) konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait penganggaran di APBD Provinsi dan APBD Kota; dan (ii) melakukan perencanaan dan koordinasi dengan bidang teknis, sekolah dan UPTD pendidikan kecamatan sedini mungkin agar pelaksanaan Bankeu Provinsi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan regulasi dan tepat waktu.
- 4) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan RI c.q. Dirjen Penzxdidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

2. Urusan Wajib Kesehatan

- a. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
Pada kegiatan pembangunan gedung perawatan jantung paru yang berasal dari anggaran DBHCHT mengalami wanprestasi dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan tidak dipergunakan secara maksimal oleh pihak pemenang lelang sebagai kontraktor pembangunan gedung perawatan jantung paru. Progres pekerjaan yang seharusnya 100 %, sampai dengan waktu kontrak selesai progres yang dicapai 27,278 %.
- b. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain adalah:
Kegiatan pembangunan gedung perawatan jantung paru dianggarkan kembali di tahun 2015 melalui anggaran BLUD RSUD Kota Semarang.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

- a. Pada tahun 2014 secara umum dihadapi permasalahan sebagai berikut :
 - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Adanya beberapa kegiatan fisik yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu :
 - a) Peningkatan Jalan Podorejo tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak .
 - b) Kegiatan Peningkatan Jalan Diponegoro dikarenakan gagal lelang dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan proses penunjukkan langsung.
 - c) Peningkatan akses jalan terminal mangkang dikarenakan gagal lelang dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan proses penunjukkan langsung
 - 2) Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan Jembatan
Pelaksanaan fisik belum dapat dilaksanakan dengan baik yaitu:
Pelapisan Ulang HOTMIX Paket II (Pemeliharaan Jalan Thamrin, Pemeliharaan Jalan Ki Mangunsarkoro, Pemeliharaan Jalan Menteri Supeno) dikarenakan gagal lelang dan waktu yang tersedia sampai akhir tahun tidak mencukupi pelaksanaan fisik untuk melakukan proses penunjukkan langsung
 - 3) Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh
Pekerjaan pengadaan lahan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran yaitu :
 - a) Pengadaan lahan untuk outer ring roads;
 - b) Pengadaan lahan untuk jalan undip - jangli – mrican;
 - c) Pengadaan lahan untuk Jalan Urip Sumoharjo.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Dikarenakan proses yang sangat panjang dan ketergantungan dengan instansi vertikal (BPN) dan perlu pembuktian dalam verifikasi kenyataan bukti kepemilikan sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi.

4) Program Pengendalian Banjir

Dari 24 Kegiatan yang telah dianggarkan, ada 8 kegiatan yang belum terlaksana sesuai target yang diharapkan, berupa 1 (satu) Kegiatan Fisik dan 7 (Tujuh) kegiatan pembebasan lahan yaitu :

- a) Operasional dan Pemeliharaan Sistem polder Kali Banger dikarenakan belum dilaksanakannya Pembangunan Kolam Retensi dan Pengadaan ME Pompa oleh Satker Cipkataru Prov Jateng karena kendala teknis kesiapan lahan;
- b) Pembebasan Tanah Kali Tenggang Tahap II dikarenakan bukti kepemilikan lahan tidak dapat ditunjukkan saat pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c) Kegiatan Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali Semarang dikarenakan Penerima Ganti Untung PT. PELINDO selaku Pengelola Lahan tidak berkenan menerima hasil pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- d) Kegiatan Pembebasan Tanah Embung Hulu Kali Bringin tidak terlaksana proses penetapan lahan terkendala UU No 2 Tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- e) Pembebasan Tanah K. Bringin Tahap III dikarenakan bukti kepemilikan lahan tidak dapat ditunjukkan saat pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid MAJT tidak terlaksana proses penetapan lahan terkendala UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- g) Pembebasan Lahan Paket C Kali Semarang dan Kali Asin dikarenakan permohonan warga yang tidak bersertifikat tidak dapat dibayar seperti lahan yang bersertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Dari permasalahan di atas, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Dilakukan usulan penganggaran kembali kegiatan dan dilkukn percepatan pengadaan barang dan jasa pada awal tahun baik dari perencanaan maupun proses tender;

2). Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Dilakukan tindak lanjut secara administratif sesuai ketentuan bagi penyedia jasa yang cidera janji dengan mengumumkan dalam daftar rekanan daftar hitam dan diupayakan penganggaran kembali kelanjutan fisik pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia;

3). Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh.
Pengadaan Lahan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 akan dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2015;

4). Program Pengendalian Banjir

Untuk kegiatan yang belum selesai diusulkan dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2015.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Kegiatan pembebasan tanah yang bersifat baru untuk dilanjutkan kembali sesuai UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan melakukan upaya hukum dengan persiapan data- data dukung melalui konsultasi di Lembaga Audit, Pengadilan dalam Kegiatan Penyediaan Lahan Kolam Retensi K. Semarang.

4. Urusan Wajib Perumahan

- a. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait Urusan Wajib Perumahan pada tahun 2014 yaitu :

1). Kegiatan Penataan lingkungan permukiman

Kegiatan ini dianggarkan murni 2014 tidak jadi dilaksanakan karena kegiatan ini dianggarkan untuk dicadangkan mendampingi apabila ada bantuan kegiatan dari pusat / APBN, akan tetapi tidak ada bantuan yang turun dari pusat / APBN.

2). Pembangunan TPUJabungan

Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena pembebasan lahan TPU Jabungan sebelumnya dilaksanakan oleh DPKAD, dengan luasan tanah TPU Jabungan yang dibutuhkan seluas 6 hektar, baru bisa dibeli seluas 5.010 meter persegi, dikarenakan proses pengadaan lahan belum terselesaikan, maka untuk pembangunan TPU Jabungan belum dapat dilaksanakan

3). Pengadaan Lahan TPU Jabungan

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pengadaan lahan TPU Jabungan merupakan limpahan dari DPKAD pada Anggaran Perubahan maka untuk pengadaan lahannya tidak memungkinkan dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

a) Adanya regulasi baru mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU No 2 Tahun 2012 dan Kepres RI No 71 Tahun 2012);

b) Ijin Penetapan lokasi untuk Pemakaman Umum sudah berakhir tanggal 2 Nopember 2012;

c) Adanya ketidakjelasan kepemilikan lahan dan surat – surat yang dimiliki warga;

d) Adanya ketidak sesuaian antara hasil penilaian appraisal dengan keinginan pemilik tanah;

e) DED yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

f) Keterbatasan waktu untuk melakukan verifikasi data yang sudah ada.

4). Kegiatan Sarpras Terminal Terboyo

Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena di tahun anggaran 2015 ada kegiatan Revitalisasi Terminal Terboyo yang cakupan kegiatan dan anggarannya lebih besar, sehingga di tahun 2014 tidak jadi dilaksanakan agar tidak terjadi pekerjaan yang sama.

a) Kegiatan Lomba Ketrampilan PMK dan Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini hanya menyerap dana 51,85% disebabkan event lomba pemadam kebakaran di DKI Jakarta tidak ada, sehingga penyerapan anggaran hanya dapat dilakukan untuk persiapan lomba di DKI Jakarta dan lomba di Dinas Kebakaran.

b) Kegiatan Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pelayanan kepada masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran diperlukan adanya pembagian wilayah manajemen kebakaran di Kota Semarang, adapun pembagian wilayah tersebut dibagi dalam 3 sektor yaitu Sektor Pemadam Kebakaran Banyumanik, Sektor Pemadam Kebakaran Ngaliyan dan Sektor Pemadam Kebakaran Genuk, yang masing-masing membawahi 2 pos pemadam kebakaran, hal ini menimbulkan permasalahan bagi Dinas Kebakaran, yaitu antara lain:

- (1) Jumlah Pos Pemadam yang dimiliki oleh Dinas Kebakaran masih kurang untuk memenuhi pembagian wilayah manajemen kebakaran yang sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Adapun pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Semarang saat ini hanya terbagi dalam 1 pos komando Induk dan dibantu 4 pos pemadam kebakaran yaitu Pos Pemadam Plamongan, Pos Pemadam Banyumanik, Pos Pemadam Genuk, dan Pos Pemadam Tugu;
- (2) Personil Aparatur Kebakaran baik jumlah kuantitatif maupun kualitatif masih kurang.
- (3) Usia mobil pemadam kebakaran yang semakin bertambah menyebabkan permasalahan, antara lain :
 - (a) Terdapat 14 unit mobil pemadam kebakaran yang tidak layak operasional. 5 unit tidak ada STNK dan 9 unit berusia lebih dari 10 tahun;
 - (b) Mobil tangga 2 (dua) unit yang dimiliki tidak ada STNK sedangkan bangunan tinggi semakin pesat jumlahnya seiring kemajuan Kota Semarang;
- (4) Belum ditetapkannya rencana induk sistem proteksi kebakaran dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota sebagai acuan pelaksanaan pelayanan penanggulangan kebakaran.

b. Dari permasalahan diatas, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan TPU Jabungan
Pembangunan TPU Jabungan akan dianggarkan dan dilaksanakan menunggu pembebasan lahan selesai minimal mencapai 75% sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.
- 2) Pengadaan Lahan TPU Jabungan
Di tahun anggaran 2015 telah dianggarkan Kegiatan Kajian Makam Jabungan yang bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembebasan lahan makam Jabungan.
- 3) Kegiatan Sarpras Terminal Terboyo
Di tahun anggaran 2015 telah dianggarkan kegiatan Revitalisasi Terminal Terboyo, dimana cakupan kegiatannya lebih luas mencakup perbaikan sarpras Terminal dan kegiatan pembangunan lainnya.
- 4) Kegiatan Lomba Ketrampilan PMK dan Penanggulangan Bencana
Lomba ketrampilan pemadam kebakaran di tahun 2015 dititikberatkan dilaksanakan di Dinas Kebakaran untuk peningkatan ketrampilan anggota Dinas Kebakaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

penanggulangan kebakaran disebabkan lomba ketrampilan pemadam kebakaran tingkat Nasional tidak ada.

- 5) Kegiatan Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- c. Rencana mengatasi permasalahan :
 - 1) Menambah Pos Pembantu untuk Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Semarang Timur di tahun 2015 dan mengadakan kerjasama dengan instansi swasta (pengembang) dalam hal pemenuhan pengadaan prasarana (pos wilayah).
 - 2) Mengajukan tambahan personil PNS maupun non PNS tahun 2015 sebanyak 48 personil untuk pos gunungpati, Mijen, dan Semarang Timur. Serta mengajukan tenaga outsourcing untuk penyediaan tenaga keamanan, supir dan kebersihan.
 - 3) Menambah mobil pemadam kebakaran dan mobil tangga/snorkel untuk menggantikan mobil yang tidak ada STNK dan berusia lebih dari 10 tahun.

5. Urusan Wajib Penataan Ruang

- a. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait Urusan Wajib Penataan Ruang pada tahun 2014 yaitu :
 - 1) Masih banyaknya kegiatan pembangunan di Kota Semarang yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW Kota Semarang, selain itu juga banyaknya perencanaan pembangunan di Kota Semarang yang belum teridentifikasi dalam Perda RTRW.
 - 2) Banyaknya SKPD dan pihak swasta yang terkait dalam kegiatan perubahan iklim sehingga banyak kegiatan yang membutuhkan perencanaan yang panjang dan komitmen bersama. Hal ini yang menjadi kendala karena pada pelaksanaan banyak dari tim yang terdiri dari Stakeholder dan beberapa SKPD tidak hadir dalam setiap kegiatannya.
 - 3) Banyaknya kegiatan yang perlu mendapatkan rekomendasi dari Tim BKPRD belum terselesaikan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada pada masing-masing tim.
 - 4) Kurangnya perhatian/dukungan dari masyarakat dalam hal pemasangan reklame dan penerangan jalan umum.
 - 5) Sedangkan kendala yang menyebabkan pendapatan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame menurun adalah:
 - a) Ijin titik Reklame tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang belaku, serta beberapa ijin yang saat ini masih dalam proses.
 - b) Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga titik reklame yang berada di lahan Bina Marga, Jasa Marga dan Jalan Nasional tidak boleh lagi dipungut retribusi sewa lahan.
 - c) Dicabutnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame, sehingga pemasangan reklame yang berada di halaman/bangunan sendiri tidak lagi dipungut retribusi.
 - 6) Diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan,



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

sehingga tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di Jalan Nasional, Provinsi, maupun Kota.

- b. Dari permasalahan diatas, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) Perlu adanya review pada perda No 14 tahun 2011 tentang RTRW pada tahun 2015 sesuai dengan ketentuan pelaksaan review RTRW minimal setiap lima tahun sekali guna meningkatkan kualitas dari perda tersebut;
 - 2) Penyusunan jadwal kerja dan anggaran yang lebih detail pada kegiatan koordinasi tata ruang dan perubahan iklim;
 - 3) Perlunya peningkatan kegiatan koordinasi untuk dapat memberikan keluaran berupa dokumen dan pentahapan yang lebih jelas guna meningkatkan kualitas kinerja pada kegiatan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - 4) Sosialisasi kepada masyarakat umum terutama dalam hal pemasangan reklame dan penerangan jalan umum untuk menghindari maraknya pemasangan reklame dan penerangan jalan umum illegal.
Sedangkan solusi yang dilakukan untuk menambah pendapatan agar sesuai atau melebihi target yang telah ditentukan adalah melakukan Intensifikasi, yaitu dengan penambahan titik reklame baru di lahan Pemerintah Kota Semarang, penyederhanaan proses perijinan titik reklame, dan rencana penggantian Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaran Reklame.

6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

- a. Permasalahan yang dihadapi pada urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2014 adalah:
- 1) Perlu adanya review pada perda No 14 tahun 2011 tentang RTRW pada tahun 2015 sesuai dengan ketentuan pelaksaan review RTRW minimal setiap lima tahun sekali guna meningkatkan kualitas dari perda tersebut;
 - 2) Penyusunan jadwal kerja dan anggaran yang lebih detail pada kegiatan koordinasi tata ruang dan perubahan iklim;
 - 3) Perlunya peningkatan kegiatan koordinasi untuk dapat memberikan keluaran berupa dokumen dan pentahapan yang lebih jelas guna meningkatkan kualitas kinerja pada kegiatan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - 4) Sosialisasi kepada masyarakat umum terutama dalam hal pemasangan reklame dan penerangan jalan umum untuk menghindari maraknya pemasangan reklame dan penerangan jalan umum illegal.
 - 5) Kajian Evaluasi Banjir dan Rob yang dilaksanakan di tahun 2014 disusun untuk mengkaji dampak dari serangkaian kegiatan fisik penanggulangan banjir dan rob yang telah dilaksanakan oleh SKPD, tapi belum melihat secara utuh mulai dari penyebab terjadinya banjir dan rob, mitigasi bencana dan penanggulangannya, serta upaya konservasi hulu dan hilir.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- b. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain adalah sebagai berikut:
- 1) Melakukan kajian kebutuhan kelembagaan kelitbang yang mandiri sehingga diharapkan kedepannya penelitian dan pengembangan di Kota Semarang dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
 - 2) Mengoptimalkan koordinasi terhadap seluruh SKPD yang terkait untuk memberdayakan Desa Wisata di Kota Semarang, termasuk SKPD pada urusan Pekerjaan Umum.
 - 3) Untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan bidang sosial budaya, maka dilakukan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang intens, membagi dokumen yang dihasilkan kepada SKPD terkait dan memfasilitasi kesulitan yang muncul agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.
 - 4) Kajian yang terkait dengan pengambilan kebijakan anggaran untuk penyusunan KUA/PPAS akan dilaksanakan melalui kegiatan kelitbang.
 - 5) Melaksanakan kajian lanjutan tentang evaluasi banjir dan rob secara menyeluruh dari sisi cakupan wilayah (hulu dan hilir) maupun dari sisi aspek penyebab (sosial, teknis, ekologi, dan lain).

7. Urusan Wajib Perhubungan

- a. Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan yaitu:
- 1) Target pendapatan parkir tepi jalan umum tidak dapat terpenuhi.
 - 2) Kondisi Terminal Terboyo yang kurang layak untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
 - 3) Terdapat beberapa unit kerja di lingkungan Dishubkominfo yang terpisah di beberapa tempat karena kondisi kantor Dishubkominfo yang sudah tidak mencukupi.
- b. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu:
- 1) Melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap juru parkir liar dan titik parkir larangan.
 - 2) Dilakukan revitalisasi Tahap I bangunan Terminal Terboyo pada Tahun 2015.
Dilakukan pembangunan gedung kantor Dishubkominfo pada Tahun 2015.

8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

- a. Permasalahan pada Urusan Lingkungan Hidup :
- 1) Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelaku kegiatan usaha yang tidak menerapkan kaidah konservasi didalam melaksanakan penambangan mineral eks galian C di wilayah Kota Semarang
 - 2) Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan konservasi SDA
- b. Rencana tindak Lanjut
- 1) Melakukan penyelidikan perkara kasus penambangan minerba eks galian C
 - 2) Menggerakkan peran serta sektor swasta dalam penanganan pemulihan kerusakan lingkungan serta konservasi sumberdaya alam melalui CSR serta mendorong peran SKPD untuk mainstreaming kebijakan yang pro lingkungan hidup, khususnya terhadap issue perubahan iklim.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

9. Urusan Wajib Pertanahan

- a. Permasalahan urusan pertanahan yang dihadapi selama tahun 2014 khususnya terkait dengan Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P5T) ini belum optimal dikarenakan tidak semua pemilik bidang tanah mengembalikan formulir yang telah dibagikan oleh petugas Kelurahan.
- b. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain dengan mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi lebih lanjut terkait dengan manfaat dari inventarisasi data pertanahan di Kelurahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran petugas kelurahan pada saat pengambilan data bidang tanah guna penyusunan database pertanahan di tingkat kelurahan.

10. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Permasalahan yang dihadapi pada urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2014 adalah:
 - 1) 5 (lima) bangunan gedung TPDK Kecamatan belum memenuhi standar pelayanan administrasi kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
 - 2) Luas bangunan gedung arsip kurang dapat menampung arsip dokumen kependudukan yang terus bertambah setiap tahun sehingga perlu penambahan luas bangunan yang lebih representatif.
 - 3) Elektronik arsip yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan khususnya untuk dokumen akta catatan sipil yang bersifat arsip aktif untuk lebih memudahkan dalam pencarian dokumen.
 - 4) Penerapan KTP_el sampai dengan akhir tahun 2014 masih masih banyak kendala untuk mencapai target dalam penerbitan KTP_el.
- b. Guna mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, langkah-langkah yang ditempuh antaralain :
 - 1) Melakukan pemeliharaan, terhadap sarana gedung TPDK Kecamatan yang belum sesuai dengan standar pelayanan, yaitu di Semarang Tengah, Tugu, Gajahmungkur, Gayamsari dan Candisari, akan diajukan usulan untuk pembangunan gedung TPDK Kecamatan tersebut sampai dengan masa tahun penganggaran 2015.
 - 2) Melakukan perencanaan kebutuhan perluasan gedung arsip yang dapat menampung peningkatan jumlah arsip dokumen kependudukan dan mengusulkan anggaran dan perencanaan teknis pembangunan Gedung Arsip sesuai dengan standart menurut Undang-Undang Kearsipan pada tahun yang akan datang.
 - 3) Melaksanakan pembangunan database elektronik arsip dokumen akta catatan sipil secara bertahap dan kontinyu selain itu juga melakukan pemeliharaan atas arsip dokumen akta catatan sipil dan gedung arsip agar lebih representatif sebagai tempat penyimpanan dan arsip dapat terjaga dari kerusakan secara kimia maupun biologis.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Permasalahan yang dialami urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Kurangnya tenaga psikolog dalam upaya penanganan rehabilitasi korban KDRT
 - 2) Masih belum terselesaikannya masalah rumah aman / shelter untuk korban kekerasan baik perempuan maupun anak , apakah dibangun permanen dengan resiko diketahui umum atau berbentuk sewa dengan resiko selalu berpindah tempat apabila diketahui oleh umum .
- b. Upaya yang dilakukan
 - 1) Mengoptimalkan tenaga dari full timer PPT SERUNI
 - 2) Demi menjaga keamanan dan kenyamanan korban, maka Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya sewa rumah aman / shelter yang dianggarkan tiap tahunnya.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Jumlah Penyuluhan KB idealnya adalah 1 : 2, artinya 1 (satu) orang penyuluhan mengampu 2 (dua) kelurahan, tetapi penyuluhan KB yang merupakan tenaga teknis fungsional khusus kondisinya saat ini masih 1 : 4, atau 1 (satu) orang penyuluhan mengampu 4 (empat) kelurahan.
- b. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain adalah sebagai berikut:
Optimalisasi dengan mitra / jaringan / kader yang telah dibina dan dilatih tentang program Keluarga Berencana untuk mengatasi kondisi jumlah penyuluhan yang minim.

13. Urusan Wajib Sosial

- a. Permasalahan yang dialami urusan sosial
 - 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS
Dalam pelaksanaan program ini masih ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah :
Penanganan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum simultan dan komperensif.
 - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Dalam pelaksanaan program ini masih ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah :
 - a) Ketersediaan database urusan sosial yang belum valid dan tidak reliabel.
 - b) Belum tersusunnya Peraturan Walikota yang mengatur tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang, yang merupakan turunan selanjutnya sebagai konsekuensi dari diterbitkannya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Dalam pelaksanaan program ini masih ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah :
Panti rehabilitasi sosial yang dimiliki masih terbatas daya tampung dan kualifikasi jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat diterima/dibina.
- b. Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul diantaranya:
- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS
Hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pada program ini diantaranya adalah :
Melaksanakan penataan dan sinkronisasi program serta kegiatan yang terkait dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta penggalian potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
 - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pada program ini diantaranya adalah :
 - a) Melaksanakan rekonsiliasi data dengan instansi-instansi terkait;
 - b) Melaksanakan penyusunan Peraturan Walikota yang mengatur tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang.
 - 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pada program ini diantaranya adalah :
Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia pengelola panti rehabilitasi sosial serta rehab bangunan Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo ruangan yaitu penambahan ruangan rehabilitasi.

14. Urusan Ketenagakerjaan

- a. Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
- b. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain adalah sebagai berikut:

15. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

- a. Permasalahan yang dihadapi
 - 1) Belum optimalnya pengelolaan koperasi yang dijalankan oleh pengurus hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manajemen kelembagaan, manajemen usaha maupun manajemen keuangan pengelolaan koperasi. Ditambah dengan pengawas koperasi yang belum melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan cenderung sebagai pelengkap organisasi.
 - 2) Perlunya dorongan terhadap pelaku UMKM dalam hal manajemen usaha dan perlunya kemitraan dengan pengusaha besar untuk berbagi pengalaman.
- b. Rencana Tindak Lanjut
 1. Diperlukan adanya pembinaan koperasi kepada pengurus dan anggota melalui pendampingan dalam hal peraturan dan manajemen perkoperasian. Serta



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

pembinaan bagi pengawas Koperasi, sehingga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana mestinya.

2. Pelaku UMKM diberikan pembinaan dan peningkatan SDM dalam manajemen usaha serta fasilitasi kemitraan usaha UMKM dengan pengusaha besar maupun kontak dagang dengan daerah lain

16. Urusan Wajib Penanaman Modal

- a. Dalam pelaksanaan urusan ini masih ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah:
 - 1) Peraturan – peraturan Pusat tentang Penanaman Modal dan Perijinan sering berubah – ubah, menyulitkan daerah dalam pelaksanaannya..
 - 2) Belum terlaksananya penyesuaian kelembagaan BPM-PTSP sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang PTSP, karena diterbitkannya Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) Adanya perbedaan 2 (dua) regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga khususnya terkait dengan kerjasama pemanfaatan asset yaitu antara Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah , perbedaan tersebut dalam pelaksanaan kerjasama pihak ketiga antara lain terkait dengan persetujuan DPRD, mekanisme / proses seleksi, serta jumlah peserta seleksi / tender mitra kerjasama.
- b. Hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pada urusan ini di antaranya adalah:
 - 1) Konsultasi dan Koordinasi terkait teknis pelaksanaan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
 - 2) Evaluasi Kelembagaan BPPT
 - 3) Perlu peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.

17. Urusan Kebudayaan

- a. Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:
 - 1) Generasi Muda masih tertarik terhadap Seni dan Budaya Asing dibanding Budaya Lokal
 - 2) Kemajuan dibidang teknologi dan komunikasi mempermudah masuknya budaya asing yang lebih diminati generasi muda.
Kepedulian masyarakat terhadap pelestarian seni budaya tradisional dan peninggalan bersejarah masih kurang.
- b. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mangatasi permasalahan tersebut di atas antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Memperkenalkan Budaya Lokal kepada generasi muda sesuai dengan perkembangan zaman dimasa sekarang.
 - 2) Menumbuhkan minat generasi muda dengan kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif, Inovatif serta kreatif melalui sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya.
 - 3) Memanfaatkan tempat-tempat bersejarah dalam setiap pelaksanaan event-event seni kebudayaan baik tingkat lokal maupun nasional.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

18. Urusan Pemuda dan Olahraga

a. Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Dalam pelaksanaan program ini masih ditemukan beberapa kendala di antaranya adalah belum adanya peraturan daerah tentang kepemudaan yang mengatur secara rinci dan jelas pelaksanaan urusan kepemudaan karena saat ini urusan tersebut masih tumpang tindih dengan urusan pendidikan, kesatuan bangsa, dan politik.

2) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Dalam pelaksanaan program ini masih ditemukan beberapa kendala di antaranya adalah

- belum adanya peraturan daerah tentang keolahragaan sebagai pijakan yang kuat untuk mengembangkan pelaksanaan urusan keolahragaan
- masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kelompok/klub olahraga perihal hibah perlengkapan dan peralatan olahraga

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Dalam pelaksanaan program ini masih ditemukan beberapa kendala di antaranya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas di Kota Semarang

b. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mangatasi permasalahan tersebut di atas antara lain adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pada program ini di antaranya adalah melaksanakan tahapan penyusunan peraturan daerah tentang kepemudaan

2) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

- melaksanakan tahapan penyusunan peraturan daerah tentang keolahragaan
- melaksanakan sosialisasi dan internalisasi dengan masyarakat dan kelompok/klub olahraga perihal hibah secara langsung
- mengembangkan sosialisasi dan layanan secara elektronik melalui website Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pada program ini di antaranya adalah:

- perbaikan, pemeliharaan, dan rehabilitasi secara berkesinambungan sarana dan prasarana olahraga yang ada
- optimalisasi dan sinkronisasi peran ruang publik dan taman kota, selain sebagai fungsi estetika kota juga dapat dimanfaatkan sebagai area olahraga
- melaksanakan rekonsiliasi data perihal sarana dan prasarana olahraga dengan masyarakat, kelompok/klub olahraga, dan pihak terkait lainnya

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama tahun 2014 adalah :

1) Pengaruh masa transisi dari sistem demokrasi sebelumnya dengan sistem demokrasi setelah reformasi yang nuansanya lebih bebas masih belum



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

sepenuhnya dipahami. Perbedaan persepsi dalam memberi makna kebebasan dan keterbukaan masih tampak pada penyampaian opini, aspirasi atau pendapat dimuka umum oleh sebagian masyarakat yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah hukum dan normasosial yang ada.

- 2) Berdasarkan hasil dari beberapa kegiatan dialog dengan tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa karakter asli Bangsa Indonesia yaitu semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam kehidupan bermasyarakat mulai bergeser ke arah individualis yaitu masyarakat yang kehidupan anggotanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, serta memperhitungkan untung rugi.
 - 3) Penegakan Perda untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umumsangat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat menengah kebawah, banyaknya aktivitas dan kegiatan masyarakat yang berpotensi dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan oleh pelanggaranya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini dapat diartikan sebagai kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota khususnya bagi masyarakat pendatang atau masyarakat menengah kebawah.
- b. Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama tahun 2014 yaitu:
- 1) Perlu dilakukan upaya berupa pendidikan politik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pendidikan politik difokuskan kepada pengembalian nilai-nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila.
 - 2) Untuk membangkitkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Semarang perlu diimplementasikan konsep Pembangunan Berbasis Komunitas (*Community Base Development*). Pembangunan baik fisik maupun non fisik yang memiliki skala kecil dan bersifat sederhana dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat yang dinilai mampu melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola oleh kelompok masyarakat. Dengan cara tersebut masyarakat akan muncul kepedulian melalui partisipasi aktif terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Melalui partisipasi aktif masyarakat secara kolektif akan mengembalikan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - 3) Mengoptimalkan layanan penyajian informasi melalui papan/labelisasi tempat rawan pelanggaran, tentang kriteria Pelanggaran Peraturan tingkat Daerah khususnya pelanggaran Perda yang bernilai startegis berdampak terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kemudian meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui layanan pengaduan dengan SMS Pengaduan masyarakat



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

ke nomor 081215215666, lewat twitter @satpolpp_smg, serta melalui website www.semarangkota.go.id.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, sebagai berikut:
- 1) Sering terjadinya perubahan perundang-undangan pusat yang menjadi acuan penyusunan produk hukum daerah, dan adanya tumpang tindih/tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan pusat yang satu dengan yang lain sehingga menghambat dalam implementasi produk hukum daerah.
 - 2) Banyaknya permasalahan hukum yang ada di Pemerintah Kota Semarang dan perlu untuk segera ditangani.
 - 3) Kegiatan sosialisasi produk hukum belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - 4) Banyaknya aparat pengawas selain Inspektorat Kota Semarang, seperti BPK, BPKP, Irjen Kementerian, dan Inspektorat Provinsi yang melakukan pemeriksaan di Pemerintah Kota Semarang, sehingga dapat menimbulkan bertubi-tubinya pemeriksaan di SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
 - 5) Kesulitan dalam pemungutan pajak daerah yang tidak jelas kepemilikannya, seperti kepemilikan tanah.
 - 6) Kurangnya kesadaran dan transparansi sebagai wajib pajak dalam melaporkan besaran pendapatan dan besaran pembayaran pajaknya
 - 7) Dalam penulusuran aset daerah saksi-saksi atas keberadaan aset/alas hak sulit ditemui dan bukti administrasi atas alas hak aset sulit ditemukan.
 - 8) Kantor pertanahan tidak bisa memberikan jadwal secara pasti sehingga Pemerintah Kota Semarang kesulitan dalam hal pendampingan dalam pengukuran.
 - 9) Masih adanya penyewa aset milik Pemerintah Kota semarang yang kurang tertib dalam membayar Barang Milik Daerah yang disewa.
 - 10) Adanya rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjadikan Perubahan SOTK dilingkungan Pemerintah Kota Semarang harus menunggu revisi peraturan pemerintah tersebut.
 - 11) Jaringan internet simbangda.semarangkota.go.id sering mengalami kendala.
 - 12) Masih adanya sebagian penerima hibah pembangunan sarana dan prasarana umum maupun hibah pembangunan tempat ibadah yang belum tertib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah Kota Semarang.
 - 13) Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang belum memadai dengan jumlah pokja sebanyak 25 orang, serta dengan paket yang dilelangkan kurang lebih 480 paket.
 - 14) Dalam GiS Aset Tanah dan bangunan kekurangan tenaga PNS yang dapat mengoperasionalkan sistem GIS.
 - 15) Masih adanya aset tanah yang belum bersertifikat.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

-
- 16) Rincian kegiatan jabatan sebagai bahan penyusunan informasi jabatan (analisis jabatan) belum tersusun secara sistematis di setiap SKPD;
 - 17) Banyak pemangku jabatan yang belum memahami penyusunan rincian kegiatan jabatannya;
 - 18) Kurangnya minat PNS pada pekerjaan-pekerjaan analisis jabatan dan analisis beban kerja karena penyusunan informasi jabatan dan analisis beban kerja hanya dapat dilaksanakan dengan metode sensus per pemangku jabatan;
 - 19) Munculnya regulasi-regulasi sektoral baru diluar regulasi umum yang mengatur organisasi perangkat daerah, disertai kewajiban daerah untuk membentuk lembaga;
 - 20) Adanya regulasi-regulasi yang mengatur pembentukan lembaga non struktural dengan tugas pokok dan fungsinya yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah;
 - 21) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD;
 - 22) Belum semua SKPD menyusun standar operasional prosedur sebagai mekanisme kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - 23) Belum memadai sarana dan prasarana pendukung penanganan pengaduan pelayanan publik;
 - 24) Terjadinya perubahan Regulasi Kegiatan Recruitmen CPNS dari Pemerintah Pusat yang setiap tahun selalu berubah baik dari segi Juklak / Juknis maupun SOP nya sehingga sulit untuk merencanakan pengadaan CPNS yang tepat, baik dari segi waktu maupun biaya.
 - 25) Terbatasnya formasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Semarang. Hal ini tidak signifikan dengan kebutuhan riil organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sehingga mengakibatkan kekurangan personil pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
 - 26) Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja di Kota Semarang belum berjalan optimal, karena masih banyak PNS yang belum memahami teknik penyusunan SKP (Sasaran Kerja Pegawai).
 - 27) Masih terdapatnya pegawai yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pencatatan kehadiran PNS dengan alat presensi elektronik dikarenakan sulit terdeteksi sidik jarinya.
 - 28) Masih ada beberapa PNS dari formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang belum diangkat dalam jabatan sesuai dengan formasinya, karena PNS yang bersangkutan belum mengikuti diklat teknis sesuai formasi jabatan.
 - 29) Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS masih ada keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan SOP yang diharapkan karena banyak usulan dari SKPD yang persyaratannya kurang.
 - 30) Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga belum semua pegawai mendapatkan hak untuk mengikuti diklat sesuai dengan kompetensinya
 - 31) Belum tersedianya gedung Diklat (Kampus Diklat dan Asrama Diklat) yang representatif yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, karena gedung kelas dan asrama diklat pada tahun 2014 masih dalam tahap pembangunan.
 - 32) Waktu pengadaan barang untuk pemenuhan sarana dan prasarana Diklat melalui APBD Perubahan 2014 yang relatif pendek, sehingga tidak semua



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

barang bisa tersedia, terutama barang yang tidak ready-stock/memerlukan waktu yang cukup lama dari pemesanan hingga ke pengiriman/serah terima barang.

- 33) Belum adanya pasal didalam PP Nomor 100 tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS yang menyebutkan sanksi bagi Pejabat struktural yang tidak mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya sehingga tersirat bahwa Diklat Pim bukan merupakan diklat wajib bagi pejabat structural
- b. Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama ke berbagai pihak, baik ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pakar hukum dalam rangka penyusunan produk hukum daerah dan penanganan permasalahan hukum.
 - 2) Mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum di Pemerintahan Kota Semarang.
 - 3) Perlu melakukan kegiatan sosialisasi produk hukum secara terus menerus dan berkesinambungan agar mampu menjangkau seluruh aparatur pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya seperti BPKP dan Inspektorat Provinsi dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
 - 5) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan penelusuran/ melacak keberadaan pemilik tanah.
 - 6) Melakukan kerjasama dengan pihak ke III dengan pemasangan online sistem (pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik) terhadap wajib pajak restoran dan pajak hiburan dan selanjutnya akan dilakukan terhadap objek pajak lainnya.
 - 7) Secara intensif melakukan penelusuran dan pendekatan kepada tokoh masyarakat.
 - 8) Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pertanahanan terkait dengan pelaksanaan pengukuran aset pemkot yang sedang diajukan sertifikasi.
 - 9) Melakukan pendekatan kepada penyewa aset milik Pemerintah Kota Semarang agar lebih tertib dalam membayar sewa aset.
 - 10) Perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, khususnya dalam melakukan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah.
 - 11) Segera dibangun server hosting sendiri yang mana domain tetap mengikuti semarangkota.
 - 12) Memberikan teguran kepada masyarakat yang belum membuat laporan pelaksanaan hibah.
 - 13) Mengusulkan pembangunan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang representatif sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih baik.
 - 14) Mengoptimalkan pemberdayaan PNS dalam mengoperasikan sistem GIZ tanah dan bangunan.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

-
- 15) Melakukan pensertifikatan tanah aset secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - 16) Membuat surat Walikota Semarang kepada Kepala SKPD perihal Penyusunan Rincian Kegiatan;
 - 17) Melaksanakan asistensi penyusunan rincian kegiatan terhadap pemangku jabatan pada SKPD prioritas analisis jabatan;
 - 18) Menyusun Tim Analis jabatan dan Analis Beban kerja yang beranggotakan PNS yang berkompenten;
 - 19) Merencanakan kajian regulasi sektoral diluar regulasi umum yang mengatur organisasi perangkat daerah;
 - 20) Merencanakan kajian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 21) Melaksanakan pembinaan kinerja unit pelayanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi, jasa dan barang;
 - 22) Merencanakan penyusunan regulasi Standar Operasional Prosedur bagi masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan regulasi Standar Pelayanan;
 - 23) Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan penanganan pengaduan pelayanan publik;
 - 24) Melaksanakan perencanaan pengadaan CPNS dengan tetap mengusulkan formasi sesuai kebutuhan serta mengintensifkan konsultasi ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat tentang kebijakan Pengadaan CPNS dan pelaksanaannya.
 - 25) Melaksanakan optimalisasi kinerja untuk jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan mengusulkan tambahan formasi serta menetapkan PNS mutasi dari luar sesuai skala prioritas kebutuhan SKPD dengan tetap disesuaikan kompetensinya.
 - 26) Melaksanakan asistensi secara intensif penyusunan SKP pada SKPD, merencanakan sistem aplikasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan SKP;
 - 27) Melaksanakan perekaman data ulang bagi PNS yang sulit terbaca sidik jarinya atau penggunaan kartu RFID (Radio Frequency Identification).
 - 28) Mendorong SKPD untuk segera mengusulkan Diklat syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan pengusulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu.
 - 29) Merencanakan penerimaan berkas kenaikan pangkat secara terpadu dengan verifikasi secara langsung.
 - 30) Menetapkan prioritas penyelenggaraan dan pengiriman diklat melalui Evaluasi Pasca Diklat dan Analisis Kebutuhan Diklat untuk mengetahui jenis Diklat yang benar – benar dibutuhkan oleh Pegawai Negeri Sipil atau masing – masing SKPD
 - 31) Memanfaatkan secara maksimal gedung kelas dan asrama Diklat yang telah dibangun pada tahun 2013 dan 2014.
 - 32) Merencanakan untuk melaksanakan pengadaan barang yang belum tersedia untuk menunjang pelaksanaan Diklat pada tahun-tahun yang akan datang.
 - 33) Memberikan input secara berjenjang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk penguatan aturan formal kediklatan.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

21. Urusan Ketahanan Pangan

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Ketahanan Pangan pada tahun 2014 diantaranya :
 - 1) Belum meratanya kemampuan manajerial kelompok dalam mengelola bantuan, sehingga kelompok tidak dapat berkembang secara optimal
 - 2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan pekarangan dengan budidaya sayur, buah, peternakan maupun perikanan dalam pemenuhan gizi keluarga, meskipun kegiatan tersebut sangat bermanfaat
- b. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas antara lain:
 - 1) Pembinaan secara kontinyu dan memberikan pembekalan administrasi atau pembukuan sederhana agar manajemen kelompok lebih baik, serta menyusun skala prioritas kelompok yang harus didukung fasilitasi terlebih dahulu dan mengajukan permohonan pada tingkat provinsi maupun pusat.
 - 2) Memberikan pembinaan dan edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan seimbang serta gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan maupun gerakan untuk mencintai pangan lokal serta membentuk kader ketahanan pangan sebagai pendamping di tiap kecamatan.

22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Permasalahan yang dialami urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 1) Belum adanya kejelasan tentang keberlanjutan program PNPM Mandiri Perkotan di tahun 2015
 - 2) Kelembagaan BKM belum tertata dengan baik
 - 3) Banyak lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum, hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
 - 4) Jaringan pemasaran produk kelompok usaha mikro masih terbatas
- b. Untuk mengatasi permasalahan tersebut:
 - 1) Melaksanakan pendampingan pada BKM dalam pengelolaan aset, sehingga keberlanjutan program kemiskinan dapat dilaksanakan;
 - 2) Melaksanakan bimbingan teknis bagi fasilitator pendamping;
 - 3) Sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang ditujukan pada UMKM dan UPK menuju lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum;
 - 4) Melaksanakan pelatihan kemasan dan labelling serta penyuluhan dan sertifikasi P.I.R.T produk makanan / minuman industri rumah tangga.

23. Urusan Wajib Statistik

- a. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik adalah :
 - 1) Terdapat jeda waktu yang cukup lama antara pengumpulan data sampai dengan penyajian data hasil analisis, sehingga data yang pasti belum bisa segera dipublikasikan setelah pengumpulan (data Sementara).
 - 2) Beberapa jenis data yang dibutuhkan belum tersedia secara lengkap.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- 3) Terbatasnya sumberdaya yang ada dilingkungan Pemerintah kota Semarang dalam pengumpulan data secara mandiri.
- b. Untuk mengatasi permasalahan pada urusan statistik, rencana tindak lanjut yang akan ditempuh adalah :
 - 1). Penyusunan data sementara sebelum ada data resmi yang dipublikasikan
 - 2). Inventarisasi dan reklasifikasi data sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku
 - 3). Mempertahankan kerjasama dan peningkatan koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

24. Urusan Wajib Kearsipan

- a. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik adalah :
 - 1) Kurangnya kesadaran SKPD untuk menyerahkan dan mengumpulkan arsip, khususnya arsip in-aktif ke Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagai instansi penyimpanan arsip;
 - 2) Belum tersedianya pengelola arsip yang terampil.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2013 yaitu:
 - 1) Pembuatan Jadwal Penyerahan Arsip SKPD dan mensosialisikannya;
 - 2) Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat-diklat kearsipan untuk memenuhi kebutuhan tenaga arsiparis.

25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

- a. Permasalahan dalam Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika yaitu:
 - 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme prosedur permohonan informasi dan dokumentasi melalui PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
 - 2) Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, namun belum diimbangi sarana prasarana pendukung.
- b. Untuk mengatasi permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu:
 - 1) Mengadakan Forum Koordinasi PPID yang melibatkan masyarakat dan juga Pemerintah Kota Semarang.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informasi yang canggih demi mengikuti era perkembangan teknologi informasi

26. Urusan Wajib Perpustakaan

- a. Urusan Wajib Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang pada tahun 2014 belum dapat berjalan secara maksimal disebabkan:
 - 1) Terbatasnya kuantitas Sumber daya manusia pada Kantor Perpustakaan dan Arsip untuk menjadi tenaga pustakawan;
 - 2) Sarana prasarana gedung perpustakaan yang belum representatif.
- b. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengusulkan penambahan personil berpendidikan perpustakaan yang akan ditugaskan sebagai fungsional pustakawan serta peningkatan kompetensi



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

sumber daya manusia yang ada untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat dengan cepat, tepat, akurat dan lengkap;

- 2) Optimalisasi gedung perpustakaan dengan infrastruktur yang memadai untuk peningkatan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.

27. Urusan Wajib Perdagangan

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pilihan perdagangan adalah sebagai berikut :
 - 1) Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha akan arti pentingnya validitas data ekspor dan impor;
 - 2) Kurangnya tingkat pemahaman tentang hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha;
 - 3) Terbatasnya sarana prasarana hasil produk IKM (Industri Kecil Menengah).
- b. Rencana tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pilihan perdagangan adalah sebagai berikut :
 - 1) Perlu adanya pendataan secara berlanjut tentang realisasi ekspor dan impor;
 - 2) Perlunya sosialisasi berkesinambungan baik melalui forum diskusi atau media cetak;
 - 3) Perlunya peningkatan sarana/tempat promosi/pameran hasil produk IKM (Industri Kecil Menengah).

28. Urusan Wajib Perindustrian

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pilihan perindustrian tahun 2014 adalah sebagai berikut:
 - 1) Masih rendahnya frekuensi komunikasi antara pelaku usaha industri dengan Pemerintah Kota;
 - 2) Masih ditemukan bebasnya produk industri dipasaran yang belum memenuhi standard industri.
- b. Rencana tindak lanjut terkait dengan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan perindustrian adalah sebagai berikut :
 - 1) Perlunya peningkatan forum komunikasi antar para pelaku usaha dengan Pemerintah Kota;
 - 2) Perlu ditingkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha tentang produk sesuai dengan peraturan/ standar industri.

URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pertanian

- a. Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian pada tahun 2014 adalah:
 - 1) Tingkat pendidikan petani yang relatif masih rendah menjadi kendala dalam alih teknologi pertanian yang berkembang cepat.
 - 2) Kelembagaan petani masih lemah dimana sistem organisasi dan manajemen kelompok belum berjalan optimal.
 - 3) Keterbatasan sumber daya penyuluhan/pembinaan pertanian menyebabkan pembinaan kelompok tani belum bisa menjangkau semua anggota kelompok tani dan hanya terbatas pada pengurus kelompok.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- 4) Terbatasnya kemampuan petani dalam penawaran produk yang dihasilkan, serta penanganan produk mulai dari panen sampai pascapanen yang belum dilakukan dengan baik mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan..
 - 5) Berkurangnya lahan sawah karena alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian seperti pemukiman dan kawasan bisnis
 - 6) Infrastruktur pertanian seperti irigasi, transportasi, dan unit pengolahan belum optimal.
 - 7) Produktivitas pertanian masih dibawah produktivitas potensial karena belum semua petani mempraktekkan sistem budidaya tanaman sebagaimana dianjurkan.
 - 8) Berkurangnya lahan peternakan baik untuk kandang maupun hijauan makanan ternak akibat alih fungsi lahan.
 - 9) Kurang berkembangnya populasi ternak besar terutama sapi karena berkurangnya minat peternak untuk memelihara sapi bibit karena mahalnya harga bibit bakalan sapi. Dengan keterbatasan modal peternak lebih memiliki untuk budidaya kambing atau sapi kereman yang turn-overnya lebih cepat daripada sapi bibit.
 - 10) Munculnya zoonosis baru serta kemunculan kembali zoonosis lama seperti H5N1 (flu burung). Faktor-faktor seperti perubahan demografi (peningkatan populasi), perdagangan global, perubahan pola hidup masyarakat, dan pariwisata diidentifikasi sebagai pemicu zoonosis baru. Sementara perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan sanitasi dan kesehatan lingkungan menyebabkan zoonosis-zoonosis yang lama sulit untuk diberantas sepenuhnya.
- b. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada Urusan Pilihan Pertanian di tahun 2014 antara lain :
- 1) Meningkatkan kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan-pelatihan bagi petani untuk mempercepat penyebaran informasi pertanian serta introduksi teknologi-teknologi pertanian tepat guna.
 - 2) Meningkatkan kemampuan berorganisasi dan manajerial kelompok tani.
 - 3) Meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian lapangan serta memberdayakan penyuluhan-penyuluhan swadaya untuk membantu kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian di lapangan.
 - 4) Meningkatkan nilai tambah komoditas melalui kegiatan-kegiatan pascapanen seperti pengemasan dan pengolahan hasil pertanian.
 - 5) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengendalikan alih fungsi lahan-lahan untuk pertanian dan peternakan.
 - 6) Meningkatkan infrastruktur pertanian.
 - 7) Mendorong petani untuk menerapkan teknologi anjuran dalam budidaya tanaman.
 - 8) Memberikan insentif dan stimulan kepada para peternak sapi bibit.
 - 9) Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penangulangan penyakit menular ternak terutama zoonosis melalui biosecurity, pengobatan ternak, pengawasan keluar-masuk hewandari dan ke Kota Semarang.
 - 10) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya zoonosis melalui penyuluhan serta penyebarluasan informasi mengenai zoonosis dan pola beternak yang benar dan sehat.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. Urusan Kehutanan

- a. Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Urusan Pilihan Kehutanan pada tahun 2014 adalah:
 - 1) Usaha merehabilitasi hutan dan lahan kritis menghadapi tantangan dengan cepatnya pertumbuhan kota (urban sprawl). Urban sprawl menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sehingga daerah resapan air dan daya dukungnya terhadap DAS juga berkurang. Sampai akhir tahun 2014 terdapat 954,5 ha lahan kritis di Kota Semarang yang harus mendapat prioritas untuk ditangani, disamping 5.425,6 ha lahan yang berpotensi kritis yang juga harus dijaga agar tidak berubah menjadi kritis .Selain itu padatnya kawasan pemukiman dan bisnis mengakibatkan krisis lahan hijau sehingga target 30% ruang terbuka hijau belum dapat terpenuhi.
 - 2) Meskipun sudah ada kesadaran masyarakat terhadap penghijauan lingkungan, tetapi partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan perlu lebih ditingkatkan supaya konservasi lingkungan hidup belum dapat sepenuhnya diwujudkan.
- b. Upaya yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam Urusan Pilihan Kehutanan yaitu:
 - 1) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan untuk menambah carbon sink dan meningkatkan daerah resapan air melalui melalui penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota dan hutan rakyat, serta rehabilitasi mangrove kawasan pesisir.
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan penghijauan lingkungan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta bantuan teknis.

3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2014 diidentifikasi kendala yaitu:
 - 1) Konsep Pengelolaan Urusan Energi Sumber Daya Mineral belum dapat diintegrasikan dengan pola administrasi kewilayahan.
 - 2) Adanya Wacana/ sosialisasi pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral akan dikelola Oleh Pemerintah Propinsi
 - 3) Keterbatasan SDM di Lingkugan Pemerintah Kota di bidang Fungsional Penilik Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Ahli Geologi
 - 4) Keterlambatan dalam penyusunan Perda Tentang Pengaturan ABT dan galian C berakibat pada belum terkelolanya tentang Ijin dan Pengendalian Air bawah tanah dan Galian C di Tingkat Pemerintah Kota dengan Baik.
- b. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah
 - 1) Koordinasi dengan Pihak terkait (Pertamina, PLN & Perusahaan GAS Negara) secara komprehensif akan peran, tugas dan fungsi masing- masing.
 - 2) Mengusulkan Perekruit SDM Fungsional Penilik Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Ahli Geologi, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM yang ada melalui Diklat di bidang ESDM.
 - 3) Melakukan upaya pendataan yang berkelanjutan agar dalam pengelolaan kegiatan lebih spesifik.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4. Urusan Kepariwisataan

- a. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2014 diidentifikasi kendala yaitu:
 - 1) Fasilitas dan kualitas prasarana di obyek wisata masih kurang lengkap;
 - 2) Promosi pariwisata masih kurang maksimal;
 - 3) Kurang efektifnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata;
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengembangankepariwisataan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan tersebut , rencana akan ditindak lanjuti dengan langkah langkah sebagai berikut
 - 1) Meningkatkan dan melengkapi fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata
 - 2) Meningkatkan promosi pariwisata dengan para pelaku pariwisata
 - 3) Meningkatkan pertemuan secara intensif dengan para pelaku pariwisata
 - 4) Meningkatkan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat
 - 5) Dan meningkatkan pembinaan kepada kelompok sadar wisata (POKDARWIS)

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2014 diidentifikasi kendala yaitu:
 - 1) Pengadaan lahan konservasi belum bisa terealisasi karena anggaran untuk pengadaan lahan dari anggaran perubahan, sehingga pada tahun 2014 baru bisa membuat dokumen yang dipersyaratkan untuk pengadaan lahan yaitu, LARAP, Master Plan, dan UKP-UPL.
 - 2) Belum dimilikinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang representatif.
 - 3) Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan PIH yg disebabkan belum selesainya proses hibah asset dr kementerian keuangan yang sampai saat ini proses pengalihan hibah asset milik Negara PIH dalam proses di Kementerian Keuangan RI.
 - 4) Masih rendahnya kualitas produk olahan hasil perikanan karena ketrampilan, dan pengetahuan tentang pengolahan ikan masih kurang;
 - 5) Masih rendahnya ketrampilan dan pengetahuan masyarakat terhadap budidaya ikan dan belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan.
 - 6) Masih belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang. Saat ini peluang pasar di Semarang (Pasar Kobong) adalah 100 ton/malam atau 36.500 ton / tahun sedangkan produksi perikanan darat dan laut dari Semarang baru 3.339,88 ton /tahun.
 - 7) Masih kurangnya tingkat konsumsi makan ikan untuk tingkat kota yaitu 25,93 kg/kapita dibandingkan dengan standard konsumsi ikan nasional yaitu 38 kg/kapita pada tahun 2014.
- b. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas antara lain :
 - 1) Pengadaan lahan konservasi, sesuai dengan kajian studi kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya akan dilaksanakan pada tahun 2015.
 - 2) Menyusun FS dan DED rencana pembangunan TPI di Kota Semarang yang lebih baik pada tahun 2015 yang terletak di muara sungai Tambaklorok.
 - 3) Memantau dan melakukan konsultasi agar pengalihan hibah asset milik negara PIH Mina Rejomulyo segera terlaksana.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- 4) Mengadakan pelatihan, pembinaan, penyuluhan, uji mutu produk hasil perikanan dan sarana produksi olahan hasil perikanan.
- 5) Mengadakan pengembangan lahan budidaya terutama memanfaatkan lahan-lahan tidur dan tambak-tambak yang terbengkalai, serta mengintensifkan pelatihan dan pembinaan, serta pemberian bantuan dan sarana produksi budidaya ikan.
- 6) Mengadakan pengembangan usaha penangkapan ikan melalui pelatihan, pembinaan, dan bantuan sarana penangkapan ikan.
- 7) Mengadakan kegiatan gemar makan ikan, promosi dan pameran hasil perikanan di lingkup Kota Semarang.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai

Di Pemerintah Kota Semarang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) agar digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah kota semarang terdiri dari 7 laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD Kota Semarang. SKPD di Pemerintah Kota Semarang yang telah menyusun Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

NO	SKPD	ALAMAT/NO.TELP
1	Dinas Pendidikan	Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. (024) 8412180, 8414883
2	Dinas Kesehatan	Jl. Pandanaran No.79 Semarang Telp. (024) 8415269
3	RSUD	Jl. Fatmawati No. 1 Semarang Telp. (024) 7611500
4	Dinas Bina Marga	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang Telp. (024) 3513366 / 1270
5	Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang Telp. (024) 3568540
6	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang Telp. (024) 3548920
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang Telp. (024) 3556435
8	Dinas Penerangan Jalan dan pengelolaan Reklame	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang Telp. (024) 3515945
9	Sekretariat Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang Telp. 3560767, 3513366 Pes. 1302, 1304, 1305
10	Badan Kepegawaian Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang Telp. (024) 3586680
11	Bappeda	JL. Pemuda 148 Semarang Telp. (024) 3541095
12	Inspektorat	Jl. Pemuda No. 148 Semarang Telp. (024) 3540129, 3513366 Pes. 1239, 1293
13	BPPT	Jl. Pemuda 148 Semarang Telp. (024) 3584501 / 3513366 Ps. 1521, 1530
14	Sekretariat Dewan	Jl. Pemuda No. 146 Telp. 024-3540089 Fax. 024-3547146
15	DPRD	Jl. Pemuda No. 146 Semarang Telp. 3540002, 3540089 Pes. 1202
16	Walikota	Jl. Pemuda No. 148 Semarang Telp. 3540003, 3513366 Pes.1214, 1504
17	Satpol PP	Jl. Ronggolawe No. 10 Semarang Telp. (024) 7604689
18	BPBD	Jl. Brigjend Soedirto KM 11 Komplek Terminal Penggaron Telp. 6730212, 6730356 Fax. (024) 6730212
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. (024) 3584081, 3584080
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Pemuda Nomor 175 Telp. (024) 3584084
21	Dinas Koperasi dan UKM	Jl. Pemuda 175 Semarang Telp. (024) 3584085 / 3584077 Pswt. 2700
22	Badan Kesbangpolinmas	Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584045 Pes. (024) 3584077 – 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 Fax. (024) 3584045
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang Telp. (024) 3547998 Pswt.2301
24	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang Telp. (024) 3584077 Pswt 2213
25	Dinas PSDA dan ESDM	Jl. Pamularsih Nomor 20 Semarang Telp. (024) 7606879
26	Dinas Kebakaran	Jl. Madukoro Raya No. 6 Semarang Telp. 113, 7605871



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

27	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	JL. Tambak Aji Raya NO.5 Smg Telp. (024) 8662389
28	Badan Lingkungan Hidup	Jl. Tapak Tugurejo Smg Telp. (024) 8664742 Fax. (024) 8664743
29	Kantor Diklat	Jl. Abdul Rahman Saleh No.522 Smg Telp. (024) 7605375
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. Ki Mangunsarkoro 21 Smg Telp. (024) 84403335
31	Dinas Pasar	Jl. Dr. Cipto 115 Semarang Telp. (024) 3547888,3544303
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Kanguru Raya No.3 Smg Telp. (024) 6712563
33	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Jl. Supriyadi No.30 Smg telp. (024) 6714283
34	Dinas Pertanian	Jl. Kompak No.2-3 Smg
35	Kantor Ketahanan Pangan	Jl. Kompak Nomor 1 Smg Telp. (024) 76745957
36	Bapermas	Jl. Prof. Soedarto No. 116 Telp. (024) 7472221, 7474416
37	Kecamatan Semarang Selatan	Jl. Taman Sompok No. 1 Semarang Telp. 024-8449641 Fax. 024-8449641
38	Kecamatan Semarang Utara	Jl. Taman Brotojoyo No.2 Semarang Telp. 3556110 Fax. 3560844
39	Kecamatan Semarang Barat	Jl.Ronggolawe No.2 Semarang Telp. 024-7602284 Fax. 024-7613173
40	Kecamatan Semarang Timur	Jl. Barito No. 5 Semarang Telp. 8451868 Fax. 8451868
41	Kecamatan Semarang Tengah	Jl. Taman Seteran Barat No. 1 Semarang Telp. 3445694 Fax. 3560839
42	Kecamatan Gunungpati	Jl. Mr. Wuryanto No. 33 Semarang Telp. 024-6921021 Fax. 024-7691570
43	Kecamatan Tugu	Jl. Walisongo Km 10 Semarang Telp. 024-8663031 Fax. 024-8661758
44	Kecamatan Mijen	Jl. RM. Hadisoebono S.122 Semarang Telp. 7711065 Fax. 7711201
45	Kecamatan Genuk	Jl. Dong Biru No.12 Semarang Telp.6582291 Fax.6585156
46	Kecamatan Gajahmungkur	Jl. S. Parman 38 A Semarang Telp. (024) 8412173 Fax. (024) 8444811
47	Kecamatan Tembalang	Jl. H. Kol Iman Soearto Tjakraoeda, SH No. 1 Semarang Telp. 024-7478588 Fax. 024-7479181
48	Kecamatan Candisari	Jl. Kesatrian 18 A Semarang Telp. 8504588 Fax. 8444747
49	Kecamatan Banyumanik	Jl. Prof Soedarto SH No.116 Semarang Telp.7473400 Fax. 7479182
50	Kecamatan Ngaliyan	Jl. Prof. DR. Hamka Semarang Telp. 7609732 – 7622390 Fax. 7609732
51	Kecamatan Gayamsari	Jl. Slamet Riyadi No. 8 Semarang Telp. 6716244 Fax. 6724086
52	Kecamatan Pedurungan	Jl. Brigjen Sudiarto No. 357 Semarang Tlp. 024-6715382 Fax. 024-6723080



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Semarang dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kota Semarang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kota Semarang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kota semarang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CALK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

pelaporan. Metode akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 terdapat perubahan yaitu :

- asset tak berwujud seperti software dilakukan penyusutan/amortisasi dengan garis lurus;
- prosentase kapitalisasi asset tetap pada gedung, bangunan, monumen, menambah umur ekonomis dari asset yang dikapitalisasi
- asset lainnya yang berasal dari asset tetap disajikan dengan akumulasi penyusutannya;
- asset tetap gedung, bangunan, jalan dan irigasi minimal sama dengan Rp. 10.000.000,00 diakui sebagai asset.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Semarang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (fair presentation) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlalu rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlalu tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

3.1.1 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut:

3.1.1.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Semarang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Semarang yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat / Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat /provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/ Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimanya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat//gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat / SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan. Masih diberlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Semarang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Pemerintah kota Semarang memiliki hak atas pendapatan;
- Pemerintah kota Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen;
- Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

- Pengakuan Pajak
 - Pembayaran tunai pajak yang disetor oleh wajib Pajak maksimal pada tanggal 10 jam 14.00 WIB pada hari kerja
 - Apabila terjadi pembayaran melebihi tanggal dan jam dimaksud, akan dikenakan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecuali tanggal 10 tersebut jatuh pada hari libur maka batas pembayaran maksimal yang tidak dikenakan denda adalah pada hari kerja berikutnya jam 14.00 WIB

Contoh :

Wajib Pajak membayar pajak yang jatuh tempo tanggal 10, namun karena tanggal 10 jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak dilakukan setelah tanggal 10 atau maksimal pada hari kerja berikutnya

- b. Pembayaran pajak setiap hari kerja maksimal jam 14.00 WIB, maka pendapatan diakui pada hari saat pembayaran tersebut. Apabila pembayaran melebihi jam 14.00 WIB pada hari tersebut, maka pendapatan diakui pada hari dan tanggal hari berikutnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah kota Semarang di rekening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah kota Semarang dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah kota Semarang. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Semarang. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan Perlakuan Transaksi Netto Pemerintah Kota Semarang dimana prinsip Transaksi Netto adalah melanggar ketentuan asas Bruto yang dikenal selama ini. Namun perlu disadari, bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah ini, harus diberlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan tampak sebagai salah satu penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka Laporan Arus Kas (yang dicatat menurut transaksi riil).

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

- b. Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto, antara lain adalah :

- a. Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kota Semarang) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.
- b. Upah pungut yang dipotong oleh penyetor (akibat kerja sama) misalnya Upah Pungut PPJU yang langsung dipotong oleh PLN. Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut). Mengingat bahwa uang yang diterima netto (dipotong upah pungut), maka upah pungut akan dicatat dalam pengeluaran pada pos belanja upah pungut (dengan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan)
- c. Komisi/ Potongan/ Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

Pemerintah Kota Semarang pada jasa Giro dan administrasi bank serta upah pungut PPJU telah dicatat secara bruto setelah diadakan MOU atas Pemerintah Kota Semarang dengan Bank Jateng dan Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Persero PLN Cabang Semarang.

Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara netto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan suatu keharusan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Semarang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah kota Semarang memiliki hak atas pendapatan;
- b. Pemerintah kota Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen;
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah,



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

Mekanisme Uang Jaminan Bongkar Reklame (UJB)

- a. Pencatatan UJB apabila Wajib Pajak wanprestasi maka UJB tersebut dipindahkan ke BUD pada rekening Pendapatan Lain-lain DPKAD
- b. Sedangkan beban pembongkaran atas wanprestasi akan dibiayai pada belanja kegiatan pada APBD memprediksikan jumlah anggaran berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dengan membentuk Tim Penyelesaian Pembongkaran Reklame.
- c. Tim dimaksud harus memonitor jatuh tempo dan jangka waktu sewa titik reklame yang sudah harus dibongkar. Waktu yang diberikan dari jatuh tempo adalah 2 bulan, apabila melebihi waktu yang telah ditentukan maka eksekusi pembongkaran dilaksanakan 2 minggu setelah waktu tenggang yang diberikan.
- d. Apabila anggaran untuk pembongkaran belum tersedia, akan tetapi terdapat reklame yang sudah melampaui batas waktu pembongkaran, maka tim wajib melakukan pembongkaran terhadap obyek reklame tersebut.

3.1.1.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban; dan
- b. terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah kota Semarang. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah pemerintah kota Semarang untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi asset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

3.1.1.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah kota Semarang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah kota Semarang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah kota Semarang, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3.1.1.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Semarang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kota Semarang adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Semarang.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kota Semarang adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

1. Perusda Percetakan
2. PD. BPR Bank Pasar
3. PD. BPR/BKK Cabang Semarang Tengah
4. Perusda Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
5. PT. Bank Jateng
6. PT. PRPP



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Semarang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Penggerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam penggerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan FS dan DED untuk satu sampai lima tahun dicatat sebagai *Aset Tetap* yaitu Konstruksi dalam Penggerjaan. Setelah tahun kelima FS dan DED tersebut belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset Tetap Lainnya. Kemudian FS dan DED tersebut dapat dihapuskan setelah adanya Persetujuan Penghapusan maka aset tersebut pindah ke *Aset Lainnya*, Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila SK Penghapusan telah terbit.

Apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan

Konstruksi dalam penggerjaan ini apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3.1.1.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Semarang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fiyah ketiga, utang perhitungan fiyah ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

1. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
2. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
2. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
4. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah kota Semarang menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah kota Semarang pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah kota Semarang yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Semarang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah kota Semarang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PKF) yang belum disetorkan kepada lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.1.1.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Semarang sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini DPKAD selaku BUD)

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kota Semarang sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3.2 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang antara lain sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), meliputi persediaan yang nilai satuanya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga-nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pencatatan untuk barang yang berasal dari anggaran belanja modal dengan nilai per unit di bawah Rp300.000,00 yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dicatat sendiri didalam inventaris non aset dan diakui sebagai beban persediaan, sehingga akan mengurangi ekuitas.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun Anggaran 2012

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
1 bulan 1 hari – 3 bulan	20%
3 bulan 1 hari – 6 bulan	40%
6 bulan 1 hari – 9 bulan	60%
9 bulan 1 – 1 tahun	80%
1 tahun ke atas	100%



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Aset Tetap

Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan asset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

d. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satunya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
2. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
3. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya pada peliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi. Contoh : pengecatan, perbaikan partisi.

Kapitalisasi belanja pemeliharaan terhadap tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak disertai dengan penambahan umur ekonomis sedangkan kapitalisasi belanja pemeliharaan terhadap aset tetap gedung dan bangunan disertai dengan penambahan umur ekonomis dengan kriteria dan tabel perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TABEL MASA MANFAAT DAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
A. Bangunan Gedung			
a. Permanen	50	<25%	0
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja		25%≤ sd <50%	5
2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal		50%≤ sd <75%	10
		≥75%	15
b. Semi Permanen	25	<25%	0
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja		25%≤ sd <50%	1
2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal		50%≤ sd <75%	3
		≥75%	7
c. Darurat	10	<25%	0
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja		25%≤ sd <50%	1
2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal		50%≤ sd <75%	2
		≥75%	5
d. Bangunan Menara	20	<25%	0
		25%≤ sd <50%	1
		50%≤ sd <75%	3
		≥75%	4
B. Monumen	20	<25%	0
1. Bangunan Bersejarah		25%≤ sd <50%	1
2. Tugu Peringatan		50%≤ sd <75%	3
3. Candi		≥75%	4
4. Monumen/Bangunan Bersejarah			
5. Tugu Titik Kontrol Pasti			
6. Rambu-rambu			
7. Rambu-rambu Lalu Lintas Udara			

e. Penyusutan Aset Tetap dan Aset tidak berwujud

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Aset dianggap telah berumur 1 bulan jika telah berumur lebih dari 15 hari sejak tanggal perolehan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Semarang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Mengingat penghitungan penyusutan telah didukung dengan sistem yang memadai maka penghitungan penyusutan aset pada tahun 2014 dilaksanakan secara bulanan dengan mengacu pada tanggal perolehan, Bila tanggal perolehan kurang dari 15 hari sudah dihitung biaya penyusutannya satu bulan, sedangkan lebih dari 15 hari maka belum diperhitungkan satu bulan. Hal ini berlaku baik untuk asset tetap maupun asset tidak berwujud.

Penyusutan asset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan asset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus :

$$\text{Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat asset tidak berwujud adalah 5 tahun.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen ;

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- d. Untuk aset sumbangan / hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok asset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan asset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota Nomor 030/341 Tahun 2009 tentang Penetapan Kode Barang Dan Standar Umur Ekonomis Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (terlampir).

f. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

4.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, demikian pula bagi Pemerintah Kota Semarang, pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari propinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan tersebut diatas dalam tahun anggaran 2014 serta realisasi tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

4.1.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah :	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1. Pendapatan Asli Daerah.	891,280,705,000.00	1,138,367,228,493.00	127.72%	247,086,523,493.00	925,919,310,506.00
2. Pendapatan Transfer	1,895,803,592,000.00	1,958,242,860,296.00	103.29%	62,439,268,296.00	1,787,969,405,733.00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.	78,425,281,000.00	69,405,952,776.00	88.50%	(9,019,328,224.00)	82,682,010,621.00
Jumlah	2,865,509,578,000.00	3,166,016,041,565.00	110.49%	300,506,463,565.00	2,796,570,726,860

Gambaran dari tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2014 sebesar Rp2.865.509.578.000,00 terealisasi sebesar Rp3.166.016.041.565,00 atau 110,49%. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2013 Rp2.796.570.726.860,00 hal ini mengandung arti bahwa pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp369.445.314.705,00. Kenaikan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2014 dari anggaran terutama terjadi pada Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Realisasi masing-masing kelompok pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tahun anggaran 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah :	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
a. Pendapatan Pajak Daerah	642,700,000,000.00	791,509,586,089.00	123.15%	148,809,586,089.00	683,708,489,950.00
b. Pendapatan Retribusi Daerah	104,484,420,000.00	110,491,080,293.00	105.75%	6,006,660,293.00	102,785,108,993.00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7,989,867,000.00	8,036,099,560.00	100.58%	46,232,560.00	7,650,778,888.00
d. Lain-lain PAD yang Sah	136,106,418,000.00	228,330,462,551.00	167.76%	92,224,044,551.00	131,774,932,675.00
Jumlah	891,280,705,000.00	1,138,367,228,493.00	127.72%	247,086,523,493.00	925,919,310,506.00

Dari tabel di atas menunjukkan Realisasi masing-masing jenis PAD tahun anggaran 2014 dan 2013 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang sifatnya memaksa dan pendapatan ini tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2014 serta realisasi tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah :	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	
				Rp	Rp
1 Pajak Hotel	44.000.000.000,00	50.589.695.464,00	114,98%	6.589.695.464,00	44.674.905.002,00
2 Pajak Restoran	45.000.000.000,00	62.752.745.542,00	139,45%	17.752.745.542,00	48.387.960.623,00
3 Pajak Hiburan	11.250.000.000,00	14.670.566.132,00	130,41%	3.420.566.132,00	12.405.484.804,00
4 Pajak Reklame	20.812.500.000,00	22.505.204.838,00	108,13%	1.692.704.838,00	22.921.879.365,00
5 Pajak Penerangan Jalan	136.687.500.000,00	163.497.269.621,00	119,61%	26.809.769.621,00	137.411.660.918,00
6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	800.000.000,00	25.199.840,00	3,15%	(774.800.160,00)	1.367.379.075,00
7 Pajak Parkir	5.600.000.000,00	7.508.343.122,00	134,08%	1.908.343.122,00	5.658.633.242,00
8 Pajak Air Bawah Tanah	4.500.000.000,00	4.873.574.208,00	108,30%	373.574.208,00	4.679.097.924,00
9 Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	-	0,00%	(50.000.000,00)	-
10 Pajak BPHTB	188.000.000.000,00	254.085.540.258,00	135,15%	66.085.540.258,00	220.909.156.797,00
11 Pajak Bumi dan Bangunan	186.000.000.000,00	211.001.447.064,00	113,44%	25.001.447.064,00	185.292.332.200,00
Jumlah	642.700.000.000,00	791.509.586.089,00	123,15%	148.809.586.089,00	683.708.489.950,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2014 sebesar Rp642.700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp791.509.586.089,00 atau 123,15%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp683.708.489.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp107.801.096.139,00. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Pembayaran pajak daerah ada 2 metode yaitu metode Self Assesment dan Official Assesment, dimana Self Assesment memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Self Assesment terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB. Sedangkan pada Official Assesment, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Official Assesment meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah serta Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pajak Sarang Burung Walet belum ada realisasinya yang disebabkan sulitnya menemui wajib pajak (Pemilik) sehingga tidak pernah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah(SPTDT) Pajak Sarang Burung Walet. Akan tetapi tetap dianggarkan mengingat adanya potensi perkembangan bisnis sarang burung walet di Kota Semarang.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah dimana besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pendapatan retribusi terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh beberapa SKPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kota Semarang tahun 2014 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur lebih lanjut pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kota Semarang. Retribusi ini dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	
				Rp	Rp
1 Jasa Umum	45,522,617,000.00	52,705,593,979.00	115,78%	7,182,976,979.00	53,902,160,860.00
2 Jasa Usaha	35,124,089,000.00	26,486,232,114.00	75,41%	(8,637,856,886.00)	21,531,562,533.00
3 Perijinan Tertentu	23,837,714,000.00	31,299,254,200.00	131,30%	7,461,540,200.00	27,351,385,600.00
Jumlah Retribusi Daerah	104,484,420,000.00	110,491,080,293.00	105,75%	6,006,660,293.00	102,785,108,993.00

Data tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2014 sebesar Rp104.484.420.000,00 terealisasi sebesar Rp110.491.080.293,00 atau 105,75%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp102.785.108.993,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.705.971.300,00.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan dan Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Retribusi Jasa Umum

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	
				Rp	Rp
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	7,403,912,000.00	12,283,231,500.00	165,90%	4,879,319,500.00	8,250,886,050.00
2 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	55,945,000.00	64,682,500.00	115,62%	8,737,500.00	58,512,500.00
3 Retribusi Reklame			#DIV/0!		6,675,978,460,00
4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3,700,000,000.00	2,789,089,500.00	75,38%	(910,910,500.00)	2,601,911,700,00
5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	5,879,655,000.00	6,468,913,470.00	110,02%	589,258,470.00	6,142,773,030.00
6 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	11,772,150,000.00	13,610,750,000.00	115,62%	1,838,600,000.00	12,648,398,000.00
7 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	753,155,000.00	1,156,621,000.00	153,57%	403,466,000.00	2,854,896,000.00
8 Retribusi Pelayanan Pasar	13,757,871,000.00	13,824,452,709.00	100,48%	66,581,709.00	12,414,897,320,00
9 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	750,000,000.00	842,654,000.00	112,35%	92,654,000.00	771,062,000.00
10 Retribusi Penggantian Biaya Cek Peta	1,300,000,000.00	1,461,821,300.00	112,45%	161,821,300.00	1,482,845,800.00
11 Retribusi Penyedian dan atau Penyedotan Kakus	149,929,000.00	203,378,000.00	135,65%	53,449,000.00	
Jumlah Retribusi Jasa Umum	45,522,617,000.00	52,705,593,979.00	115,78%	7,182,976,979.00	53,902,160,860.00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Data pada tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum tahun anggaran 2014 sebesar Rp45.522.617.000,00 terealisasi sebesar Rp52.705.593.979,00 atau 115,78%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp53.902.160.860,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.196.566.881,00. Sedangkan yang tidak mencapai target anggaran tahun 2013 adalah jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Solusi dan upaya yang dilakukan adalah dengan mencari titik-titik parkir baru serta mengefektifkan realisasi titik parkir yang sudah ada, melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir, dan menambah personil sebagai pemungut retribusi parkir.

b) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan retribusi Jasa Usaha merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Retribusi Jasa Usaha dirinci sebagai berikut:

Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	21.459.102.405,00	15.735.082.557,00	73,33%	(5.724.019.848,00)	11.804.068.250,00
Retribusi Terminal	882.300.000,00	885.551.000,00	100,37%	3.251.000,00	963.826.000,00
Retribusi Tempat Parkir Khusus	874.695.000,00	911.147.500,00	104,17%	36.452.500,00	872.445.000,00
Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus			0,00%		228.405.800,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.366.894.000,00	4.183.953.850,00	95,81%	(182.940.150,00)	3.917.366.500,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/vila	1.054.732.595,00	1.178.813.000,00	111,76%	124.080.405,00	1.076.734.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	30.375.000,00	36.893.795,00	121,46%	6.518.795,00	32.562.080,00
Kerjasama Bengkok Pujasera Ngaliyan	19.044.000,00	38.088.000,00	200,00%	19.044.000,00	34.625.000,00
Kerjasama Lantai Dasar / Pertokoan Simpang Lima	191.239.000,00	155.381.750,00	81,25%	(35.857.250,00)	223.112.000,00
Kerjasama PT Narpati	580.000.000,00	-	0,00%	(580.000.000,00)	580.000.000,00
Sewa Aset Tanah	385.990.000,00	969.702.328,00	251,22%	583.712.328,00	1.453.460.228,00
Sewa Lahan Jembatan Ciputra - Anggrek	15.691.000,00	18.986.302,00	121,00%	3.295.302,00	17.260.275,00
Sewa Lahan Jembatan Ciputra - Ahmad Dahlan	142.381.000,00	160.182.000,00	112,50%	17.801.000,00	142.383.000,00
Sewa Lahan Sam Poo Kong	34.875.000,00	132.668.032,00	380,41%	97.793.032,00	24.494.400,00
Sewa Lahan Toko Roti Puri Mas	26.620.000,00	29.282.000,00	110,00%	2.662.000,00	50.820.000,00
SPBU Pandanaran	3.353.900.000,00	-	0,00%	(3.353.900.000,00)	110.000.000,00
Sewa Lapangan Golf	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00%	-	-
Retribusi Sewa Lapangan Simpang Lima	506.250.000,00	850.500.000,00	168,00%	344.250.000,00	-
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	35.124.089.000,00	26.486.232.114,00	75,41%	(8.637.856.886,00)	21.531.562.533,00

Memperhatikan data tabel di atas, menunjukkan bahwa anggaran penerimaan jasa usaha sebesar Rp35.124.089.000,00 realisasi sebesar Rp26.486.232.114,00 atau 75,41%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp21.531.562.533,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.954.669.581,00. Yang tidak mencapai target anggaran Tahun 2014 antara lain pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Penyebab tidak tercapainya Retribusi Jasa Usaha antara lain sebagai berikut.

- (1) Kerjasama pengelolaan SPBU Pandanaran sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, sedangkan denda terhadap keterlambatan Rp.3.353.900.000,- sampai dengan selesainya perjanjian belum dipenuhi sehingga masuk menjadi piutang.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- (2) Kerjasama dengan PT.Narpati tidak mencapai target dan capaiannya 0% dikarenakan sampai dengan saat ini belum memenuhi kewajiban membayar retribusi.

Solusi yang sudah dilakukan atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan proses hukum sampai dengan tingkat Kasasi dan saat ini telah ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Sesuai putusan MA tersebut dimenangkan oleh Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Pemerintah Kota Semarang telah melakukan penagihan sebanyak 2 (dua) kali, tapi sampai dengan saat ini PT Narpati belum melakukan pembayaran.

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari :

- (1) Penggunaan Gedung Pertemuan Balikota;
- (2) Penggunaan Gedung Taman Budaya Raden Saleh;
- (3) Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati;
- (4) Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang;
- (5) Penggunaan Gedung Juang;
- (6) Penggunaan Ruang/ Toko di Lapangan Citarum;
- (7) Penggunaan Tempat Penginapan Wisma Cibubur;
- (8) Penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda;
- (9) Penggunaan Tempat Penginapan di Kampung Wisata Taman Lele;
- (10) Penggunaan Mobil Derek;
- (11) Penggunaan Mobil Jenazah;
- (12) Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran;
- (13) Penggunaan Alat Berat;
- (14) Sewa Rumah milik Pemda;
- (15) Sewa Lahan;
- (16) Penggunaan Peralatan Laboratorium Lapangan;
- (17) Penggunaan Peralatan Penelitian Laboratorium;
- (18) Penggunaan Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo;

c) Retribusi Perijinan Tertentu

Pendapatan retribusi perijinan tertentu merupakan pendapatan yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber PAD dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Retribusi Perijinan Tertentu	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
Retribusi Izin Persewaan Alat Berat	177,678,000.00	147,825,000.00	83.20%	(29,853,000.00)	163,145,000.00
Retribusi Izin Trayek	120,690,000.00	111,525,000.00	92.41%	(9,165,000.00)	91,700,000.00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	17,280,888,000.00	23,696,254,200.00	137.12%	6,415,366,200.00	21,070,239,500.00
Retribusi Izin Gangguan atau Keramaian	5,558,458,000.00	5,712,478,000.00	102.77%	154,020,000.00	6,026,301,100.00
Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	700,000,000.00	1,631,172,000.00	233.02%	931,172,000.00	6,026,301,100.00
Jumlah Retribusi Perijinan Tertentu	23,837,714,000.00	31,299,254,200.00	131.30%	7,461,540,200.00	27,351,385,600.00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Data tabel di atas menunjukkan Anggaran Penerimaan retribusi perijinan tertentu tahun anggaran 2014 sebesar Rp23.837.714.000,00 terealisasi sebesar Rp31.299.254.200,00 atau 131,30%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp27.351.385.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.947.868.600,00. Peningkatan sektor PAD ini karena terdapat mata anggaran baru yg berupa retribusi memperkerjakan tenaga asing.

Realisasi retribusi Ijin Trayek mencapai Rp111.525.000,00 dari anggaran Rp120.690.000,00 atau sebesar 92,41 %. Penyebab tidak tercapainya target anggaran tersebut karena pelaksanaan ijin operasional taksi dilakukan 5(lima) tahun sekali.

Sedangkan untuk retribusi persewaan alat berat dari anggaran Rp177.678.000,00 hanya tercapai Rp147.825.000,00 atau sebesar 83,20% dari anggaran karena banyak kontraktor yang memilih memakai alat berat dari pihak swasta daripada milik pemerintah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatannya diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi tahun anggaran 2014 dan 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Perusda RPH dan BPH	40.150.000,00	40.263.443,00	100,28%	113.443,00	40.024.700,00
2 Perusda Percetakan	157.178.000,00	186.582.943,00	118,71%	29.404.943,00	181.801.835,00
3 Perusda Bank Pasar	385.769.000,00	191.206.550,00	49,57%	(194.562.450,00)	330.515.110,00
4 Bank JaTeng Cabang Semarang	6.000.000.000,00	6.683.452.338,00	111,39%	683.452.338,00	6.049.636.864,00
5 Perusahaan daerah BPR/BKK	1.406.770.000,00	934.594.286,00	66,44%	(472.175.714,00)	1.048.800.379,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.989.867.000,00	8.036.099.560,00	100,58%	46.232.560,00	7.650.778.888,00

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2014 sebesar Rp7.989.867.000,00 terealisasi sebesar Rp8.036.099.560,00 atau 100,58%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp7.650.778.888,00 mengalami kenaikan sebesar Rp385.320.672,00. Kenaikan ini sesuai dengan laba yang diperoleh, sedangkan kurangnya pencapaian target pada PD BPR Bank Pasar karena :

- Adanya biaya jasa pengabdian direktur yang harus dibayarkan secara langsung dan tidak boleh diambilkan dari dana kesejahteraan pegawai.
- Adanya biaya sistem yang harus dibayar langsung oleh BPR Bank Pasar dan tidak boleh disusutkan.

Sedangkan untuk Perusda BPR/BKK juga kurang mencapai target dikarenakan adanya persaingan pasar yang semakin ketat. Solusi yang diupayakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah meminilasir suku bunga lebih rendah sehingga dapat bersaing dengan lembaga perkreditan yang lain.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan dari 6 Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kota Semarang yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Dishubkominfo, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian, serta Dinas Kelautan & Perikanan.

Pendapatan Lain – lain PAD Yang Sah untuk periode tahun anggaran 2014 dan tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

Lain-Lain PAD Yang Sah	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
Pendapatan BLU RSUD	82.000.000.000,00	96.898.317.951,00	118,17%	14.898.317.951,00	50.648.925.346,00
Fasilitas Umum	219.313.000,00	245.084.775,00	111,75%	25.771.775,00	245.617.850,00
Pelepasan Hak Atas Tanah	100.000.000,00	4.247.676.530,00	4247,68%	4.147.676.530,00	96.698.000,00
Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor yang tidak terpakai	56.250.000,00	795.290.500,00	1413,85%	739.040.500,00	1.435.318.450,00
Jasa Giro Kas Daerah	5.000.000.000,00	23.279.213.592,00	465,58%	18.279.213.592,00	13.011.336.326,00
Jasa Giro Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Bunga Deposito	17.500.000.000,00	53.782.838.186,00	307,33%	36.282.838.186,00	44.781.020.977,00
Karcis Parkir	-	-	-	-	-
Plat Ijin Reklame	-	6.856.000,00	#DIV/0!	6.856.000,00	36.471.500,00
Bunga Bank Dana Bergulir	-	83.345.928,00	-	83.345.928,00	68.330.929,00
Lain lain DPKAD	-	16.756.132.476,00	-	16.756.132.476,00	7.608.536.756,00
Penjualan Hasil Pertanian	18.000.000,00	28.136.800,00	156,32%	10.136.800,00	24.416.600,00
Penjualan Hasil Peternakan	445.500.000,00	740.170.894,00	166,14%	294.670.894,00	283.971.563,00
Penjualan Hasil Perikanan	15.240.000,00	15.810.500,00	103,74%	570.500,00	13.787.000,00
Penerimaan Lain lain	-	-	-	-	-
Penerimaan Lain lain (Golf Gombel Semarang)	-	-	#DIV/0!	-	1.182.449.664,00
Sumbangan Pihak III	-	-	-	-	-
Penerimaan Lain lain BLU	16.425.048.000,00	16.465.463.419,00	100,25%	40.415.419,00	12.338.051.714,00
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	14.327.067.000,00	14.986.125.000,00	104,60%	659.058.000,00	12.338.051.714,00
Jumlah Lain lain PAD yang Sah	136.106.418.000,00	228.330.462.551,00	167,76%	92.224.044.551,00	131.774.932.675,00

Data tabel di atas menunjukkan Anggaran lain-lain PAD yang sah tahun anggaran 2014 sebesar Rp136.106.418.000,00 terealisasi sebesar Rp228.330.462.551,00 atau 167,76%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp131.774.932.675,00 mengalami kenaikan sebesar Rp96.555.529.876,00. Pendapatan dari BLUD RSUD yang dicatat tidak termasuk pendapatan yang berasal dari Jamkesmaskot sebesar Rp11.964.432.783,00 karena merupakan belanja Dinas Kesehatan yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan (merupakan transaksi reciprocal antar SKPD).

Pada Tahun Anggaran 2013 pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api lintas Pekalongan – Semarang yang terletak di Kecamatan Tugu dan Kecamatan Semarang Utara belum terealisasi karena adanya perbedaan jumlah bidang asset Pemerintah Kota Semarang sehingga harus dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang. Namun pada tahun anggaran 2014 telah dilepas kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan telah terealisasi sebesar Rp4.247.676.530,00 serta ganti rugi tersebut telah disetor ke Kas Daerah Kota Semarang. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 030/762 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pelepasan Hak



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Atas Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang Yang Terletak di Kecamatan Tugu dan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Yang Terkena Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Pekalongan-Semarang Dengan Cara Ganti Rugi.

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah terdapat Pendapatan Lain-lain DPKAD sebesar Rp16.756.132.476,00. Pos ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pengembalian hibah Rp5.000.000,00
- b) Pengembalian Bantuan Panitia Pembangunan TPQ Rp10.000.000,00
- c) Kapitasi / BPJS Rp2.031.417.000,00
- d) Pengembalian Dana BOS Rp2.615.000,00
- e) Denda Keterlambatan Rp3.130.741.900,00
- f) Pengembalian Sisa Belanja Rp5.739.769.206,00
- g) Kelebihan HPS Rp6.455.000,00
- h) Koreksi kurang setor 2014 Rp80,00
- i) Koreksi kurang setor 2013 Rp200.000,00
- j) Temuan BPK Rp306.223.849,00
- k) Temuan Inspektorat Rp155.295.645,00
- l) Pengembalian Asuransi DPRD Rp145.000.000,00
- m) Potongan hutang Kasda Rp185.284.172,00
- n) Jasa Giro Rp147.394,00
- o) Jaminan Rehab Rp37.508.850,00
- p) Pencairan bank garansi Rp1.075.472.552,00
- q) Pengembalian sitaan kejaksaan Rp2.804.675.380,00
- r) B. transfer Kapitasi Rp3.841.790,00
- s) Denda keterlambatan sewa asset Rp66.256.460,00
- t) Pengembalian pajak Rp639.998,00
- u) PP UJB dan UJPB yang menjadi PAD Rp1.044.588.200,00

b. Pendapatan Transfer

2) Pendapatan Transfer

	Anggaran 2014 Rp	Realisasi 2014 Rp	Rasio %	Lebih/Kurang		Realisasi 2013 Rp
				Lebih	Kurang	
1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.266.631.093.000,00	1.274.767.390.279,00	100,64%	8.136.297.279,00	-	1.191.097.523.757,00
2 Transfer Pemerintah Pusat Lainya	283.917.499.000,00	283.917.499.000,00	100,00%	-	-	266.894.650.000,00
3 Transfer Pemerintah Provinsi	345.255.000.000,00	399.557.971.017,00	115,73%	54.302.971.017,00	-	329.977.231.976,00
Jumlah Pendapatan Langsung	1.895.803.592.000,00	1.958.242.860.296,00	103,29%	62.439.268.296,00	-	1.787.969.405.733,00

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah realisasi Pendapatan Transfer untuk periode tahun anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Semarang untuk anggaran dan realisasi pada periode 2014 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Dana Bagi Hasil Pajak	120,850,000,000.00	137,759,893,153.00	113.99%	16,909,893,153.00	120,223,608,244.00
2 Dana Bagi Hasil bukan pajak/SDA	2,059,000,000.00	3,031,059,126.00	147.21%	972,059,126.00	1,878,324,513.00
3 Dana Alokasi Umum	1,104,739,473,000.00	1,104,739,473,000.00	100.00%	-	1,054,002,569,000.00
4 Dana Alokasi Khusus	38,982,620,000.00	29,236,965,000.00	75.00%	(9,745,655,000.00)	14,993,022,000.00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1,266,631,093,000.00	1,274,767,390,279.00	100.64%	8,136,297,279.00	1,191,097,523,757.00

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebagaimana nampak pada tabel anggaran sebesar Rp1.266.631.093.000,00 dibanding realisasi sebesar Rp1.274.767.390.279,00 atau 100,64%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp83.669.866.522,00.

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

a) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kota Semarang yang berupa bagi hasil dari PBB, Pajak Penghasilan OPDN, PPH pasal 25/29, dan bagi hasil cukai tembakau. Untuk periode tahun anggaran 2014 dan 2013, Dana Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	11,950,000,000.00	18,569,293,102.00	155.39%	6,619,293,102.00	18,596,870,546.00
2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (Pph) OPDN dan PPH Pasal 25/29	94,000,000,000.00	99,186,447,967.00	105.52%	5,186,447,967.00	85,000,241,717.00
3 Bagi Hasil dari PPH Pasal 25/29	9,000,000,000.00	13,562,259,287.00	150.69%	4,562,259,287.00	9,361,450,765.00
4 Bagi Hasil Cukai Tembakau	5,900,000,000.00	6,441,892,797.00	109.18%	541,892,797.00	7,265,045,216.00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	120,850,000,000.00	137,759,893,153.00	113.99%	16,909,893,153.00	120,223,608,244.00

b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagi hasil iuran pengusahaan hutan dan eksplorasi dan eksploitasi (royalti) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Semarang. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode Tahun Anggaran 2014 dan 2013, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	-	#DIV/0!	-	-
2 Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Exploitasi (Royalti)	2,059,000,000.00	3,031,059,126.00	147.21%	972,059,126.00	1,878,324,513.00
Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2,059,000,000.00	3,031,059,126.00	147.21%	972,059,126.00	1,878,324,513.00

c) Dana Alokasi Umum

Pendapatan Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode tahun anggaran 2014, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
	1.104.739.473.000,00	1.104.739.473.000,00	100,00%	-	1.054.002.569.000,00
1 Dana Alokasi Umum					
Jumlah	1.104.739.473.000,00	1.104.739.473.000,00	100,00%	-	1.054.002.569.000,00

Sesuai Perpres nomor 6 tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011 yang kemudian dikoreksi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.07/2011 bahwa penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat ditransfer dan ditampung dalam rekening giro BPD Jateng a.n Kas Daerah Kota Semarang. DAU Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1.104.739.473.000,00 realisasi Rp1.104.739.473.000,00 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp50.736.904.000,00.

d) Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan transfer pusat-dana perimbangan yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan juklak dan juknis. DAK untuk tahun anggaran 2014 dan 2013 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
	38.982.620.000,00	29.236.965.000,00	75,00%	9.745.655.000,00	14.993.022.000,00
1 Dana Alokasi Khusus					
Jumlah	38.982.620.000,00	29.236.965.000,00	75,00%	9.745.655.000,00	14.993.022.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2014 sebesar Rp38.982.620.000,00 terealisasi sebesar Rp29.236.965.000,00 atau 75,00% dari anggarannya. Dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp14.993.022.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.243.943.000,00.

Adapun rincian Dana Alokasi Khusus sebagai berikut:

NO	BIDANG	PAGU PUSAT (100%)	PAGU TAHAP I & II (75%)	
		(Rp)	(Rp)	
1	Pendidikan SD	15.261.070.000	10.682.749.000	70,00%
2	Pendidikan SMP	11.170.850.000	6.003.516.000	53,74%
3	Kesehatan Pelayanan Farmasi	4.811.660.000	4.811.660.000	100,00%
4	Infrastruktur Air Minum	2.759.120.000	2.759.120.000	100,00%
5	Lingkungan Hidup	1.516.480.000	1.516.480.000	100,00%
6	Kesehatan Transportasi Darat	525.450.000	525.450.000	100,00%
7	Pasar	2.937.990.000	2.937.990.000	100,00%
	JUMLAH	38.982.620.000	29.236.965.000	



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah berupa dana penyesuaian yang terdiri atas tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan profesi guru PNSD untuk periode TA 2014 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Dana Penyesuaian	283,917,499,000,00	283,917,499,000,00	100.00%	-	266,894,650,000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	283,917,499,000,00	283,917,499,000,00	100.00%	-	266,894,650,000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2014 sebesar Rp283.917.499.000,00 terealisasi sebesar Rp283.917.499.000,00 atau 100%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Prof Guru PNSD	283,917,499,000,00	283,917,499,000,00	100.00%	-	266,894,650,000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	283,917,499,000,00	283,917,499,000,00	100.00%	-	266,894,650,000,00

3) Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer - Pemerintah Provinsi dialokasikan pada Pemerintah Kota Semarang meliputi dana bantuan untuk pembangunan. Bantuan keuangan dari Gubernur tersebut, berdasarkan SKO Gubernur Jawa Tengah, realisasi pada tahun 2014 dan 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Dana Bagi Hasil Pajak	345,255,000,000,00	399,557,971,017,00	115.73%	54,302,971,017,00	329,977,231,976,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	345,255,000,000,00	399,557,971,017,00	115.73%	54,302,971,017,00	329,977,231,976,00

Data tabel di atas menunjukkan target anggaran penerimaan transfer pemerintah provinsi tahun anggaran 2014 sebesar Rp345.255.000.000,00 terealisasi sebesar Rp399.557.971.017,00 atau 115,73%. Dibanding realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp329.977.231.976,00 mengalami kenaikan sebesar Rp69.580.739.041,00.

Pendapatan Transfer ini dapat dirinci lebih lanjut pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	110,000,000,000.00	128,647,152,000.00	116.95%	18,647,152,000.00	105,092,447,396.00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	139,000,000,000.00	139,354,094,076.00	100.25%	354,094,076.00	138,691,775,956.00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	140,000,000.00	165,592,525.00	118.28%	25,592,525.00	159,569,099.00
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	87,315,000,000.00	107,170,327,744.00	122.74%	19,855,327,744.00	86,033,439,525.00
Pajak Rokok	8,800,000,000.00	24,220,804,672.00	275.24%	15,420,804,672.00	
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	345,255,000,000.00	399,557,971,017.00	115.73%	54,302,971,017.00	329,977,231,976.00

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Tk 1	78,425,281,000.00	69,405,952,776.00	88.50%	(9,019,328,224.00)	82,682,010,621.00
Jumlah Pendapatan Lainnya	78,425,281,000.00	69,405,952,776.00	88.50%	(9,019,328,224.00)	82,682,010,621.00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan lain – lain yang sah tahun anggaran 2014 sebesar Rp78.425.281.000,00 terealisasi sebesar Rp69.405.952.776,00 atau 88,50%. Dibanding realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp82.682.010.621,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.276.057.845,00.

4.1.2 BELANJA

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2014 serta Realisasi tahun anggaran 2013 diuraikan pada tabel sebagai berikut:

4.1.2.1 Belanja

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Belanja Operasi	2,404,608,902,878.00	2,155,474,360,151.00	89.64%	(249,134,542,727.00)	1,881,672,488,078.00
2 Belanja Modal	1,310,439,327,122.00	800,181,230,907.00	61.06%	(510,258,096,215.00)	591,011,412,262.00
3 Belanja Tak Terduga	22,461,480,000.00	1,777,048,020.00	7.91%	(20,684,431,980.00)	806,709,097.00
Jumlah Belanja	3,737,509,710,000.00	2,957,432,639,078.00	79.13%	(780,077,070,922.00)	2,473,490,609,437.00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2014 sebesar Rp3.737.509.710.000,00 terealisasi sebesar Rp2.957.432.639.078,00 atau 79,13%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2013 sebesar Rp2.473.490.609.437,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp483.942.029.641,00 lebih lanjut dirinci sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2014 dan tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Belanja Pegawai	1,408,794,186,232.00	1,306,934,922,575.00	92.77%	(101,859,263,657.00)	1,290,880,031,132.00
2 Belanja Barang	928,942,801,796.00	727,399,487,313.00	78.30%	(201,543,314,483.00)	545,272,678,680.00
3 Bunga	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00%	-	378,295,400.00
4 Subsidi	-	-	-	-	-
5 Hibah	57,956,904,850.00	113,718,345,363.00	196.21%	55,761,440,513.00	41,621,315,866.00
6 Bantuan Sosial	7,794,905,000.00	6,301,500,000.00	80.84%	(1,493,405,000.00)	2,731,600,000.00
7 Bantuan Keuangan	870,105,000.00	870,104,900.00	100.00%	(100.00)	788,567,000.00
Jumlah Belanja Operasi	2,404,608,902,878.00	2,155,474,360,151.00	89.64%	(249,134,542,727.00)	1,881,672,488,078.00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja operasi tahun anggaran 2014 sebesar Rp2.404.608.902.878,00 terealisasi sebesar Rp2.155.474.360.151,00 atau 89,64%. Realisasi tahun anggaran 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp1.881.672.488.078,00 mengalami kenaikan sebesar Rp273.801.872.07,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan pimpinan & anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS dan uang lembur. Anggaran dan realisasi belanja ini tahun anggaran 2014 serta realisasi tahun anggaran 2013 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Belanja Pegawai	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Dinas Pendidikan	827.032.344.500,00	761.966.146.627,00	92,13%	(65.066.197.873,00)	742.807.581.134,00
2 Dinas Kesehatan Kota	63.317.224.000,00	60.661.477.395,00	95,81%	(2.655.746.605,00)	58.591.981.033,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah	25.072.170.000,00	23.893.949.945,00	95,30%	(1.178.220.055,00)	45.144.150.729,00
4 Dinas Bina Marga	13.128.564.000,00	11.307.354.554,00	86,13%	(1.821.209.446,00)	9.654.619.466,00
5 Dinas PSDA dan ESDM	14.035.794.000,00	12.069.842.227,00	85,99%	(1.965.951.773,00)	9.659.785.253,00
6 Dinas Kebakaran	8.197.456.000,00	7.792.441.120,00	95,06%	(405.014.880,00)	7.558.802.163,00
7 Dinas Tata Kota dan Perumahan	16.314.588.000,00	15.377.772.035,00	94,26%	(936.815.965,00)	13.063.009.743,00
8 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	6.641.049.000,00	6.174.828.934,00	92,98%	(466.220.066,00)	6.366.578.413,00
9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)	7.690.469.000,00	7.222.261.626,00	93,91%	(468.207.374,00)	8.175.793.497,00
10 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.580.974.000,00	23.770.876.579,00	96,70%	(810.097.421,00)	20.747.448.679,00
11 Badan Lingkungan Hidup (BLH)	4.223.575.000,00	4.094.425.120,00	96,94%	(129.149.880,00)	4.452.025.278,00
12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	14.330.157.782,00	13.392.248.029,00	93,45%	(937.909.753,00)	12.879.270.012,00
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8.224.010.000,00	7.781.265.965,00	94,62%	(442.744.035,00)	7.801.197.581,00
14 Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	9.730.781.500,00	9.370.705.084,00	96,30%	(360.076.416,00)	11.396.297.995,00
15 Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	9.092.555.000,00	8.626.129.815,00	94,87%	(466.425.185,00)	9.278.469.075,00
16 Badan Penugasan Bencana Daerah (BPPD)	3.663.778.000,00	3.332.368.143,00	90,95%	(331.409.857,00)	3.835.949.938,00
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.511.860.000,00	6.151.775.887,00	94,47%	(360.084.113,00)	7.010.386.200,00
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.059.290.000,00	4.792.889.802,00	94,73%	(266.400.198,00)	5.336.529.159,00
19 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)	5.476.114.000,00	5.219.731.606,00	95,32%	(256.382.394,00)	4.997.344.863,00
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.910.699.000,00	8.565.404.673,00	96,12%	(345.294.327,00)	9.462.109.360,00
21 Badan Kesbang, Politik dan Linmas	3.758.071.500,00	3.603.726.868,00	95,89%	(154.344.632,00)	3.904.717.274,00
22 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	15.711.218.000,00	15.114.490.288,00	96,20%	(596.727.712,00)	15.373.628.279,00
23 DPRD	15.152.654.000,00	12.969.195.624,00	85,59%	(2.183.458.376,00)	11.791.214.048,00
24 Walikota dan Wakil Walikota	1.483.728.000,00	1.213.058.336,00	81,76%	(270.669.664,00)	908.952.916,00
25 Sekretariat Daerah	34.220.789.750,00	31.630.670.673,00	92,43%	(2.590.119.077,00)	29.705.580.659,00
26 Sekretariat DPRD	4.527.974.000,00	4.027.396.366,00	88,94%	(500.577.634,00)	3.776.430.910,00
27 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	83.719.605.850,00	75.850.143.997,00	90,60%	(7.869.461.853,00)	64.278.468.311,00
28 Inspektorat	6.832.935.000,00	6.169.216.345,00	90,29%	(663.718.655,00)	5.765.053.015,00
29 Kec. Semarang Selatan	7.623.051.000,00	7.323.831.304,00	96,07%	(299.219.696,00)	7.469.196.086,00
30 Kec. Semarang Utara	6.263.402.750,00	6.021.465.576,00	96,14%	(241.937.174,00)	6.229.206.166,00
31 Kec. Semarang Barat	9.050.246.500,00	8.811.637.502,00	97,36%	(238.608.998,00)	9.103.733.460,00
32 Kec. Semarang Timur	7.151.543.000,00	6.845.502.868,00	95,72%	(306.040.132,00)	6.560.756.623,00
33 Kec. Semarang Tengah	9.606.430.500,00	8.907.251.742,00	92,72%	(699.178.758,00)	9.184.318.030,00
34 Kec. Gunung Pati	8.552.923.000,00	8.051.196.928,00	94,13%	(501.726.072,00)	7.659.682.028,00
35 Kec. Tugu	4.880.464.500,00	4.541.483.732,00	93,05%	(338.980.768,00)	4.364.322.836,00
36 Kec. Mijen	6.596.168.000,00	6.365.738.303,00	96,51%	(230.429.697,00)	6.054.760.584,00
37 Kec. Genuk	7.700.905.500,00	7.326.951.814,00	95,14%	(373.953.686,00)	7.639.204.289,00
38 Kec. Gajah Mungkur	6.080.228.700,00	5.805.599.115,00	95,48%	(274.629.585,00)	5.528.810.068,00
39 Kec. Tembalang	7.850.262.000,00	7.616.235.444,00	97,02%	(234.026.556,00)	8.067.930.632,00
40 Kec. Candisari	6.317.537.000,00	5.934.453.674,00	93,94%	(383.083.326,00)	5.891.996.074,00
41 Kec. Banyumanik	8.786.956.000,00	8.499.264.808,00	96,73%	(287.691.192,00)	8.614.229.799,00
42 Kec. Ngaliyan	6.514.782.750,00	6.201.886.187,00	95,20%	(312.896.563,00)	6.589.708.058,00
43 Kec. Gayamsari	5.245.031.750,00	5.055.616.865,00	96,39%	(189.414.885,00)	5.247.977.581,00
44 Kec. Pedurungan	9.402.966.500,00	8.932.812.697,00	95,00%	(470.153.803,00)	9.737.917.748,00
45 Badan Kependidikan Daerah (BKD)	5.504.610.400,00	5.229.104.359,00	94,99%	(275.506.041,00)	5.171.163.031,00
46 Kantor Pendidikan dan Latihan (diklat)	2.072.179.000,00	1.951.976.418,00	94,20%	(120.202.582,00)	2.437.602.884,00
47 Kantor Ketahanan Pangan	1.396.040.000,00	1.329.585.838,00	95,24%	(66.454.162,00)	1.427.044.640,00
48 Kantor Perpustakaan dan Arsip	1.648.611.000,00	1.532.310.384,00	92,95%	(116.300.616,00)	1.773.902.547,00
49 Dinas Pertanian	6.703.340.500,00	6.440.584.562,00	96,08%	(262.755.938,00)	6.183.211.653,00
50 Dinas Kelautan dan Perikanan	4.083.737.000,00	3.904.056.401,00	95,60%	(179.680.599,00)	4.012.744.088,00
51 Dinas Pasar	17.966.674.000,00	17.285.822.779,00	96,21%	(681.051.221,00)	16.905.714.892,00
52 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.155.666.000,00	4.878.959.612,00	94,63%	(276.706.388,00)	5.301.522.352,00
Jumlah Belanja Pegawai	1.408.794.186.232,00	1.306.934.922.575,00	92,77%	(101.859.263.657,00)	1.290.880.031.132,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.408.794.186.232,00 terealisasi sebesar Rp1.306.934.922.575,00 atau 92,77%. Realisasi tahun anggaran 2014 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp1.290.880.031.132,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.054.891.443,00.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pada Belanja Pegawai BLUD RSUD dan Terminal Mangkang jumlah Rp28.215.642.236,00 dengan perinciannya sebagai berikut:

Belanja Pegawai				
No	BLUD RSUD	BLUD Terminal Mangkang	Jumlah	
1	Rp 23.893.949.945	Rp 4.321.692.291,00		Rp 28.215.642.236,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, dan perjalanan dinas, dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2014		Realisasi 2014		Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp		
Dinas Pendidikan	74.179.378.164,00	67.418.830.113,00	90,89%	(6.760.548.051,00)	54.502.498.454,00		
Dinas Kesehatan Kota	74.286.366.964,00	66.815.324.390,00	89,94%	(7.471.042.574,00)	54.398.736.192,00		
Rumah Sakit Umum Daerah	86.162.232.800,00	71.337.561.004,00	82,79%	(14.824.671.596,00)	25.329.876.216,00		
Dinas Bina Marga	37.531.298.000,00	32.630.642.974,00	86,94%	(4.900.655.026,00)	15.701.823.034,00		
Dinas PSDA dan ESDM	30.392.427.000,00	26.256.053.703,00	86,39%	(4.136.373.297,00)	12.587.585.889,00		
Dinas Kebakaran	5.572.888.500,00	5.229.540.615,00	93,84%	(343.347.885,00)	3.247.031.296,00		
Dinas Tata Kota dan Perumahan	79.164.897.700,00	7.887.285.599,00	9,96%	(71.277.612.101,00)	50.984.621.594,00		
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	4.139.653.300,00	3.696.501.008,00	89,29%	(443.152.292,00)	3.918.503.387,00		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)	8.763.832.000,00	7.333.860.177,00	83,68%	(1.429.971.823,00)	7.866.749.438,00		
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	43.600.410.924,00	41.242.226.137,00	94,59%	(2.358.184.787,00)	28.577.175.033,00		
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	4.739.185.300,00	4.489.399.820,00	94,73%	(249.785.480,00)	4.176.366.505,00		
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	46.552.905.194,00	43.858.122.923,00	94,21%	(2.694.782.271,00)	29.231.565.507,00		
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.859.310.000,00	3.731.065.482,00	96,68%	(128.244.518,00)	4.365.141.376,00		
Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	8.773.658.500,00	8.451.996.552,00	96,33%	(321.661.948,00)	6.495.589.537,00		
Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	7.863.313.500,00	7.269.710.665,00	92,45%	(593.602.835,00)	5.589.664.080,00		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD)	3.737.555.000,00	3.431.917.929,00	91,82%	(305.637.071,00)	2.140.796.883,00		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.757.417.650,00	7.173.806.234,00	92,48%	(583.611.416,00)	5.074.490.445,00		
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.886.684.700,00	7.164.921.004,00	90,85%	(721.763.696,00)	4.556.413.699,00		
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)	2.682.917.000,00	2.611.636.093,00	97,34%	(71.280.907,00)	3.204.564.488,00		
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.814.194.000,00	9.366.808.840,00	95,44%	(447.385.160,00)	6.974.720.873,00		
Badan Kesbang, Politik dan Linmas	3.704.908.500,00	3.324.131.560,00	89,72%	(380.776.940,00)	2.319.587.312,00		
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	7.412.275.000,00	7.278.427.408,00	98,19%	(133.847.592,00)	4.115.046.195,00		
DPRD	-	-	-	-	-		
Walikota dan Wakil Walikota	-	-	-	-	-		
Sekretariat Daerah	71.562.012.450,00	58.657.901.111,00	81,97%	(12.904.111.339,00)	54.266.360.543,00		
Sekretariat DPRD	50.785.837.000,00	21.380.307.450,00	42,10%	(29.405.529.550,00)	30.824.510.070,00		
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	98.270.233.700,00	67.226.570.187,00	68,41%	(31.043.663.513,00)	53.894.417.972,00		
Inspektorat	1.616.809.500,00	1.299.115.201,00	80,35%	(317.694.299,00)	1.281.400.736,00		
Kec. Semarang Selatan	5.837.536.000,00	5.594.936.744,00	95,84%	(242.599.256,00)	2.164.635.098,00		
Kec. Semarang Utara	5.992.609.250,00	5.888.434.610,00	98,26%	(104.174.640,00)	2.090.503.726,00		
Kec. Semarang Barat	9.427.434.000,00	9.366.173.714,00	99,35%	(61.260.286,00)	3.267.170.791,00		
Kec. Semarang Timur	6.264.108.000,00	6.013.985.005,00	96,01%	(250.122.995,00)	2.890.996.007,00		
Kec. Semarang Tengah	7.774.788.500,00	7.576.849.812,00	97,45%	(197.938.688,00)	2.814.091.674,00		
Kec. Gunung Pati	8.024.240.000,00	7.735.249.578,00	96,40%	(288.990.422,00)	3.324.152.162,00		
Kec. Tugu	4.212.463.500,00	4.158.863.416,00	98,73%	(53.600.084,00)	1.884.197.623,00		
Kec. Mijen	7.274.833.000,00	7.127.638.524,00	97,98%	(147.194.476,00)	2.932.503.203,00		
Kec. Genuk	7.342.269.000,00	7.096.246.493,00	96,68%	(244.022.507,00)	2.868.369.138,00		
Kec. Gajah Mungkur	5.175.219.300,00	5.031.164.785,00	97,22%	(144.054.515,00)	2.368.631.407,00		
Kec. Tembalang	8.310.640.000,00	8.220.268.713,00	98,91%	(90.371.287,00)	2.796.884.350,00		
Kec. Candisari	4.952.464.000,00	4.533.110.807,00	91,53%	(419.353.193,00)	1.670.411.668,00		
Kec. Banyumanik	7.323.547.000,00	7.153.013.671,00	97,67%	(170.533.329,00)	2.739.460.444,00		
Kec. Ngaliyan	6.830.120.250,00	6.678.794.637,00	96,68%	(151.325.613,00)	2.326.672.828,00		
Kec. Gayamsari	5.010.036.250,00	4.911.089.159,00	98,03%	(98.947.091,00)	1.976.608.539,00		
Kec. Pedurungan	9.818.439.500,00	9.684.718.046,00	98,64%	(133.721.454,00)	2.883.132.284,00		
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	2.924.652.600,00	2.655.628.399,00	90,80%	(269.024.201,00)	2.688.623.545,00		
Kantor Pendidikan dan Latihan (diklat)	4.756.234.300,00	4.093.221.941,00	88,06%	(663.012.359,00)	3.817.653.812,00		
Kantor Ketahanan Pangan	2.639.422.000,00	1.888.447.841,00	71,55%	(750.974.159,00)	1.357.680.263,00		
Kantor Perpustakaan dan Arsip	2.438.247.600,00	2.333.881.282,00	95,72%	(104.356.318,00)	1.888.091.474,00		
Dinas Peranania	5.897.929.500,00	5.128.006.068,00	86,95%	(769.923.432,00)	3.896.479.412,00		
Dinas Kelautan dan Perikanan	5.011.635.700,00	4.651.529.333,00	92,81%	(360.106.367,00)	3.824.561.626,00		
Dinas Pasar	9.978.405.000,00	8.791.718.111,00	88,11%	(1.186.688.889,00)	6.781.034.280,00		
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.912.925.400,00	4.520.842.445,00	92,02%	(392.082.955,00)	4.394.896.572,00		
Jumlah Belanja Barang	928.942.801.796,00	727.399.487.313,00	78,30%	(201.543.314.483,00)	545.272.678.680,00		



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Data tabel di atas menunjukkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2014 sebesar Rp727.399.487.313,00 atau 78,30% dari anggaran sebesar Rp928.942.801.796,00. Belanja tersebut bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp545.272.678.680,00 terdapat kenaikan sebesar Rp179.199.587.345,00. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSUD sudah tidak termasuk belanja barang dan jasa yang terkait pelayanan Jamkesmaskot sebesar Rp11.964.432.783,00.

Perincian Belanja Barang dan Jasa per jenis belanja dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

	Perincian Belanja Barang dan Jasa Per Jenis Belanja			
	Realisasi 2014		Realisasi 2013	Rasio
	Rp	Rp	%	Rp
1 Belanja Bahan Pakai Habis	79,914,698,600.00	64,208,422,850.00	124.46%	15,706,275,750.00
2 Belanja Bahan/Material	49,894,252,376.00	31,757,677,798.00	157.11%	18,136,574,578.00
3 Belanja Jasa Kantor	186,343,399,678.00	159,372,489,136.00	116.92%	26,970,910,542.00
4 Belanja Jasa Premi Asuransi	6,057,327,551.00	4,841,434,911.00	125.11%	1,215,892,640.00
5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25,974,068,240.00	25,200,223,097.00	103.07%	773,845,143.00
6 Belanja Cetak dan Penggandaan	24,516,216,083.00	24,747,915,701.00	99.06%	(231,699,618.00)
7 Belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,628,338,825.00	4,829,127,600.00	178.67%	3,799,211,225.00
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,592,379,850.00	1,849,997,546.00	86.07%	(257,617,696.00)
9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,382,165,376.00	4,054,824,931.00	108.07%	327,340,445.00
10 Belanja Makanan dan Minuman	40,631,461,335.00	40,748,685,606.00	99.71%	(117,224,271.00)
11 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3,933,233,250.00	948,085,300.00	414.86%	2,985,147,950.00
12 Belanja Pakaian Kerja	1,014,107,500.00	858,901,100.00	118.07%	155,206,400.00
13 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu	1,141,759,250.00	949,393,000.00	120.26%	192,366,250.00
14 Belanja Perjalanan Dinas	73,139,815,905.00	41,282,477,958.00	177.17%	31,857,337,947.00
15 Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-
16 Belanja pemulangan pegawai	-	-	-	-
17 Belanja pameran, promosi dan propaganda	4,023,969,129.00	3,395,970,748.00	118.49%	627,998,381.00
18 Belanja pemeliharaan gedung/kantor/rumah dinas/gudang/pagar	18,768,720,992.00	13,842,652,504.00	135.59%	4,926,068,488.00
19 Belanja Pemeliharaan alat tulis kantor	7,142,409,153.00	5,104,640,495.00	139.92%	2,037,768,658.00
20 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kesenian	75,714,000.00	46,076,000.00	164.32%	29,638,000.00
21 Belanja pemeliharaan dokumen dan bahan perpustakaan	281,908,500.00	289,745,000.00	97.30%	(7,836,500.00)
22 Belanja pemeliharaan peralatan sarana komunikasi	606,217,150.00	435,043,250.00	139.35%	171,173,900.00
23 Belanja pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan Angkutan	794,077,000.00	681,300,000.00	116.55%	112,777,000.00
24 Belanja pemeliharaan sarana prasarana pertanian/perkebunan	13,050,000.00	1,515,000.00	861.39%	11,535,000.00
25 Belanja pemeliharaan sarana prasarana pekerjaan umum	599,943,000.00	425,825,000.00	140.89%	174,118,000.00
26 Belanja pemeliharaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	120,285,900.00	59,443,000.00	202.36%	60,842,900.00
27 Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	70,005,810,803.00	32,964,605,659.00	212.37%	37,041,205,144.00
28 Belanja Pemeliharaan sarana prasarana penghijauan/pertamanan	5,508,953,000.00	2,081,878,000.00	264.61%	3,427,075,000.00
29 Belanja pemeliharaan sarana prasarana persampahan	2,637,200,249.00	363,446,000.00	725.61%	2,273,754,249.00
30 Belanja pemeliharaan sarana prasarana perikanan/kelautan	17,550,000.00	31,725,000.00	55.32%	(14,175,000.00)
31 Belanja Jasa Konsultasi	2,079,499,300.00	162,193,000.00	1282.11%	1,917,306,300.00
32 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	-	40,309,790,000.00	0.00%	(40,309,790,000.00)
33 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis	2,337,655,415.00	4,836,547,300.00	-	(2,498,891,885.00)
34 Belanja Pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan banjir dan rob	28,280,000.00	18,300,000.00	-	9,980,000.00
35 Belanja Beasiswa a Pendidikan PNS	29,400,000.00	-	-	-
36 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Penceramah / Moderator PNS	5,152,794,000.00	-	-	-
37 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Penceramah / Moderator	6,303,970,200.00	-	-	-
38 JKN	9,176,008,300.00	-	-	-
39 Belanja barang dan jasa BLU Terminal Mangkang	13,195,286,399.00	9,535,652,947.00	-	3,659,633,452.00
40 Belanja barang dan jasa rumah sakit BLUD	71,337,561,004.00	25,036,673,243.00	284.93%	46,300,887,761.00
Jumlah Realisasi	727,399,487,313.00	545,272,678,680.00	133.40%	161,464,636,133.00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Belanja Barang dan Jasa pada BLUD sejumlah Rp84.532.847.403,00 terdiri dari BLUD RSUD Rp71.337.561.004,00 dan BLUD Terminal Mangkang Rp13.195.286.399,00.

Belanja Barang Jasa				
No	BLUD RSUD	BLUD Terminal Mangkang	Jumlah	
1	71.337.561.004	Rp13.195.286.399,00	Rp84.532.847.403,00	

c. Belanja Bunga

Akun belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan biaya bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan) berupa *Sub Loan Agreement* (SLA), dengan anggaran dan realisasi tahun 2014 serta realisasi tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
	250,000,000,00	250,000,000,00	100,00%	-	378,295,400,00
Belanja Bunga					
Jumlah Belanja Bunga	250,000,000,00	250,000,000,00	100,00%	-	378,295,400,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bunga sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp250.000.000,00 atau 100,00%, yang berarti belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp128.295.400,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp378.295.400,00.

d. Belanja Hibah

Akun belanja Hibah tahun anggaran 2014 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Anggaran belanja hibah tahun anggaran 2014 sebesar Rp57.956.904.850,00 terealisasi sebesar Rp113.718.345.363,00 atau 196,21%. Kenaikan realisasi belanja hibah Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 sebesar Rp1.976.550.837,00 adanya pengendalian pemberian hibah sesuai ketentuan Permendagri nomor 39 tahun 2012 sebagai perubahan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dan realisasi 2014 serta realisasi TA 2013 dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Anggaran 2014 Rp	Realisasi 2014 Rp	Rasio %	Lebih/Kurang Rp	Realisasi 2013 Rp
1 KONI Kota Semarang	15,090,091,400.00	13,867,393,405.00	92%	(1,222,697,995.00)	11,771,645,866.00
2 KORPRI Kota Semarang	750,000,000.00	648,676,500.00	86%	(101,323,500.00)	-
3 Pramuka	750,000,000.00	743,990,000.00	99%	(6,010,000.00)	500,000,000.00
4 PMI Kota Semarang	200,000,000.00	199,793,918.00	100%	(206,082.00)	-
5 Badan Amil Zakat	300,000,000.00	300,000,000.00	100%	-	-
6 Majelis Ulama Indonesia	200,000,000.00	200,000,000.00	100%	-	-
7 KPU	7,188,023,450.00	-	0%	(7,188,023,450.00)	200,000,000.00
8 Muhammadiyah	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	-	-
9 BPKL (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama)	100,000,000.00	100,000,000.00	100%	-	-
10 Dewan Kesehatan Kota	100,000,000.00	-	0%	(100,000,000.00)	-
11 Pemuda Pancasila	25,000,000.00	25,000,000.00	100%	-	-
12 Nahdlatul Ulama	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	-	20,000,000.00
13 Pemuda Muhammadiyah	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	-	-
14 Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	-	-
15 Pembangunan Tempat Ibadah	2,842,500,000.00	1,845,500,000.00	65%	(997,000,000.00)	2,097,000,000.00
16 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	-	-
17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	2,562,000,000.00	1,396,000,000.00	54%	(1,166,000,000.00)	-
18 KNPI	500,000,000.00	476,028,660.00	95%	(23,971,340.00)	-
19 Legiun Veteran RI (LVRI)	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	-	30,000,000.00
20 Bantuan Pendampingan PANSIMAS	825,000,000.00	790,000,000.00	96%	(35,000,000.00)	852,500,000.00
21 Pendampingan BOS Kota SD/MI	3,750,000,000.00	3,555,164,000.00	95%	(194,836,000.00)	3,608,400,000.00
22 Pendampingan BOS Kota SMP MTS	8,580,000,000.00	6,845,400,000.00	80%	(1,734,600,000.00)	7,007,400,000.00
23 Pendampingan BOS Provinsi SD/SDLB/MI Swasta	1,533,990,000.00	1,524,780,000.00	99%	(9,210,000.00)	-
24 Pendampingan BOS Provinsi SMAMTS Swasta	2,071,300,000.00	2,023,100,000.00	98%	(48,200,000.00)	-
25 Pendampingan BOS SMA / SMK Swasta	4,218,000,000.00	4,011,600,000.00	95%	(206,400,000.00)	-
26 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	500,000,000.00	500,000,000.00	100%	-	50,000,000.00
27 Generasi Muda FKPKPI Kota Semarang	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
28 LSM Capura	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
29 DPD Pengajian Al-Hidayah	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
30 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia	50,000,000.00	40,767,100.00	82%	(9,232,900.00)	250,000,000.00
31 DPD Ikatan Tuna Netra muslim Indonesia (ITMI)	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
32 Pemuda Pancasila Marga	40,000,000.00	40,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
33 Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
34 Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP)	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
35 LSM Komunitas Kajian Kebangsaan	10,000,000.00	-	0%	(10,000,000.00)	250,000,000.00
36 Lembaga Pelestarian Budaya Jawa Maju Karep	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
Pembangunan Masjid & Pemugaran Kompleks Makam	200,000,000.00	200,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
37 Syeikh Maulana Jumadil	200,000,000.00	200,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
38 Gerakan Pemuda Ansor	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
39 Fatayat Nahdlatul Ulama	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
40 Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama	8,000,000.00	8,000,000.00	100%	-	250,000,000.00
41 Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama	8,000,000.00	8,000,000.00	100%	-	-
42 OEN Foundation	100,000,000.00	100,000,000.00	100%	-	-
43 Pendampingan Hibah Insentif Kota (Program PAMSIMAS)	1,000,000,000.00	989,996,000.00	99%	(10,004,000.00)	-
44 Panitia Pengawas Pemilu Kota Semarang (PANWASLU)	120,000,000.00	-	0%	(120,000,000.00)	-
45 Hibah Pembayaran Kasus Hukum ke PT.PASMI Scientific	450,000,000.00	-	0%	(450,000,000.00)	-
46 Yayasan Bhakti Sejahtera	3,500,000,000.00	2,773,677,120.00	79%	(726,322,880.00)	-
Jumlah Belanja Hibah	57,956,904,850.00	43,597,866,703.00	75%	(13,033,478,367.00)	26,136,945,866.00

Pada Tahun Anggaran 2014 Pemkot Semarang menganggarkan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp928.942.801.796,00 dan direalisasikan senilai Rp797.464.294.285,00 atau 85,90%. Realisasi tersebut diantaranya senilai Rp70.120.478.660,00 dipergunakan untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu kelompok petani, kelompok peternak dan kelompok usaha yang dikelola oleh 15 SKPD Teknis dengan rincian sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No	SKPD	Jumlah
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	106,480,000
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	95,232,500
3	DINAS KOPERASI UMKM	194,000,000
4	DINAS PERTANIAN	415,492,500
5	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	68,075,718,560
6	KANTOR KETAHANAN PANGAN	688,904,100
7	KECAMATAN CANDISARI	46,916,000
8	KECAMATAN GAJAH MUNGKUR	43,420,000
9	KECAMATAN GAYAMSARI	20,000,000
10	KECAMATAN GENUK	38,160,000
11	KECAMATAN MIJEN	44,500,000
12	KECAMATAN NGALIYAN	50,000,000
13	KECAMATAN PEDURUNGAN	24,585,000
14	KECAMATAN SEMARANG UTARA	27,725,000
15	SEKRETARIAT DAERAH	249,345,000
Jumlah		70,120,478,660

e. Belanja Bantuan Sosial

Akun belanja Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2014 direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat dan bantuan bidang pendidikan, dapat dirinci sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	3.069.000.000,00	3.065.000.000,00	-	(4.000.000)	-
2 Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu SMA/SMK Swasta	646.000.000,00	641.000.000,00	-	(5.000.000)	-
3 Kelompok Pengawas Masyarakat (Nelayan)	90.000.000,00	-	-	(90.000.000)	-
4 Kelompok Sido Mulyo (Nelayan)	5.000.000,00	-	-	(5.000.000)	-
5 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)	100.000.000,00	-	-	(100.000.000)	-
6 Bantuan Kepada Penyandang Cacat	127.000.000,00	-	0%	(127.000.000)	127.000.000,00
7 Bantuan Pemulangan kepada Orang Terlantar	150.000.000,00	-	0%	(150.000.000)	150.000.000,00
8 Bantuan Kepada Korban Bencana	830.405.000,00	549.250.000,00	66%	(281.155.000)	250.000.000,00
9 Bantuan Kepada Panti Sosial & Panti Asuhan	1.277.500.000,00	1.277.500.000,00	100%	-	1.779.400.000,00
10 DDUPB (PNPM)	1.500.000.000,00	768.750.000,00	51%	(731.250.000)	1.700.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	7.794.905.000,00	6.301.500.000,00	81%	(1.493.405.000,00)	4.006.400.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja bantuan sosial tahun anggaran 2014 sebesar Rp7.794.905.000,00 terealisasi sebesar Rp6.301.500.000,00 atau 81% bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp4.006.400.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.295.100.000,00. Kebijakan Pemerintah dalam pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat (pemberian bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan tertentu serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Belanja bantuan sosial diberikan sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 39 tahun 2012 sebagai perubahan Permendagri nomor 32 tahun 2011



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Akun belanja Bantuan Keuangan pada 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dapat di rinci sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
	1 Belanja Bantuan Keuangan	870,105,000.00	870,104,900.00	100.00%	(100.00)
Jumlah		870,105,000.00	870,104,900.00	100.00%	(100.00)
					788,567,000.00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja bantuan keuangan sebesar Rp870.105.000,00 terealisasi sebesar Rp870.104.900,00 atau 100%. Bantuan keuangan merupakan bantuan kepada partai politik yang diberikan kepada 10 partai politik dengan jumlah suara sebanyak 656.683 suara, dengan nilai Rp1.325,00 per suara.

SKPD pengelola bantuan keuangan tersebut adalah Badan Kesbangpolinmas, sedangkan Partai Politik penerima Belanja Bantuan Keuangan tahun 2014 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Jumlah
1	Demokrat	151.841	201.189.300
2	PDIP	164.778	218.331.200
3	PKS	65.513	86.805.300
4	PAN	51.743	68.559.500
5	GOLKAR	59.800	79.234.800
6	GERINDRA	62.457	82.755.950
7	PKB	42.299	56.046.500
8	HANURA	11.512	15.252.750
9	NASDEM	19.669	26.061.600
10	PPP	27.070	35.868.000
	JUMLAH	656.683	870.104.900

2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam tahun anggaran 2014 dan realisasi tahun anggaran 2013 dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Belanja Modal

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	
				Rp	Rp
1 Belanja Tanah	456.326.615.700,00	66.806.647.024,00	14,64%	(389.519.968.676,00)	55.557.059.733,00
2 Belanja Peralatan dan Mesin	194.313.982.988,00	168.484.419.664,00	86,71%	(25.829.563.324,00)	132.632.841.323,00
3 Belanja Gedung dan Bangunan	415.308.746.454,00	380.386.931.387,00	91,59%	(34.921.815.067,00)	143.715.016.979,00
4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	210.334.586.580,00	175.596.020.355,00	83,48%	(34.738.566.225,00)	252.075.125.515,00
5 Belanja Aset Tetap Lainnya	34.174.413.400,00	8.850.992.477,00	25,90%	(25.323.420.923,00)	7.031.368.712,00
6 Belanja Aset Lainnya	-	56.220.000,00	#DIV/0!	56.220.000,00	-
Jumlah Belanja Modal	1.310.458.345.122,00	800.181.230.907,00	61,06%	(510.277.114.215,00)	591.011.412.262,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal tahun anggaran 2014 sebesar Rp1.310.439.327.122,00 terealisasi sebesar Rp800.181.230.907,00 atau 61,06%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp591.011.412.262,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp209.169.818.645,00.

Kegiatan tahun 2014 yang tidak selesai / putus kontrak sampai dengan 31 Desember antara lain yaitu:

Dinas Bina Marga

- a. Pada Kegiatan Peningkatan Podorejo dengan kode rekening 1.03 1.03.01.15.020 dengan pagu anggaran Rp. 3.600.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus juta rupiah), dimana setelah diadakan pelelangan didapat nilai kontrak sebesar Rp. 3.111.339.000,00 (Tiga milyar seratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang rencananya dapat terselesaikan 100%, hanya dapat diselesaikan 81,43% dengan nilai akhir realisasi sebesar Rp. 2.533.604.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah) atau 70,38% dari pagu anggaran, dimana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan telah diberi kesempatan perpanjangan waktu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga dilakukan putus kontrak dan penyedia jasa yang bersangkutan terancam di blacklist.
- b. Pada tahun 2014 ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mengalami gagal lelang yaitu Peningkatan Jalan Diponegoro dengan kode rekening 1.03 1.03.01.15.033 dan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (Dua milyar Sembilan ratus ratus juta rupiah), Peningkatan Akses Jalan Terminal Mangkang dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.056 dan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dan Pelapisan Ulang HOTMIX Paket II (Pemeliharaan Jalan Thamrin, Pemeliharaan Jalan Ki Mangunsarkoro, Pemeliharaan Jalan Menteri Supeno) dengan kode rekening 1.03.1.03.01.18.184 dan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah), dimana lelang ulang telah beberapa kali dilakukan dan telah dilakukan peninjauan kembali, namun sampai dengan batas waktu minimal pelaksanaan kegiatan, tidak terdapat penyedia jasa yang berminat terhadap pekerjaan tersebut.
- c. Pengadaan lahan untuk outer ring roads dengan kode rekening 1.03 1.03.01.29.002 dan anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) belum bisa dilaksanakan karena kegiatan ini ditangani oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) memberikan pernyataan bahwa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Mangkang - Mijen harus diselesaikan terlebih dahulu, sedangkan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Mangkang - Mijen sendiri baru diselesaikan tahun 2014 dan berakhir pada bulan Desember 2014.

- d. Pengadaan lahan untuk jalan Undip-Jangli-Mrican dengan kode rekening 1.03.1.03.01.29.003 dan anggaran sebesar Rp. 82.980.838.000,00 (Delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tidak bisa dilaksanakan, akan tetapi semua proses sebelum pengadaan lahan sudah dijalankan yaitu pemotongan dan proses penetapan lokasi. Anggaran murni 2014 sebesar Rp. 6.980.838.000,00 menurut Panitia Pembebasan Tanah (P2T) tidak mencukupi, maka anggaran perubahan 2014 bertambah menjadi Rp. 82.980.838.000,00 (Delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dengan berlakunya Perpres No. 99 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tertanggal 15 September 2014 yang menyatakan semula kegiatan ditangani oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dikembalikan ke Dinas Bina Marga Kota Semarang disamping itu menurut Panitia Pembebasan Tanah (P2T) waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
- e. Pengadaan lahan untuk jalan Urip Sumoharjo dengan kode rekening 1.03.1.03.01.29.007 dan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) tidak bisa dilaksanakan karena belum tersedianya perencanaan dari Satker Perencana dan Pengawas Jalan Nasional (P2JN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang memadai karena lokasinya berubah-ubah sehingga proses penyusunan DED dari Satker Perencana dan Pengawas Jalan Nasional (P2JN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan belum terselesaikan.

Adapun untuk pekerjaan yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum selesai dilaksanakan dan pada tahun 2014 sudah ditindak lanjuti antara lain :

- a. Dinas Bina Marga
 - 1) Peningkatan Jalan Madukoro
Untuk kegiatan ini pada tahun 2014 belum dilaksanakan kembali dan dianggarkan kembali di Tahun 2015
 - 2) Pemeliharaan Jalan Raya Klipang Sendangmulyo
Dianggarkan pada tahun 2014 sebesar Rp3.299.404.000,00 dilaksanakan oleh PT. Suyudono Sakti dan telah selesai 100%
 - 3) Peningkatan Jalan Hawa (Musren)
Dianggarkan pada tahun 2014 sebesar Rp199.090.000,00 dilaksanakan oleh CV. Dinda Karya dan telah selesai 100%
 - 4) Peningkatan Jalan Desel
Dianggarkan pada tahun 2014 sebesar Rp199.466.000,00 dilaksanakan oleh CV. Anantyo dan telah selesai 100%
 - 5) Peningkatan Jalan Kokrosono
Dianggarkan pada tahun 2014 sebesar Rp2.414.999.000,00 dilaksanakan oleh CV. Satriamas Karyatama dan telah selesai 100%
 - 6) Peningkatan Jalan Cinde Raya
Dianggarkan pada tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Evi Edo dan telah selesai 100%



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- 7) Peningkatan jalan Sarwo Edhi
Dianggarkan kembali di Perubahan Anggaran Tahun 2015
- b. PSDA dan ESDM
Peningkatan Saluran Drainase Kali Tenggang (R.Arteri s/d Kaligawe) Tahun 2014 terdiri dari 3 paket pekerjaan peninggian jembatan dengan hasil sebagai berikut ;
1) 1 paket (jembatan LIK I) tahun 2014 selesai 100%
2) 1 paket (jembatan Daendels) tahun 2013 gagal lelang, tahun 2014 dianggarkan kembali dan dilaksanakan oleh CV. Anantyo dengan nilai Rp1.442.338.000,00.
3) 1 paket (jembatan Muktiharjo) tahun 2013 wanprestasi, tahun 2014 dianggarkan kembali dan dilaksanakan oleh PT. Putra Mas Indah dengan nilai Rp2.020.000.000,00
- c. Dinas Pasar
Kegiatan pembangunan Pasar Klitikan Penggaron Tahap II dengan nilai kontrak Rp9.608.844.000,00 terealisasi 100% dengan pelaksana PT. Arqindo.
- d. DTKP
Kegiatan rehab GOR Tri Lomba Juang selesai 100% dengan pelaksana PT.Sinar Cerah Sempurna dan PT.Asta Saka.

Sampai dengan 31 Desember 2014 pada Pemerintah Kota Semarang mempunyai garansi bank sebagai jaminan pada masa pemeliharaan dari pihak ketiga terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	NILAI JAMINAN
1	Dinas Pendidikan	Rp 970.056,650
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 587.123,700
3	Dinas Bina Marga	Rp 6.056.819,600
4	Dinas PSDA dan ESDM	Rp 5.111.425,106
5	Dinas Kebakaran	Rp 53.992,500
6	Dinas Tata Kota dan Perumahan	Rp 1.876.696,853
7	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR)	Rp 713.496,270
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 1.425.209,187
9	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	Rp 142.537,000
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp 5.108.608,000
11	Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	Rp 11.969,100
12	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	Rp 36.823,650
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 65.287,600
14	Kecamatan Semarang Selatan	Rp 685.334,000
15	Kecamatan Semarang Utara	Rp 214.149,900
16	Kecamatan Gunungpati	Rp 318.511,650
17	Kecamatan Tugu	Rp 134.854,800
18	Kecamatan Mijen	Rp 316.051,150
19	Kecamatan Genuk	Rp 242.207,950
20	Kecamatan Gajahmungkur	Rp 175.927,800
21	Kecamatan Candisari	Rp 82.293,150
22	Kecamatan Ngaliyan	Rp 4.452.617,700



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

23	Kecamatan Gayamsari	Rp 39,120,350
24	Kecamatan Pedurungan	Rp 70,714,450
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 64,661,500
26	Dinas Pasar	Rp 1,978,932,120
Jumlah		Rp 30,935,421,736

3. Belanja Tidak Terduga

Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk periode tahun anggaran 2014 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Belanja Tak Terduga					
	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
Belanja Tak Terduga	22.461.480.000,00	1.777.048.020,00	7,91%	(20.684.431.980,00)	89.140.960.000,00
Jumlah	22.461.480.000,00	1.777.048.020,00	7,91%	(20.684.431.980,00)	89.140.960.000,00

Data tabel di atas menggambarkan Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga ada pada DPKAD Kota Semarang.

Belanja Tidak Terduga dalam tahun anggaran 2014 dianggarkan Rp22.461.480.000,00 terealisasi sebesar Rp1.777.048.020,00 atau 7,91% dari anggarannya, belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Bencana alam Rp634.500.000,00
- b. Tanggap darurat bencana Rp858.554.505,00
- c. Kelebihan bayar BPHTB Rp6.975.000,00
- d. Pengembalian PBB Daspen PGRI Rp16.862.874,00
- e. Pengembalian BPHTB Nasmoco Rp60.045.394,00
- f. Pengembalian BPHTB An. Eko Yulianto Rp28.500.000,00
- g. Pengembalian BPHTB An PT.Nasmoco Rp100.499.902,00
- h. Pengembalian BPHTB Rp6.500.000,00
- i. Pengembalian BPHTB An. Fatrijanto Rp10.500.000,00
- j. Pengembalian BPHTB An. Fatrijanto Rp7.000.000,00
- k. Pengembalian BPHTB An. Fatrijanto Rp5.700.000,00
- l. Pengembalian BPHTB An. Oka Agus Sudarto Rp3.210.000,00
- m. Pengembalian BPHTB An. Rudi Aidiantoro Rp14.500.000,00
- n. Pengembalian BPHTB An. S.Mizbach Hady Rp10.155.000,00
- o. Pengembalian BPHTB An. Andi Suharto Rp47.200.600,00
- p. Restitusi BPHTB An. Regeng Sunarso Rp2.500.000,00
- q. Restitusi BPHTB An. Dyan Puspitasari Rp2.250.000,00
- r. Pengembalian BPHTB An. Dwi Mulyono Rp920.250,00

Adapun dari pencairan Dana tidak terduga tersebut, terdapat pengembalian dana atas dana yang telah dicairkan tersebut sebesar Rp39.325.505,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengembalian darurat bencana Rp25.825.505,00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- b. Pengembalian darurat bencana Rp13.500.000,00

Rendahnya penyerapan pos belanja tak terduga ini karena pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

4.1.3 SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3.166.016.041.565,00 dan belanja daerah sebesar Rp2.957.432.639.078,00 dihasilkan surplus sebesar Rp208.583.402.487,00. Dibandingkan dengan surplus pada tahun 2013 sebesar Rp323.080.117.423,00 mengalami penurunan sebesar Rp114.496.714.936,00.

4.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Semarang meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2014 serta realisasi tahun anggaran 2013 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
Penerimaan Pembiayaan	920,179,046,000,00	912,721,021,842,00	99.19%	(7,458,024,158,00)	635,457,569,772,00
Pengeluaran Pembiayaan	48,178,914,000,00	48,085,579,353,00	99.83%	(83,334,647,00)	45,816,665,353,00
Jumlah	872,000,132,000,00	864,625,442,489,00	99.15%	(7,374,689,511,00)	589,640,904,419,00

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2014 sebesar Rp864.625.442.489,00 atau 99,15% dari anggaran sebesar Rp872.000.132.000,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp589.640.904.419,00 mengalami kenaikan sebesar Rp274.984.538.070,00. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu, adapun anggaran/realisasi tahun anggaran 2014 dan realisasi 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

1 penerimaan Pembayaran

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
Penggunaan SILPA	912,721,021,842,00	912,721,021,842,00	100.00%	-	635,457,569,772,00
Pencairan Dana Cadangan	7,458,024,158,00	-	0.00%	-	-
Jumlah	920,179,046,000,00	912,721,021,842,00	100.00%	-	635,457,569,772,00

Tabel di atas menunjukkan Realisasi sisa lebih pembiayaan APBD tahun lalu sebesar Rp912.721.021.842,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp920.179.046.000,00 naik sebesar Rp277.263.452.070,00 dibanding realisasi TA 2013 sebesar Rp635.457.569.772,00.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Semarang tahun 2014 dan 2013 anggaran dan realisasi dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Pembentukan Dana Cadangan	25,439,914,000.00	25,439,914,000.00	100.00%	-	15,000,000,000.00
2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20,839,000,000.00	20,839,000,000.00	100.00%	-	29,000,000,000.00
3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	1,900,000,000.00	1,816,665,353.00	95.61%	83,334,647.00	1,816,665,353.00
4 Pengembalian Sisa Dana DPPID	-	-	-	-	-
Jumlah	48,178,914,000.00	48,095,579,353.00	99.83%	83,334,647.00	45,816,665,353.00

Tabel di atas menunjukkan target anggaran sebesar Rp48.178.914.000,00 dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2014 sebesar Rp48.095.579.353,00 atau 99,83%, naik sebesar Rp2.278.914.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp45.816.665.353,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pembentukan Dana Cadangan

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
Pembentukan Dana Cadangan (DPKAD)	25,439,914,000.00	25,439,914,000.00	100.00%	-	15,000,000,000.00

Tabel di atas menunjukkan Realisasi pembentukan dana cadangan (DPKAD) tahun 2014 sebesar Rp25.439.914,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp25.439.914.000,00. Dana cadangan ini nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2015 dalam hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 yang disimpan dalam bentuk deposito.

2) Penyertaan Modal

Penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang untuk periode tahun anggaran 2014 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
Penyertaan Modal (PDAM)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00%	-	10,000,000,000.00
Bank Jateng	8,339,000,000.00	8,339,000,000.00	100.00%	-	15,000,000,000.00
Perusa Perceatakan			0.00%	-	1,000,000,000.00
PD BPR Bank Pasar			0.00%	-	1,000,000,000.00
PD BPR/BKK cabang Semarang Tengah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00%	-	1,000,000,000.00
Perusda Rumah Potong Hewan (RPH)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00%	-	1,000,000,000.00
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20,839,000,000.00	20,839,000,000.00	100.00%	-	29,000,000,000.00

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tambahan Penyertaan Modal kepada Bank Jateng dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tambahan Penyertaan Modal Kepada BUMD.

3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo yang dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.816.665.353,00 dapat dirinci sebagai berikut.

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Lembaga Keuangan Bank	1,900,000,000.00	1,816,665,353.00	95.61%	83,334,647.00	1,816,665,353.00
Jumlah	1,900,000,000.00	1,816,665,353.00	95.61%	83,334,647.00	1,816,665,400.00

Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan perhitungan dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dengan tabel berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
Penerimaan Pembiayaan	920,179,046,000.00	912,721,021,842.00	99.19%	(7,458,024,158.00)	635,457,569,772.00
Pengeluaran Pembiayaan	48,178,914,000.00	48,095,579,353.00	99.63%	(83,334,647.00)	45,816,665,353.00
Jumlah	872,000,132,000.00	864,625,442,489.00	99.15%	(7,374,689,511.00)	589,640,904,419.00

Tabel di atas menunjukkan realisasi dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp912.721.021.842,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp48.095.579.353,00 diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp864.625.442.489,00 naik sebesar Rp274.984.538.070,00 jika dibandingkan dengan pembiayaan netto tahun 2013 sebesar Rp589.640.904.419,00.

4.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1.4.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA)

Perhitungan APBD	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2013
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
Pendapatan Daerah	2,594,562,688,000.00	3,166,016,041,565.00	122.03%	571,453,353,565.00	2,796,570,726,860.00
Belanja Daerah	3,184,087,019,000.00	2,957,432,639,078.00	92.88%	226,654,379,922.00	2,473,490,609,437.00
Surplus (Defisit) : 1-2	(589,524,331,000.00)	208,583,402,487.00	-35.38%	344,798,973,643.00	323,080,117,423.00
Penerimaan Pembiayaan	635,424,331,000.00	912,721,021,842.00	143.64%	277,296,690,842.00	635,457,569,772.00
Pengeluaran Pembiayaan	45,900,000,000.00	48,095,579,353.00	104.78%	(2,195,579,353.00)	45,816,665,353.00
Pembiayaan Netto : 4-5	589,524,331,000.00	864,625,442,489.00	146.66%	279,492,270,195.00	589,640,904,419.00
SILPA (SIKPA) : 3+6	-	1,073,208,844,976.00		624,291,243,838.00	912,721,021,842.00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2014 sebesar Rp1.073.208.844.976,00 mengalami kenaikan sebesar Rp160.487.823.134,00 dari SiLPA tahun anggaran 2013 sebesar Rp912.721.021.842,00, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

	Rp	Rp	%
a) Kas di BUD (tidak termasuk utang PFK)	1,032,196,521,655.00	900,299,767,116.00	14.65%
b) Sisa UP di Bendahara Pengeluaran	9,048,526,245.00	765,149,017.00	1082.58%
c) Kas di Bendahara Penerimaan	24,431,500.00	-	0.00%
d) Kas di BLU RSUD	30,525,824,100.00	9,329,918,962.00	227.18%
e) Kas di BLU Dishubkominfo/UPTD Mangkang	1,413,541,476.00	2,326,186,747.00	-39.23%
Jumlah	1,073,208,844,976.00	912,721,021,842.00	17.58%

Tabel di atas menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2014 sebesar Rp1.073.208.844.976,00 terdiri dari :

- a. Kas di Kas Daerah (BUD)
 - Bank : Rp306.490.843.380,00
 - Deposito : Rp725.705.769.509,00
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - DKK : Rp5.258.999.688,00
 - DTKP : Rp5.784.000,00
 - BLH : Rp19.800.000,00
 - BPBD : Rp15.526.750,00
 - Kantor Satpol : Rp11.027.700,00
 - Setwan : Rp3.653.691.894,00
 - Inspektorat : Rp30.244.000,00
 - Kec. Semarang Utara : Rp738.631,00
 - Kec. Semarang Timur : Rp39.242.532,00
 - Kec. Gajahmungkur : Rp460.422,00
 - Kecamatan Pedurungan : Rp9.213.067,00
 - Kantor Diklat : Rp350.000,00
 - Disperindag : Rp3.447.560,00
- c. Kas di BLUD RSUD sebesar Rp30.525.824.100,00
- d. Kas di BLUD Terminal Mangkang sebesar Rp1.413.541.476,00
- e. Kas Bendahara Penerimaan Rp24.431.500,00
- f. Selisih lebih catat Kasda dengan realisasi pendapatan Rp91.234



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Silpa sebesar Rp1.073.328.480.432,00 didalamnya terdapat nilai deposito sebesar Rp22.705.769.509,00 tidak diakui oleh BTPN dan masih dalam proses penyelesaian hukum.

4.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2014 sebesar Rp912.721.021.842,00 atau naik 43,63% yaitu sebesar Rp277.263.452.070,00 dari tahun 2013.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Tahun 2014 Penggunaan SAL merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp912.721.021.842,00 bila dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar Rp277.263.452.070,00 atau naik 43,63 % dari tahun 2013. Hal ini dikarenakan Pendapatan pada tahun 2014 mengalami kenaikan.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA tahun 2014 sebesar Rp1.073.208.844.976,00 atau naik 17,59 % yaitu sebesar Rp160.487.823.134,00 dari tahun 2013.

Surplus /Defisit – LRA

Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit – LRA tahun 2014 sebesar Rp208.703.037.943,00 atau turun -35,40 % yaitu sebesar (Rp114.377.079.480,00) dari tahun 2013.

Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Pembiayaan Netto tahun 2014 sebesar Rp864.625.442.489,00 atau naik 46,64 % yaitu sebesar Rp274.984.538.070,00 dari tahun 2013.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya.

Untuk tahun 2014 dan tahun 2013 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- e. Saldo Anggaran lebih pada Tahun 2014 sebesar Rp1.073.208.844.976,00 terdiri dari:
1. Over target pendapatan sebesar Rp300.503.686.065,00
 2. Sisa kegiatan dari Dana Perimbangan/Transfer yang harus dianggarkan kembali sebesar Rp94.509.605.365,00 yang berasal dari dana – dana yang sifatnya khusus dan sesuai dengan ketentuan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang lain, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Alokasi DBHCHT yang belum dilaksanakan di tahun 2014 akan dianggarkan kembali di tahun 2015 dalam APBD Perubahan 2015 sebesar Rp5.900.000.000,00 terdiri dari :
 - a. RSUD Rp3.400.000.000,00
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp1.000.000.000,00
 - c. Dinas Koperasi dan UKM Rp500.000.000,00
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp1.000.000.000,00
 - b) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah diakumulasi dengan Silpa tahun sebelumnya dan dianggarkan kembali di tahun 2015 sebesar Rp3.451.500.000,00
 - c) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah diakumulasi dengan Silpa tahun sebelumnya dan dianggarkan kembali di tahun 2015 sebesar Rp75.244.812.886,00
 - d) Dana Alokasi Khusus dan Pendamping yang dianggarkan kembali di tahun 2015 sebesar Rp7.422.909.703,00 terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan Rp6.956.544.923,00
 - 2) DKK Rp89.250.780,00 (Dana Pendamping)
 - 3) Dinas PSDA dan ESDM Rp216.360.000,00
 - 4) Badan Lingkungan Hidup Rp61.043.500,00
 - 5) Dinas Perhubungan dan Kominfo Rp20.214.500,00
 - 6) Dinas Pasar Rp79.496.000,00
 - e) Dana Bantuan Keuangan yang dianggarkan kembali di tahun 2015 sebesar Rp2.490.401.776,00 disebabkan antara lain karena keterlambatan juknis, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, tidak cukup waktu pelaksanaan lelang, kesalahan penempatan rekening yang terdiri pada SKPD:

1) Bantuan Umum	Rp. 193.762.776,00
2) BAPPEDA	Rp. 21.705.000,00
3) Bapermas dan KB	Rp. 618.000,00
4) DTKP	Rp. 216.274.000,00
5) Dinas Bina Marga	Rp. 688.426.000,00
6) Dinas PSDA dan ESDM	Rp. 342.209.000,00
7) Dishubkominfo	Rp. 20.002.000,00
8) Dinas PJPR	Rp. 76.688.000,00
9) RSUD	Rp. 282.000.000,00
10) DKK	Rp. 258.067.000,00
11) Dinas Pendidikan	Rp. 390.650.000,00

Saldo anggaran tersebut selanjutnya akan dikurangi kas non anggaran UJB (Uang Jaminan Bongkar) sebesar Rp2.259.098.000,00 dan UJPB (Uang Jaminan Pondok Boro) sebesar Rp1.476.418.564,00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Saldo Anggaran lebih Tahun 2014 sebesar Rp1.073.328.480.432,00 terdiri dari:

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2014 yang berasal dari SAL adalah sebesar Rp1.073.328.480.432,00

Penerimaan SAL Tahun 2014 terdiri dari:

	Tahun 2014 Rp	Tahun 2013 Rp	Trend %
Pendapatan Asli Daerah	1,138,367,228,493.00	925,919,310,506.00	22.94%
Pendapatan Transfer	1,958,242,860,296.00	1,787,969,405,733.00	9.52%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	69,405,952,776.00	82,682,010,621.00	-16.06%
Jumlah	3,166,016,041,565.00	2,796,570,726,860.00	13.21%
Belanja Operasi	2,155,474,360,151.00	1,881,672,488,078.00	14.55%
Belanja Modal	800,181,230,907.00	591,011,412,262.00	35.39%
Belanja Tak Terduga	1,777,048,020.00	806,709,097.00	120.28%
Jumlah	2,957,432,639,078.00	2,473,490,609,437.00	19.57%
Penerimaan Pembiayaan	912,721,021,842.00	635,457,569,772.00	43.63%
Pengeluaran Pembiayaan	48,095,579,353.00	45,816,665,353.00	4.97%
Jumlah	864,625,442,489.00	589,640,904,419.00	46.64%



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Tahun 2014	Tahun 2013	Trend
	Rp	Rp	%
SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	1,073,208,844,976.00	912,721,021,842.00	17.58%
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan	912,721,021,842.00	635,457,569,772.00	43.63%
Pembiayaan Tahun Berjalan			
Pendapatan	3,166,016,041,565.00	2,796,570,726,860.00	13.21%
Belanja	2,957,432,639,078.00	2,473,490,609,437.00	19.57%
Penerimaan Pembiayaan	912,721,021,842.00	635,457,569,772.00	43.63%
Pengeluaran Pembiayaan	48,095,579,353.00	45,816,665,353.00	4.97%
Jumlah	1,073,208,844,976.00	912,721,021,842.00	17.58%



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4.3 PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

Neraca Pemerintah Kota Semarang dapat menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan bahwa harta yang diperoleh pendanaannya bersumber dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

Total Aset Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp15.174.527.757.784,00 atau meningkat sebesar Rp 7.744.719.428.326,00 atau 104,24% dibandingkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp7.429.808.329.458,00 sebagaimana tabel berikut:

Aset	31-Dec-14	31-Dec-13	TREND
	Rp	Rp	%
	15,174,527,757,784.00	7,429,808,329,458.00	104.24%
Jumlah	15,174,527,757,784.00	7,429,808,329,458.00	104.24%

Jumlah aset diatas terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

ASET	31-Dec-14	31-Dec-13	TREND
	Rp	Rp	%
a.Aset Lancar	1,210,460,200,788.00	1,015,878,042,270.00	19.15%
b.Investasi Jangka Panjang	78,105,882,735.00	66,465,922,740.00	17.51%
c.Aset Tetap	13,717,885,116,131.00	6,119,616,888,621.00	124.16%
d.Dana Cadangan	75,671,777,153.00	47,183,424,649.00	60.38%
e.Aset Lainnya	92,404,780,977.00	180,664,051,178.00	-48.85%
Jumlah	15,174,527,757,784.00	7,429,808,329,458.00	104.24%

4.3.1 KAS

Kas merupakan pos neraca yang paling likuid. Pos ini menunjukkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2013 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLU RSUD, BLUD Terminal Mangkang serta Bendahara pada SKPD, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Pada Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.086.300.120.262,00 atau naik sebesar Rp163.548.402.918,00 (17,74%) dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp922.751.717.344,00 dengan rincian:

Kas dan Setara Kas	31-Dec-14	31-Dec-13	TREND
	Rp	Rp	%
1) Kas di Kas Daerah		0.00	0.00%
2) Bank	310,926,359,944.00	656,050,079,880.00	-52.61%
3) Deposito	725,705,769,509.00	249,000,000,000.00	191.45%
4) Kas di Bendahara Pengeluaran	9,135,385,241.00	978,269,516.00	833.83%
5) Kas di Bendahara Penerimaan	24,431,500.00	65,432,500.00	-62.66%
6) Kas di Bendahara Dana BOS	8,568,808,492.00	5,001,829,739.00	71.31%
7) Kas di BLUD	31,939,365,576.00	11,656,105,709.00	174.01%
Jumlah	1,086,300,120,262.00	922,751,717,344.00	17.72%

Saldo kas yang tertera pada neraca sebagian menunjukkan hak Pemerintah Kota Semarang yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan sebagian merupakan uang titipan sebagai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa Uang Jaminan Bongkar Reklame (UJB), Jaminan Penduduk Boro, Pajak yang belum disetor



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

dan Pendapatan yang belum disetor pada 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	Rp	Rp	%
1) Sisa Lebih Pembayaran Anggaran	1,073,208,844,976,00	912,721,021,842,00	17,58%
2) Pendapatan Retribusi yang belum di setor	0,00	65,432,500,00	-100,00%
3) Utang Perhitungan Fihak Ketiga/PFK			
A. Pajak yang belum disetor	86,858,996,00	213,120,499,00	-59,24%
B.Uang jaminan bongkar reklame	2,959,098,000,00	3,392,494,200,00	-12,78%
C. Uang Jaminan Penduduk Boro	1,476,418,564,00	1,357,818,564,00	8,73%
4)Kurang/lebih catat	91,234,00		
5) Dana Bos	8,568,808,492,00	5,001,829,739,00	71,31%
Jumlah	1,086,300,120,262,00	922,751,717,344,00	17,72%

Penjelasan yang berkaitan dengan SiLPA selengkapnya dapat dilihat pada Penjelasan Sisa Anggaran Lebih (SiLPA), dan penjelasan Utang PFK pada Catatan Utang PFK. Sedangkan rincian saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2013, dapat disajikan sebagai berikut:

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah menunjukkan keberadaan saldo Kas Daerah Kota Semarang Per 31 Desember 2014. Kas pada Kas Daerah disimpan pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang Semarang, Bank Mandiri Semarang, BNI Cabang Karangayu Semarang, BRI Cabang Patimura Semarang, BTN Cabang Semarang, Bank Mega Cabang Semarang, BTPN Cabang Semarang berupa dana di rekening giro bank dan dana di rekening deposito.

Pada PT Bank Jateng Semarang, rekening di atas dirinci dengan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah:	31-Des-14	31-Des-13	TREND
	Rp	Rp	
a. Rekening Giro	310.926.359.944,00	656.050.079.880,00	-52,61%
b. Rekening Deposito	725.705.769.509,00	249.000.000.000,00	191,45%
Jumlah	1.036.632.129.453,00	905.050.079.880,00	14,54%

Masing-masing saldo rekening Kas di Bank per 31 Desember 2014 dan 2013, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rekening Giro

Penggunaan masing masing rekening giro bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rekening Giro Bank	31-Des-14	31-Des-13	TREND
	Rp	Rp	
1. BPD Jateng 1-021-0006-8 : RKUD PAD	306.478.765.918,00	393.314.637.828,00	-22,08%
2. Bank Mandiri 135-00-0205417-7 : RKUD	2.211.512,00	37.451.182.603,00	-99,99%
3. Bank Muamalat 5-010-011710 : RKUD	0,00	14.511.218.958,00	-100,00%
4. Bank Niaga 015-01-0075-009 : RKUD	0,00	6.283.679.490,00	-100,00%
5. BRI Patimura 0000083-01-000503-30-1 : RKUD	0,00	48.210.544.182,00	-100,00%
6. BTN Cab. Smg 00013-01-30-000419-5 : RKUD	972.000,00	38.292.947.604,00	-100,00%
7. BNI Cab. Karangayu 29045202 : RKUD	8.893.950,00	91.449.490.353,00	-99,99%
8. BTPN 3863000028 : RKUD	0,00	19.823.711.539,00	-100,00%
9. Bank Syariah Mega 10000024890 : RKUD	0,00	1.962.354.559,00	-100,00%
10. Bank BPD Jateng 1-021-003341 : Jaminan Biaya Reklame	2.959.098.000,00	3.392.494.200,00	-12,78%
11. Bank BPD Jateng 1-021-005122 : Jaminan Penduduk Boro	1.476.418.564,00	1.357.818.564,00	8,73%
Jumlah	310.926.359.944,00	656.050.079.880,00	-52,61%

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- a) Rekening giro Nomor 1-021-00066-8 pada PT Bank Jateng (BPD) Cabang Semarang merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Provinsi dan Dana Pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2014 sebesar Rp306.478.765.918,00 atau turun sebesar Rp86.835.871.910,00 (-22,08%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp393.314.637.828,00. Sampai dengan 31 Desember 2014 masih terdapat SP2D yang belum terselesaikan sebesar Rp46.842.606.377,00 dan Rp484.930.810,00;
- b) Rekening giro nomor 135-00-0205417-7 pada bank Mandiri cabang Semarang merupakan rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan dana pemerintah kota Semarang, pencairan dan penerimaan bunga giro dikurangi biaya administrasi dan materai untuk deposito, serta menampung penerimaan pajak daerah PBB. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.211.512,00 atau turun sebesar Rp37.448.971.091,00 (99,99%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 Rp37.451.182.603,00
- c) Rekening giro Nomor 5010011710 pada Bank Muamalat Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan dana pemerintah , pencairan dan penerimaan bunga giro. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp14.511.218.958,00 (100%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp14.511.218.958,00
- d) Rekening giro nomor 015-01-00775-009 pada CIMB Niaga Semarang merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk menampung Penerimaan Pajak Daerah (pajak hotel,restoran dll), dana pemerintah kota Semarang,pencairan dan penerimaan bunga giro dikurangi biaya administrasi. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2014 Rp0,00 atau turun sebesar Rp6.283.679.490,00 (100%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.283.679.490,00
- e) Rekening giro Nomor 0083-01-000503-30-1 pada BRI Patimura Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kota Semarang, pencairan dan penerimaan bunga giro dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00, atau turun sebesar Rp48.210.544,18200 (100%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp48.210.544.182,00.
- f) Rekening giro Nomor 00013-01-30-000419-5 pada Bank BTN Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk menampung penempatan dana pemerintah , pencairan dan penerimaan bunga giro. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2014 sebesar Rp972.000,00 atau turun sebesar Rp38.291.975.604,00 (100%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp38.292.947.604,00
- g) Rekening giro Nomor 0029-045202 pada BNI Cabang Karangayu



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk menampung penerimaan pajak daerah PBB, penempatan dana pemerintah, pencairan dan penerimaan bunga giro. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2014 Rp8.893.950,00 atau turun sebesar Rp91.440.596.403,00 (99,99%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp91.449.490.353,00

- h) Rekening giro Nomor 0386300-0028 pada BTPN Cabang Semarang merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan dana pemerintah, pencairan dan penerimaan bunga giro dikurangi biaya administrasi. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp19.823.711.539,00 (100%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp19.823.711.539,00
- i) Rekening giro Nomor 100-00-2489-0 pada Bank Syariah Mega Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan dana pemerintah kota semarang, pencairan dan penerimaan bunga giro dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp1.962.354.559,00 (100%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.962.354.559,00
- j) Rekening giro Nomor 1-021-003341 pada Bank Jateng Cabang Semarang merupakan Rekening Uang Jaminan Bongkar Reklame (UJB) yang digunakan untuk penempatan dan pencairan uang titipan jaminan bongkar reklame. Uang tersebut bukan merupakan PAD, yang merupakan PAD hanya bunga giro dan uang jaminan yang masa tenggang berlakunya sudah habis tetapi tidak dicairkan oleh Pemohon. Bunga giro setiap akhir bulan otomatis dipindahbukukan ke rekening PAD. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.959.098.000,00 atau turun sebesar Rp390.355.539.828,00 (12,78%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp393.314.637.828,00
- k) Rekening giro Nomor 1-021-00512-2 pada Bank Jateng Cabang Semarang merupakan Rekening Uang Jaminan Penduduk Boro (UPJPB) yang digunakan untuk penempatan dan pencairan uang titipan penduduk boro. Uang tersebut bukan merupakan PAD, yang merupakan PAD hanya bunga giro dan uang jaminan yang masa tenggang berlakunya sudah habis tetapi tidak dicairkan oleh pemohon. Bunga giro setiap akhir bulan otomatis dipindahbukukan ke rekening PAD. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.476.418.564,00 atau naik sebesar Rp118.600.000,00 (8,73%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.357.818.564,00

2) *Rekening Deposito*

Rekening ini adalah Rekening Deposito milik Pemerintah Kota Semarang yang penempatan rekeningnya pada 7 bank dibawah ini:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Rekening Deposito	31-Des-14	31-Des-13	Trend
	Rp	Rp	%
1 Bank Jateng	350.000.000.000,00	200.000.000.000,00	75,00%
2 CIMB Niaga	0,00	40.000.000.000,00	0,00%
3 Bank Bukopin	0,00	2.000.000.000,00	0,00%
4 BRI Agro	0,00	5.000.000.000,00	0,00%
5 BTN Syariah	0,00	2.000.000.000,00	0,00%
6 Bank Mandiri	45.000.000.000,00	0,00	0,00%
7 BNI Karangayu	129.000.000.000,00	0,00	0,00%
8 BRI Patimura	100.000.000.000,00	0,00	0,00%
9 Bank Tabungan Negara	69.000.000.000,00	0,00	0,00%
10 BTPN	22.705.769.509,00	0,00	0,00%
11 Bank Mega	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
	725.705.769.509,00	249.000.000.000,00	191,45%

- a) Penempatan deposito pada Bank Jateng cabang Semarang dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp350.000.000.000,00 naik sebesar Rp150.000.000.000,00 (75%) dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000.000,00
- b) Penempatan deposito pada CIMB Niaga cabang Semarang dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp40.000.000.000,00 (100%) dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp40.000.000.000,00.
- c) Penempatan deposito pada bank Bukopin cabang Semarang dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp2.000.000.000,00 (100%) dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00.
- d) Penempatan deposito pada BRI Agro cabang Semarang dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp5.000.000.000,00 (100%) dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00.
- e) Penempatan deposito pada BTN Syariah cabang Semarang dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp2.000.000.000,00 (100%) dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00.
- f) Penempatan deposito pada BTPN cabang Semarang dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp22.705.769.509,00 atau naik sebesar Rp22.705.769.509,00 (100%) dibandingkan per 31 Desember 2013 Rp0,00. Deposito sebesar Rp22.705.769.509,00 pada BTPN ini tidak diakui oleh BTPN. Ketekoran kas terjadi sejak tahun 2008 oleh oknum BTPN dan masih dalam proses penyelesaian hukum.
- g) Penempatan deposito pada Bank Mandiri cabang Semarang dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp45.000.000.000,00 atau



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

naik sebesar Rp45.000.000.000,00 (100%) dibandingkan per 31 Desember 2013 Rp0,00.

- h) Penempatan deposito pada BNI cabang Karangayu dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp129.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp129.000.000.000,00 (100%) dibandingkan per 31 Desember 2013 Rp0,00.
- i) Penempatan deposito pada BTN cabang Semarang dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp69.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp69.000.000.000,00 (100%) dibandingkan per 31 Desember 2013 Rp0,00.
- j) Penempatan deposito pada BRI cabang Patimura dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp100.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp100.000.000.000,00 (100%) dibandingkan per 31 Desember 2013 Rp0,00.
- k) Penempatan deposito pada Bank Mega cabang Semarang dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp10.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp10.000.000.000,00 (100%) dibandingkan per 31 Desember 2013 Rp0,00.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas per 31 Desember 2014 belum disetorkan pada kasda sebesar Rp9.135.385.241,00 atau naik sebesar Rp8.157.115.765,00 (833,83%), saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp978.269.516,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Kas di Bendahara Pengeluaran	31-Dec-14	31-Dec-13	TREND
	Rp	Rp	%
a) Sisa UP			
1 Dinas Pendidikan	41,136,617.00	4,278,558.00	0.00%
2 DKK	5,259,831,506.00	26,819,500.00	0.00%
3 Dinas Tata Kota dan Perumahan	32,616,126.00	551,068.00	5818.71%
4 Dishubkominfo	0.00	2,455,525.00	-100.00%
5 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	0.00	9,213,989.00	0.00%
6 Bappermas, Perempuan dan KB	0.00	1,500,000.00	0.00%
7 Satpol-PP	11,027,700.00	0.00	0.00%
8 Sekretariat Daerah	0.00	48,565,500.00	0.00%
9 DPKAD	0.00	2,879,670.00	0.00%
10 Kecamatan Semarang Selatan	0.00	2,739,541.00	0.00%
11 Kecamatan Semarang Utara	738,631.00	1,350,000.00	-45.29%
12 Kecamatan Semarang Timur	39,242,532.00	3,873,161.00	913.19%
13 Kecamatan Semarang Tengah	206,536.00	0.00	0.00%
14 Kecamatan Pedurungan	9,213,067.00	0.00	0.00%
15 Kecamatan Gunungpati	0.00	345,063.00	0.00%
16 Dinas Bina Marga	0.00	664,031,000.00	0.00%
17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,447,560.00	825,000.00	0.00%
18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15,526,750.00	0.00	0.00%
19 Sekretariat DPRD	3,653,691,894.00	0.00	0.00%
20 Inspektorat	30,244,000.00	0.00	0.00%
21 Kecamatan Gajah Mungkur	460,422.00	0.00	0.00%
22 Kecamatan Candisari	17,851,900.00	0.00	0.00%
23 Kantor Pendidikan dan Latihan	350,000.00	0.00	0.00%
24 Badan Lingkungan Hidup	19,800,000.00	0.00	0.00%
25. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0.00	208,841,941.00	0.00%
Jumlah a	9,135,385,241.00	978,269,516.00	833.83%

Saldo Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2014 sebesar Rp9.135.385.241,00 atau naik sebesar Rp8.157.115.725,00 (833,83%). Kas di bendahara pengeluaran merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2014 dan tahun 2013 yang merupakan sisa UP yang masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran dan belum disetor Ke Kas Daerah, serta pajak yang belum disetor ke Kas Negara. Kas di Bendahara Pengeluaran termasuk di dalamnya adalah Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dinas Kesehatan sebesar Rp4.865.498.553,00

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan adalah saldo kas yang masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember 2014 belum disetor ke kasda sebesar Rp24.431.500,00 atau turun sebesar (Rp41.001.000,00) dari saldo kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp65.432.500,00 (-62,66%). Kas bendahara penerimaan akhir tahun yang masih berada pada bendahara penerimaan SKPD dengan rincian sebagai berikut;

Kas di Bendahara Penerimaan	31-Des-14	31-Des-13	TREND
	Rp	Rp	%
1. Dinas Perhubungan	6.617.500	2.777.500	138%
2. Dinas Kesehatan Kota	4.175.000	1.635.000	155%
3. Sekretaris Daerah	13.450.000	61.020.000	-78%
4. Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga	189.000	-	100%
Jumlah	24.431.500,00	65.432.500,00	-62,66%

d. Kas di BLUD



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Saldo Kas BLUD adalah kas yang berada pada BLU RSUD, BLUD BRT Terminal Mangkang per 31 Desember 2014 sebesar Rp31.939.365.576,00 atau naik sebesar Rp20.283.259.867,00 dari saldo kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp11.656.105.709,00 (174%) dapat dirinci:

Kas di BLUD	31-Des-14	31-Des-13	TREND
	Rp	Rp	%
Kas di BLUD RSUD	30.525.824.100,00	9.329.918.962,00	227,18%
Kas di BLUD BRT	1.413.541.476,00	2.326.186.747,00	-39,23%
Jumlah	31.939.365.576,00	11.656.105.709,00	174,01%

Rekening Kas di BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rekening BLUD RSUD Kota Semarang merupakan rekening yang digunakan untuk penempatan, pencairan dana BLUD RSUD dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi rekening tersebut posisi per 31 Desember 2014 sebesar Rp30.525.824.100,00 atau naik sebesar Rp21.195.905.138,00 (227,18%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp9.329.918.962,00. Saldo kas RSUD terdiri dari :
 - a) Kas pada Bank BPD Jateng sebesar Rp8.184.587.354,00;
 - b) Deposito yang berjangka waktu 1 bulan pada BTN Syariah sebesar Rp1.800.000.000,00 dan sebesar Rp2.000.000.000,00
 - c) Deposito yang berjangka waktu 1 bulan pada BRI sebesar Rp2.000.000.000,00 dan sebesar Rp2.000.000.000,00
 - d) Deposito berjangka 3 bulan di Bank Jateng sebesar Rp2.000.000.000,00; dan berjangka 1 bulan Rp4.000.000.000,00; Rp1.000.000.000,00; Rp1.000.000.000,00; Rp2.000.000.000,00; Rp2.500.000.000,00; dan Rp2.000.000.000,00;
 - e) Kas di Bendahara Penerimaan Rp41.236.746,00
- 2) Rekening BLUD Terminal Mangkang Kota Semarang terdapat pada Bank BNI 46 nomor rekening 555-8555-804, kondisi per 31 Desember 2014 sebesar Rp632.792.357,00 , Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 2-056-13378-2 dengan kondisi per 31 Desember 2014 sebesar Rp597.023,00 dan BRI nomor rekening 0083-01-000084-56-9 sebesar Rp710.700.496,00 Sehingga total rekening di bank per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.344.089.876,00 atau turun sebesar Rp912.645.271,00 (-39%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.326.186.747,00.

e. Kas di Bendahara Dana Non APBD

Saldo Kas di bendahara Dana Non APBD per 31 Desember 2014 merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara Dana BOS, Dana Blockgrant dan Dana Komite Sekolah pada SD, SLTP , SLTA pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Kas di Bendaara Dana Non APBD	31-Dec-14	31-Dec-13	TREND
	Rp	Rp	%
Dinas Pendidikan	8,568,808,492.00	5,001,829,739.00	71.31%
Jumlah	8,568,808,492.00	5,001,829,739.00	71.31%

REKAPITULASI SALDO DANA BOS TAHUN		SISA DANA
1	SD / 350 SKLH	3,115,226,831.00
2	SMP / 41 SKLH	2,264,583,609.00
3	SMA / 16 SKLH	0.00
4	SMK / 11 SKLH	0.00
5	Blockgrant	1,412,045,150.00
6	Komite Sekolah	1,776,952,902.00
TOTAL		8,568,808,492.00

Jumlah kas ini bukan merupakan bagian dari SILPA namun sebagai bagian dari pengakuan pendapatan secara akrual.

4.3.2 PIUTANG

Piutang daerah merupakan hak Pemerintah Kota Semarang yang berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut.

a. Piutang Pajak

Piutang Pajak merupakan hak pemerintah terhadap pendapatan tersebut. Piutang ini terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Bidang Pajak DPKAD, sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak tahun 2014 sebesar Rp306.224.578.799,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.392.361.928,00 atau 12,65% dari piutang pajak Tahun 2013 sebesar Rp271.832.216.871,00 dengan rincian:

Piutang Pajak	31-Dec-14	31-Dec-13	TREND
	Rp	Rp	%
Pajak Hotel	1,179,628,522.00	330,571,453.00	256.85%
Pajak Restoran	1,812,472,507.00	1,565,470,250.00	15.78%
Pajak Hiburan	1,515,807,662.00	1,206,784,293.00	25.61%
Pajak Reklame	10,160,770,975.00	8,719,296,775.00	16.53%
Pajak Galian Gol C	5,783,999.00	5,783,999.00	0.00%
Pajak Parkir	336,851,225.00	234,122,440.00	43.88%
Pajak Air Tanah	243,957,330.00	307,681,632.00	-20.71%
BPHTB	4,595,134,370.00	4,595,134,370.00	0.00%
PBB Perkotaan	286,374,172,209.00	254,867,371,659.00	12.36%
Jumlah	306,224,578,799.00	271,832,216,871.00	12.65%

Piutang Galian Golongan C dan BPHTB tidak mengalami kenaikan ataupun pengurangan dikarenakan merupakan piutang tak tertagih yang umur piutangnya lebih dari 1 tahun.

Saldo akhir piutang PBB tahun 2014 sebesar Rp286.374.172.209,00 merupakan akumulasi piutang PBB karena adanya pelimpahan piutang PBB



PEMERINTAH KOTA SEMARANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(pendaerahan PBB) dan piutang PBB baru setelah pendaerahan PBB. Piutang PBB berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Piutang PBB –P2 dan Aset Sitaan Nomor: BA-75/WPJ.10/2012, Nomor: 971.11/319 tanggal 30 Januari 2012 adalah sebesar Rp209.690.801.433,00. Pada tahun 2013 setelah dilakukan penelusuran data piutang PBB dan karena adanya realisasi pembayaran diperoleh saldo piutang PBB limpahan sebesar Rp174.463.237.813,00. Piutang PBB limpahan tersebut telah disajikan sebagai Piutang Pajak pada Neraca Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 (Audited). Ditambah dengan piutang PBB baru (setelah pendaerahan PBB) didapatkan saldo akhir piutang PBB Tahun 2013 sebesar Rp254.867.371.659,00. Berdasarkan database SIM-PBB pada tahun 2014 dilakukan lagi penelusuran terhadap piutang PBB limpahan, dari hasil penelusuran diketahui bahwa masih terdapat piutang pajak PBB sebesar Rp466.244.555,00 yang belum disajikan pada neraca sedangkan pada database SIM-PBB terdapat Nomor Objek Pajak (NOP) dan Wajib Pajaknya sehingga perlu dilakukan koreksi penambahan piutang PBB sebesar Rp466.244.555,00 pada tahun 2014.

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan penerimaan terhadap pendapatan retribusi. Piutang Retribusi di sebabkan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu belum di lakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi Daerah.

Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2014 sebesar Rp9.792.767.879,00 mengalami kenaikan sebesar Rp926.973.428,00 atau 10,46% dari piutang Retribusi Tahun 2013 sebesar Rp8.865.794.451,00 dengan rincian :

Piutang Retribusi	31-Dec-14	31-Dec-13	TREND
	Rp	Rp	%
a. Retribusi Pada Dinas Tata Kota dan Perumahan	1,938,127,756.00	634,852,756.00	205.29%
b. Retribusi Penyelenggaraan ijin Reklame (PJPR)	2,721,418,250.00	2,852,638,650.00	-4.60%
c. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	1,716,690,787.00	1,736,490,787.00	-1.14%
d. Retribusi Sewa Kios Terminal Terboyo (Dinas Perhubungan)	141,842,500.00	141,842,500.00	0.00%
e. Retribusi ijin ops taksi (Dinas Perhubungan)	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00%
f. Retribusi Pelayanan Kebersihan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	1,016,101,000.00	1,100,690,000.00	-7.69%
g. Retribusi Atas Pemakaian Kekayaan Daerah (BLH)	29,250,000.00	52,750,000.00	-44.55%
h. Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Pasar)	2,209,537,586.00	2,326,729,758.00	-5.04%
Jumlah Piutang Retribusi	9,792,767,879.00	8,865,794,451.00	10.46%

Dari beberapa piutang retribusi yang mengalami penurunan atau sudah tertagih yaitu dari retribusi Penyelenggaraan Ijin Reklame pada PJPR yaitu terjadi penurunan sebesar -4,50%, retribusi Pelayanan Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar -7,69%, retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah pada



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BLH sebesar -44,55% dan retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pasar sebesar -5,04%.

Piutang Retribusi Reklame pada Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame sebesar Rp2.721.418.250,00 merupakan data tagihan retribusi reklame per 31 Desember 2014 dimana terjadi penurunan sebesar -5%.

Pemerintah Kota Semarang memiliki piutang kepada penghuni rusunawa atas tagihan pembayaran retribusi sewa rusunawa, rincian piutang sebagai berikut:

Setelah dilakukan validasi piutang retribusi bertambah sebesar Rp.1.303.275.000,00 sedangkan senilai Rp2.227.990.500,00 tidak di masukkan dalam neraca per 31 desember 2014 karena belum dilakukan validasi.

c. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang yang dilakukan pemerintah kota dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan.

Penyisihan piutang tahun 2014 sebesar Rp276.344.961.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.780.065.060,00 atau 12,53% dari Tahun 2013 sebesar Rp245.564.896.340,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyisihan Piutang	31-Dec-14	31-Dec-13	TREND
	Rp	Rp	%
Piutang Pajak (DPKAD)	(267,867,750,313,00)	(238,504,988,602,00)	12.31%
Piutang Retribusi Penyelenggaraan Reklame (Dinas PJPR)	(2,671,448,670,00)	(2,691,090,280,00)	-0.73%
Piutang Retribusi (Dinas Tata Kota & Perumahan)	(1,938,127,756,00)	(634,852,756,00)	205.29%
Piutang Retribusi (Dinas Perhubungan)	(1,878,333,287,00)	(1,878,333,287,00)	0.00%
Piutang Retribusi (Badan Lingkungan Hidup)	(1,100,000,00)	(8,550,000,00)	-87.13%
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Pasar)	(1,988,201,374,00)	(1,847,081,415,00)	7.64%
Jumlah	(276,344,961,400,00)	(245,564,896,340,00)	12.53%

Untuk Penyisihan Piutang Pajak pada DPKAD per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp267.867.750.313,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Penyisihan Piutang Pajak	Jumlah	
		Piutang	Penyisihan
1	Pajak Hotel	1.179.628.522,00	280.655.942,00
2	Pajak Restoran	1.812.472.507,00	1.047.235.068,00
3	Pajak Hiburan	1.515.807.662,00	1.188.415.077,00
4	Pajak Reklame	10.160.770.975,00	7.986.253.875,00
5	Pajak Galian Gol C	5.783.999,00	5.783.999,00
6	Pajak Parkir	336.851.225,00	216.723.690,00
7	Pajak Air tanah	243.957.330,00	119.568.745,00
8	BPHTB	4.595.134.370,00	4.595.134.370,00
9	PBB	286.374.172.209,00	252.427.979.547,00
Jumlah		306.224.578.799,00	267.867.750.313,00

d. Belanja Dibayar Dimuka



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran biaya tahun 2014 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2014 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang. Biaya dibayar dimuka tahun 2014 sebesar Rp7.241.624.151,00 mengalami kenaikan mencapai Rp4.071.506.450,00 atau 128,43% dari Tahun 2013 sebesar Rp3.170.117.701,00 dengan rincian :

Belanja di bayar di muka	31-Dec-14	31-Dec-13	TREND
	Rp	Rp	%
A. Premi Asuransi Aset Daerah	3.132.055.948	1.854.731.666	68,87%
B. Premi Asuransi Jiwa Anggota DPRD	-	202.942.466	-100,00%
C. Premi Asuransi Santunan Kematian Warga	1.334.486.598	1.097.945.205	21,54%
D. Bahan Bakar Minyak Rumah Pompa (PSDA & ESDM)	2.760.049.200	-	100%
E. Premi Asuransi Jiwa PJPR	15.032.405	14.498.364	3,68%
Jumlah	7.241.624.151,00	3.170.117.701,00	128,43%

Nilai Pertanggungan Premi Asuransi Belanja Bayar di Muka tahun 2014 terdiri dari:

Nama Asuransi	SKPD	Nilai Pertanggungan	Keterangan
A. Premi Asuransi Aset Daerah;	DPKAD		
~ Gedung		1.570.948.377,00	
~ Kendaraan Dinas		1.561.107.571,00	
B. Premi Asuransi Jiwa Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	0,00	
C. Premi Asuransi Santunan Kematian Warga	Sekretariat Daerah	2.155.044.700,00	
D. Premi Asuransi Jiwa PJPR	Dinas PJPR	3.315.000.000,00	
		8.602.100.648,00	

e. Piutang Lainnya

Piutang lainnya adalah piutang Pemerintah Kota Semarang terhadap pihak ketiga di luar piutang pajak dan retribusi. Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp51.195.303.117,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp34.859.925.426,00 atau 213,40%. dari tahun 2013 sebesar Rp16.335.377.691,00 dengan rincian:

Piutang Lainnya	31-Des-14	31-Des-13	TREND
	Rp	Rp	%
1. Piutang Pasien Askes (RSUD)	0,00	646.392.171,00	-100,00%
2. Piutang Pasien Umum (RSUD)	804.686.041,00	578.722.182,00	39,05%
3. Piutang Pasien Jamkesmas/BPJS (RSUD)	7.847.295.544,00	10.370.055.453,00	-24,33%
4. Piutang Pasien ASTEK (RSUD)	207.502.493,00	325.770.026,00	-36,30%
5. Piutang BLU Terminal Mangkang (Dinas Perhubungan)	57.000,00	2.500,00	2180,00%
6. Piutang SPBU Pandanaran (DPKAD)	3.353.900.000,00	3.353.900.000,00	0,00%
7. Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir (DPKAD)	50.590.231,00	50.360.496,00	0,46%
8. Piutang Bunga Deposito (RSUD)	70.673.523,00	23.605.525,00	199,39%
9. Piutang Bunga Deposito (DPKAD)	37.724.483.676,00	114.395.161,00	32877,34%
10. Piutang kelebihan pembayaran tunjangan pensiunan (DPKAD)	63.476.778,00	43.456.952,00	100,00%
11. Piutang Hewan Ternak pada Masyarakat (Dinas Pertanian)	1.072.637.831,00	828.717.225,00	100,00%
Jumlah	51.195.303.117,00	16.335.377.691,00	213,40%

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

f. Penyisihan Piutang Lainnya

Tahun 2014 terdapat akun penyisihan piutang lainnya untuk menyajikan penyisihan piutang pada akun piutang lainnya yang pada tahun 2013 masih menjadi satu pada akun penyisihan piutang dengan rincian sebagai berikut:

Penyisihan Piutang	31-Des-14	31-Des-13	TREND
	Rp	Rp	%
1. Piutang SPBU Pandanaran(DPKAD)	(3.353.900.000,00)	(3.353.900.000,00)	0,00%
2. Piutang Pendapatan atas Dana Bergulir (DPKAD)	(50.390.231,00)	(49.215.496,00)	2,39%
3. Piutang ASTEK (RSUD)	(79.917.981,00)	(16.267.466,00)	391,27%
4. Piutang Perorangan/Umum (RSUD)	(635.436.428,00)	(505.987.994,00)	25,58%
5. Piutang Jamkesmas (RSUD)	(91.656.182,00)	(1.581.293.017,00)	-94,20%
6. Piutang Hewan Ternak pada Masyarakat (Dinas Pertanian)	(533.782.931,00)	(366.945.225,00)	45,47%
Jumlah	(4.745.083.753,00)	(5.873.609.198,00)	-19,21%

4.3.3 PERSEDIAAN

Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan tersebut per 31 Desember 2014 sebesar Rp30.795.854.733,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.565.469.017,00 atau -30,58% dari Tahun 2013 sebesar Rp44.361.323.750,00.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Persediaan	31-Dec-14	31-Dec-13	TREND
	Rp	Rp	%
1. Alat Kebersihan	611,386,963.00	473,960,721.00	29.00%
2. Alat Listrik dan Elektronik	1,278,834,786.00	692,321,450.00	84.72%
3. Alat Peraga dan peralatan medis	422,289,022.00	0.00	#DIV/0!
4. ATK	3,427,186,023.00	2,339,088,155.00	46.52%
5. Barang Cetakan	4,360,373,842.00	4,641,053,190.00	-6.05%
7. Bibit Tanaman	409,850,550.00	418,303,550.00	-2.02%
9. Makanan Tambahan	0.00	275,071,600.00	-100.00%
10. Materai dan Perangko	26,000.00	6,033,000.00	-99.57%
11. Obat obatan	15,308,971,790.00	14,401,644,166.00	6.30%
12. Material	0.00	466,555,600.00	-100.00%
13. Peralatan Kerja	0.00	16,607,000.00	-100.00%
15. Peralatan Penanggulangan Bencana	405,167,484.00	1,592,338,360.00	-74.56%
16. Vaksin	0.00	578,671,510.00	-100.00%
17. Suku Cadang	0.00	66,511,320.00	-100.00%
18. Pelumas dan Grease	0.00	102,058,880.00	-100.00%
19. Obat obatan Hewan	0.00	21,320,750.00	-100.00%
20. Obat obatan Tanaman	0.00	340,797,500.00	-100.00%
21. Peralatan Peternakan dan Pertanian	0.00	40,578,100.00	-100.00%
22. Peralatan Perkebunan	0.00	107,071,100.00	-100.00%
23. Bahan Makanan Pokok	357,269,600.00	0.00	#DIV/0!
24. Perlengkapan Rumah Tangga	0.00	93,994,950.00	-100.00%
25. Alat Olah raga	55,114,300.00	19,728,650.00	179.36%
26. Reagen	0.00	347,036,180.00	-100.00%
27. Gas Oksigen	0.00	637,000.00	-100.00%
28. Bahan Makanan Gizi	0.00	66,485,518.00	-100.00%
29. Air Minum Galon	0.00	36,000.00	-100.00%
30. Bahan Laboratorium	0.00	1,998,500.00	100.00%
31. Paving pada masyarakat yang belum ada BAST	0.00	17,251,421,000.00	100.00%
32. Bahan Bangunan	964,893,000.00	0.00	100.00%
33. Bahan Kimia	407,330,470.00	0.00	100.00%
34. Alat Penanggulangan Kebakaran	1,973,556,465.00	0.00	100.00%
35. Perlengkapan Bengkel	198,551,500.00	0.00	100.00%
36. Peralatan Perkebunan dan Pertanian	172,149,780.00	0.00	100.00%
37. Bahan Bakar Minyak	262,707,385.00	0.00	100.00%
38. Suku Cadang Sarana Mobilitas	72,055,630.00	0.00	100.00%
39. Alat Kontrasepsi	108,140,143.00		
Jumlah	30,795,854,733.00	44,361,323,750.00	-30.58%

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2014 pada SKPD dapat dilihat sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Persediaan per SKPD	31-Dec-14	31-Dec-13	TREND
	Rp	Rp	%
1. Dinas Pendidikan	3,082,264,921.00	1,615,122,327.00	90.84%
2. Dinas Kesehatan Kota	12,212,519,650.00	13,025,732,734.00	-6.24%
3. Rumah Sakit Umum Daerah	4,045,119,593.00	2,738,622,406.00	47.71%
4. Dinas Bina Marga	1,154,934,415.00	447,881,500.00	157.87%
5. Dinas PSDA dan ESDM	155,666,900.00	3,389,240.00	4492.97%
6. Dinas Kebakaran	2,431,848,349.00	1,058,930,895.00	129.65%
7. Dinas Tata Kota dan Permukiman	0.00	17,251,421,000.00	100.00%
8. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	790,674,750.00	538,524,300.00	46.82%
9. BAPPEDA	5,885,295.00	1,248,900.00	371.24%
10. Dishubkominfo + BLU	1,397,459,743.00	1,284,661,399.00	8.78%
11. Badan Lingkungan Hidup	655,900.00	442,200.00	0.00%
12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan	2,417,000.00	5,456,550.00	-55.70%
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,308,424,195.00	1,731,014,504.00	-24.41%
14. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	264,449,050.00	335,566,690.00	-21.19%
15. BPBD	162,266,600.00	625,593,965.00	-74.06%
16. Dinas Koperasi dan UKM	27,276,950.00	22,136,000.00	23.22%
17. BPPT	157,023,825.00	54,998,725.00	185.50%
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26,189,930.00	23,131,538.00	13.22%
19. Sekretariat Daerah	1,105,302,950.00	1,239,529,075.00	-10.83%
20. DPKAD	788,739,145.00	1,069,681,570.00	-26.26%
21. Badan Kepegawaian Daerah	12,663,950.00	23,208,657.00	-45.43%
22. Dinas Pertanian	801,321,265.00	930,842,650.00	-13.91%
23. Inspektorat	10,906,775.00	19,611,675.00	0.00%
24. Dinas Pasar	430,276,000.00	314,575,250.00	36.78%
25. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1,689,000.00	0.00	
26. Kantor Pendidikan dan Latihan	105,633,800.00	0.00	
27. Bapermasper dan KB	314,244,782.00		
Jumlah	30,795,854,733.00	44,361,323,750.00	-30.58%

Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor. 32 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang, bahwa metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode fisik, sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO (First In First Out). Khusus persediaan obat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang sebesar Rp11.502.774.377,67 yang terdiri dari persediaan obat di Instalasi Farmasi (IF) Rp7.687.271.981,18 dan di Puskesmas sebesar Rp3.815.502.396,49 pengeluaran persediaan diperhatikan terlebih dahulu masa kadaluarsanya lebih pendek akan dikeluarkan lebih dahulu tanpa memperhatikan waktu obat tersebut masuk gudang. Jika persediaan obat tersebut mempunyai masa kadaluarsa yang sama maka digunakan metode FIFO.

Saldo Persediaan sebagaimana tersebut diatas, sudah tidak termasuk persediaan obat yang sudah rusak atau tidak dapat digunakan atau kadaluwarsa yaitu pada RSUD sebesar Rp10.044.974,00 serta barang cetakan yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi pada DPKAD dengan rincian :

Nama Barang Cetakan	Jumlah Buku	Jumlah lembar
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan		



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1	Karcis Permainan Golf	84	8.400
2	Karcis Permainan Golf	84	8.400
3	Karcis Permainan Golf	84	8.400
4	Karcis Pajak Restoran (PKL)	30	3.000
5	Karcis Pajak Restoran (PKL)	40	4.000
6	Karcis Pajak Restoran (PKL)	175	17.500
7	Karcis Pajak Restoran (PKL)	30	3.000
8	Nota Karaoke	130	6.500
9	Nota Bilyard	95	4.750
10	Nota Galian C	125	12.500
11	Nota Pembayaran Sewa Gedung	74	7.400

Meskipun barang cetakan pada DPKAD tidak dapat lagi dipakai namun belum ditindaklanjuti dengan usulan penghapusan dan pemusnahan.

Pada SKPD Dinas Pasar juga terdapat persediaan rusak berupa barang cetak karcis yang akan dihapuskan menunggu Surat Keputusan Penghapusan. Persediaan yang rusak pada Dinas Pasar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN		Persediaan Yang Rusak
	1	2	
BARANG CETAK KARCIS			
1	Karcis Harian Pasar Nom. Rp. 400,--	(Perda Lama)	15,000,000
2	Karcis Sewa Lahan PKL Nom.Rp.200,-	(Perda Lama)	2,700,000
3	Karcis Sampah Pasar Nom. Rp. 100,--	(Perda Lama)	1,800,000
4	Karcis Sampah Pasar Nom. Rp. 150,--	(Perda Lama)	10,500,000
5	Karcis Kebersihan PKL Nom. 100,-	(Perda Lama)	1,800,000
	Jumlah		31,800,000

Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Semarang juga terdapat persediaan barang yang rusak berupa tinta faximile, tinta Epson, stempel tanggal dan kain seragam kekhy dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PERSEDIAAN YANG RUSAK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	A. ATK			
	Tinta Faxilimie	6	500.000	3.000.000
2.	Tinta Faximilie	6	480.000	2.880.000
	Stempel Tanggal	15	17.672	265.080
	Stempel Tanggal	3	29.000	87.000
	Tinta Epson N 73	2	76.000	152.000



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

B. BARANG LAINNYA Kain seragam kekhy	1	102.025	102.025
JUMLAH			6.486.105

4.3.4 INVESTASI JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomik sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2014 sebesar Rp78.105.882.735,00 mengalami kenaikan mencapai Rp11.639.959.995,00 atau 17,51% dari Tahun 2013 sebesar Rp66.465.922.740,00 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Non Permanen	3.781.112.967,00	3.619.379.238,00	4,47%
Permanen	74.324.769.768,00	62.846.543.502,00	18,26%
JUMLAH	78.105.882.735,00	66.465.922.740,00	17,51%

Investasi tersebut per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Investasi Non Permanen

Investasi ini merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Semarang sesuai Peraturan Walikota dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Investasi non permanen saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.700.000.000,00 tidak mengalami kenaikan dari Tahun 2013 sebesar Rp4.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Non Permanen	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Melalui Bank Pasar	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00%
Melalui Bank Muamalat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00%
Melalui Bank Jateng	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00%
JUMLAH	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00%

Investasi non permanen berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.700.000.000,00 terdapat pada 3 Bank yaitu BPR Bank Pasar Semarang, Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Jateng. Dana Bergulir dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Dana Bergulir sebesar Rp2.700.000.000,00 melalui Bank Pasar digulirkan pada Koperasi dan UKM secara bertahap mulai tahun 2001 sebesar Rp110.000.000,00, tahun 2003 sebesar Rp470.000.000,00, tahun 2004 sebesar Rp940.000.000,00, tahun 2005 sebesar Rp180.000.000,00, tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00. Mendasarkan pada laporan perkembangan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

dan UKM, dana bergulir pada koperasi dan UKM mengalami kekurang lancaran dalam pengembaliannya. Adapun perkembangannya sebagai berikut :

- Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada Koperasi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.229.244.094,00.

- Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada UKM dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.328.612.215,00.

- Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada LKM dari tahun 2005 sampai tahun 2014 sebesar Rp.239.038.156,00

2) Dana Bergulir melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI) Semarang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang di salurkan pada Koperasi dan UKM (Usaha Menengah Kecil) di Kota Semarang. Berdasarkan laporan perkembangan Dana Bergulir terdapat sisa pinjaman pokok sebagai berikut :

- Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada Koperasi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 Rp.124.166.867,00.

- Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada UKM sebesar Rp.78.273.831,00.

3) Dana Bergulir sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui Bank Jawa Tengah yang disalurkan pada Koperasi dan UKM dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

- Sisa pinjaman pokok yang disalurkan Koperasi sebesar Rp13.333.333,00 pada UMKM sisa pinjaman pokok sebesar Rp.64.583.333,00. Pada LKM sisa pinjaman pokok sebesar Rp.375.323.500,00.

- Sisa pinjaman bunga yang kurang lancar yang akan menjadi Piutang Pendapatan Bunga yang berada pada SKPD.

b. Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen

Cadangan ini merupakan pencadangan yang dilakukan terhadap tunggakan pokok dana bergulir yang masih ada dan belum dibayarkan oleh Penerima dana bergulir, dasar penghitungan cadangan kerugian investasi non permanen menggunakan sama dengan kebijakan penghitungan penyisihan piutang. Per 31 Desember 2014 sebesar Rp918.887.033,00 mengalami penurunan mencapai Rp161.733.729,00 atau 185,03% dari Tahun 2013 sebesar Rp1.080.620.762,00 dengan rincian :

Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Dinas Koperasi & UKM	918.887.033,00	(1.080.620.762,00)	-185,03%
JUMLAH	918.887.033,00	(1.080.620.762,00)	-185,03%

c. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akun ini per 31 Desember 2014 sebesar Rp74.324.769.768,00 mengalami kenaikan mencapai Rp11.478.226.266,00 atau 18,26% dari Tahun 2013 sebesar Rp.62.846.543.502,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Investasi Permanen	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Perusda Percetakan	4,316,420,815.00	4,408,210,646.00	-2.08%
PD BPR Bank Pasar	4,802,173,966.00	3,897,443,362.00	23.21%
PD BPR/BKK cabang Semarang Tengah	9,349,999,132.00	8,349,999,132.00	11.98%
Perusda Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	7,475,375,854.00	6,149,090,362.00	21.57%
PT Bank Jateng	46,600,000,000.00	38,261,000,000.00	21.80%
PT PRPP	1,780,800,000.00	1,780,800,000.00	0.00%
JUMLAH	74,324,769,767.00	62,846,543,502.00	18.26%

Nilai investasi pada PDAM bernilai Rp0,00 dikarenakan nilai ekuitas pada Laporan Keuangan PDAM per 31 Desember 2013 bernilai (Rp130.625.481.368,00). Sesuai dengan metode ekuitas (kepemilikan 100%) maka nilai investasi pada PDAM bernilai Rp0,00 sesuai dengan ketentuan yang ada, PDAM belum diwajibkan untuk setor bagian laba.

Berikut adalah tabel mengenai tingkat pengendalian dan metode penilaian:

NO	Investasi	Metode Penilaian	Prosentase Kepemilikan	Ket
1	Perusda Percetakan	Ekuitas	100%	LK Audited
2	PD BPR Bank Pasar	Ekuitas	100%	LK Audited
3	PD BPR / BKK Cab. Semarang Tengah	Biaya (Cost)	49%	LK Audited
4	Perusda Rumah Potong Hewan (RPH)	Ekuitas	100%	LK Audited
5	PDAM Kota Semarang	Ekuitas	100%	LK Anaudited
6	PT. Bank Jateng	Biaya (Cost)	3.40%	
7	PT. PRPP	Biaya (Cost)	3.56%	

Selain investasi Permanen tersebut diatas, Pemerintah Kota Semarang memiliki investasi pada PT. Manyaran Indah sebesar Rp16.593.213.000,00.

4.3.5 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2014 dan 2013. Perolehan aset tetap yang berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp13.717.885.116.131,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.598.268.227.510,00 atau 124,16% dari tahun 2013 sebesar Rp6.119.616.888.621,00, dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut:

Aset Tetap	31-Dec-14	31-Dec-13	Kenaikan/penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
Tanah	10,809,811,533,805.00	3,623,084,124,539.00	7,186,727,409,266.00	198.36%
Peralatan dan Mesin	957,835,854,744.00	989,497,933,801.00	(31,662,079,057.00)	-3.20%
Gedung dan Bangunan	1,656,851,392,286.00	1,457,131,509,262.00	199,719,883,024.00	13.71%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,654,555,357,306.00	1,279,544,234,937.00	375,011,122,369.00	29.31%
Aset Tetap Lainnya	73,945,990,040.00	62,232,661,307.00	11,713,328,733.00	18.82%
Konstruksi dalam Pengerjaan	102,732,023,730.00	109,950,402,504.00	(7,218,378,774.00)	-6.57%
Akumulasi Penyusutan	(1,537,847,035,780.00)	(1,401,823,977,729.00)	(136,023,058,051.00)	9.70%
Jumlah	13,717,885,116,131.00	6,119,616,888,621.00	7,598,268,227,510.00	124.16%

Tahun 2014 terjadi mutasi aset tetap baik mutasi masuk maupun mutasi keluar yang mempengaruhi saldo akhir aset tetap, rincian mutasi masuk dan keluar aset tetap tahun 2014 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Tanah	Paralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jumlah
Penambahan Aset Tetap							
1 Belanja Modal Tahun 2014	66,806,647,024.00	167,550,434,316.00	189,661,439,271.00	366,305,879,671.00	8,850,992,477.00	-	799,175,392,759.00
2 Barang dalam proses penelusuran yang ditemukan	-	10,551,095,326.00	600,383,189.00	-	410,069,762.00	-	11,561,548,277.00
3 Kapitalisasi	175,950,000.00	304,753,342.00	2,304,210,891.00	386,245,977.00	80,396,280.00	596,738.00	3,252,153,228.00
4 Reklasifikasi Belanja Barang menjadi Aset Tetap	-	854,129,692.00	1,946,473,000.00	-	47,200,500.00	-	2,847,803,192.00
5 Aset yang berasal dari Donasi/Hibah	-	2,221,630,577.00	7,804,398,922.00	-	1,104,917,531.00	-	11,130,947,030.00
6 Aset yang berasal dari Dana BOS	-	4,609,731,046.00	6,940,000.00	14,000,179.00	5,348,552,520.00	-	9,979,223,745.00
7 Penilaian Tahun 2014	7,047,168,357,000.00	10,995,552,179.00	3,829,846,491.00	2,040,909,000.00	425,072,900.00	-	7,064,459,737,570.00
8 Koreksi nilai (mutasi, koreksi dan reklassifikasi antar aset tetap)	72,576,455,242.00	4,272,921,656.00	5,685,577,467.00	7,155,258,542.00	-	-	89,690,212,907.00
	7,186,727,409,266.00	201,360,248,134.00	211,839,269,231.00	375,902,293,369.00	16,267,201,970.00	596,738.00	7,992,097,018,708.00
Pengurangan Aset Tetap							
1 Reklassifikasi Belanja Modal menjadi Barang Persediaan	-	(1,438,985,713.00)	(253,994,000.00)	(874,071,000.00)	(73,500,000.00)	-	(2,640,550,713.00)
2 Penghapusan Aset Tetap Tahun 2014	-	(3,639,693,991.00)	(10,785,519,244.00)	(17,100,000.00)	(231,321,610.00)	-	(14,673,634,845.00)
3 Usulan Penghapusan (Reklas menjadi aset lainnya)	-	(1,061,791,073.00)	(1,079,872,963.00)	-	-	-	(2,141,664,036.00)
4 Reklassifikasi Aset Tetap menjadi Barang Extraomitable	-	(226,881,856,414.00)	-	-	(4,064,000.00)	-	(226,885,920,414.00)
5 Koreksi nilai (mutasi, koreksi dan reklassifikasi antar aset tetap)	-	-	-	-	(1,599,480,700.00)	(7,218,975,512.00)	(8,818,456,212.00)
6 Hibah aset tetap	-	-	-	-	(2,645,506,927.00)	-	(2,645,506,927.00)
	(233,022,327,191.00)	(12,119,386,207.00)	(891,171,000.00)	(4,553,873,237.00)	(7,218,975,512.00)	(257,805,733,147.00)	

a. Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp10.809.811.533.805,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.186.727.409.266,00 atau 198,36% dari tahun 2013 sebesar Rp3.623.084.124.539,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanah per SKPD	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Dinas Pendidikan	1,113,103,189,641.00	1,105,915,589,641.00	0.65%
Dinas Kesehatan Kota	55,144,808,386.00	55,144,808,386.00	0.00%
Rumah Sakit Umum Daerah	61,285,300,000.00	61,285,300,000.00	0.00%
Dinas Bina Marga	6,808,141,398,786.00	68,493,631,067.00	9839.82%
Dinas PSDA dan ESDM	83,688,795,002.00	72,754,366,197.00	15.03%
Dinas Kebakaran	1,089,200,000.00	1,089,200,000.00	0.00%
Dinas Tata Kota dan Perumahan	43,692,580,772.00	24,051,594,572.00	81.66%
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	114,463,200,000.00	114,463,200,000.00	0.00%
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	140,675,888.00	140,675,888.00	0.00%
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	76,543,487,240.00	76,543,487,240.00	0.00%
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	16,675,300,000.00	16,675,300,000.00	0.00%
Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	40,657,560,600.00	40,657,560,600.00	0.00%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,053,016,462.00	4,053,016,462.00	0.00%
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	220,066,600,000.00	220,066,600,000.00	0.00%
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	4,884,000,000.00	4,884,000,000.00	0.00%
Sekretariat Daerah	218,155,700,000.00	218,155,700,000.00	0.00%
Sekretariat DPRD	5,326,900,000.00	5,326,900,000.00	0.00%
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	193,887,297,901.00	116,688,207,359.00	66.16%
Kec. Semarang Selatan	42,312,005,600.00	42,312,005,600.00	0.00%
Kec. Semarang Utara	11,023,544,000.00	11,023,544,000.00	0.00%
Kec. Semarang Barat	31,945,406,450.00	25,639,406,450.00	24.59%
Kec. Semarang Timur	21,737,200,000.00	19,487,700,000.00	11.54%
Kec. Semarang Tengah	23,985,359,012.00	23,985,359,012.00	0.00%
Kec. Gunung Pati	122,481,432,500.00	116,608,088,500.00	5.04%
Kec. Tugu	69,393,224,000.00	57,983,065,000.00	19.68%
Kec. Mijen	362,715,943,677.00	66,020,327,677.00	449.40%
Kec. Genuk	52,854,463,300.00	52,854,463,300.00	0.00%
Kec. Gajah Mungkur	52,486,846,800.00	52,486,846,800.00	0.00%
Kec. Tembalang	35,035,143,100.00	35,035,143,100.00	0.00%
Kec. Candisari	24,726,770,750.00	24,726,770,750.00	0.00%
Kec. Banyumanik	135,649,091,148.00	128,809,091,148.00	5.31%
Kec. Ngaliyan	47,002,725,000.00	47,173,725,000.00	-0.36%
Kec. Gayamsari	16,395,518,750.00	16,395,518,750.00	0.00%
Kec. Pedurungan	210,236,501,860.00	207,504,021,860.00	1.32%
Kantor Pendidikan dan Latihan (diklat)	1,180,141,000.00	998,704,000.00	18.17%
Kantor Ketahanan Pangan	995,000,000.00	995,000,000.00	0.00%
Dinas Pertanian	36,156,404,800.00	36,156,404,800.00	0.00%
Dinas Kelautan dan Perikanan	13,592,298,380.00	13,592,298,380.00	0.00%
Dinas Pasar	436,807,503,000.00	436,807,503,000.00	0.00%
JUMLAH	10,809,811,533,805	3,623,084,124,539	198.36%

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Dalam Aset Tanah terdapat tanah yang disewakan kepada pihak ketiga yang seharusnya dikategorikan aset lainnya. Namun mengingat aset yang disewakan menempati sebagian dari aset yang masih digunakan oleh entitas Pemerintah Kota Semarang dan dokumen kepemilikan masih menyatu dengan dokumen induk maka tetap dicatat sebagai asset tetap tanah. Aset-aset tanah tersebut yaitu:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No.	Nama	Peruntukan	Masa
1	Sihar Pahala Sianipar	Perpanjangan Sewa menyewa Tanah milik	jangka waktu : 5 Tahun
	PT. Indonusa Mora Prakarsa	Pemerintah Kota Semarang	
	Jl. Penataran No. 9 Jakarta Pusat	Semarang	Perjanjian berlaku:
		di Jalan Sompok No.43 A	20 Juni 2010 s.d. 19 Juni 2015
		Semarang kepada	
		PT. Indonusa Mora	
		Prakarsa	
2	Andang Ruhiat	Perpanjangan Sewa menyewa Tanah milik	jangka waktu : 5 Tahun
	PT. Indosat (Persero) Tbk.	Pemerintah Kota Semarang	
	Jl. Pandanaran No. 18 Semarang	Semarang	Perjanjian berlaku:
		di Jl. Jend. Sudirman 295	30 April 2011 s.d. 29 April 2015
		Semarang kepada	
		PT. Indosat (Persero).	
		Tbk.	
3	Drs. Soenarno	Perpanjangan Sewa menyewa Tanah milik	jangka waktu : 5 Tahun
	KUD Usaha Mina	Pemerintah Kota Semarang	
		Semarang	Perjanjian berlaku:
		di Jl. Pondok Pati	2 Januari 2012 s.d.
		Rejomulyo Temarang	21 Desember 2016
		Timur Kota Semarang	
		utk KUD Usaha Mina	
		(pabrik Es)	
4	PT. Indosat (Persero) Tbk.	Perpanjangan Sewa menyewa Tanah milik	jangka waktu : 5 Tahun
	Jl. Pandanaran No. 18 Semarang	Pemerintah Kota Semarang	
		Semarang	Perjanjian berlaku:
		di Jl. Dr. Cipto No.115	12 Desember 2012 s.d.
		Semarang kepada	12 Desember 2016
		PT. Indosat (Persero).	
		Tbk.	
5	Nani Siti Amaliani	Perpanjangan Sewa menyewa Tanah milik	jangka waktu : 5 Tahun
	PT. XL AXIATA (Persero) Tbk.	Pemerintah Kota Semarang	
	Jl. Mega Kuningan Lot E 4-7 No.1	Semarang	Perjanjian berlaku:
	Kuningan Timur setiabudi	di SMK N 7	2 Januari 2012 s.d.
	Jakarta Selatan	Semarang kepada	31 Desember 2016
		PT. XL AXIATA (Persero) Tbk.	
		Tbk.	
6	PT Mac Sarana	Sewa-menyeysi lahan di lingkungan Balaikota	jangka waktu : 5 Tahun
		Semarang untuk jaringan	Perjanjian berlaku:
		telekomunikasi kepada	4 Juni 2013 s.d. 3 Juni 2018
		PT Mac Sarana	
7	Karozin	Sewa-menyeysi Tanah eks Bengkok kel. gemah	jangka waktu : 3 Tahun
		Kec. Pedurungan	Perjanjian berlaku:
			1 Jan 2013 s.d. 31 Des 2016
8	Kelompok Pengusaha	Sewa-menyeysi Tanah di Kel. Brumbungan untuk	jangka waktu : 5 Tahun
	Peduli Sosial	Kegiatan Sosial	Perjanjian berlaku:
	Jl. Karang Wulan sari no 11		10 Des 2013 s.d. 9 Des 2018
	Kel Brumbungan		
	Kec. Semarang Tengah		
9	PT Fastel Indonesia	Sewa-menyeysi Tanah di Lingkungan gd. Pandanaran	jangka waktu : 5 Tahun
		Untuk jaringan telekomunikasi	Perjanjian berlaku:
			25 nov 2013 s.d. 24 okt 2018
10	Bambang Hudi, SH, MHum	Sewa-menyeysi tanah bangunan mil Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota semarang	jangka waktu : 5 Tahun
		untuk poliklinik jamsostek	Perjanjian berlaku:
		Jl. Ki Bei Wongso No. 1	26 okt 2013 s.d. 25 okt 2018
		Kel. Genuk Kec. Genuk	
11	Dr. Setya Dipayana	Sewa-menyeysi tanah eks Bengkok di kel. Sumurboto	jangka waktu : 5 Tahun
	Jl. Setyabudi	Kec. Banyumanik untuk usaha perdagangan (indomaret)	Perjanjian berlaku:
			16 agustus 2013-15 agustus 2018

Selanjutnya dalam pencatatan aset tanah juga terdapat aset tanah yang dimanfaatkan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama pemanfaatan yang seharusnya dikategorikan ke aset lainnya. Namun mengingat aset yang dikerjasamakan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

menempati sebagian dari aset tanah yang masih digunakan oleh entitas Pemerintah Kota Semarang dan dokumen kepemilikan masih menyatu dengan dokumen induk maka tetap dicatat sebagai aset tetap tanah. Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Pihak Ketiga	Peruntukan	Masa
1	PT. Semarang Arsana	Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Taman Ria di Komplek Budaya Raden Saleh Jl.Sriwijaya No.29 Candi Sari HP.1 Tegalsari	Jangka Waktu : 25 tahun Perjanjian berlaku: 27 Agustus 2002 s.d. 28-Aug-27
2	PT. NARPATI AGUNG KARYA	Kerjasama Pemanfaatan Dalam Rangka Pengolahan Sampah menjadi pupuk Organik di Kel.Jati Barang Dan Kedungpane Mijen	Jangka Waktu : 25 tahun Perjanjian berlaku: 14 November 2007 s.d. 14 November 2032
3	PERSADA, Graha Mustika		
4	Ratu Lt. 4 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 74-75 jakarta		

Terdapat Penambahan Aset Tanah yang berasal dari Pinjam Pakai yang baru yaitu

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Penggunaan	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Biro Sarpras Polda Jateng	1,336	2014	Jl. Sriwijaya No. 1 Semarang	Kantor Biro Sarpras Polda Jateng	-
2	Tanah Bangunan koramil 01/0733	1,395	2012	Jl. Ronggolawe Kel. Gisikdrone Kac. Semarang Barat	Koramil 01 / 0733	1,375,000,000
3	Tanah Bangunan Koramil 07/0733	768	2013	Jl. Gunungpati Kel. Gunungpati Kec. Gunungpati	Kantor dan Rumdis Koramil 07/0733	348,000,000
4	Tanah Bangunan Koramil 03/0733	482	2012	Jl. Barito Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur	Kantor dan Rumdis Koramil 03/0733	759,000,000
5	Tanah Bangunan Koramil 11/0733	1,012	2012	Jl. Gemah Timur Ke. Pedurungan Kec. Semarang Timur	Kantor dan Rumdis Koramil 11/0733	719,000,000
6	Tanah Bangunan Koramil 13/0733	850	2012	Jl. Nanas Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan	Kantor dan Rumdis Koramil 13/0733	555,000,000
7	Tanah Bangunan Koramil 10/0733	2,047	2009	Jl. Watulawang IV RT.01 RW. VII	-	1,651,400,000
8	Tanah Bangunan Koramil 04/0733	1,382	1984	Jl. Kanguru Raya Kel. Gayamsari	Koramil 04/0733	258,750,000
9	Tanah Bangunan Koramil 09/0733	933	1993	Jl. Walisongo Kel. Tambakaji	Koramil 09/0733	466,500,000
10	Tanah Kantor Kecamatan, Kelurahan Moroto, Lap. Olahraga Kecamatan (Koramil) Semarang Tengah gabung dengan kecamatan	5,545	2005	Jl. Seteren Barat	Kantor Kecamatan, Balai Kelurahan, dan Lapangan Olahraga	8,246,234,300
11	MTs N 02 Semarang	2,023	2010	J. Cintadui Raya III Kel. Mlatiharjo	MTs N 02	5,636,300,000
12	Tanah Bangunan Polsek Tembalang	3,800	2013	Jl. Turus Asri No. 9 Tembalang	Polsek Tembalang	4,560,000,000
13	Tanah Kantor Mapolsek Semarang Selatan	0	2004	Jl. Lamper Tengah XIV Kec. Semarang Selatan	Kantor Mapolsek Semarang Selatan	402,000,000
14	Tanah Mapolsek Gunungpati	0	2004	Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan	Kantor Mapolsek Ngaliyan	750,000,000
15	Kantor Mapolsek Gunungpati	2,428	2012	Jl. Kol RW Sugiantoro Kec.Gunungpati	Kantor Mapolsek Gunungpati	1,072,000,000
16	Kantor Mapolsek Banyumanik	1,034	2012	Jl Nusa Indah Kel.Sronadol Welan Kec.Banyumanik	Tanah Kantor Mapolsek Banyumanik	931,000,000
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,800	1984	Jl. Slamet Riyadi	Polsek dan Asrama Polisi	450,000,000
18	Koramil Tugu	1,282	1976	Jl. Tapak Tugurejo	Kantor Koramil Kc.Tugu	92,700,000

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pinjam Pakai Kantor Biro Sarpras Polda Jateng dengan tanah seluas ± 500m². Nilai masih nol karena data baru ditemukan berdasarkan perjanjian pinjam pakai terdahulu. Aset Tanah tersebut dicatat pada DPKAD dengan Rincian sebagai berikut:

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp957.835.854.744,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp31.662.079.057,00 atau -3,20% dari tahun 2013 sebesar Rp989.497.933.801,00 dengan sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Alat alat Besar	89,591,010,725.00	96,221,606,571.00	-6.89%
Alat alat Angkutan	248,102,995,902.00	190,503,516,767.00	30.24%
Alat Bengkel dan Alat Ukur	22,311,565,289.00	180,939,817,181.00	-87.67%
Alat Pertanian	11,041,871,478.00	9,649,253,495.00	14.43%
Alat Kantor dan Rumah Tangga	378,164,324,154.00	352,635,298,634.00	7.24%
Alat Studio Dan Alat Komunikasi	27,651,149,738.00	23,968,045,457.00	15.37%
Alat Alat Kedokteran	126,724,447,770.00	89,280,371,661.00	41.94%
Alat Laboratorium	53,214,031,656.00	45,448,673,149.00	17.09%
Alat alat Persenjataan / Keamanan	1,034,458,032.00	851,350,886.00	21.51%
Jumlah	957,835,854,744.00	989,497,933,801.00	-3.20%

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 pada SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Peralatan Mesin per SKPD	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Dinas Pendidikan	244,105,365,825.00	443,122,643,481.00	-44.91%
Dinas Kesehatan Kota	55,708,611,442.00	42,684,574,113.00	30.51%
Rumah Sakit Umum Daerah	145,817,385,417.00	101,115,899,008.00	44.21%
Dinas Bina Marga	18,559,559,135.00	13,858,139,548.00	33.93%
Dinas PSDA dan ESDM	55,759,990,783.00	38,487,048,130.00	44.88%
Dinas Kebakaran	34,644,393,570.00	22,176,808,366.00	56.22%
Dinas Tata Kota dan Perumahan	7,070,273,946.00	4,976,522,941.00	42.07%
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	10,318,844,162.00	8,401,071,594.00	22.83%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)	4,304,514,684.00	4,248,028,438.00	1.33%
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	54,054,152,902.00	47,714,249,865.00	13.29%
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	8,726,009,864.00	7,279,549,285.00	19.87%
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	91,632,686,784.00	69,893,490,146.00	31.10%
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9,559,606,018.00	9,344,983,984.00	2.30%
Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	6,163,620,939.00	5,779,949,660.00	6.64%
Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	7,457,264,794.00	5,122,449,059.00	45.58%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD)	5,541,839,004.00	4,678,261,073.00	18.46%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,057,916,865.00	3,552,387,157.00	14.23%
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2,123,876,586.00	1,567,770,578.00	35.47%
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)	6,432,310,588.00	5,060,471,482.00	27.11%
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,108,098,726.00	3,157,900,030.00	30.09%
Badan Kesbang, Politik dan Linmas	2,635,426,641.00	2,462,530,351.00	7.02%
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	6,720,648,860.00	5,706,682,685.00	17.77%
Sekretariat Daerah	56,917,528,823	45,806,372,928.00	24.26%
Sekretariat DPRD	19,130,445,944	17,073,665,587.00	12.05%
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	18,796,525,153	16,062,677,640.00	17.02%
Inspektorat	2,396,497,421	2,110,106,475.00	13.57%
Kec. Semarang Selatan	2,667,185,327	2,302,079,513.00	15.86%
Kec. Semarang Utara	2,557,820,604	2,152,972,319.00	18.80%
Kec. Semarang Barat	2,931,799,768	2,540,752,730.00	15.39%
Kec. Semarang Timur	2,530,584,923	2,082,247,300.00	21.53%
Kec. Semarang Tengah	3,052,593,112	2,602,782,599.00	17.28%
Kec. Gunung Pati	2,847,024,690	2,246,979,640.00	26.70%
Kec. Tugu	1,695,653,658	1,333,796,718.00	27.13%
Kec. Mijen	2,889,965,426	2,058,486,508.00	40.39%
Kec. Genuk	2,730,924,803	2,205,739,667.00	23.81%
Kec. Gajah Mungkur	2,561,756,876	2,179,064,241.00	17.56%
Kec. Tembalang	2,577,889,348	2,145,998,165.00	20.13%
Kec. Candisari	2,047,427,830	1,662,454,041.00	23.16%
Kec. Banyumanik	2,654,600,994	2,261,291,066.00	17.39%
Kec. Ngaliyan	2,762,362,554	2,379,609,785.00	16.08%
Kec. Gayamsari	2,395,565,793	1,901,475,922.00	25.98%
Kec. Pedurungan	3,004,293,158	2,434,074,969.00	23.43%
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	2,008,078,814	1,803,375,669.00	11.35%
Kantor Pendidikan dan Latihan	5,136,909,224	1,237,392,919.00	315.14%
Kantor Ketahanan Pangan	956,666,062	946,645,213.00	1.06%
Kantor Perpustakaan dan Arsip	6,698,799,641	5,851,040,364.00	14.49%
Dinas Pertanian	5,569,436,704	5,036,685,743.00	10.58%
Dinas Kelautan dan Perikanan	3,112,964,383	1,910,366,819.00	62.95%
Dinas Pasar	6,204,978,528	4,699,648,475.00	32.03%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,497,177,648	2,078,739,812.00	68.24%
Jumlah	957,835,854,744.00	989,497,933,801.00	-3.20%

c. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.656.851.392.286,00 mengalami kenaikan sebesar Rp199.719.883.024,00 atau 13,71% dari tahun 2013 sebesar Rp1.457.131.509.262,00 disajikan sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Monumen	29,174,602,370.00	24,334,472,257.00	19.89%
Bangunan Gedung	1,627,676,789,916.00	1,432,797,037,005.00	13.60%
Jumlah	1,656,851,392,286.00	1,457,131,509,262.00	13.71%

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Gedung dan Bangunan per SKPD	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Dinas Pendidikan	679,327,651,354.00	649,319,713,054.00	4.62%
Dinas Kesehatan Kota	58,427,379,644.00	53,373,560,959.00	9.47%
Rumah Sakit Umum Daerah	50,217,046,736.00	37,411,226,802.00	34.23%
Dinas Bina Marga	4,325,086,219.00	4,762,972,032	-9.19%
Dinas PSDA & ESDM	20,016,923,753.00	17,643,910,978	13.45%
Dinas Kebakaran	4,114,929,614.00	3,483,598,614	18.12%
Dinas Tata Kota & Perumahan	105,613,318,125.00	50,861,199,805	107.65%
Dinas Penerangan Jalan & Pengelolaan Reklame	352,434,500.00	243,670,500	44.64%
Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	77,056,890,225.00	74,941,404,225	2.82%
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	3,305,024,202.00	1,688,687,202	95.72%
Dinas Kebersihan & Pertamanan	22,762,840,225.00	15,113,056,078	50.62%
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	7,140,034,924.00	7,092,734,924	0.67%
Bapemas Perempuan & Keluarga Berencana	1,801,361,761.00	1,845,461,761	-2.39%
Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	27,707,670,504.00	28,874,552,748	-4.04%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1,253,611,292.00	106,800,000	1073.79%
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	3,015,141,234.00	2,964,310,534	1.71%
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	83,505,000.00	83,505,000	0.00%
Dinas Kebudayaan & Pariwisata	14,282,857,950.00	12,694,911,580	12.51%
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	7,091,131,282.00	7,091,131,282	0.00%
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	15,693,916,400.00	127,168,362,773	-87.66%
Sekretariat Daerah	127,471,379,773.00	15,693,916,400	712.23%
Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	2,202,704,639.00	508,522,681	333.16%
Kecamatan Semarang Selatan	6,860,575,268.00	6,003,063,268	14.28%
Kecamatan Semarang Utara	5,283,447,434.00	4,952,403,500	6.68%
Kecamatan Semarang Barat	14,690,457,759.00	14,443,674,265	1.71%
Kecamatan Semarang Timur	6,874,373,000.00	6,115,739,000	12.40%
Kecamatan Semarang Tengah	16,638,866,948.00	16,339,962,948	1.83%
Kecamatan Gunungpati	12,635,683,402.00	11,356,826,402	11.26%
Kecamatan Tugu	4,638,937,400.00	4,821,486,400	-3.79%
Kecamatan Mijen	4,709,211,350.00	3,745,714,350	25.72%
Kecamatan Genuk	14,862,367,999.00	13,335,317,999	11.45%
Kecamatan Gajahmungkur	5,981,238,382.00	4,862,207,382	23.01%
Kecamatan Tembalang	6,534,201,410.00	5,944,428,960	9.92%
Kecamatan Candisari	6,909,412,382.00	6,041,838,382	14.36%
Kecamatan Banyumanik	20,843,874,898.00	19,970,846,898	4.37%
Kecamatan Ngaliyan	8,022,374,581.00	7,251,155,581	10.64%
Kecamatan Gayamsari	41,478,153,000.00	40,299,125,000	2.93%
Kecamatan Pedurungan	10,054,633,717.00	8,373,092,217	20.08%
Kantor Pendidikan & Latihan	9,989,952,200.00	502,170,800	1889.35%
Kantor Ketahanan Pangan	190,785,000.00	190,785,000	0.00%
Kantor Perpustakaan & Arsip	3,522,164,692.00	3,522,164,692	0.00%
Dinas Pertanian	4,771,701,700.00	4,142,079,700	15.20%
Dinas Kelautan & Perikanan	14,718,389,181.00	14,772,240,181	-0.36%
Dinas Pasar	203,253,251,227.00	147,177,976,405	38.10%
Dinas Perindustrian & Perdagangan	124,500,000.00	-	0.00%
Jumlah	1,656,851,392,286.00	1,457,131,509,262.00	-99.31%

Dari nilai total bangunan sebesar Rp1.656.851.392.286,00 tersebut terdapat didalamnya terdapat Pasar Johar yang pada tanggal 9 Mei 2015 telah terbakar. Nilai kerugian atas kebakaran Pasar Johar tersebut belum diketahui sampai dengan selesainya audit laporan keuangan. Pasar Johar merupakan Bangunan milik Pemerintah Kota Semarang yang diasuransikan pada Asuransi Jasindo dengan Nomor Polis 407.205.200.14.00021/000/000 periode 19 Desember 2014 sampai dengan 19 Desember 2015 dengan Harga Pertanggungan Rp.6.604.096.175,00. Atas Kebakaran Pasar Johar tersebut Pemerintah Kota Semarang melalui Kepala DPKAD telah mengirimkan surat kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) dengan Nomor 585/1722 Perihal Klaim Asuransi Pasar Johar.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.654.555.357.306,00 mengalami kenaikan sebesar Rp375.011.122.369,00 atau 29,31% dari tahun 2013 sebesar Rp1.279.544.234.937,00 dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Jaringan	113,125,984,645.00	88,658,891,188.00	27.60%
Instalasi	28,865,268,432.00	15,914,195,952.00	81.38%
Bangunan Air/Irigasi	365,811,081,269.00	236,805,356,561.00	54.48%
Jalan dan Jembatan	1,146,753,022,960.00	938,165,791,236.00	22.23%
Jumlah	1,654,555,357,306.00	1,279,544,234,937.00	29.31%

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Dinas Pendidikan	9,432,319,508	8,710,806,929.00	8.28%
Dinas Kesehatan Kota	686,533,553	269,810,386.00	154.45%
Rumah Sakit Umum Daerah	6,611,276,913.00	5,023,884,120.00	31.60%
Dinas Bina Marga	1,127,024,938,813	922,370,775,633.00	22.19%
Dinas PSDA dan ESDM	354,659,361,471	228,400,326,174.00	55.28%
Dinas Kebakaran	27,805,000	27,805,000.00	0.00%
Dinas Tata Kota dan Perumahan	20,929,805,510	1,272,271,510.00	1545.07%
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	97,089,138,758	84,018,040,533.00	15.56%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)	9,000,000	9,000,000.00	0.00%
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7,091,779,000	6,926,779,000.00	2.38%
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	2,649,533,672	1,379,743,472.00	92.03%
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	7,603,714,716	2,036,886,680.00	273.30%
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	320,180,700	320,180,700.00	0.00%
Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	302,032,328	319,132,328.00	-5.36%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD)	39,488,000	39,488,000.00	0.00%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	256,362,000	256,362,000.00	0.00%
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14,610,000	14,610,000.00	0.00%
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)	98,219,000	98,219,000.00	0.00%
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8,307,482,919	8,145,684,766.00	1.99%
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	29,570,888	0.00	0.00%
Sekretariat Daerah	110,077,552	110,077,552.00	0.00%
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	5,030,171	5,030,171.00	0.00%
Kec. Semarang Selatan	20,969,350	20,969,350.00	0.00%
Kec. Semarang Utara	67,700,000	67,700,000.00	0.00%
Kec. Semarang Barat	990,000	990,000.00	0.00%
Kec. Semarang Tengah	178,820,000	178,820,000.00	0.00%
Kec. Gunung Pati	17,688,866	10,000,000.00	76.89%
Kec. Tugu	58,501,000	58,501,000.00	0.00%
Kec. Mijen	77,500,000	0.00	0.00%
Kec. Genuk	4,609,700	4,609,700.00	0.00%
Kec. Gajah Mungkur	12,600,000	12,600,000.00	0.00%
Kec. Ngaliyan	52,834,000	52,834,000.00	0.00%
Kec. Gayamsari	20,757,700	17,757,700.00	16.89%
Kec. Pedurungan	18,000,000	18,000,000.00	0.00%
Kantor Pendidikan dan Latihan	652,815,000	0.00	0.00%
Kantor Ketahanan Pangan	11,816,800	11,816,800.00	0.00%
Kantor Perpustakaan dan Arsip	611,215,288	611,215,288.00	0.00%
Dinas Pertanian	1,236,720,500	1,202,225,500.00	2.87%
Dinas Kelautan dan Perikanan	2,281,628,398	1,976,953,413.00	15.41%
Dinas Pasar	5,931,930,232	5,544,328,232.00	6.99%
Jumlah	1,654,555,357,306.00	1,279,544,234,937.00	29.31%

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp73.945.990.040,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.713.328.733,00 atau 18,82% dari tahun 2013 sebesar Rp62.232.661.307,00 dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Aset Tetap Lainnya	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Buku Dan Perpustakaan	61,006,150,639.00	49,922,207,149.00	22.20%
Barang Bercorak Kebudayaan	6,282,546,380.00	5,777,047,293.00	8.75%
Hewan Dan Ternak Serta Tanaman	5,944,149,521.00	5,820,423,365.00	2.13%
Aset Lainnya yang tidak masuk neraca	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00%
Pemeliharaan aset bukan milik pemkot	703,643,500.00	703,483,500.00	0.02%
Jumlah	73,945,990,040.00	62,232,661,307.00	18.82%

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya per SKPD	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Dinas Pendidikan	55,726,128,319	44,219,725,366.00	26.02%
Dinas Kesehatan Kota	24,878,875	13,806,675.00	80.19%
Rumah Sakit Umum Daerah	520,573,520.00	507,673,520.00	2.54%
Dinas Bina Marga	211,519,750	12,180,000.00	1636.62%
Dinas PSDA dan ESDM	1,234,436,430	1,234,436,430.00	0.00%
Dinas Kebakaran	122,912,500	114,674,000.00	7.18%
Dinas Tata Kota dan Perumahan	840,167,300	702,965,400.00	19.52%
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	2,480,000	2,480,000.00	0.00%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)	779,617,900	778,964,200.00	0.08%
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	8,605,000	6,605,000.00	30.28%
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	5,312,398,900	5,948,880,900.00	-10.70%
Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	3,005,292	3,005,292.00	0.00%
Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	11,248,000	10,665,000.00	5.47%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD)	113,044,300	113,044,300.00	0.00%
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14,754,326	13,256,526.00	11.30%
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)	10,223,892	9,739,792.00	4.97%
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,226,934,812	1,225,934,812.00	0.08%
Badan Kesbang, Politik dan Linmas	5,505,292	5,505,292.00	0.00%
Sekretariat Daerah	265,186,699	231,475,199.00	14.56%
Sekretariat DPRD	237,421,800	190,470,400.00	24.65%
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	922,167,375	883,366,375.00	4.39%
Inspektorat	24,406,800	20,490,800.00	19.11%
Kec. Semarang Selatan	5,685,500	5,685,500.00	0.00%
Kec. Semarang Utara	2,593,500	2,593,500.00	0.00%
Kec. Semarang Barat	19,327,408	19,327,408.00	0.00%
Kec. Semarang Timur	2,093,500	2,093,500.00	0.00%
Kec. Semarang Tengah	5,749,000	5,749,000.00	0.00%
Kec. Gunung Pati	2,213,500	2,213,500.00	0.00%
Kec. Tugu	5,755,030	5,755,030.00	0.00%
Kec. Mijen	27,578,500	27,578,500.00	0.00%
Kec. Genuk	6,003,000	5,749,000.00	4.42%
Kec. Gajah Mungkur	6,772,500	6,518,500.00	3.90%
Kec. Tembalang	11,163,500	10,909,500.00	2.33%
Kec. Candisari	2,618,500	2,618,500.00	0.00%
Kec. Banyumanik	4,093,500	4,093,500.00	0.00%
Kec. Ngaliyan	11,313,500	11,213,500.00	0.89%
Kec. Gayamsari	2,291,000	2,291,000.00	0.00%
Kec. Pedurungan	3,740,500	3,740,500.00	0.00%
Badan Kepegawaiannya Daerah (BKD)	5,757,800	4,758,800.00	20.99%
Kantor Pendidikan dan Latihan (diklat)	120,000	120,000.00	0.00%
Kantor Ketahanan Pangan	3,350,000	3,350,000.00	0.00%
Kantor Perpustakaan dan Arsip	5,062,971,463	4,839,150,533.00	4.63%
Dinas Pertanian	805,660,575	686,285,575.00	17.39%
Dinas Kelautan dan Perikanan	11,510,000	11,510,000.00	0.00%
Dinas Pasar	311,005,890	311,005,890.00	0.00%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9,005,292	9,005,292.00	0.00%
Jumlah	73,945,990,040.00	62,232,661,307.00	18.82%

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 didalamnya sudah termasuk nilai kapitalisasi yang dapat diatribusikan pada setiap masing-masing aset tetap pada setiap SKPD. Nilai Kapitalisasi aset tersebut sebesar Rp3.258.759.079,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.070.239.079,00, Belanja Barang Rp190.585.150,00, Belanja



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Jasa Rp1.997.934.850,00 Belanja Pemeliharaan Rp0,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Rp. 0,00. Kapitalisasi Belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

KAPITALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2014

NO	SKPD	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA PERJALANAN DINAS	JUMLAH KAPITALISASI
1	DINAS PENDIDIKAN	5,535,000,00	1,425,000,00	0,00	0,00	0,00	6,960,000,00
2	DINAS BINA MARGA	30,675,000,00	3,500,750,00	285,207,500,00	0,00	0,00	319,383,250,00
3	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	520,690,000,00	41,692,900,00	1,610,110,350,00	0,00	0,00	2,172,493,250,00
4	DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN	254,883,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,883,000,00
5	DISOSPORA	19,125,000,00	0,00	3,517,000,00	0,00	0,00	22,642,000,00
6	DISNAKER & TRANS	899,999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,999,00
7	DINAS KEBUD & PARIWISATA	13,854,100,00	2,065,000,00	0,00	0,00	0,00	15,919,100,00
8	BADAN KESBANG DAN POLITIK	1,250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250,000,00
9	SEKRETARIAT DAERAH	36,692,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,692,300,00
10	SEKRETARIAT DPRD	11,720,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,720,000,00
11	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	69,150,000,00	7,700,000,00	99,100,000,00	0,00	0,00	175,950,000,00
12	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	1,610,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,610,000,00
13	KECAMATAN SEMARANG BARAT	12,350,000,00	7,185,500,00	0,00	0,00	0,00	19,535,500,00
14	KECAMATAN GUNUNGPATI	18,200,000,00	3,080,000,00	0,00	0,00	0,00	21,280,000,00
15	KECAMATAN GENUK	2,950,000,00	487,500,00	0,00	0,00	0,00	3,437,500,00
16	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	7,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,500,000,00
17	KECAMATAN TEMBALANG	11,505,000,00	115,326,000,00	0,00	0,00	0,00	126,831,000,00
18	KECAMATAN PEDURUNGAN	17,295,000,00	8,122,500,00	0,00	0,00	0,00	25,417,500,00
19	KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH	34,354,680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,354,680,00
	Jumlah	1,070,239,079,00	190,585,150,00	1,997,934,850,00	0,00	0,00	3,258,759,079,00

Rincian kapitalisasi belanja berdasarkan jenis Aset per SKPD dalam tabel berikut :

RINCIAN KAPITALISASI BERDASARKAN JENIS ASET
TAHUN 2014

NO	SKPD	TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN,IRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERRAJAN	ASET LAINNYA
1	Dinas Pendidikan	0,00	6.960.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Bina Marga	0,00	23.058.749,00	0,00	283.313.000,00	13.011.500,00	0,00	0,00
3	Dinas Tata Kota dan Perumahan	0,00	13.479.400,00	2.047.340.350,00	49.555.400,00	62.118.100,00	0,00	0,00
4	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	0,00	113.845.600,00	100.129.139,00	40.908.261,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	899.999,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	1.230.447,00	12.694.453,00	1.214.072,00	184.291,00	596.738,00	0,00
8	Badan Kesbang dan Politik	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sekretariat Daerah	0,00	36.692.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sekretariat DPRD	0,00	11.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	175.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kecamatan Semarang Selatan	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kecamatan Barat	0,00	12.350.000,00	7.185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kecamatan Gunungpati	0,00	0,00	21.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Genuk	0,00	3.437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kecamatan Gajahmungkur	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kecamatan Tembalang	0,00	126.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecamatan Pedurungan	0,00	1.850.000,00	23.567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kantor Perpustakaan dan Arsip	0,00	31.408.000,00	0,00	0,00	2.946.680,00	0,00	0,00
	JUMLAH	175.950.000,00	394.122.995,00	2.212.196.942,00	374.990.733,00	80.580.571,00	596.738,00	19.125.000,00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap konstruksi Dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp102.732.023.730,00 mengalami penurunan nilai sebesar Rp7.218.378.774,00 atau 6,57% dibandingkan dengan Tahun 2013 sebesar Rp109.950.402.504,00 dapat disajikan sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Dinas Pendidikan	1.558.861.000,00	2.216.349.400,00	-29,67%
Dinas Kesehatan Kota	675.718.273,00	0,00	0,00%
Rumah Sakit Umum Daerah	2.572.309.293,00	39.054.400,00	6486,48%
Dinas Bina Marga	6.480.102.901,00	2.854.323.551,00	127,03%
Dinas PSDA dan ESDM	41.431.093.709,00	39.379.020.099,00	5,21%
Dinas Tata Kota & Perumahan	4.196.002.028,00	4.677.288.789,00	-10,29%
PJPR	491.584.300,00	376.717.300,00	30,49%
Badan Lingkungan Hidup	20.982.000,00	0,00	0,00%
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1.542.712.000,00	906.230.000,00	70,23%
Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	44.700.000,00	0,00	0,00%
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	79.526.738,00	0,00	0,00%
Kecamatan Pedurungan	114.638.817,00	114.638.817,00	0,00%
Dinas Kelautan dan Perikanan	158.564.000,00	0,00	0,00%
Dinas Pasar	43.365.228.671,00	59.386.780.148,00	-26,98%
Jumlah	102.732.023.730,00	109.950.402.504,00	-6,57%

Aset konstruksi dalam pengerjaan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menyajikan nilai konstruksinya berdasarkan pada pembayaran yang telah dilakukan atau sesuai penyelesaian / prestasi pekerjaan terhadap jenis pekerjaan:

Pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat FS-DED (Feasibility Study-Detail Engineering Design) dan pekerjaan-pekerjaan yang wanprestasi.

1) Dinas Bina Marga (FS-DED)

Nilai FS-DED Dinas Bina Marga Kota Semarang Per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

DAFTAR FS-DED TA. 2014
DINAS BINA MARGA KOTA SEMARANG

NO	KEGIATAN		JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
	NOMOR REKENING	URAIAN		
1	2	3	4	5
1	1.03.1.03.01.15.005	DED Pawitran Luhur	123.027.806	
2	1.03.1.03.01.15.005	DED Pedestrian Jl Menteri Supeno, Tri Lomba Juang & Pandanaran II	48.552.143	
3	1.03.1.03.01.15.005	DED Jalan & Pedestrian Jl Kelud	72.487.704	
4	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Suratm. & Jl WR Supratman	48.630.123	
5	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Woltermonginsidi	95.942.911	
6	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Menuju Desa Wisata (Kp. Batik) & Jmbtn Kedungsari Meteseh & Jmbtn Gemah	49.825.809	
7	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Honggowongso	51.617.259	
13	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Bangetay Weton-Mrangeen, Jl Kyai Syakir(Penghub Tlogosari Kulon ke Bangetavu)	49.749.909	
14	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Plamongansari-Mrangeen, Jl Sunan Kalijaga & Jl Inspeksi Jl Brigjend Sudjarto	45.245.810	
15	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Kudu-Waringin Jajar (Demak Selatan) & Jl Tlogosari Raya	73.922.528	
16	1.03.1.03.01.15.005	DED Simpang Jl Kasipah-Jangli-Dr. wahidin	49.698.962	
17	1.03.1.03.01.15.005	Review Desain DED Jl Sriwijaya	51.518.485	
18	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl & Jembatan Bumirejo	51.705.636	
19	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Kauman-Kudu, Jl Pengaron Lor & Jl Sapi Watu	51.068.283	
20	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl & Jmbt Anposari Timur V & Jl R. Soekanto	51.525.763	
21	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Hanoman Raya & Subali Raya	51.632.855	
22	1.03.1.03.01.15.005	DED Gedung Base Camp Alat Madukoro	48.770.486	
23	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Menuju IPTT Tambak Lorok & Jl Tambakrejo	48.553.183	
24	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Internal Kawasan Pusat Pemerintahan (BSB)	51.150.422	
25	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Tanjung & Kajian Konstruksi Jl Merak	51.789.854	
26	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Lamper Tengah Raya	51.459.220	
27	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl TPI Mangunharjo Harjo Mangkang Kulon & Jl Dewi Saratika Raya-Kp Delik	51.314.698	
28	1.03.1.03.01.15.005	DED Jl Kaliancar-Pondok & Padaan-Palir	48.314.046	
		JUMLAH	1.317.503.895	



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pelaksanaan Kegiatan yang putus kontrak (wanprestasi) dalam penggerjaan Dinas Bina Marga Kota Semarang Per 31 Desember 2014 dengan tabel berikut:

KEGIATAN YANG PUTUS KONTRAK (WANPRESTASI) TA. 2014
DINAS BINA MARGA KOTA SEMARANG

NO	KODE REKENING	KEGIATAN	NILAI KONTRAK	REALISASI	FISIK	KETERANGAN	BERITA ACARA WANPRESTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.03.1.03.01 15 020	Peningkatan Jalan Podorejo	3.111.339.000	2.602.843.700	70,35%	wanprestasi	050/121 Tanggal 06 Januari 2015

2) PSDA dan ESDM

Nilai FS-DED Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang Per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK	KET
I.	PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI		
1.	DED Kawasan Karanganyar	48.851.000	
2.	DED Kawasan Tapak	49.555.000	
3.	DED Kawasan Tugu Rejo	48.620.000	
4.	DED Kawasan Semarang Indah	49.307.000	
5.	DED Sub Sistem Kp. Melayu	99.000.000	
6.	DED Sub Sistem Sungai Bandarharjo	63.190.000	
7.	DED Kedungmundu - Mangunharjo	49.307.000	
8.	DED Kawasan Si Angker	141.493.000	
9.	DED Kawasan Bulu Drain	49.420.000	
10	DED Embung Tirtosari Kalimas	49.505.000	
11	DED Embung Bubakan	49.522.000	
12	DED Kolam Retensi Banyumanik	49.307.000	
13	Inventori D.I Sigotek	49.252.000	
14	Inventori D.I Sigandu	49.362.000	
15	Inventori D.I Dampyak	49.142.000	
16	DED Pengerukan Tambak Lorok	49.500.000	
17	DED Talud Bukit Manyaran Permai	49.519.000	
18	DED Kawasan Singosari, Admodirono, Kimangunsarkoro	49.340.000	
19	DED Kawasan Genuk Indah	49.307.000	
20	DED Kalilutung	108.300.000	
21	DED Kawasan Mulawarman Jabungan	49.060.000	
22	DED Kawasan Senjoyo (Dr. Cipto -Bugangan- Citarum)	49.115.000	
23	DED Sistem Pompa Banjardowo	48.345.000	
24	DED Kawasan Gajahmada (Depok, Gajahmada, Wahid Hasim)	48.178.000	
25	DED Saluran Imam Bonjol (Gendingan - Kol. Soegiyono)	48.125.000	
26	DED Saluran Jl. Jend.Sudirman (Siliwangi)	47.850.000	
27	DED Saluran Drainase Kelurahan Nongkosawit	47.822.000	
28	DED Saluran Jl. Gatot Subroto	48.030.000	
29	DED Saluran Drainase Kelurahan Wonolopo	47.795.000	
30	DED Saluran Drainase Kelurahan Kandri	47.850.000	
31	DED Saluran Jl. Brigjend Sudjarto - Pedurungan	47.806.000	
32	DED Kali PU (Graha Padma)	48.026.000	



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3) Dinas Pasar Kota Semarang

- a) Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional, Pekerjaan Pembangunan Pasar Klithikan Penggaron Kode Rekening 2.06.2.06.02.18.011 Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.829.644.000,00 dengan pelaksanaan selama 75 hari kalender (17 Oktober s/d 30 Desember 2013) dan nilai kontrak sebesar Rp. 8.990.717.000,00 oleh PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI capaian fisik sampai tanggal 27 Desember 2013 sebesar 71,32 %.
- b) Pada tahun anggaran 2014 pembangunan Pasar Klithikan Penggaron dilanjutkan dengan nilai kontrak sebesar Rp9.608.884.000,00. Pembangunan dikerjakan oleh PT. Arqindo dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 telah terealisasi 100%.

4) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang

Nilai FS-DED Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang Per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

DAFTAR FS-DED
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KEGIATAN	REALISASI
1	DED Perbaikan Sarpras TPU di Kota Semarang	48.188.000
2	DED Gor Tri Lomba Juang	28.934.000
3	DED Gedung Diklat Kota Semarang	48.638.000
4	DED Saluran Balaikota	38.591.000
5	DED Rehabilitasi Puskesmas Banjarharjo	48.505.000
	Jumlah	212.856.000

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan atau kompilasi dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah. Di dalam akumulasi penyusutan aset tetap masih terkandung penyusutan dari peralatan dan mesin yang nilainya kurang dari Rp300.000,00 (*extra countable*).

Akumulasi Penyusutan tahun 2014 sebesar Rp1.537.847.035.780,00 ini mengalami kenaikan sebesar Rp136.023.058.051,00 atau 9,70% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp1.401.823.977.729,00. dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Dinas Pendidikan	(490,607,324,776.00)	(536,244,729,577.00)	(45,637,404,801.00)	8.51%
2	Dinas Kesehatan Kota	(58,887,455,907.00)	(43,386,287,712.00)	15,501,168,195.00	-35.73%
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(90,578,606,830.00)	(75,886,215,061.00)	14,692,391,769.00	-19.36%
4	Dinas Bina Marga	(388,560,908,012.00)	(329,455,280,213.00)	59,105,627,799.00	-17.94%
5	Dinas PSDA & ESDM	(65,015,184,341.00)	(50,043,897,982.00)	14,971,286,359.00	-29.92%
6	Dinas Kebakaran	(18,561,660,498.00)	(16,540,088,014.00)	2,021,572,484.00	-12.22%
7	Dinas Tata Kota & Perumahan	(11,822,031,835.00)	(6,116,503,004.00)	5,705,528,831.00	-93.28%
8	Dinas Penerangan Jalan & Pengelolaan Reklame	(18,189,379,220.00)	(12,897,909,757.00)	5,291,469,463.00	-41.03%
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	(3,692,466,212.00)	(3,373,024,608.00)	319,441,604.00	-9.47%
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	(49,106,813,100.00)	(42,330,228,613.00)	6,776,584,487.00	-16.01%
11	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	(7,028,870,587.00)	(5,585,315,978.00)	1,443,554,609.00	-25.85%
12	Dinas Kebersihan & Pertamanan	(35,577,318,397.00)	(27,293,395,522.00)	8,283,922,875.00	-30.35%
13	Dinas Kependidikan & Catatan Sipil	(8,284,555,180.00)	(7,136,637,921.00)	1,147,917,259.00	-16.08%
14	Bapermas, Perempuan & Keluarga Berencana	(4,353,326,401.00)	(3,505,075,636.00)	848,250,765.00	-24.20%
15	Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga	(9,684,627,721.00)	(7,980,873,556.00)	1,703,754,165.00	-21.35%
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	(2,365,640,229.00)	(1,662,867,301.00)	702,772,928.00	-42.26%
17	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	(3,765,205,345.00)	(2,639,328,303.00)	1,125,877,042.00	-42.66%
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(1,186,113,074.00)	(979,039,676.00)	207,073,398.00	-21.15%
19	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	(5,400,074,899.00)	(3,685,671,956.00)	1,714,402,943.00	-46.52%
20	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	(13,959,302,892.00)	(12,925,331,302.00)	1,033,971,590.00	-8.00%
21	Badan Kesbang, Politik & Limmas	(2,058,497,271.00)	(2,014,475,747.00)	44,021,524.00	-2.19%
22	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	(5,362,797,330.00)	(4,572,190,734.00)	790,606,596.00	-17.29%
23	Sekretariat Daerah	(14,027,131,191.00)	(56,163,539,386.00)	0.00	0.00%
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(66,516,416,259.00)	(11,714,704,045.00)	0.00	0.00%
25	Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	(15,013,779,004.00)	(9,444,388,192.00)	4,582,742,999.00	-48.52%
26	Inspektorat	(1,561,469,487.00)	(1,366,643,336.00)	65,149,772,923.00	-4767.14%
27	Kecamatan Semarang Selatan	(4,811,023,894.00)	(4,045,316,109.00)	10,968,462,895.00	-271.14%
28	Kecamatan Semarang Utara	(3,442,850,319.00)	(3,131,265,313.00)	(1,569,795,826.00)	50.13%
29	Kecamatan Semarang Barat	(6,270,807,142.00)	(6,084,239,731.00)	(1,273,215,837.00)	20.93%
30	Kecamatan Semarang Timur	(3,235,143,499.00)	(2,903,659,713.00)	539,190,606.00	-18.57%
31	Kecamatan Semarang Tengah	(9,601,965,798.00)	(9,024,913,049.00)	(2,754,105,907.00)	30.52%
32	Kecamatan Gunungpati	(4,906,267,532.00)	(4,207,621,425.00)	(972,477,926.00)	23.11%
33	Kecamatan Tugu	(2,832,642,798.00)	(2,624,068,858.00)	6,977,896,940.00	-265.92%
34	Kecamatan Mijen	(3,264,700,282.00)	(2,523,355,440.00)	2,382,912,092.00	-94.43%
35	Kecamatan Genuk	(4,597,407,456.00)	(3,941,721,671.00)	(1,109,078,873.00)	28.14%
36	Kecamatan Gajahmungkur	(3,171,311,212.00)	(2,756,467,021.00)	508,233,261.00	-18.44%
37	Kecamatan Tembalang	(3,899,005,093.00)	(4,117,772,734.00)	479,634,722.00	-11.65%
38	Kecamatan Candisari	(4,963,797,506.00)	(4,409,253,597.00)	(1,237,942,385.00)	28.08%
39	Kecamatan Banyumanik	(13,871,221,621.00)	(12,349,604,067.00)	(8,450,598,974.00)	68.43%
40	Kecamatan Ngaliyan	(5,096,636,986.00)	(4,576,922,883.00)	386,874,623.00	-8.45%
41	Kecamatan Gayamsari	(8,427,918,882.00)	(7,018,727,540.00)	6,852,494,081.00	-97.63%
42	Kecamatan Pedurungan	(3,730,267,464.00)	(2,951,374,977.00)	2,145,262,009.00	-72.69%
43	Badan Kepegawaian Daerah	(1,585,218,493.00)	(1,310,734,955.00)	7,117,183,927.00	-542.99%
44	Kantor Pendidikan & Latihan	(1,187,749,351.00)	(764,785,529.00)	2,965,481,935.00	-387.75%
45	Kantor Ketahanan Pangan	(748,732,169.00)	(648,769,228.00)	936,449,265.00	-144.34%
46	Kantor Perpustakaan & Arsip	(10,268,486,897.00)	(8,578,125,882.00)	(7,390,376,531.00)	86.15%
47	Dinas Pertanian	(5,548,058,962.00)	(4,192,439,273.00)	(3,443,707,104.00)	82.14%
48	Dinas Kelautan & Perikanan	(4,364,241,195.00)	(3,868,183,170.00)	6,400,303,727.00	-165.46%
49	Dinas Pasar	(35,187,788,990.00)	(29,423,430,486.00)	(23,875,371,524.00)	81.14%
50	Dinas Perindustrian & Perdagangan	(1,666,836,241.00)	(1,427,581,946.00)	2,936,659,249.00	-205.71%
	Jumlah	(1,537,847,035,780.00)	(1,401,823,977,729.00)	167,046,676,251.00	-11.92%

Kebijakan Penyusutan Pemkot Semarang dituangkan dalam Perwali No.32 Tahun 2014 tentang Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pemkot Semarang yang menganut metode garis lurus.

4.3.6 DANA CADANGAN

Pembentukan Dana Cadangan Pemkot ditetapkan melalui Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. Tujuannya adalah menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp75.671.777.153,00. Dana Cadangan tersebut ditempatkan pada Rekening Bank Jateng Cabang Semarang Nomor : 1-021-00916-1 atas nama Dana Cadangan Pemerintah Kota Semarang berupa



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Deposito Bank Jateng dengan Nomor Bilyet 098251 sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Deposito Bank Jateng dengan Nomor Bilyet 103107 sebesar Rp15.000.000,00 dengan bunga sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp4.617.123.271,00. Pada tahun 2014 dibentuk Dana Cadangan lagi yang ditempatkan pada rekening giro baik pada Bank Jateng dengan No. Rekening 1-021-00916-1 sebesar Rp25.439.914.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2014 mendapat bunga sebagai penambah Dana Cadangan sebesar Rp614.739.882,00.

4.3.7 ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset Pemkot Semarang yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp92.404.780.977,00, mengalami penurunan sebesar Rp88.259.270.201,00 atau 48,85% dari tahun 2013 sebesar Rp180.664.051.178,00 dengan rincian sebagai berikut:

ASET LAINNYA	31-Dec-14 (Rp)	31-Dec-13 (Rp)	Tren %
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	11,056,831,000,00	66,053,931,000,00	-83,26%
Aset Tak Berwujud	18,358,331,532,00	18,095,485,406,00	1,45%
Aset Lain-lain	74,449,767,898,00	111,085,904,808,00	-32,98%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(11,460,149,453,00)	(14,571,270,036,00)	-21,35%
Jumlah	92,404,780,977,00	180,664,051,178,00	-48,85%

Adapun rincian Aset Lainnya sebagai berikut :

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2014 di Pemerintah Kota Semarang adalah sebesar Rp11.056.831.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp54.997.100.000,00 atau 83% dari tahun 2013 sebesar Rp 66.053.931.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (PK)	31-Dec-14 (Rp)	31-Dec-13 (Rp)	Tren %
1 Tanah Bekas Gedung Pertemuan Wisma Pancasila	1.944.000.000,00	1.944.000.000,00	0,00%
2 Tanah Bangunan Pusat Pasar Dargo Semarang	1.775.101.000,00	1.775.101.000,00	0,00%
3 Tanah Bangunan Pasar Gayamsari Semarang	1.055.850.000,00	1.055.850.000,00	0,00%
4 Tanah Komplek Pertokoan Bubakan	1.002.400.000,00	1.002.400.000,00	0,00%
5 Tanah Bangunan Pusat Perbelanjaan & Rekreasi Shopping Center Johar	2.289.480.000,00	2.289.480.000,00	0,00%
6 Tanah Bangunan Disekitar Tugu Tabanas Gombel Semarang	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00%
7 Tanah Bangunan Bekas Gedung Kanwil VII DEPPARPOSTEL JAWA TENGAH Plaza II	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00%
8 Tanah Bangunan Pasar Banjardowo	0,00	15.815.000.000,00	-100,00%
9 Tanah Bangunan Pasar Mateseh	0,00	1.675.200.000,00	-100,00%
10 Tanah Bangunan Pasar Gedawang Kec. Banyumanik	0,00	1.057.100.000,00	-100,00%
11 Parkir Toko Roti Purimas 3 Bakery	0,00	149.800.000,00	-100,00%
12 Lap. Golf SGC	0,00	36.300.000.000,00	-100,00%
	11.056.831.000,00	66.053.931.000,00	-83,26%



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Dalam catatan aset kemitraan dengan Pihak Ketiga mengalami penurunan yang signifikan karena terjadi reklass dari aset lain-lain ke-aset tetap tanah sebesar Rp54.997.100.000,00.

Selain kemitraan Pihak Ketiga tersebut, di Kota Semarang terdapat kemitraan/kerjasama dengan Pihak Ketiga yang melibatkan aset namun belum bisa dicatat sebagai aset kemitraan dengan Pihak Ketiga. Perjanjian tersebut merupakan sewa menyewa dari Bagian tempat Usaha bagi Pemerintah Kota Semarang yang timbul sebagai akibat perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Semarang dan Pihak ketiga.

Kemitraan ini belum dicatat sebagai Aset kemitraan karena bangunan tersebut belum sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang yakni menunggu jangka waktu / masa kerja sama selesai.

Sewa menyewa Bagian Tempat Usaha tersebut adalah :

- 1) Bagian Tempat Usaha yang timbul sebagai akibat Perjanjian Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Arga Mukti Pratama, Komplek Pertokoan Simpang Lima Blok A No. 14-15 Semarang tentang Perjanjian Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka peningkatan Daya dan Guna Gedung Wisma Pancasila, HGB 1213 diatas HPL 1 Pekunden di Jl. KH. A. Dahlan Semarang . Sewa menyewa atas Bagian Tempat Usaha Pemerintah Kota Semarang tersebut adalah sebagai berikut:

No	Pihak Ketiga	Bentuk Kemitraan	Jangka Waktu
1	PT. Arga Mukti Pratama	Sewa menyewa areal parkir Lt.I	5 tahun
	Kompleks Pertokoan	Sampai dengan Vi Plasa Simpang	7 Januari 2011 -
	Simpang Lima Blok. A	Lima	7 Januari 2016
	No. 14-15 Semarang		
2	PT. Arga Kencana Santoso	Sewa menyewa Gedung	5 tahun
	Gd. Plasa Simpang Lima	Pertemuan beserta fasilitasnya	6 Januari 2011 -
	Lt. VI Jl. KH. A. Dahlan	Dan areal parkir Lt.VII Plasa	5 Januari 2016
	No. 2 Semarang	Simpang Lima	
3	Lembaga Pendidikan Perhotelan	Sewa menyewa Ruang Lt.VII B	5 tahun
	Pushkom Semarang	Plasa Simpang LIma	29 Desember 2010 -
			28 Desember 2015
4	PT. Arga Mukti Pratama	Sewa menyewa Pertokoan Lantai	5 tahun
	Komplek Pertokoan Simpang	Dasar Plasa Simpang Lima	1 September 2011 -
	Lima Blok A No.14-15 Semarang		1 September 2016

- 2) Kerjasama kemitraan sewa menyewa atas Bagian Tempat Usaha Pemerintah Kota Semarang yang timbul dari Perjanjian Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Gedung Bertingkat di atas Tanah Milik Pemerintah



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Terletak dijalan KH. Ahmad Dahlan No.2 Semarang (Bekas Gedung Kanwil VII Depparpostel Jawa Tengah) adalah sebagai berikut:

No	Pihak Ketiga	Bentuk Kemitraan	Jangka Waktu
1	PT. Arga Mukti Pratama	Sewa menyewa areal parkir	5 tahun
	Jl. Pusponjolo Barat No. 12	di Lantai V Plasa II Simpang	
	RT.04 RW.II Kel. Cabean	Lima di Jl. KH. A. Dahlan	
	Semarang Barat	No. 2 Semarang	
2	PT. Metro Golden Manajemen	Sewa menyewa Pertokoan	5 tahun
	Jl. KH. Nur Alie	Lantai I Plasa II Simpang Lima	
	PO. BOX. 275 Bekasi		

Selanjutnya dalam Catatan ini kami sampaikan bahwa terdapat kemitraan dengan Pihak Ketiga yang juga belum bisa dikategorikan masuk dalam catatan aset kemitraan karena asetnya belum menjadi hak Pemerintah Kota Semarang. Kemitraan tersebut adalah :

No	Pihak Ketiga	Bentuk Kemitraan	Jangka Waktu
1	PT. Arga Mukti Pratama	Kerja sama Pengelolaan	20 tahun
	Komplek Pertokoan Simpang	Jembatan Penghubung	12 Agustus 2014 -
	Lima Blok A No,14-15 Semarang	Gd. Plasa Simpang Lima dan Mall Ciputra Jl. KH.	13 Agustus 2024
		A.Dahlan	
2	PT. Ciputra	Kerja sama Pengelolaan	25 tahun
	Jl. Simpang Lima No. 1	Jembatan Penghubung	12 Agustus 2014 -
	Semarang	Gd. parkir dan Mall Ciputra	13 Agustus 2029
		Jl. Anggrek	

b) Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2014 di Pemerintah Kota Semarang adalah sebesar Rp18.358.331.532,00 mengalami peningkatan Rp262.846.126,00 atau 1,45% dari tahun 2013 sebesar Rp18.095.485.406,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b) Aset Tak Berwujud	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
Dinas Pendidikan	1,545,746,003.00	1,544,957,603.00	0.05%
Dinas Kesehatan Kota	243,635,000.00	233,635,000.00	4.28%
RSUD	557,554,857.00	549,334,857.00	1.50%
Dinas Bina Marga	137,068,025.00	137,068,025.00	0.00%
Dinas PSDA dan ESDM	23,947,000.00	23,947,000.00	0.00%
Dinas Kebakaran	24,750,000.00	24,750,000.00	0.00%
Dinas Tata Kota & Perumahan	632,027,900.00	632,027,900.00	0.00%
Dinas Pengelolaan Penerangan Jalan dan Reklame	147,288,524.00	147,288,524.00	0.00%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	-	181,530,000.00	-100.00%
Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	411,102,007.00	254,159,847.00	61.75%
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	-	128,607,233.00	-100.00%
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	14,850,000.00	14,850,000.00	0.00%
Dinas Kependidikan dan Capil	564,828,000.00	564,828,000.00	0.00%
Bapemas, Perempuan dan KB	76,425,660.00	76,425,660.00	0.00%
Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga	381,815,333.00	214,772,833.00	77.78%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	79,900,000.00	79,900,000.00	0.00%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	171,371,676.00	171,371,676.00	0.00%
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	35,810,000.00	-100.00%
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	6,458,210,550.00	6,455,210,550.00	0.05%
Badan Kesbang Politik dan Linmas	-	140,033,299.00	-100.00%
Dinas Kebudayaan & Pariwisata	188,533,299.00	42,872,701.00	339.75%
Satpol PP	202,499,839.00	202,499,839.00	0.00%
Sekretariat Daerah	714,222,996.00	462,049,996.00	54.58%
Sekretariat DPRD	144,251,800.00	144,251,800.00	0.00%
DPKAD	4,703,782,807.00	4,703,782,807.00	0.00%
Badan Kepegawaian Daerah	120,585,000.00	115,585,000.00	4.33%
Kantor Perpustakaan dan Arsip	519,335,256.00	519,335,256.00	0.00%
Dinas Pertanian	93,045,000.00	93,045,000.00	0.00%
Dinas Pasar	201,555,000.00	201,555,000.00	0.00%
Jumlah	18,358,331,532.00	18,095,485,406.00	1.45%

Aset tidak berwujud sebesar Rp18.358.331.532,00 disajikan dengan nilai perolehan. Aset ini berupa software-software.

c) Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2014 di Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp74.449.767.898,00, mengalami penurunan Rp36.636.136.910,00 atau 49,21% dari tahun 2013 sebesar Rp111.085.904.808,00. Rincian aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Aset lain-lain	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Barang Setuju Dihapus	-	5.815.000,00	(5.815.000,00)	0,00%
2 Software	-	-	-	0,00%
3 Tanah yang Bukan Aset Tetap :				0,00%
- Lahan kolam retensi	19.193.642.300,00	19.193.642.300,00	-	0,00%
- Tanah kena abrasi (Kec. Genuk)	52.276.488.000,00	52.276.488.000,00	-	0,00%
- Tanah kena erosi sungai (Kec. Mijen)	210.250.000,00	210.250.000,00	-	0,00%
4 Paving, aspal, jalan, saluran dan sumur yang akan dihapus tahun 2014	-	21.270.463.858,00	(21.270.463.858,00)	0,00%
5 Usulan Barang yang Dihapus	2.047.694.445,00	-	2.047.694.445,00	100,00%
6 Barang Dalam Proses Penelusuran	721.693.153,00	18.129.245.650,00	(17.407.552.497,00)	-2412,04%
Jumlah	74.449.767.898,00	111.085.904.808,00	(36.636.136.910,00)	-49,21%

d) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2014 sebesar Rp11.460.149.453,00 ini mengalami kenaikan sebesar Rp3.111.120.583,00 atau 21,35% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp14.571.270.036,00. dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
Dinas Pendidikan	(857,332,018.00)	0.00	(857,332,018.00)	0.00%
Dinas Kesehatan Kota	(232,175,845.00)	0.00	(232,175,845.00)	0.00%
RSUD	(438,938,126.00)	0.00	(438,938,126.00)	0.00%
Dinas Bina Marga	(181,695,350.00)	(184,999,996.00)	3,304,646.00	-1.79%
Dinas PSDA & ESDM	(22,749,669.00)	(18,254,547.00)	(4,495,122.00)	24.62%
Dinas Kebakaran	(7,920,000.00)	0.00	(7,920,000.00)	0.00%
Dinas Tata Kota & Perumahan	(489,427,607.00)	(10,284,437,602.00)	9,795,009,995.00	-95.24%
Dinas Penerangan Jalan & Pengelolaan Reklame	(112,206,023.00)	(3,452,332.00)	(108,753,691.00)	3150.15%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	(112,574,766.00)	0.00	(112,574,766.00)	0.00%
Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	(85,797,396.00)	0.00	(85,797,396.00)	0.00%
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	(52,840,797.00)	(213,312,472.00)	160,471,675.00	-75.23%
Dinas Kebersihan & Pertamanan	(85,690,240.00)	(62,414,991.00)	(23,275,249.00)	37.29%
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	(465,586,837.00)	(392,217,594.00)	(73,369,243.00)	18.71%
Bapemas, Perempuan & Keluarga Berencana	(44,581,635.00)	(3,879,713.00)	(40,701,922.00)	1049.10%
Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga	(143,451,682.00)	(43,860,008.00)	(99,591,674.00)	227.07%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	(119,419,288.00)	(124,340,394.00)	4,921,106.00	-3.96%
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	(73,243,144.00)	(219,998.00)	(73,023,146.00)	33192.64%
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(148,263,189.00)	0.00	(148,263,189.00)	0.00%
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	(2,615,911,160.00)	(40,553,737.00)	(2,575,357,423.00)	6350.48%
Dinas Kebudayaan & Pariwisata	(44,099,079.00)	(48,198,619.00)	4,099,540.00	-8.51%
Badan Kesbang, Politik & Linmas	(175,522,684.00)	(92,292,094.00)	(83,230,590.00)	90.18%
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	(166,874,761.00)	(94,868,286.00)	(72,006,475.00)	75.90%
Sekretariat Daerah	(58,521,542.00)	(145,325,722.00)	86,804,180.00	-59.73%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(247,398,328.00)	0.00	(247,398,328.00)	0.00%
Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	(3,282,869,224.00)	(1,889,041,336.00)	(1,393,827,888.00)	73.78%
Kecamatan Semarang Selatan	0.00	(29,462,199.00)	29,462,199.00	-100.00%
Kecamatan Semarang Utara	0.00	(62,934,595.00)	62,934,595.00	-100.00%
Kecamatan Semarang Barat	(24,523,923.00)	(126,697,905.00)	102,173,982.00	-80.64%
Kecamatan Semarang Tengah	(8,999,999.00)	(73,774,367.00)	64,774,368.00	-87.80%
Kecamatan Gunungpati	0.00	(19,321,978.00)	19,321,978.00	-100.00%
Kecamatan Tugu	(55,187,886.00)	(15,299,997.00)	(39,887,889.00)	260.71%
Kecamatan Mijen	0.00	(23,311,579.00)	23,311,579.00	-100.00%
Kecamatan Genuk	0.00	(31,194,892.00)	31,194,892.00	-100.00%
Kecamatan Gajahmungkur	0.00	(20,982,402.00)	20,982,402.00	-100.00%
Kecamatan Tembalang	(195,374,985.00)	(32,569,911.00)	(162,805,074.00)	499.86%
Kecamatan Candisari	0.00	(6,574,954.00)	6,574,954.00	-100.00%
Kecamatan Banyumanik	(73,990,979.00)	(108,266,106.00)	34,275,127.00	-31.66%
Kecamatan Ngaliyan	0.00	(12,949,943.00)	12,949,943.00	-100.00%
Kecamatan Gayamsari	(7,999,999.00)	(113,096,993.00)	105,096,994.00	-92.93%
Kecamatan Pedurungan	0.00	(22,700,765.00)	22,700,765.00	-100.00%
Badan Kepegawaiannya Daerah	(65,476,422.00)	0.00	(65,476,422.00)	0.00%
Kantor Perpustakaan & Arsip	(436,669,274.00)	(49,583,597.00)	(387,085,677.00)	780.67%
Dinas Pertanian	(145,686,962.00)	(180,878,412.00)	35,191,450.00	-19.46%
Dinas Kelautan & Perikanan	(20,061,143.00)	0.00	(20,061,143.00)	0.00%
Dinas Pasar	(161,087,491.00)	0.00	(161,087,491.00)	0.00%
Jumlah	(11,460,149,453.00)	(14,571,270,036.00)	3,111,120,583.00	-21.35%

4.3.8 KEWAJIBAN

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember tahun 2014 adalah sebesar Rp27.067.052.431,00, mengalami penurunan sebesar Rp325.237.774,00 atau -1,19% dari tahun 2013 sebesar Rp27.392.290.205,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban	31-Des-14	31-Des-13	Tren
	(Rp)	(Rp)	%
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	4.522.375.560,00	4.442.638.263,00	1,79%
B. Utang Bunga	874.741,00	62.604.529,00	-98,60%
c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	1.816.665.353,00	-100,00%
d. Pendapatan di Terima di muka	2.054.073.350,00	1.964.887.805,00	4,54%
e. Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00%
f. Utang Belanja	20.489.728.780,00	19.105.494.255,00	7,25%
Jumlah	27.067.052.431,00	27.392.290.205,00	-1,19%

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dapat dirinci sebagai berikut:

Utang PFK	31-Dec-14	31-Dec-13	Tren
	Rp	Rp	%
1. Utang Pajak Yang Belum Disetor	86.858.996,00	213.120.499,00	-59,24%
2. Uang Jaminan Biaya (UJB) Reklame	2.959.098.000,00	2.871.699.200,00	3,04%
3. Uang Jaminan Penduduk Boro	1.476.418.564,00	1.357.818.564,00	8,73%
	4.522.375.560,00	4.442.638.263,00	1,79%

- 2) Utang Bunga per 31 Desember 2014 sebesar Rp874.741,00 merupakan tunggakan denda pokok atas utang jangka panjang tanggal 21 September 1994 Nomer SLA-768/DP3/1994 pada IBRD Bank Dunia.
- 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklassifikasi dari Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran, atas Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank. Pada tahun 2014 utang jangka panjang tersebut sudah lunas sehingga saldo akhir bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka merupakan penerimaan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 tetapi Pemerintah Kota Semarang masih mempunyai kewajiban untuk memberikan jasanya dan melebihi tahun 2014. Saldo akhir Pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2014 sebesar Rp2.054.073.350,00 mengalami kenaikan sebesar Rp89.185.545,00 (4,54%) dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp1.964.887.805,00. Rincian Pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut:

No	Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2014	Tahun 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Sewa titik reklame (PJPR)	1,481.454.679,00	1,468.887.805,00	12.566.874,00	0.86
2	Sewa Gedung untuk Bank Jateng dan ATM BNI (RSUD)	24.000.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	(33,33)
3	Sewa Hall Matahari Simpang 5 lantai lima (Dishubkominfo)	230.000.000,00	460.000.000,00	(230.000.000,00)	(50,00)
4	E-Ticketing (BLUD Terminal Mangkang)	7.024.000,00	-	7.024.000,00	100,00
5	Sewa tanah eks bengkok (DPKAD)	311.594.671,00	-	311.594.671,00	100,00
	Jumlah	2.054.073.350,00	1.964.887.805,00	89.185.545,00	4,54

- 5) Utang Belanja

- Utang belanja sebesar Rp20.489.728.780,00,- merupakan pemakaian jasa atas belanja jamkesmaskot, pemakaian listrik, telepon/speedy dan air bulan Desember 2014 yang belum dibayar, karena sudah timbul kewajiban maka dicatat sebagai utang belanja.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No.	SKPD	31-Dec-14 (Rp)	31-Dec-13 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	846,494,156	1,194,578,281
2	Dinas Kesehatan Kota	3,843,357,529	95,249,957
3	Rumah Sakit Umum Daerah	9,096,568,412	12,514,803,518
4	Dinas Bina Marga	26,191,609	10,847,995
5	Dinas PSDA & ESDM	26,400,066	30,671,614
6	Dinas Kebakaran	11,306,326	13,915,506
7	Dinas Tata Kota & Perumahan	-	246,225
8	Dinas Penerangan Jalan & Pengelolaan Reklame	984,677	572,041
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	1,844,382	9,259,584
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	102,110,387	95,864,480
11	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	9,699,750	7,905,650
12	Dinas Kebersihan & Pertamanan	18,928,437	18,948,300
13	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	85,066,820	120,553,917
14	Bapermas, Perempuan & Keluarga Berencana	987,000	1,532,000
15	Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga	37,429,470	3,984,877
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	7,939,393	6,254,674
17	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	27,348,879	27,999,685
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2,223,541	1,076,979
19	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	1,721,882	1,696,927
20	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	31,554,370	25,123,233
	Badan Kesbangpol	650,897	
21	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	26,461,646	13,209,360
22	Sekretariat Daerah	539,262,889	503,206,745
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	11,777,344
24	Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	5,267,753,089	3,910,666,626
25	Inspektorat	510,105	470,336
26	Kecamatan Semarang Selatan	11,345,608	8,762,983
27	Kecamatan Semarang Utara	4,417,819	4,253,591
28	Kecamatan Semarang Barat	9,678,492	7,724,391
29	Kecamatan Semarang Timur	8,448,405	7,017,662
30	Kecamatan Semarang Tengah	11,199,098	10,200,591
31	Kecamatan Gunungpati	5,408,571	3,550,323
32	Kecamatan Tugu	3,290,420	3,767,958
33	Kecamatan Mijen	6,537,730	5,663,941
34	Kecamatan Genuk	8,213,444	8,774,038
35	Kecamatan Gajahmungkur	8,405,429	6,590,588
36	Kecamatan Tembalang	5,179,800	6,626,900
37	Kecamatan Candisari	6,754,843	6,549,613
38	Kecamatan Banyumanik	2,850,764	9,101,477
39	Kecamatan Ngaliyan	11,158,693	12,184,819
40	Kecamatan Gayamsari	6,692,877	6,255,967
41	Kecamatan Pedurungan	8,121,678	7,948,975
42	Badan Kepegawaiannya Daerah	3,661,432	1,922,507
43	Kantor Pendidikan & Latihan	2,237,247	3,133,587
44	Kantor Ketahanan Pangan	3,853,728	3,891,645
45	Kantor Perpustakaan & Arsip	2,571,594	2,848,135
46	Dinas Pertanian	13,503,894	10,389,760
47	Dinas Kelautan & Perikanan	-	15,919,125
48	Dinas Pasar	331,608,657	331,608,657
49	Dinas Perindustrian & Perdagangan	1,792,845	391,168
	Jumlah	20,489,728,780	19,105,494,255

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp21.000.000,00 atau 2013 sebesar Rp23.000.000,00 merupakan pendapatan diterima di muka atas penerimaan sewa gedung untuk ATM BNI dan Kantor kas Bank Jateng milik RSUD yang melebihi 1 tahun ke depan.

4.3.9 EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Semarang pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Semarang. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp15.147.458.705.353,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.745.065.666.100,00 atau 104,63% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2013 sebesar Rp7.402.393.039.253,00.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp7.402.393.039.253,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2013.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp835.566.043.649,00 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat selisihnya sebesar Rp6.909.499.622.451,00 hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya dan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan mutasi masuk dan keluar serta koreksi aset tetap sebesar Rp(1.501.654.758,00) merupakan transaksi penyesuaian aset tetap yang disebabkan adanya koreksi nilai aset tetap, mutasi keluar masuk aset tetap antar SKPD atas aset tetap yang tahun perolehannya sebelum tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar
1	DINAS PENDIDIKAN	1.809.222.473
2	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	(2.764.865.524)
3	BAPPEDA	(510.520.524)
4	DISHUBKOMINFO	(2.190.000)
5	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	6.078.483
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	(7.524.153)
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(59.970.225)
8	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	152.659.724
9	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.390.773
10	SEKRETARIAT DAERAH	289.311.976
11	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	(92.826.003)
12	KECAMATAN GUNUNGPATI	1.500.000
13	KECAMATAN MIJEN	5.897.082
14	KECAMATAN TEMBALANG	(50.397.840)
15	KECAMATAN CANDISARI	(130.751.000)
16	KECAMATAN NGALIYAN	(171.000.000)
17	KECAMATAN GAYAMSARI	650.000
18	DINAS PASAR	47.445.000
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(41.765.000)
Jumlah		(1.501.654.758)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- b. Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp57.656.228.202,00 merupakan penyesuaian akumulasi penyusutan terkait dengan adanya penambahan maupun pengurangan penyusutan aset tetap yang disebabkan adanya penghapusan, mutasi dan reklasifikasi aset tetap dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:
- c. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp71.962.150,00 berada pada Dinas Bina Marga Rp71.761.250,00 dan Kantor Satpol-PP Rp200.900,00 yang merupakan koreksi penambahan persediaan karena kurang catat pada tahun 2013
- d. Pada tahun 2014 terdapat penilaian aset tetap sebesar Rp6.894.102.110.567,00 merupakan penilaian yang dilakukan terhadap aset-aset tetap yang belum ada nilainya. Rincian penilaian aset tetap tahun 2014 pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Penilaian	
		2014	2013
1	Dinas Pendidikan	(181,715,189,609)	7,903,250,000
2	Dinas Kesehatan	570,560,728	-
3	DPKAD	15,118,470,265	2,743,100,000
4	Dinas Bina Marga	6,695,640,958,000	-
5	Dinas PSDA & ESDM	16,904,877	-
6	DTKP	27,938,564,624	-
7	Dinas Kebakaran	1,624,000	-
8	PJPR	104,000,000	45,000,000
9	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	84,000,000	-
10	Dinas Kebersihan & Pertamanan	(277,750,000)	-
11	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	109,280,000	-
12	Bapermasper & KB	241,000,000	-
13	Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	117,000,000	-
14	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	98,400,000	-
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	55,830,700	-
16	Dinas Koperasi dan UKM	100,000,000	-
17	Sekretariat Daerah	5,082,640,562	2,993,000
18	Inspektorat	139,000,000	-
19	Kecamatan Semarang Selatan	20,500,000	-
20	Kecamatan Semarang Utara	-	27,000,000
21	Kecamatan Semarang Barat	8,513,710,161	-
22	Kecamatan Semarang Timur	5,955,344,000	-
23	Kecamatan Gunungpati	508,194,000	-
24	kecamatan genuk	-	14,892,500
25	Kecamatan Tugu	11,105,581,000	-
26	Kecamatan Mijen	296,567,000,000	-
27	Kecamatan Gajahmungkur	75,000,000	-
28	Kecamatan Candisari	975,000	7,529,400,000
29	Kecamatan Banyumanik	6,839,423,418	-
30	Kecamatan gayamsari	611,361,341	6,662,500
31	Kecamatan Pedurungan	75,000,000	-
32	Badan Kepegawaian Daerah	95,000,000	-
33	Kantor Pendidikan & Latihan	14,877,500	-
34	Kantor Perpustakaan & Arsip	188,100,000	-
35	Kantor Ketahanan Pangan	-	995,000,000
36	Dinas Pasar	-	5,285,000,000
37	Dinas Pertanian	106,750,000	1,828,000,000
Jumlah		6,894,102,110,567	26,380,298,000



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- e. Penyesuaian akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp(5.636.843.022,00) merupakan penyesuaian yang disebabkan adanya penghapusan, penilaian, reklasifikasi, mutasi aset lainnya serta karena penghitungan amortisasi aset tak berwujud baru dilakukan pada tahun 2014 sehingga amortisasi aset tak berwujud sebelum tahun 2014 dicatat sebagai penyesuaian akumulasi penyusutan aset lain-lain.
- f. Penyesuaian eliminasi RK Dinas dan RK Kasda sebesar Rp1.959.062.115,00 merupakan penyesuaian yang disebabkan karena adanya selisih antara RK Dinas dan RK Kasda.
- g. Koreksi nilai piutang sebesar (Rp1.580.246.451,00) merupakan koreksi terhadap nilai piutang PBB dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1) Koreksi hasil penelusuran piutang PBB | : | Rp 466.244.555,00 |
| 2) Koreksi karena perubahan nilai SPPT PBB | : | (Rp 27.110.464,00) |
| 3) Koreksi karena sudah ada pembayaran WP | : | (Rp 2.024.408.374,00) |
| 4) Koreksi karena double pembayaran | : | <u>Rp 5.027.832,00</u> |
| Jumlah | : | (Rp1.580.246.451,00) |
- h. Penyesuaian nilai investasi permanen tahun 2014 merupakan penyesuaian yang dilakukan terhadap investasi permanen pada DPKAD sebesar Rp(9.166.592.070,00). Koreksi ini terjadi karena adanya penyesuaian terkait penerapan metode ekuitas dalam penilaian investasi permanen pada BUMD.
- i. Koreksi nilai pendapatan pajak/retribusi sebesar Rp(1.635.000,00) merupakan koreksi terhadap pengakuan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada DKK atas pendapatan yang telah diterima pada tahun 2013.
- j. Koreksi nilai aset tetap dalam proses penelusuran sebesar (Rp303.863.487,00) merupakan koreksi pengurangan ekuitas yang disebabkan koreksi ketidaksesuaian penyajian aset tetap dalam proses penelusuran tahun 2013. Koreksi nilai aset tetap dalam proses penelusuran terdapat pada SKPD:

No	SKPD	Koreksi Nilai Barang dalam proses penelusuran
1	Dinas Pendidikan	50.720.920
2	Dinas Tata Kota & Perumahan	373.269.209
3	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	85.130.647
4	Dinas Kebersihan & Pertamanan	(609.121.584)
5	Sekretariat Daerah	3.323.444
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(214.711.634)
7	Badan Kepegawaian Daerah	7.525.511
Jumlah		(303.863.487)

- k. Penyesuaian inventaris non aset sebesar Rp26.098.905.795,00 merupakan penurunan nilai aset tetap yang bernilai kurang dari Rp300.000,00 dengan tahun perolehan sebelum tahun 2014, sesuai dengan kebijakan barang tersebut tidak seharusnya disajikan sebagai aset tetap sehingga dilakukan koreksi menjadi inventaris non aset dengan mengurangi ekuitas.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4.5. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

4.5.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kota Semarang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer , dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Pendapatan Asli Daerah	1,206,399,826,150,00	995,942,290,996,81	210,457,535,153,19	21.13%
2 Pendapatan Transfer	1,958,242,860,296,00	1,787,969,405,733,00	170,273,454,563,00	9.52%
3 Lain lain Pendapatan yang Sah	231,082,675,376,00	227,528,933,145,00	3,553,742,231,00	1.56%
Jumlah	3,395,725,361,822,00	3,011,440,629,874,81	384,284,731,947,19	12.76%

Realisasi pendapatan LO tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp.384.284.731.947,19 atau 12,76% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp3.011.440.629.874,81.

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2013. PAD pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp1.206.399.826.150,00 meningkat sebesar Rp210.457.535.153,19 atau 21,26% dibandingkan dengan tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp995.942.290.996,81 dengan rincian sebagai berikut:

	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Pendapatan Pajak Daerah	823,847,715,745,00	735,254,951,589,81	88,592,764,155,19	12.05%
2 Pendapatan Retribusi Daerah	110,046,031,286,00	103,248,367,515,00	6,797,663,771,00	6.58%
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,841,917,896,00	7,862,169,853,00	(2,251,957,00)	-0.26%
4 Lain lain PAD yang Sah	264,664,161,223,00	149,576,802,039,00	115,087,359,184,00	76.94%
Jumlah	1,206,399,826,150,00	995,942,290,996,81	210,457,535,153,19	21.13%

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun anggaran 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) kota Semarang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2014, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2014 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2014. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp823.847.715.745,00 meningkat sebesar Rp88.592.764.155,19 atau 12,05%



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

dibandingkan dengan tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp735.254.951.589,81 dengan rincian sebagai berikut:

	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
Pajak Hotel	51.438.752.533,00	44.939.686.753,00	6.499.065.780,00	14,46%
Pajak Restoran	62.999.747.799,00	49.137.598.346,86	13.862.149.452,14	28,21%
Pajak Hiburan	14.979.589.501,00	12.505.902.872,95	2.473.686.628,05	19,78%
Pajak Reklame	23.946.679.038,00	25.745.753.865,00	(1.799.074.827,00)	-6,99%
Pajak Penerangan Jalan	163.497.269.621,00	137.411.660.918,00	26.085.608.703,00	18,98%
Pajak Galian Gol C	25.199.840,00	1.367.379.075,00	(1.342.179.235,00)	-98,16%
Pajak Parkir	7.611.071.907,00	5.728.808.492,00	1.882.263.415,00	32,86%
Pajak Air Tanah	4.809.849.906,00	4.877.309.481,00	(67.459.575,00)	-1,38%
Pajak Sarang Burung Walet				0,00%
Pajak BPHPB	254.085.540.258,00	220.909.156.797,00	33.176.383.461,00	15,02%
Pajak PBB	240.454.015.342,00	232.631.694.989,00	7.822.320.353,00	3,36%
	823.847.715.745,00	735.254.951.589,81	88.592.764.155,19	12,05%

Realisasi pendapatan LO-PBB merupakan perhitungan hak Pemerintah Kota Semarang. Yang menjadi ketetapan Pajak PBB tahun 2014 sebesar Rp240.454.015.342,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Semarang dipungut dan dikelola oleh 18 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp110.046.031.286,00 meningkat sebesar Rp6.797.663.771,00 atau 6,58% dibandingkan dengan tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp103.248.367.515,00 dengan rincian sebagai berikut:

2	pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Dinas Kesehatan Kota Semarang	12,283.231.500,00	8,252.521.050,00	4.030.710.450,00	48,84%
2	Dinas Bina Marga	42.800.000,00	41.500.000,00	1.300.000,00	3,13%
3	Dinas PSDA dan ESDM	105.025.000,00	121.645.000,00	(16.620.000,00)	-13,66%
4	Dinas Kebakaran	82.682.500,00	72.762.500,00	9.920.000,00	13,63%
5	Dinas Tata Kota dan Perumahan	32.662.155.200,00	30.268.115.900,00	2.394.039.300,00	7,91%
6	Dinas Penerangan Jalan dan Reklame	6.044.158.961,00	6.758.699.580,00	(714.540.619,00)	-10,57%
7	Dishubkominfo & BLU	12.312.991.345,00	12.015.303.730,00	297.687.615,00	2,48%
8	Badan Lingkungan Hidup	617.670.000,00	319.200.000,00	298.470.000,00	93,51%
9	Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan	14.580.039.000,00	13.800.599.800,00	779.439.200,00	5,65%
10	Dispendum dan Capil	1.156.621.000,00	2.854.896.000,00	(1.698.275.000,00)	-59,49%
11	Sekretaris Daerah	917.613.000,00	907.754.000,00	9.859.000,00	1,09%
12	Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga	1.755.746.150,00	2.060.349.950,00	(304.603.800,00)	-14,78%
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.631.172.000,00	-	1.631.172.000,00	100,00%
14	DPKAD	2.392.695.741,00	2.636.154.903,00	(243.459.162,00)	-9,24%
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.880.453.350,00	5.568.807.000,00	(688.353.650,00)	-12,36%
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	66.535.295,00	58.802.580,00	7.732.715,00	13,15%
17	Dinas Pasar	18.514.441.244,00	17.511.255.522,00	1.003.185.722,00	5,73%
	Jumlah	110.046.031.286,00	103.248.367.515,00	6.797.663.771,00	6,58%

Realisasi pendapatan retribusi pada tabel tersebut diatas merupakan pendapatan Laporan Operasional tahun 2014 dan menurut jenisnya ada tiga (3)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

retribusi yaitu rertibusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu. Pendapatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	1.156.621.000,00	2.854.896.000,00	(1.698.275.000,00)	-59,49%
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	842.654.000,00	771.062.000,00	71.592.000,00	9,28%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.789.089.500,00	2.601.911.700,00	187.177.800,00	7,19%
Retribusi Pelayanan Pasar	13.707.260.537,00	13.077.834.222,00	629.426.315,00	4,81%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	6.468.913.470,00	6.142.773.030,00	326.140.440,00	5,31%
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	64.682.500,00	58.512.500,00	6.170.000,00	10,54%
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pela	1.461.821.300,00	1.482.845.800,00	(21.024.500,00)	-1,42%
Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	211.631.000,00	-	211.631.000,00	100,00%
Retribusi Pada BLUD Terminal Mangkang	294.570.000,00	-	294.570.000,00	100,00%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	2.636.154.903,00	(2.636.154.903,00)	-100,00%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.283.231.500,00	8.252.521.050,00	4.030.710.450,00	100,00%
Retribusi Pelayanan Persampahan	13.517.908.000,00	12.801.903.000,00	716.005.000,00	100,00%
Jumlah	52.798.382.807,00	50.680.414.205,00	2.117.968.602,00	4,18%

Pendapatan Retribusi jasa umum pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp52.798.382.807,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.117.968.602,00 atau 4,18% jika dibandingkan tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp50.680.414.205,00

Retribusi Jasa Usaha	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
Retribusi Terminal	588.203.500,00	585.474.000,00	2.729.500,00	0%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	911.147.500,00	872.445.000,00	38.702.500,00	4%
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa	1.178.813.000,00	1.381.950.800,00	(203.137.800,00)	-15%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.183.953.850,00	3.917.366.500,00	266.587.350,00	7%
Retribusi Sewa Lahan Jembatan Ciputra - Anggrek	18.986.302,00	-	18.986.302,00	100%
Retribusi Sewa Lahan Jembatan Ciputra - Achmad Dahlan	160.182.000,00	-	160.182.000,00	100%
Retribusi Kerjasama Lt Dasar / Pertokoan Simpang Lima	155.381.750,00	-	155.381.750,00	100%
Retribusi Kerjasama Bengkok Pujasera Ngaliyan	38.088.000,00	-	38.088.000,00	100%
Sewa lahan Sam Poo Kong	132.668.032,00	-	132.668.032,00	100%
Sewa lapangan Simpang Lima	850.500.000,00	-	850.500.000,00	100%
Sewa Lahan Purimas	29.282.000,00	-	29.282.000,00	100%
Sewa Lapangan Golf	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	100%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.502.886.893,00	17.826.817.830,00	(2.323.930.937,00)	-13%
Retribusi Sewa Laboratorium Air	323.100.000,00	319.200.000,00	3.900.000,00	1%
Retribusi Sewa Aset Tanah	658.107.657,00	-	658.107.657,00	100%
Retribusi Tempat Pelelangan	36.893.795,00	32.562.080,00	4.331.715,00	13%
Jumlah	25.968.194.279,00	24.935.816.210,00	1.032.378.069,00	4%

Pendapatan Retribusi jasa usaha pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp25.968.194.279,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.032.378.069,00 atau 4% jika dibandingkan tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp24.935.816.210,00

Retribusi Perizinan Tertentu	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
Retribusi Izin Trayek	91.725.000,00	84.800.000,00	6.925.000,00	8%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	23.696.254.200,00	21.056.679.200,00	2.639.575.000,00	
Retribusi izin gangguan Keramaian	5.712.478.000,00	6.039.861.400,00	(327.383.400,00)	
Retribusi Perizinan Persewaan Alat Berat	147.825.000,00	163.145.000,00	(15.320.000,00)	-9%
Retribusi IMTA	1.631.172.000,00	-	1.631.172.000,00	100%
Jumlah	31.279.454.200,00	27.344.485.600,00	3.934.968.600,00	99%



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pendapatan Retribusi perijinan tertentu pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp31.279.454.200,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.934.968.600,00 atau 99% jika dibandingkan tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp27.344.485.600,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang dengan realisasi pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp7.841.917.896,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp20.251.957,00 atau -0,26% dibandingkan dengan tahun anggaran 2013 yang terealisasi sebesar Rp7.862.169.853,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	Realisasi 2014		Realisasi 2013		Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%		
1 Perusda Percetakan	126.111.842,00	339.241.716,00	(213.129.874,00)	-62,83%		
2 PD BPR Bank Pasar	165.466.808,00	347.648.270,00	(182.181.462,00)	-52,40%		
3 PD BPR / BKK Cab Sng Tengah	934.594.286,00	1.048.800.379,00	(114.206.093,00)	-10,89%		
4 Perusda Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	(67.707.378,00)	76.842.624,00	(144.550.002,00)	-188,11%		
5 PT Bank Jateng	6.683.452.338,00	6.049.636.864,00	633.815.474,00	10,48%		
Jumlah	7.841.917.896,00	7.862.169.853,00	(20.251.957,00)	-0,26%		

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar 0,26% disebabkan BUMD Perusda Percetakan, PD BPR/BKK cab Semarang, Perusda RPH, penilaian pendapatan dan investasi menggunakan metode ekuitas sehingga pengakuan pendapatan adalah sebesar laba yang dihasilkan dan pada tahun 2014 perusda dengan kepemilikan dengan 100% tersebut mengalami penurunan bahkan untuk Perusda RPH mengalami kerugian Rp67.707.378,00 sehingga mempengaruhi penurunan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah /LO. Dengan metode ekuitas laba perusda PDAM tidak diakui sebagai pendapatan karena nilai ekuitasnya minus.

4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2014		Realisasi 2013		Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%		
1 RSUD	95.364.742.443,00	65.668.581.989,00	29.696.160.454,00	45,22%		
2 DKK	14.986.125.000,00	-	14.986.125.000,00	0,00%		
3 Dishubkominfo & BLU	16.703.563.694,00	12.601.644.064,00	4.101.919.630,00	32,55%		
4 Dinsospora		1.182.449.664,00	(1.182.449.664,00)	-100,00%		
5 DPKAD	136.581.691.286,00	69.801.951.159,00	66.779.740.127,00	95,67%		
6 Dinas Pertanian	1.012.228.300,00	308.388.163,00	703.840.137,00	228,23%		
7 Dinas Kelautan dan Perikanan	15.810.500,00	13.787.000,00	2.023.500,00	14,68%		
	264.664.161.223,00	149.576.802.039,00	115.087.359.184,00	76,94%		



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya menurut jenisnya adalah:

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Jasa Pelayanan Kesehatan BLU	95,364,742,443,00	65,668,581,989,00	29,696,160,454,00	45,22%
2 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	245,084,775,00	245,617,850,00	(533,075,00)	-0,22%
3 Pendapatan BLU	16,458,478,919,00	12,356,026,214,00	4,102,452,705,00	33,20%
4 Gombel Golf Semarang	-	1,182,449,664,00	(1,182,449,664,00)	-100,00%
5 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	5,042,967,030,00	1,532,016,450,00	3,510,950,580,00	229,17%
6 Penerimaan Jasa Giro	23,279,213,592,00	13,012,048,186,00	10,267,165,406,00	78,91%
7 Pendapatan Bunga Deposito	91,392,926,699,00	47,021,903,095,00	44,371,023,604,00	94,36%
8 Pendapatan Plat jin Reklame	6,856,000,00	36,471,500,00	(29,615,500,00)	-81,20%
9 Penerimaan Lain-lain DPKAD	16,859,727,965,00	8,199,511,928,00	8,660,216,037,00	105,62%
10 Dana Kapitali Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP	14,986,125,000,00			
11 Penjualan Hasil Perikanan	15,810,500,00	13,787,000,00	2,023,500,00	14,68%
12 Penjualan Hasil Pertanian dan Peternakan	1,012,228,300,00	308,388,163,00	703,840,137,00	228,23%
	264,664,161,233,00	149,576,802,039,00	115,087,359,184,00	76,94%

Pendapatan Asli Daerah lainnya terdapat realisasi bunga deposito sebesar 114.395.161,00 yang merupakan hak bulan Desember yang akan diterima pada bulan Januari 2014. Pendapatan Asli Daerah Lainnya sudah tidak termasuk pendapatan jamkesmaskot sebesar Rp12.753.863.347,00 pada RSUD Kota Semarang.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2014 sebesar Rp1.958.242.860.296,00 mengalami kenaikan sebesar Rp170.273.454.563,00 atau 9,52% dibandingkan dengan TA 2013 yang terealisasi sebesar Rp1.787.969.405.733,00 dengan rincian sebagai berikut:

b Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1,274,767,390,279,00	1,191,097,523,757,00	83,669,866,522,00	7,02%
2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	283,917,499,000,00	266,894,650,000,00	17,022,849,000,00	6,38%
3 Transfer dari Pemerintah Profinsi	399,557,971,017,00	329,977,231,976,00	69,580,739,041,00	21,09%
Jumlah	1,958,242,860,296,00	1,787,969,405,733,00	170,273,454,563,00	9,52%

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realiasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Semarang untuk periode tahun 2014 secara total terealisasi sebesar Rp1.274.767.390.279,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.669.866.522,00 atau 7,02% bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp1.191.097.523.757,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perimbangan	Rp	Rp	Rp	%
1 Dana Bagi Hasil Pajak	137,759,893,153,00	120,223,608,244,00	17,536,284,909,00	14,59%
2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3,031,059,126,00	1,878,324,513,00	1,152,734,613,00	61,37%
3 Dana Alokasi Umum	1,104,739,473,000,00	1,054,002,569,000,00	50,736,904,000,00	4,81%
4 Dana Alokasi Khusus	29,236,965,000,00	14,993,022,000,00	14,243,943,000,00	95,00%
Jumlah	1,274,767,390,279,00	1,191,097,523,757,00	83,669,866,522,00	7,02%



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya untuk tahun 2014 sebesar Rp283.917.499.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp17.022.849.000,00 atau 6,38% bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp266.894.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Dana Otonomi Khusus	-	-	-	0,00%
2 Dana Penyesuaian	283.917.499.000,00	266.894.650.000,00	17.022.849.000,00	6,38%
Jumlah	283.917.499.000,00	266.894.650.000,00	17.022.849.000,00	6,38%

3) Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode tahun anggaran 2014 sebesar Rp399.557.971.017,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp69.580.739.041,00 atau 21,09% bila dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp329.977.231.976,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tranfer Pemerintah Provinsi	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Pendapatan Hasil Pajak	399.557.971.017,00	329.977.231.976,00	69.580.739.041,00	21,09%
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	0,00%
Jumlah	399.557.971.017,00	329.977.231.976,00	69.580.739.041,00	21,09%

Pendapatan bagi Hasil Pajak terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp128.647.152.000,00
- BBNKB sebesar Rp139.354.094.076,00.
- Bahan bakar kendaraan bermotor Rp107.170.327.744,00.
- PPAP sebesar Rp165.592.525,00.
- Pajak Rokok Rp24.220.804.672,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp231.082.675.376,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.553.742.231,00 atau 1,56 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp227.528.933.145,00 dengan rincian sebagai berikut:

Lain lain Pendapatan yang Sah	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Pendapatan Hibah	-	-	-	0,00%
2 Pendapatan Hibah Aset	21,616,740,913,00	47,770,317,510,00	(26,153,576,597,00)	-54,75%
3 Pendapatan Dana BOS	-	97,076,605,014,00	(97,076,605,014,00)	-100,00%
4 Pendapatan Lainnya	209,465,934,463,00	82,682,010,621,00	126,783,923,842,00	153,34%
Jumlah	231,082,675,376,00	227,528,933,145,00	3,553,742,231,00	1,56%

Besarnya realisasi pendapatan lain – lain yang Sah dikarenakan pendapatan ini mencatat:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- 1) Pendapatan Hibah Aset antara lain dari Dinas Pendidikan sebesar Rp18.669.424.591,00 yang berasal dari APBN, bantuan propinsi,dan hibah sumbangan, RSUD sebesar Rp237.315.363,00 hibah aset (obat) dari Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Semarang sebesar Rp132.376.000,00 (peralatan mesin) yang berasal dari PT. Angkasa Pura dan bantuan propinsi. BPBD sebesar Rp951.052.177,00 yang berasal dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Sekretariat Daerah sebesar Rp739.328.000,00 (Iptek) yang berasal dari Perguruan tinggi Swasta Universitas Dian Nuswantoro, Dinas Pertanian sebesar Rp15.000.000,00 (pohon bonsai) yang berasal dari Asosiasi penggemar bonsai Semarang,Kecamatan Gayamsari sebesar Rp180.000.000,00 adalah gedung LPMK bantuan dari masyarakat, kecamatan Candisari sebesar Rp378.000.000,00 adalah gedung LPMK bantuan dari masyarakat,Bapermas sebesar Rp314.244.782,00 adalah bantuan alat kontrasepsi dari BKKBN pusat.
- 2) Pendapatan BOS pada tahun 2014 sebesar Rp0,00 dikarenakan pada tahun 2014 Pendapatan BOS tersebut dikoreksi menjadi pendapatan lainnya.
- 3) Pendapatan Lainnya merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan (BOS) sebesar Rp117.721.602.841,00
 - Dinas Kesehatan (BOK) sebesar Rp3.347.211.500,00
 - Dinas Koperasi (pendapatan lainnya) sebesar Rp161.733.729,00
 - Dinas Pendidikan (Block Grant) sebesar Rp8.709.845.530,00
 - Pendapatan dari dana komite sekolah sebesar Rp10.119.588.087,00
 - DPKAD (bantuan Keuangan dari Propinsi) sebesar Rp69.405.952.776,00

4.5.2 Beban-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2014 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp1.341.906.817.099,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp48.400.463.792,00 atau 3,74% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp1.293.506.353.307,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Beban Pegawai	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Dinas Pendidikan	761,966,146,627.00	742,786,286,134.00	19,179,860,493.00	2.58%
2 Dinas Kesehatan Kota	60,877,352,395.00	58,591,981,033.00	2,285,371,362.00	3.90%
3 Rumah Sakit Umum Daerah	59,592,017,040.00	49,122,865,592.00	10,469,151,448.00	21.31%
4 Dinas Bina Marga	11,314,564,554.00	9,649,501,042.00	1,665,063,512.00	17.26%
5 Dinas PSDA dan ESDM	12,069,842,227.00	9,659,785,253.00	2,410,056,974.00	24.95%
6 Dinas Kebakaran	7,792,441,120.00	7,558,802,163.00	233,638,957.00	3.09%
7 Dinas Tata Kota dan Perumahan	14,857,082,035.00	12,226,483,743.00	2,630,592,292.00	21.52%
8 Dinas Penerangan Jalan & Pengelolaan Reklame	6,174,828,934.00	6,116,655,313.00	58,173,621.00	0.95%
9 BAPPEDA	7,221,491,626.00	8,172,068,497.00	(950,576,871.00)	-11.63%
10 Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika dan BLU	23,868,888,788.00	20,794,506,467.00	3,074,382,321.00	14.78%
11 Badan Lingkungan Hidup (BLH)	4,094,425,120.00	4,452,025,278.00	(357,600,158.00)	-8.03%
12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	13,137,365,029.00	12,765,754,012.00	371,611,017.00	2.91%
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7,781,265,965.00	7,801,197,581.00	(19,931,616.00)	-0.26%
14 Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	9,370,705,084.00	11,396,297,995.00	(2,025,592,911.00)	-17.77%
15 Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga	8,607,004,815.00	9,251,969,075.00	(644,964,260.00)	-6.97%
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,332,368,143.00	3,827,249,938.00	(494,881,795.00)	-12.93%
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,150,875,888.00	7,009,976,200.00	(859,100,312.00)	-12.26%
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4,792,889,802.00	5,335,719,159.00	(542,829,357.00)	-10.17%
19 Badan Pelayanan Perjijinan Terpadu (BPPT)	5,219,731,606.00	4,997,344,863.00	222,386,743.00	4.45%
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8,550,459,672.00	9,462,103,360.00	(911,649,688.00)	-9.63%
21 Badan Kesbang, Politik dan Linmas	3,606,096,868.00	3,902,877,274.00	(296,780,406.00)	-7.60%
22 Satuan Polisi dan Pamong Praja (SATPOLPP)	15,100,490,288.00	15,373,628,279.00	(273,137,991.00)	-1.78%
23 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	12,969,195,624.00	11,791,214,048.00	1,177,981,576.00	9.99%
24 Wakilkota dan Wakil Wakilota	1,213,058,336.00	908,952,916.00	304,105,420.00	33.46%
25 Sekretariat Daerah	31,592,978,573.00	29,628,755,659.00	1,964,222,914.00	6.63%
26 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4,015,676,366.00	3,776,430,910.00	239,245,456.00	6.34%
27 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	75,780,993,997.00	64,235,011,359.00	11,545,982,638.00	17.97%
28 Inspektorat	6,169,216,345.00	5,762,573,015.00	406,643,330.00	7.06%
29 Kecamatan Semarang Selatan	7,322,221,304.00	7,467,610,086.00	(145,388,782.00)	-1.95%
30 Kecamatan Semarang Utara	6,021,465,576.00	6,229,206,166.00	(207,740,590.00)	-3.33%
31 Kecamatan semarang Barat	8,799,287,502.00	9,103,733,460.00	(304,445,958.00)	-3.34%
32 Kecamatan Semarang Timur	6,845,502,868.00	6,560,756,623.00	284,746,245.00	4.34%
33 Kecamatan Semarang Tengah	8,907,251,742.00	9,184,318,030.00	(277,066,288.00)	-3.02%
34 Kecamatan Gunung Pati	8,032,996,928.00	7,659,682,028.00	373,314,900.00	4.87%
35 Kecamatan Tugu	4,541,483,732.00	4,364,322,836.00	177,160,896.00	4.06%
36 Kecamatan Mijen	6,365,738,303.00	6,054,760,584.00	310,977,719.00	5.14%
37 Kecamatan Genuk	7,324,001,814.00	7,639,204,289.00	(315,202,475.00)	-4.13%
38 Kecamatan Gajahmungkur	5,798,099,115.00	5,528,810,068.00	269,289,047.00	4.87%
39 Kecamatan Tembalang	7,604,730,444.00	8,064,695,632.00	(459,965,188.00)	-5.70%
40 Kecamatan Candisari	5,934,453,674.00	5,891,998,074.00	42,457,600.00	0.72%
41 Kecamatan Banyumanik	8,499,264,808.00	8,614,228,799.00	(114,964,981.00)	-1.33%
42 Kecamatan Ngaliyan	6,201,886,187.00	6,589,708,058.00	(387,921,871.00)	-5.89%
43 Kecamatan Gayamsari	5,055,616,865.00	5,247,977,581.00	(192,360,716.00)	-3.67%
44 Kecamatan Pedurungan	8,915,517,697.00	9,734,407,748.00	(818,890,051.00)	-8.41%
45 Badan Kepegawaian Daerah	5,229,104,359.00	5,171,163,031.00	57,941,328.00	1.12%
46 Kantor Pendidikan dan Latihan	1,951,976,418.00	2,437,602,884.00	(485,626,466.00)	-19.92%
47 Kantor Ketahanan Pangan	1,329,585,838.00	1,427,044,640.00	(97,458,802.00)	-6.83%
48 Kantor Perpustakaan dan Arsip	1,497,955,704.00	1,773,902,547.00	(275,946,843.00)	-15.56%
49 Dinas Pertanian	6,440,584,562.00	6,183,211,653.00	257,372,909.00	4.16%
50 Dinas Kelautan dan Perikanan	3,904,056,401.00	4,012,744,088.00	(108,887,687.00)	-2.71%
51 Dinas Pasar	17,285,622,779.00	16,905,714,892.00	379,907,887.00	2.25%
52 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4,878,959,612.00	5,301,522,352.00	(422,562,740.00)	-7.97%
	1,341,906,817,099.00	1,293,506,353,307.00	48,400,463,792.00	3.74%

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2014 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2014.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp249.581.635.790,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp33.989.830.605,00 atau 15,77% bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2013 sebesar Rp215.591.805.185,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Persediaan	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Dinas Pendidikan	42,571,893,902.00	38,431,433,175.00	4,140,460,727.00	10.77%
2 Dinas Kesehatan Kota	14,375,398,736.00	14,357,596,925.00	17,801,811.00	0.12%
3 Rumah Sakit Umum Daerah	26,260,070,154.00	27,557,257,700.00	(1,297,187,546.00)	-4.71%
4 Dinas Bina Marga	27,297,028,850.00	11,344,939,039.00	15,952,089,811.00	140.61%
5 Dinas PSDA dan ESDM	13,959,947,807.00	8,503,872,005.00	5,456,075,802.00	64.16%
6 Dinas Kebakaran	698,166,142.00	1,082,606,454.00	(384,440,312.00)	-35.51%
7 Dinas Tata Kota dan Perumahan	21,396,238,900.00	22,957,218,408.00	(1,560,979,508.00)	-6.80%
8 Dinas Penerangan Jalan & Pengelolaan Reklame	2,461,790,735.00	1,986,983,750.00	474,806,985.00	23.90%
9 BAPPEDA	2,254,102,075.00	2,498,493,285.00	(244,391,210.00)	-9.78%
10 Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika dan BLU	5,204,327,706.00	3,359,575,742.00	1,844,751,964.00	54.91%
11 Badan Lingkungan Hidup (BLH)	1,651,805,100.00	926,330,650.00	725,474,450.00	78.32%
12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	15,083,487,876.00	9,607,659,231.00	5,475,828,645.00	56.99%
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2,078,838,289.00	2,506,324,546.00	(427,486,257.00)	-17.06%
14 Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	3,089,451,463.00	3,868,212,036.00	(778,760,573.00)	-20.13%
15 Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga	3,871,300,093.00	3,591,562,367.00	279,737,726.00	7.79%
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,140,341,511.00	1,437,489,808.00	702,851,703.00	48.89%
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,840,369,641.00	3,426,928,200.00	413,441,441.00	12.06%
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3,049,202,150.00	2,551,658,800.00	497,543,350.00	19.50%
19 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	1,131,191,667.00	1,502,518,497.00	(371,326,830.00)	-24.71%
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,884,744,143.00	2,945,067,627.00	(60,323,484.00)	-2.05%
21 Badan Kesbang, Politik dan Linmas	1,008,232,450.00	1,390,081,390.00	(381,848,940.00)	-27.47%
22 Satpol-PP	3,023,105,860.00	2,339,606,339.00	683,499,521.00	29.21%
23 Sekretariat Daerah	19,230,852,145.00	18,803,259,279.00	427,592,866.00	2.27%
24 Sekertaris DPRD	4,145,947,613.00	4,044,129,768.00	101,817,845.00	2.52%
25 DPKAD	6,050,025,919.00	4,456,365,643.00	1,593,660,276.00	35.76%
26 Inspektorat	664,074,300.00	635,304,467.00	28,769,833.00	4.53%
27 Kecamatan Semarang Selatan	435,262,700.00	445,979,300.00	(10,716,600.00)	-2.40%
28 Kecamatan Semarang Utara	336,061,750.00	465,979,850.00	(129,918,100.00)	-27.88%
29 Kecamatan semarang Barat	435,219,000.00	443,630,000.00	(8,411,000.00)	-1.90%
30 Kecamatan Semarang Timur	493,167,450.00	916,358,015.00	(423,190,565.00)	-46.18%
31 Kecamatan Semarang Tengah	561,284,692.00	438,622,725.00	122,661,967.00	27.97%
32 Kecamatan Gunung Pati	457,405,900.00	458,102,600.00	(696,700.00)	-0.15%
33 Kecamatan Tugu	429,016,747.00	298,399,500.00	130,617,247.00	43.77%
34 Kecamatan Mijen	391,616,500.00	375,666,300.00	15,950,200.00	4.25%
35 Kecamatan Genuk	530,179,294.00	389,730,500.00	140,448,794.00	36.04%
36 Kecamatan Gajahmungkur	339,625,100.00	650,986,000.00	(311,360,900.00)	-47.83%
37 Kecamatan Tembalang	650,585,207.00	519,375,600.00	131,209,607.00	25.26%
38 Kecamatan Candisari	311,000,630.00	244,301,940.00	66,698,690.00	27.30%
39 Kecamatan Banyumanik	620,011,600.00	500,765,000.00	119,246,600.00	23.81%
40 Kecamatan Ngaliyan	381,052,250.00	386,668,860.00	(5,616,610.00)	-1.45%
41 Kecamatan Gayamsari	417,081,250.00	380,332,250.00	36,749,000.00	9.66%
42 Kecamatan Pedurungan	478,123,300.00	433,684,500.00	44,438,800.00	10.25%
43 Badan Kepegawaiannya Daerah	849,647,387.00	1,012,415,726.00	(162,768,339.00)	-16.08%
44 Kantor Pendidikan dan Latihan	823,231,851.00	842,555,250.00	(19,323,399.00)	-2.29%
45 Kantor Kelahanan Pangan	1,027,644,000.00	912,242,500.00	115,401,500.00	12.65%
46 Kantor Perpustakaan dan Arsip	742,523,900.00	618,744,790.00	123,779,110.00	20.00%
47 Dinas Pertanian	2,941,578,915.00	2,177,488,255.00	764,090,660.00	35.09%
48 Dinas Kelautan dan Perikanan	1,624,630,260.00	1,870,848,370.00	(246,218,110.00)	-13.16%
49 Dinas Pasar	3,536,020,630.00	2,547,949,350.00	988,071,280.00	38.78%
50 DISPERINDAG	1,347,730,250.00	2,148,502,873.00	(800,772,623.00)	-37.27%
Jumlah	249,581,635,790.00	215,591,805,185.00	33,989,830,605.00	15.77%

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama(MPKP atau FIFO). Beban persediaan sudah tidak termasuk beban belanja jamkesmaskot sebesar Rp11.964.432.783,00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Beban Jasa

Beban Jasa adalah Beban Jasa yang meliputi jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet periode 1 Januari tahun 2014 sampai dengan 31 Desember tahun 2014 yang terealisasi sebesar Rp277.171.233.494,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp58.340.556.598,00 atau 26,66% bila dibandingkan dengan Beban Jasa tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp218.830.676.896,00 dengan rincian sebagai berikut :

Beban Jasa	Realisasi 2014		Realisasi 2013		Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%		
1 Dinas Pendidikan	16,366,259,051	13,721,286,857,00	2,644,972,194,00	19.28%		
2 Dinas Kesehatan Kota	51,340,325,261	41,336,858,343,00	10,003,466,918,00	24.20%		
3 Rumah Sakit Umum Daerah	5,356,874,590	3,238,753,773,00	2,118,120,817,00	65.40%		
4 Dinas Bina Marga	2,548,289,238	3,316,097,616,00	(767,808,378,00)	-23.15%		
5 Dinas PSDA dan ESDM	8,762,940,588	2,188,478,014,00	6,574,462,574,00	300.41%		
6 Dinas Kebakaran	2,773,353,844	1,779,818,375,00	993,535,469,00	55.82%		
7 Dinas Tata Kota dan Perumahan	1,447,242,884	4,299,542,705,00	(2,852,299,821,00)	-66.34%		
8 Dinas PJPR	1,502,537,478	1,116,048,101,00	386,489,377,00	34.63%		
9 BAPPEDA	3,162,634,590	3,759,678,299,00	(597,043,709,00)	-15.88%		
10 DISHUBKONIMFO dan BLU	32,765,503,767	22,083,976,154,00	10,681,527,613,00	48.37%		
11 Badan Lingkungan Hidup (BLH)	1,727,807,250	2,312,153,150,00	(584,345,900,00)	-25.27%		
12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	17,103,230,752	13,584,059,786,00	3,519,170,966,00	25.91%		
13 Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil	1,562,883,005	1,536,508,954,00	26,374,051,00	1.72%		
14 Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	2,459,713,866	1,656,992,929,00	802,720,937,00	48.44%		
15 Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga	2,218,851,273	1,199,970,498,00	1,018,880,775,00	84.91%		
16 BPBD	772,307,438	366,280,713,00	406,026,725,00	110.85%		
17 Disnakertrans	1,951,453,388	1,153,424,941,00	798,028,447,00	69.19%		
18 Dinas Koperasi dan UKM	2,988,429,016	1,328,415,099,00	1,660,013,917,00	124.96%		
19 BPPT	834,820,894	841,687,112,00	(6,866,218,00)	-0.82%		
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5,833,943,746	3,341,203,612,00	2,492,740,134,00	74.61%		
21 Badan Kesbang,Politik dan Linmas	1,039,879,567	626,263,245,00	413,616,322,00	66.05%		
22 Satpol-PP	1,774,751,534	1,218,151,856,00	556,599,678,00	45.69%		
23 Sekretariat Daerah	23,359,421,053	20,196,444,704,00	3,162,976,349,00	15.66%		
24 Sekretariat DPRD	7,381,574,188	10,082,051,796,00	(2,700,477,608,00)	-26.79%		
25 DPKAD	57,085,567,244	46,500,627,914,00	10,584,939,330,00	22.76%		
26 Inspektorat	309,347,888	234,851,803,00	74,496,085,00	31.72%		
27 Kecamatan Semarang Selatan	284,213,769	119,157,290,00	165,056,479,00	138.52%		
28 Kecamatan Semarang Utara	397,051,025	246,590,467,00	150,460,558,00	61.02%		
29 Kecamatan semarang Barat	516,123,815	280,841,782,00	235,282,033,00	83.78%		
30 Kecamatan Semarang Timur	426,808,898	287,313,154,00	139,495,744,00	48.55%		
31 Kecamatan Semarang Tengah	580,620,119	321,809,040,00	258,811,079,00	80.42%		
32 Kecamatan Gunung Pati	559,436,093	287,328,285,00	272,107,808,00	94.70%		
33 Kecamatan Tugu	298,760,878	203,677,081,00	95,083,797,00	46.68%		
34 Kecamatan Mijen	497,766,613	223,575,523,00	274,191,090,00	122.64%		
35 Kecamatan Genuk	456,918,566	265,361,276,00	191,557,290,00	72.19%		
36 Kecamatan Gajahmungkur	278,806,626	267,590,995,00	11,215,631,00	4.19%		
37 Kecamatan Tembalang	453,251,300	290,180,150,00	163,071,150,00	56.20%		
38 Kecamatan Candisari	304,261,127	210,836,841,00	93,424,286,00	44.31%		
39 Kecamatan Banyumanik	572,792,272	372,796,421,00	199,995,851,00	53.65%		
40 Kecamatan Ngaliyan	445,552,361	249,719,364,00	195,832,997,00	78.42%		
41 Kecamatan Gayamsari	405,881,819	232,994,256,00	172,887,563,00	74.20%		
42 Kecamatan Pedurungan	617,431,624	325,018,432,00	292,413,192,00	89.97%		
43 Badan Kepegawaian Daerah	981,641,524	855,861,259,00	125,780,265,00	14.70%		
44 Kantor Pendidikan dan Latihan	2,324,357,204	1,998,775,797,00	325,581,407,00	16.29%		
45 Kantor Ketahanan Pangan	485,603,024	362,948,408,00	122,654,616,00	33.79%		
46 Kantor Perpustakaan dan Arsip	1,187,978,116	820,267,813,00	367,401,303,00	44.77%		
47 Dinas Pertanian	1,011,331,815	486,612,405,00	524,719,410,00	107.83%		
48 Dinas Kelautan dan Perikanan	2,444,991,208	1,512,790,879,00	932,200,329,00	61.62%		
49 Dinas Pasar	4,816,709,483	4,157,783,304,00	658,926,179,00	15.85%		
50 DISPERINDAG	2,393,000,822	1,384,447,497,00	1,008,553,325,00	72.85%		
Jumlah Beban Jasa	277,171,233,494	218,830,676,896,00	58,340,556,598,00	26.66%		

Beban jasa sebesar Rp277.171.233.494,00 merupakan pengakuan terhadap jasa yang sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga timbul hak untuk membayar pada periode berikutnya sebesar Rp5.793.798.622,00 terdiri dari beban jasa listrik sebesar Rp1.524.121.532, beban jasa telepon sebesar Rp383,256,934,00, beban jasa air sebesar Rp105.804.784,00, beban jasa langganan majalah sebesar Rp1.055.000,00 serta utang jamkesmaskot sebesar Rp3.779.560.372,00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Rincian tabel beban jasa yang dibayarkan tahun 2015

NO	DINAS / INSTANSI	LISTRIK	TELP	AIR	MAJALAH	UTANG JAMKESMASKOT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan	563.823.934	222.810.392	59.789.830	70.000	-	846.494.156
2	Dinas Kesehatan	42.921.391	11.977.611	8.898.155	-	3.779.560.372	3.843.357.529
3	Dina Bina Marga	21.998.443	3.608.166	-	585.000	-	26.191.609
4	Dinas PSDA dan ESDM	21.342.721	5.057.345	-	-	-	26.400.066
5	Dinas Kebakaran	5.798.993	284.533	5.222.800	-	-	11.306.326
6	Dinas Penerangan Jalan dan Reklame	-	984.677	-	-	-	984.677
7	Bappeda	-	1.844.382	-	-	-	1.844.382
8	Dishubkominfo	100.090.327	2.020.060	-	-	-	102.110.387
9	B L H	7.575.950	1.321.800	402.000	400.000	-	9.699.750
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	14.965.382	1.332.885	2.630.170	-	-	18.928.437
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	55.968.972	28.215.598	882.250	-	-	85.066.820
12	Bapemas Perempuan dan Keluarga	-	987.000	-	-	-	987.000
13	BPBD	6.458.828	1.135.815	344.750	-	-	7.939.393
14	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	35.383.061	1.972.409	74.000	-	-	37.429.470
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.825.034	11.370.000	153.845	-	-	27.348.879
16	Dinas Koperasi dan UKM	-	2.223.541	-	-	-	2.223.541
17	BPPT	-	1.721.882	-	-	-	1.721.882
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	30.201.552	1.213.643	139.175	-	-	31.554.370
19	Badan Polimmas	-	650.897	-	-	-	650.897
20	Kantor Satpol PP	24.454.242	2.007.404	-	-	-	26.461.646
21	Skretariat Daerah	490.572.341	34.484.838	14.205.710	-	-	539.262.889
22	Inspektorat	-	510.105	-	-	-	510.105
23	Kecamatan Semarang Seatan	7.305.952	2.672.991	1.366.665	-	-	11.345.608
24	Kecamatan Semarang Utara	898.312	2.443.563	1.075.944	-	-	4.417.819
25	Kecamatan Semarang Barat	5.588.909	2.318.628	1.770.955	-	-	9.678.492
26	Kecamatan Semarang Timur	5.341.228	2.694.252	412.925	-	-	8.448.405
27	Kecamatan Semarang Tengah	8.107.526	2.944.002	147.570	-	-	11.199.098
28	Kecamatan Gunung Pati	2.338.507	2.680.689	389.375	-	-	5.408.571
29	Kecamatan Tugu	2.927.889	362.531	-	-	-	3.290.420
30	Kecamatan Mijen	2.497.861	2.668.854	1.371.015	-	-	6.537.730
31	Kecamatan Genuk	6.435.791	1.365.753	411.900	-	-	8.213.444
32	Kecamatan Gajah Mungkur	4.067.840	2.408.454	1.929.135	-	-	8.405.429
33	Kecamatan Tembalang	4.203.600	684.500	291.700	-	-	5.179.800
34	Kecamatan Candisari	3.827.681	1.263.567	1.663.595	-	-	6.754.843
35	Kecamatan Banyumanik	313.061	2.371.853	165.850	-	-	2.850.764
36	Kecamatan Ngaliyan	6.066.036	3.857.747	1.234.910	-	-	11.158.693
37	Kecamatan Gayamsari	4.671.421	1.884.606	136.850	-	-	6.692.877
38	Kecamatan Pedurungan	4.851.038	3.112.640	158.000	-	-	8.121.678
39	Badan Kepegawaian Daerah	-	3.661.432	-	-	-	3.661.432
40	Kantor Diklat	1.319.231	918.016	-	-	-	2.237.247
41	Kantor Ketahanan Pangan	3.409.328	444.400	-	-	-	3.853.728
42	Kantor Perpust dan Arsip	1.983.347	439.737	148.510	-	-	2.571.594
43	Dinas Pertanian	10.585.803	2.530.891	387.200	-	-	13.503.894
44	Disperindag	-	1.792.845	-	-	-	1.792.845
	JUMLAH	1.524.121.532	383.256.934	105.804.784	1.055.000	3.779.560.372	5.793.798.622

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp109.156.015.063,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp50.889.843.996,00 atau 87,34% dibandingkan Beban Pemeliharaan tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp58.266.171.067,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Dinas Pendidikan	6,372,409.255,00	4,200,003,400,00	2,172,405,855,00	51.72%
2 Dinas Kesehatan Kota	586,263,800,00	440,542,850,00	145,720,950,00	33.08%
3 Rumah Sakit Umum Daerah	3,855,585,056,00	1,675,877,893,00	2,179,707,163,00	130.06%
4 Dinas Bina Marga	610,134,000,00		610,134,000,00	#DIV/0!
5 Dinas PSDA dan ESDM	408,615,900,00	191,453,950,00	217,161,950,00	113.43%
6 Dinas Kebakaran	521,330,000,00	6,843,750,00	514,486,250,00	7517.61%
7 Dinas Tata Kota dan Perumahan	1,735,212,500,00	4,563,910,300,00	(2,828,697,800,00)	-61.98%
8 Dinas PJPR	196,404,000,00	179,035,150,00	17,368,850,00	9.70%
9 Bappeda	9,988,000,00			
10 DISHUBKONIMFO dan BLU	2,047,883,100,00	1,865,482,965,00	182,400,135,00	9.78%
11 Badan Lingkungan Hidup (BLH)	21,595,000,00	41,926,000,00	(20,331,000,00)	-48.49%
12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	11,779,035,381,00	5,962,502,240,00	5,816,533,141,00	97.55%
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	376,427,700,00	466,235,250,00	(89,807,550,00)	-19.26%
14 Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	25,400,000,00	1,260,000,00	24,140,000,00	1915.87%
15 Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga	177,524,550,00	314,259,245,00	(136,734,695,00)	-43.51%
16 BPBD	137,030,000,00	99,618,000,00	37,412,000,00	37.56%
17 Disnakertrans	90,590,500,00	62,911,060,00	27,679,440,00	44.00%
18 Dinas Koperasi dan UKM	35,750,000,00	31,400,000,00	4,350,000,00	13.85%
19 BPPT	90,915,898,00	107,240,000,00	(16,324,102,00)	-15.22%
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13,527,500,00	13,824,000,00	(296,500,00)	-2.14%
21 Satpol-PP	179,392,100,00	112,600,000,00	66,792,100,00	59.32%
22 Sekretariat Daerah	8,416,401,018,00	7,842,291,454,00	574,109,564,00	7.32%
23 Sekertariat DPRD	457,566,792,00	473,292,250,00	(15,725,458,00)	-3.32%
24 DPKAD	473,763,550,00	165,211,000,00	308,552,550,00	186.76%
25 Kecamatan Semarang Selatan	3,799,190,000,00	1,582,312,050,00	2,216,877,950,00	140.10%
26 Kecamatan Semarang Utara	3,680,807,063,00	1,356,587,000,00	2,324,220,063,00	171.33%
27 Kecamatan Semarang Barat	6,424,652,000,00	2,531,454,000,00	3,893,198,000,00	153.79%
28 Kecamatan Semarang Timur	3,870,117,000,00	1,672,819,000,00	2,197,298,000,00	131.35%
29 Kecamatan Semarang Tengah	5,500,494,100,00	2,052,471,000,00	3,448,023,100,00	167.99%
30 Kecamatan Gunung Pati	5,703,740,533,00	2,557,705,600,00	3,146,034,933,00	123.00%
31 Kecamatan Tugu	3,104,520,500,00	1,360,289,000,00	1,744,231,500,00	128.23%
32 Kecamatan Mijen	5,286,821,000,00	2,309,539,000,00	2,977,282,000,00	128.91%
33 Kecamatan Genuk	4,940,028,433,00	2,156,189,400,00	2,783,839,033,00	129.11%
34 Kecamatan Gajahmungkur	3,667,723,000,00	1,387,447,000,00	2,280,276,000,00	164.35%
35 Kecamatan Tembalang	4,644,308,923,00	1,970,190,000,00	2,674,118,923,00	135.73%
36 Kecamatan Candisari	3,004,981,000,00	1,201,667,000,00	1,803,314,000,00	150.07%
37 Kecamatan Banyumanik	4,295,440,686,00	1,861,942,000,00	2,433,498,686,00	130.70%
38 Kecamatan Ngaliyan	4,048,054,000,00	1,676,648,000,00	2,371,406,000,00	141.44%
39 Kecamatan Gayamsari	3,155,340,000,00	1,240,246,000,00	1,915,094,000,00	154.41%
40 Kecamatan Pedurungan	4,542,789,925,00	1,975,764,010,00	2,567,025,915,00	129.93%
41 Badan Kepagawainan Daerah	6,000,000,00	12,000,000,00	(6,000,000,00)	-50.00%
42 Kantor Ketahanan Pangan	8,645,000,00	6,000,000,00	2,645,000,00	44.08%
43 Kantor Perpustakaan dan Arsip	387,191,400,00	408,182,250,00	(20,996,850,00)	-5.14%
44 Dinas Pertanian	322,810,300,00	70,414,000,00	252,396,300,00	358.45%
45 Dinas Kelautan dan Perikanan	34,344,600,00	12,000,000,00	22,344,600,00	186.21%
46 Dinas Pasar	35,760,000,00	31,228,000,00	4,532,000,00	14.51%
47 Disperindag	73,500,000,00	15,350,000,00	58,150,000,00	378.83%
Jumlah Beban Pemeliharaan	109,156,015,063,00	58,266,171,067,00	50,889,843,996,00	87.34%

Besarnya kenaikan beban pemeliharaan tahun 2014 sebesar Rp50.889.843.996,00 dikarenakan untuk bertambahnya biaya pemeliharaan gedung, taman, sarana dan prasarana masyarakat, saluran air dan lain – lain.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan realisasi sebesar Rp73.428.310.367,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp31.874.010.209,00 atau 76,70% dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2013 yang terdiri terealisasi sebesar Rp41.554.300.158,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Dinas Pendidikan	2,216,196,428	654,309,293.00	1,561,887,135.00	238.71%
2 Dinas Kesehatan Kota	4,602,636,501	2,065,359,400.00	2,537,277,101.00	122.85%
3 Rumah Sakit Umum Daerah	189,649,462.00	182,063,300.00	7,586,162.00	4.17%
4 Dinas Bina Marga	241,068,590	193,225,480.00	47,843,110.00	24.76%
5 Dinas PSDA dan ESDM	208,734,000	267,525,845.00	(58,791,845.00)	-21.98%
6 Dinas Kebakaran	260,497,291	160,178,150.00	100,319,141.00	62.63%
7 Dinas Tata Kota dan Perumahan	866,137,315	443,286,801.00	422,850,514.00	95.39%
8 Dinas PJPR	162,229,900	58,474,250.00	103,755,650.00	177.44%
9 BAPPEDA	1,918,578,415	1,614,817,456.00	303,760,959.00	18.81%
10 DISHUBKONIMFO	948,694,011	405,860,600.00	542,833,411.00	133.75%
11 Badan Lingkungan Hidup (BLH)	1,089,772,870	889,613,305.00	200,159,565.00	22.50%
12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	166,334,300	75,137,900.00	91,196,400.00	121.37%
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	116,398,700	141,003,900.00	(24,605,200.00)	-17.45%
14 Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	2,871,886,223	952,003,022.00	1,919,883,201.00	201.67%
15 Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga	1,330,920,000	343,690,984.00	987,229,016.00	287.24%
16 BPBD	862,494,400	322,300,000.00	540,194,400.00	167.61%
17 Disnakertrans	1,389,457,190	309,888,229.00	1,079,568,961.00	346.37%
18 Dinas Koperasi dan UKM	1,089,085,450	646,428,860.00	442,656,590.00	68.48%
19 BPPT	453,207,489	851,010,240.00	(397,802,751.00)	-46.74%
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	635,901,298	502,008,475.00	133,892,823.00	26.67%
21 Badan Kesbang.Politik dan Linmas	1,273,050,440	306,992,200.00	966,058,240.00	314.68%
22 Satpol-PP	2,332,750,000	464,892,000.00	1,867,858,000.00	401.78%
23 Sekretariat Daerah	7,529,448,576	6,847,397,472.00	682,051,104.00	9.96%
24 Sekretariat DPRD	9,621,266,459	16,259,206,193.00	(6,637,939,734.00)	-40.83%
25 DPKAD	4,137,365,080	2,227,426,053.00	1,909,939,027.00	85.75%
26 Inspektorat	334,437,682	392,103,127.00	(57,665,445.00)	-14.71%
27 Kecamatan Semarang Selatan	1,078,852,900	19,305,500.00	1,059,547,400.00	5488.32%
28 Kecamatan Semarang Utara	1,475,504,000	25,600,000.00	1,449,904,000.00	5663.69%
29 Kecamatan semarang Barat	1,984,947,500	23,899,400.00	1,961,048,100.00	8205.43%
30 Kecamatan Semarang Timur	1,269,166,400	21,523,500.00	1,247,642,900.00	5796.65%
31 Kecamatan Semarang Tengah	1,095,696,400	12,139,500.00	1,083,556,900.00	8925.88%
32 Kecamatan Gunung Pati	1,014,045,300	24,566,000.00	989,479,300.00	4027.84%
33 Kecamatan Tugu	423,975,000	25,600,000.00	398,375,000.00	1556.15%
34 Kecamatan Mijen	955,515,200	22,392,000.00	933,123,200.00	4167.22%
35 Kecamatan Genuk	1,323,709,900	24,182,000.00	1,299,527,900.00	5373.95%
36 Kecamatan Gajahmungkur	746,824,900	19,614,000.00	727,210,900.00	3707.61%
37 Kecamatan Tembalang	2,464,737,900	23,765,500.00	2,440,972,400.00	10271.08%
38 Kecamatan Candisari	994,103,500	20,155,500.00	973,948,000.00	4832.17%
39 Kecamatan Banyumanik	1,747,340,000	13,058,500.00	1,734,281,500.00	13280.86%
40 Kecamatan Ngaliyan	1,803,109,900	24,482,000.00	1,778,627,900.00	7265.04%
41 Kecamatan Gayamsari	983,273,000	22,982,000.00	960,291,000.00	4178.45%
42 Kecamatan Pedurungan	2,380,449,400	22,892,000.00	2,357,557,400.00	10298.61%
43 Badan Kepegawaian Daerah	832,475,320	833,698,878.00	(1,223,558.00)	-0.15%
44 Kantor Pendidikan dan Latihan	895,955,222	976,713,055.00	(80,757,833.00)	-8.27%
45 Kantor Kelahanan Pangan	367,683,900	82,934,000.00	284,749,900.00	343.35%
46 Kantor Perpustakaan dan Arsip	148,131,250	42,038,400.00	106,092,850.00	252.37%
47 Dinas Pertanian	985,220,557	261,005,240.00	724,215,317.00	277.47%
48 Dinas Kelautan dan Perikanan	592,655,350	444,841,502.00	147,813,848.00	33.23%
49 Dinas Pasar	308,726,448	143,721,778.00	165,004,670.00	114.81%
50 DISPERINDAG	708,013,050	846,987,370.00	(138,974,320.00)	-16.41%
Jumlah	73,428,310,367.00	41,554,300,158.00	31,874,010,209.00	76.70%

f. Beban Bunga

Beban Bunga adalah Beban Bunga pada periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp188.270.212,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp65.000.687,00 atau -25.66% dibandingkan dengan Beban Bunga tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp253.270.899,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Bunga	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 DPKAD	188.270.212,00	253.270.899,00	(65.000.687,00)	-25,66%
Jumlah	188.270.212,00	253.270.899,00	(65.000.687,00)	-25,66%

Berkurangnya beban bunga tahun 2014 dibanding tahun 2013 dikarenakan Utang Jangka Panjang pada tahun 2014 sudah lunas.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

g. Beban Hibah

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp113.718.345.363,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp72.097.029.497,00 atau 173,22% dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp41.621.315.866,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Hibah	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 DPKAD	113,718,345,363,00	41,621,315,866,00	72,097,029,497,00	173,22%
Jumlah	113,718,345,363,00	41,621,315,866,00	72,097,029,497,00	173,22%

Beban hibah pada tahun 2014 mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya permintaan bantuan hibah dari masyarakat yang diajukan pada tahun 2013.

h. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan realisasi sebesar Rp6.301.500.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.569.900.000,00 atau 130,69% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp2.731.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 DPKAD	6.301.500.000,00	2.731.600.000,00	3.569.900.000,00	130,69%
Jumlah	6.301.500.000,00	2.731.600.000,00	3.569.900.000,00	130,69%

Pada beban bantuan sosial ini mengalami kenaikan 130,69% bila dibandingkan tahun 2013.

i. Beban Bantuan Keuangan

Beban bantuan keuangan merupakan Beban Bantuan Keuangan Periode 1 januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang diberikan kepada partai politik dengan realisasi sebesar Rp870.104.900,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp81.537.900,00 atau 10,34% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp788.567.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Beban Bantuan Keuangan	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 DPKAD	870.104.900,00	788.567.000,00	81.537.900,00	10%
Jumlah	870.104.900,00	788.567.000,00	81.537.900,00	10%

j. Beban Penyusutan

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan tahun anggaran 2014, Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Beban Penyusutan tahun 2014 dan Beban Penyusutan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Beban Penyusutan Aset Tetap	206.083.547.868,00	451.136.318.529,00	(245.052.770.661,00)	-54,32%
2 Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	206.083.547.868,00	451.136.318.529,00	(245.052.770.661,00)	-54,32%

Beban penyusutan aset tetap dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Penyusutan	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
1 Dinas Pendidikan	53,959,152,912	125,945,795,067,00	(71,986,642,155,00)	-57%
2 Dinas Kesehatan Kota	5,254,978,992	9,016,795,464,00	(3,761,816,472,00)	-42%
3 Rumah Sakit Umum Daerah	11,326,093,992,00	11,998,587,411,00	(672,493,419,00)	-6%
4 Dinas Bina Marga	59,102,649,744	55,330,298,344,00	3,772,351,400,00	7%
5 Dinas PSDA dan ESDM	10,448,682,216	140,227,010,816,00	(129,778,328,600,00)	-93%
6 Dinas Kebakaran	1,579,347,492	2,090,099,676,00	(510,752,184,00)	-24%
7 DTKP	2,751,562,224	9,967,758,081,00	(7,216,195,857,00)	-72%
8 Dinas PJPR	5,141,781,288	3,528,994,872,00	1,612,786,416,00	46%
9 BAPPEDA	345,203,652	757,641,189,00	(412,437,537,00)	-54%
10 Dishubkominfo dan BLU	6,033,486,792	26,167,553,895,00	(20,134,067,103,00)	-77%
11 Badan Lingkungan Hidup (BLH)	771,264,312	1,170,374,496,00	(399,110,184,00)	-34%
12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	9,941,163,444	11,060,729,399,00	(1,119,565,955,00)	-10%
13 Dinas Kependudukan dan Capil	903,562,704	1,401,818,523,00	(498,255,819,00)	-36%
14 Bapermas, Perempuan dan KB	571,510,764	2,954,389,227,00	(2,382,878,463,00)	-81%
15 Dinsospora	3,398,223,528	1,766,061,106,00	1,632,162,422,00	92%
16 BPBD	621,119,016	3,776,474,922,00	(3,155,355,906,00)	-84%
17 Disnakertrans	402,331,236	543,856,951,00	(141,525,715,00)	-26%
18 Dinas Koperasi dan UKM	224,102,760	272,739,222,00	(48,636,462,00)	-18%
19 BPPT	1,165,330,728	539,394,532,00	625,936,196,00	116%
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,024,663,320	1,136,886,490,00	(112,223,170,00)	-10%
21 Badan Kesbang, Politik dan Linmas	209,218,896	1,670,010,227,00	(1,460,791,331,00)	-87%
22 Satpol-PP	673,288,776	526,336,291,00	146,952,485,00	28%
23 Sekretariat Daerah	8,533,913,652	9,912,485,427,00	(1,378,571,775,00)	-14%
24 Sekretariat DPRD	2,067,285,828	2,626,962,189,00	(559,676,361,00)	-21%
25 DPKAD	2,148,484,752	3,031,136,856,00	(882,652,104,00)	-29%
26 Inspektorat	170,345,508	182,763,028,00	(12,417,520,00)	-7%
27 Kecamatan Semarang Selatan	683,512,104	1,096,511,864,00	(412,999,760,00)	-38%
28 Kecamatan Semarang Utara	345,769,608	277,528,949,00	68,240,659,00	25%
29 Kecamatan Semarang Barat	588,188,088	529,713,759,00	58,474,329,00	11%
30 Kecamatan Semarang Timur	337,890,816	318,868,004,00	19,022,812,00	6%
31 Kecamatan Semarang Tengah	655,091,136	808,723,009,00	(153,631,873,00)	-19%
32 Kecamatan Gunungpati	480,710,076	642,536,926,00	(161,826,850,00)	-25%
33 Kecamatan Tugu	285,091,980	434,679,189,00	(149,587,209,00)	-34%
34 Kecamatan Mijen	346,828,872	359,732,213,00	(12,903,341,00)	-4%
35 Kecamatan Genuk	567,968,400	718,307,721,00	(150,339,321,00)	-21%
36 Kecamatan Gajahmungkur	360,120,792	527,654,462,00	(167,533,670,00)	-32%
37 Kecamatan Tembalang	436,598,232	372,802,388,00	63,795,844,00	17%
38 Kecamatan Candisari	348,979,104	419,711,768,00	(70,732,664,00)	-17%
39 Kecamatan Banyumanik	1,190,047,572	1,160,793,438,00	29,254,134,00	3%
40 Kecamatan Ngaliyan	525,195,468	413,593,738,00	111,601,730,00	27%
41 Kecamatan Gayamsari	1,047,107,880	1,060,244,548,00	(13,136,668,00)	-1%
42 Kecamatan Pedurungan	524,436,252	527,368,492,00	(2,932,240,00)	-1%
43 Badan Kepegawai Daerah	397,726,488	243,864,662,00	153,861,826,00	63%
44 Kantor Pendidikan dan Latihan	608,236,752	628,777,077,00	(20,540,325,00)	-3%
45 Kantor Ketahanan Pangan	75,882,396	316,519,251,00	(240,636,855,00)	-76%
46 Kantor Perpustakaan dan Arsip	1,555,549,116	2,802,581,172,00	(1,247,032,056,00)	-44%
47 Dinas Pertanian	1,062,737,052	1,124,296,626,00	(61,559,574,00)	-5%
48 Dinas Kelautan dan Perikanan	540,715,968	907,031,963,00	(366,315,995,00)	-40%
49 Dinas Pasar	4,083,376,608	5,248,541,536,00	(1,165,164,928,00)	-22%
50 Disperindag	267,038,580	331,276,986,00	(64,238,406,00)	-19%
Jumlah	206,083,547,868,00	448,874,613,442,00	(242,791,065,574,00)	-54%

k. Beban Penyisihan Piutang

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp26.413.599.749,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp26.672.503.684,00 atau -50,24% dibandingkan Beban Penyisihan Piutang tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp53.086.103.433,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Rumah Sakit Umum Daerah	375,084,361.00	1,714,821,384.00	(1,339,737,023.00)	-78.13%
2 Dinas PJPR		278,190,120.00	(278,190,120.00)	-100.00%
3 Badan Lingkungan Hidup	1,100,000.00	8,550,000.00	(7,450,000.00)	-87.13%
4 DPKAD	25,729,457,723.00	50,416,401,536.00	(24,686,943,813.00)	-48.97%
5 Dinas Pertanian	166,837,706.00	115,443,000.00	51,394,706.00	100.00%
6 Dinas Pasar	141,119,959.00	552,697,393.00	(411,577,434.00)	-74.47%
Jumlah	26,413,599,749.00	53,086,103,433.00	(26,672,503,684.00)	-50.24%

Rincian beban penyisihan piutang DPKAD sebesar Rp25.729.457.723,00,00 yang terdiri dari beban penyisihan piutang pajak hotel sebesar Rp213.568.447,60,00 pajak restoran sebesar Rp175.653.391,00 pajak hiburan sebesar Rp38.776.950,00 pajak reklame sebesar Rp1.531.458.900,00 pajak parkir sebesar Rp1.254.750,00 pajak air bawah tanah sebesar Rp9.553.494,00 pajak PBB sebesar Rp23.758.017.055,00 dan penyisihan piutang dana bergulir sebesar Rp1.174.735,00.

1. Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen

Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen menggambarkan Beban Cadangan Kerugian pada periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Tidak adanya realiasi beban cadangan kerugian investasi non permanen pada tahun 2014 karena posisi saldo akhir cadangan kerugian investasi non permanen mengalami penurunan sehingga cadangan kerugian dicatat sebagai pendapatan.

m. Beban Transfer

Beban Transfer adalah Beban Transfer periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.778.238.020,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.777.194.020,00 atau 170229,31% bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp1.044.000,00 dengan data sebagai berikut:

Beban Transfer	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Rumah Sakit Umum Daerah	1.190.000,00	1.044.000,00	146.000,00	13,98%
2 DPKAD	1.777.048.020,00	-	1.777.048.020,00	100,00%
Jumlah	1.778.238.020,00	1.044.000,00	1.777.194.020,00	170229,31%

n. Beban Penghapusan Aset

Beban Penghapusan Aset merupakan Beban Penghapusan Aset periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Beban Penghapusan Aset	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Dinas Pendidikan	2.251.074.790,00	-	2.251.074.790,00	100%
2 Dinas Kesehatan Kota	336.148.470,00	-	336.148.470,00	100%
3 Dinas Bina Marga	234.385.291,00	-	234.385.291,00	100%
4 Dinas PSDA dan ESDM	2,00	-	-	100%
5 Dinas Tata Kota dan Perumahan	93.768.973,00	-	-	100%
6 P J P R	15,00	-	-	100%
7 Badan Lingkungan Hidup	91,00	-	-	100%
8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	73,00	-	-	100%
9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	241,00	-	-	100%
10 Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	35.717.677,00	-	-	100%
11 Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	1.899.218.509,00	-	-	100%
12 badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.662.907,00	-	-	100%
13 Disnakertrans	1.050.158,00	-	1.050.158,00	100%
14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.963.742,00	-	-	100%
15 Satpol-PP	82.958.592,00	-	82.958.592,00	100%
16 Sekretariat Daerah	7.965.312,00	-	7.965.312,00	100%
17 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.613.694,00	-	-	100%
18 Kecamatan Semarang Selatan	140,00	-	-	100%
19 Kecamatan Semarang Utara	135.295.573,00	-	-	100%
20 Kecamatan Semarang Barat	44.103.646,00	-	44.103.646,00	100%
21 Kecamatan Semarang Tengah	122.421.000,00	-	-	100%
22 Kecamatan Semarang Timur	-	-	-	100%
23 Kecamatan Gunungpati	40,00	-	-	100%
24 Kecamatan Tugu	305.086.801,00	-	-	100%
25 Kecamatan Mijen	79,00	-	79,00	100%
26 Kecamatan Tembalang	1,00	-	-	100%
27 Kecamatan Candisari	3,00	-	-	100%
28 Kecamatan Banyumanik	118.944.290,00	-	-	100%
29 Kecamatan Gayamsari	99,00	-	-	100%
30 Kecamatan Pedurungan	122,00	-	-	100%
31 Dinas Pertanian	55.835.237,00	-	-	100%
32 Dinas Pasar	1.646.156.523,00	-	1.646.156.523,00	100%
	7.389.372.091,00	-	7.389.372.091,00	100%

Besarnya beban penghapusan aset sebesar Rp7.389.372.091,00 merupakan aset tetap maupun aset lainnya yang dihapuskan pada tahun 2014, besarnya nilai beban penghapusan adalah sebesar nilai buku dari aset tetap dan aset lain yang dihapus. Beban penghapusan tahun 2013 bernilai Rp0,00 disebabkan beban penghapusan pada tahun 2013 diakui sebagai beban penyusutan.

o. Beban Hibah Aset

Beban Hibah Aset adalah Beban Hibah Aset periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan realisasi sebesar Rp13.032.215.745,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Hibah Aset	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Dinas Pendidikan	2.645.506.927,00	-	2.645.506.927,00	100,00%
2 Dinas Kesehatan Kota	214.093.000,00	738.891.572,00	(524.798.572,00)	-71,03%
3 Dinas Tata Kota dan Perumahan	9.376.995.818,00	-	9.376.995.818,00	100%
4 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	795.620.000,00	-	795.620.000,00	100%
Jumlah	13.032.215.745,00	738.891.572,00	12.293.324.173,00	1663,75%

Beban hibah aset pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp12.293.324.173,00 atau 1663,75% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp738.891.572,00. Beban hibah aset tahun 2014 sebesar Rp13.032.215.745,00 dengan rincian sbb :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- Dinas Pendidikan sebesar Rp2.645.506.927,00 merupakan buku ajar yang diberikan ke sekolah sekolah swasta.
- DKK bantuan sebesar Rp214.093.000,00 dipergunakan untuk Komisi Penanggulangan Aids sebesar Rp22.843.000,00 dan bantuan sirine ke Keluarahan sebesar Rp191.250.000,00.
- Dinas tata Kota dan Permukiman sebesar Rp9.376.995.818,00 merupakan pengakuan beban hibah paving kepada masyarakat yang telah diserahkan sebelum tahun 2014 tetapi baru dikeluarkan dari KIB D tahun 2014.
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp795.620.000,00 merupakan pemberian gerobak sampah kepada masyarakat.

p. Beban Lain-lain

Beban Lain – lain merupakan saldo Beban lain-lain periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang terealisasi sebesar Rp156.069.707,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.011.334.422 atau (86,63%) bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp1.167.404.129,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Lain lain	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Dishubkominfo (BLU Mangkang)	-	360.695.032,00	(360.695.032,00)	-100,00%
2 DPKAD	-	806.709.097,00	(806.709.097,00)	-100,00%
Jumlah	-	1.167.404.129,00	(1.167.404.129,00)	-100,00%

Pada UPTD BLU Terminal Mangkang realisasi sebesar Rp156.069.707,00 antara lain dipergunakan untuk biaya operasional dan promosi BLUD Terminal Mangkang.

q. Beban Dana BOS

Saldo Beban Dana BOS periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan realisasi sebesar Rp132.984.057.705,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp46.216.033.297,00 atau 53,26% jika dibandingkan tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp86.768.024.408,00

Beban Dana BOS	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	Rp
Dana Pendidikan	132.984.057.705,00	86.768.024.408,00	46.216.033.297,00	53,26%
Jumlah	132.984.057.705,00	86.768.024.408,00	46.216.033.297,00	53,26%

Beban Dana Bos merupakan Biaya Operasional Sekolah yang antara lain dipergunakan untuk pembelian / penggandaan buku teks pelajaran, kegiatan penerimaan siswa baru,pembelajaran ekstrakurikuler siswa pembayaran guru honorer dan perawatan sekolah.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4.5.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Kenaikan/Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Pendapatan	3,395,725,361,822.00	3,011,440,629,874.81	(384,284,731,947.19)	12.76%
2 Beban	2,560,159,333,173.00	2,466,041,846,449.00	(94,117,486,724.00)	3.82%
	835,566,028,649.00	545,398,783,425.81	(290,167,245,223.19)	16.58%

4.5.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2014 sebesar Rp15.000,00.

4.5.5 Pos Luar Biasa

Pos luar Biasa pada tahun 2014 sebesar Rp0,00

4.5.6 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan

setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2014 surplus sebesar Rp835.566.043.649,00 sedangkan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2013 surplus sebesar Rp545.398.785.925,81.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4.6 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2014 dan 2013 terdiri atas:

	Arus Kas	Realisasi 2014	Realisasi 2013
A	Aktivitas Operasi	982,804,220,717.00	907,174,293,280.00
B	Aktivitas Investasi	(840,782,992,098.00)	(628,544,347,134.00)
C	Aktivitas Pendanaan	(1,816,665,353.00)	(1,816,665,353.00)
D	Aktivitas Transitoris	(440,966,468.00)	(2,401,670,944)
	Arus Kas Bersih	139,763,596,798.00	274,411,609,849.00

Data tabel pada realisasi Arus Kas Bersih tahun anggaran 2014 terjadi surplus sebesar Rp139.763.596.798,00 atau turun sebesar Rp134.648.013.051,00 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2013 surplus sebesar Rp274.411.609.849,00 realisasi kas bersih yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktifitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
A	Arus Kas Masuk	3,051,562,399,695.00	2,731,670,603,850.00
B	Arus Kas Keluar	2,068,758,178,978.00	1,824,496,310,570.00
	Jumlah	982,804,220,717.00	907,174,293,280.00

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp982.804.220.717,00 naik sebesar Rp75.629.927.437,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp907.174.293.280,00. Realisasi arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus Kas Masuk

Realisasi Arus Kas Masuk sejumlah Rp3.051.562.399.695,00 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang berasal dari:

- Pajak Daerah



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Saldo Realisasi Pajak Daerah sejumlah Rp791.509.586.089,00 adalah Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Pajak Hotel	50.589.695.464,00	44.674.905.002,00
2	Pajak Restoran	62.752.745.542,00	48.387.960.623,00
3	Pajak Hburan	14.670.566.132,00	12.405.484.804,00
4	Pajak Reklame	22.505.204.838,00	22.921.879.365,00
5	Pajak Penerangan Jalan	163.497.269.621,00	137.411.660.918,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	25.199.840,00	1.367.379.075,00
7	Pajak Parkir	7.508.343.122,00	5.658.633.242,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	4.873.574.208,00	4.679.097.924,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
10	Pajak BPHTB	254.085.540.258,00	220.909.156.797,00
11	Pajak Bumi dan Bangunan	211.001.447.064,00	185.292.332.200,00
	Arus Kas Bersih	791.509.586.089,00	683.708.489.950,00

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sejumlah Rp110.196.510.293,00 adalah Saldo Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	5,712,478,000,00	6,026,301,100,00
2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	23,696,254,200,00	21,070,239,500,00
3	Retribusi Izin Persewaan Alat Berat	147,825,000,00	163,145,000,00
4	Retribusi Trayek	111,525,000,00	91,700,000,00
5	Retribusi Reklame	0,00	6,675,978,460,00
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12,296,681,500,00	8,250,886,050,00
7	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2,789,089,500,00	2,601,911,700,00
8	Retribusi Pelayanan Pasar	13,824,452,709,00	12,414,897,320,00
9	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	842,654,000,00	771,062,000,00
10	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13,610,750,000,00	12,648,398,000,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15,735,082,557,00	11,804,068,250,00
12	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadamkan Kebakaran	64,682,500,00	58,512,500,00
13	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1,461,821,300,00	1,482,845,800,00
14	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	1,156,621,000,00	2,854,896,000,00
15	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	6,468,913,470,00	6,142,773,030,00
16	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	203,378,000,00	228,405,800,00
17	Retribusi Tempat Khusus Parkir	911,147,500,00	872,445,000,00
18	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1,165,363,000,00	1,076,734,000,00
19	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	4,183,953,850,00	3,917,366,500,00
20	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	36,893,795,00	32,562,080,00
21	Retribusi Terminal	590,981,000,00	582,696,500,00
22	Retribusi Sewa Lapangan Simpang Lima	850,500,000,00	0,00
23	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	1,631,172,000,00	0,00
24	Kerjasama Bengkok Pujasera Ngaliyan	38,088,000,00	34,625,000,00
25	Kerjasama Lantai Dasar/Pertokoan Simpang Lima	155,381,750,00	223,112,000,00
26	Sewa Aset Tanah	969,702,328,00	1,453,460,228,00
27	Sewa Lahan Jembatan Ciputra-Anggrek	18,986,302,00	17,260,275,00
28	Sewa Lahan Jembatan Ciputra-Ahmad Dahlan	160,182,000,00	142,383,000,00
29	SPBU Pandanaran	0,00	110,000,000,00
30	Kerjasama PT. Narpati	0,00	580,000,000,00
31	Sewa Lahan Sam Poo Kong	132,668,032,00	24,494,400,00
32	Sewa Lahan Toko Roti Puri Mas	29,282,000,00	50,820,000,00
33	Sewa Lapangan Golf	1,200,000,000,00	0,00
	Jumlah	110,196,510,293,00	102,403,979,493,00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian Laba BUMD)
Realisasi Arus Kas Masuk pada Pendapatan Bagian Laba BUMD tahun 2014
dan tahun 2013 sebesar Rp8.036.099.560,00 dan Rp7.650.778.888,00 yang
berasal dari:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	PT Bank Jateng	6,683,452,338,00	6,049,636,864,00
2	PD RPH & Hewan Potong	40,263,443,00	40,024,700,00
3	PD Percetakan	186,582,943,00	181,801,835,00
4	Penyusunan Daerah BPR/BKK	934,594,286,00	1,048,800,379,00
5	PD Bank Pasar	191,206,550,00	330,515,110,00
	Jumlah	8,036,099,560,00	7,650,778,888,00

- d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain – lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kota Semarang untuk periode tahun anggaran 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	DPKAD	98.156.062.712,00	65.505.696.488,00
2	Dinas Pertanian	768.307.694,00	308.388.163,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.810.500,00	13.787.000,00
4	Dinas Perhubungan	245.084.775,00	245.617.850,00
5	Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga	0,00	1.182.449.664,00
6	Dinas Kesehatan	14.986.125.000,00	0,00
	Jumlah	114.171.390.681,00	67.255.939.165,00

- e. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp137.759.893.153,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Bagi Hasil Dari PBB dan BPHTB	18.569.293.102,00	18.596.870.546,00
2	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) OPDN dan Pasal 21	99.186.447.967,00	85.000.241.717,00
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25/29	13.562.259.287,00	9.361.450.765,00
4	Bagi Hasil Cukau Tembakau	6.441.892.797,00	7.265.045.216,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	137.759.893.153,00	120.223.608.244,00

- f. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam Kota Semarang untuk periode tahun anggaran 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	0,00
2	Iuran Eksplorasi/Eksplorasi	3.031.059.126,00	1.878.324.513,00
	Jumlah	3.031.059.126,00	1.878.324.513,00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

g. Dana Alokasi Umum

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Semarang untuk periode tahun anggaran 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp1.104.739.473.000,00 dan Rp1.054.002.569.000,00.

h. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kota Semarang untuk periode tahun anggaran 2014 dan 2013 sejumlah Rp29.236.965.000,00 dan Rp14.993.022.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Bidang Pendidikan	16.686.265.000,00	11.963.529.000,00
2	Bidang Kesehatan	4.811.660.000,00	1.208.367.000,00
3	Bidang Infrastruktur	2.759.120.000,00	892.182.000,00
4	Bidang Keselamatan Transportasi Darat	525.450.000,00	157.479.000,00
5	Bidang Lingkungan Hidup	1.516.480.000,00	430.485.000,00
6	Bidang Bapermasper	0,00	340.980.000,00
7	Pasar	2.937.990.000,00	0,00
	Jumlah	29.236.965.000,00	14.993.022.000,00

i. Dana Penyesuaian

Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Kota Semarang yang merupakan tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan profesi untuk periode tahun anggaran 2014 sejumlah 283.917.499.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2013 sejumlah Rp266.894.650.000,00.

j. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak adalah pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Kota Semarang untuk periode tahun anggaran 2014 dan 2013 dengan realisasi sejumlah Rp399.557.971.017,00 dan Rp329.977.231.976,00.

k. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan dan direalisasikan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah, sehingga arus kas masuk pada pos Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tahun anggaran 2014 dan tahun 2013 nilainya adalah Rp69.405.952.776,00 dan Rp82.682.010.621,00.

2. Arus Kas Keluar

Realisasi arus Kas Keluar sejumlah Rp2.068.758.178.978,00 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Belanja Pegawai	1,302,613,230,285.00	1,267,469,470,717.00
2	Belanja Barang dan Jasa	643,227,950,410.00	510,700,352,490.00
3	Belanja Bunga	250,000,000.00	378,295,400.00
4	Belanja Subsidi	0.00	0.00
5	Belanja Hibah	113,718,345,363.00	41,621,315,866.00
6	Belanja Bantuan Sosial	6,301,500,000.00	2,731,600,000.00
7	Belanja Bantuan Keuangan	870,104,900.00	788,567,000.00
8	Belanja Tak Terduga	1,777,048,020.00	806,709,097.00
9	Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00
	Jumlah Arus Kas Keluar	2,068,758,178,978.00	1,824,496,310,570.00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Realisasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Arus Kas Masuk	795.290.500,00	1.532.016.450,00
2	Arus Kas Keluar	841.578.282.598,00	630.076.363.584,00
	Jumlah	(840.782.992.098,00)	(628.544.347.134,00)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2013 terjadi defisit sebesar sebesar Rp840.782.992.098,00 dan Rp628.544.347.134,00. Arus kas masuk berasal dari penjualan Peralatan dan Mesin Rp795.290.500,00. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dapat diuktisarkan sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Pembentukan Dana Cadangan	25.439.914.000,00	15.000.000.000,00
2	Belanja Tanah	66.806.647.024,00	55.557.059.733,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin	163.602.557.355,00	130.101.104.575,00
4	Belanja Gedung dan Bangunan	380.386.931.387,00	141.312.080.049,00
5	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.596.020.355,00	252.075.125.515,00
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.850.992.477,00	7.030.993.712,00
7	Belanja Aset Lainnya	56.220.000,00	0,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.839.000.000,00	29.000.000.000,00
	Jumlah	841.578.282.598,00	630.076.363.584,00

C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
	Arus Kas Keluar	1,816,665,353,00	1,816,665,353,00
	Jumlah	(1,816,665,353,00)	(1,816,665,353,00)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun anggaran 2014 adalah defisit sebesar Rp1.816.665.353,00 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Semarang.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2014 dimanfaatkan untuk pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, dengan pengikhtisarkan sebagai berikut:

	Realisasi 2014	Realisasi 2013
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	1.816.665.353,00	1.816.665.353,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.816.665.353,00	1.816.665.353,00

D. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	Realisasi 2014	Realisasi 2013
1 Arus Kas Masuk	81.556.478.940,00	76.437.543.777,00
2 Arus Kas Keluar	81.997.445.408,00	78.839.214.721,00
Arus Kas Bersih	(440.966.468,00)	(2.401.670.944,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris realisasinya meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, dan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris realisasinya meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut:

	Realisasi 2014	Realisasi 2013
1 Potongan Kasda	80.189.868.187,00	74.120.037.569,00
2 Utang PFK	86.858.996,00	213.120.499,00
3 Penerimaan Uang Jaminan Bongkar (UJB)	763.044.000,00	1.568.235.007,00
4 Penerimaan Uang Jaminan Penduduk Boro	516.600.000,00	536.150.702,00
5 Kelebihan catat	107.757,00	0,00
Jumlah	81.556.478.940,00	76.437.543.777,00

- a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp80.189.868.187,00 merupakan penerimaan potongan dari THT, Askes, PPh Gaji, dan Taperum pada tahun 2014.
- b. Utang PFK sebesar Rp86.858.996,00 merupakan penerimaan Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum dilakukan penyetoran dan masih berada di Bendahara Pengeluaran SKPD. Utang pajak tersebut terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan Rp41.136.617,00, Dinas Kesehatan Kota Rp831.817,00 Dinas DTKP Rp26.832.126,00 Kec. Semarang Tengah Rp206.536,00 dan Kecamatan Candisari Rp17.851.900,00.
- c. Penerimaan Uang Jaminan Bongkar (UJB) Reklame tahun 2014 sebesar Rp763.044.000,00 merupakan jumlah penerimaan uang titipan dari penyelenggaraan reklame kepada Pemerintah Kota Semarang.
- d. Penerimaan Uang Jaminan Penduduk Boro tahun 2014 sebesar Rp516.600.000,00 merupakan jumlah uang titipan dari penduduk boro tahun 2014.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- e. Kelebihan catat tahun 2014 sebesar Rp107.757,00 merupakan kelebihan catat pendapatan dan akan dilakukan koreksi tahun 2015

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Realisasi kas keluar dari aktivitas transitoris yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pengeluaran lainnya. Pengeluaran PFK terdiri dari:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Potongan Kasda	80,189,868,187.00	74,120,037,569.00
2	Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar (UJB)	1,196,440,200.00	35,623,596.00
3	Pengeluaran Uang Jaminan Penduduk Boro	398,000,000.00	4,118,502,854.00
4	Utang PFK	213,120,499.00	565,050,702.00
5	Kekurangan catat	16,552.00	0.00
	Jumlah	81,997,445,408.00	78,839,214,721.00

- a) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp.80.189.868.187,00 merupakan pengeluaran atas potongan THT, PPh 21 Gaji, IWP, Taperum, dan Askes.
- b) Pengeluaran utang PFK sebesar Rp.213.120.499,00 merupakan penerimaan Pajak yang dipungut dan masih berada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan sebesar Rp4.278.558,00 dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp208.841.941,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
- c) Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar (UJB) Reklame tahun 2014 sebesar Rp1.196.440.200,00 merupakan arus kas keluar yang berasal dari uang jaminan bongkar (UJB) reklame tahun 2014 yang terdiri dari pengambilan UJB tahun 2013 sebesar Rp162.152.000,00 dan pemindahbukuan keluar dari rekening UJB menjadi PAD sebesar Rp1.034.288.200,0.
- d) Pengeluaran Uang Jaminan Penduduk Boro (UJPB) sebesar Rp398.000.000,00 merupakan arus kas keluar yang berasal dari pengambilan uang Jaminan Penduduk Boro tahun 2014 sebesar Rp387.700.000,00 dan Uang Jaminan Penduduk Boro (UJPB) yang menjadi PAD sebesar Rp10.300.000,00.
- e) Kekurangan catat sebesar Rp16.552,00 merupakan kurang catat pendapatan pada tahun 2014 dan akan dilakukan koreksi tahun 2015

E. SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir Kas sebesar Rp1.086.300.120.262,00 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2014 naik sebesar Rp163.548.402.918,00 dari saldo kas tahun 2013 sebesar Rp922.751.717.344,00. Saldo Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	1,045,791,946,194.00	906,028,349,396.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	65,432,500.00
3	Kas di BLUD	31,939,365,576.00	11,656,105,709.00
4	Kas BOS	8,568,808,492.00	5,001,829,739.00
	Jumlah	1,086,300,120,262.00	922,751,717,344.00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran

Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.045.791.946.194,00 di dalamnya termasuk saldo Uang Jaminan Bongkar (UJB) Reklame sebesar Rp2.959.098.000 dan Uang Jaminan Penduduk Boro (UJPB) sebesar Rp1.476.418.564,00. Saldo UJB Reklame dan UJPB tersebut adalah saldo murni setelah dikurangi dengan jasa giro dari rekening UJB Reklame dan UJPB serta UJB reklame dan UJPB yang diakui dan menjadi pendapatan daerah.

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Kas di BUD	1,036,632,129,453,00	905,050,079,880,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	9,135,385,241,00	978,269,516,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	24,431,500,00	0,00
	Jumlah	1,045,791,946,194,00	906,028,349,396,00
	Kas di BUD terdiri dari :		
1	Kas di Kasda	0,00	0,00
2	Bank	310,926,359,944,00	656,050,079,880,00
3	Deposito	725,705,769,509,00	249,000,000,000,00
	Jumlah	1,036,632,129,453,00	905,050,079,880,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp9.135.385.241,00 termasuk di dalamnya adalah Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dinas Kesehatan sebesar Rp4.865.498.553,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2014 belum disetorkan pada Rekening BUD. Tahun 2014 terdapat Kas Di Bendahara Penerimaan sebesar Rp24.431.500,00 yang meliputi kas pada Bendahara Penerima DKK Rp4.175.000,00 Dishubkominfo Rp6.617.500,00 dan Sekretariat Daerah Rp13.450.000,00 dan Dinsospora Rp189.000,00.

2. Kas di BLUD

Kas di BLUD sebesar Rp31.939.365.576,00 merupakan kas yang ada pada BLUD RSUD serta BLUD BRT dan Terminal Mangkang dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2014	Realisasi 2013
1	Kas di Bank BLUD RSUD	28.484.587.354,00	7.285.221.138,00
2	Deposito BLUD RSUD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	41.236.746,00	44.697.824,00
5	Kas di Bank BLUD BRT	1.344.089.876,00	2.233.105.644,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD BRT	98.100,00	103.103,00
7	Kas DI Bendahara Penerimaan BLUD BRT	69.353.500,00	92.978.000,00
	Jumlah	31.939.365.576,00	11.656.105.709,00

3. Kas BOS

Saldo kas BOS sebesar Rp8.568.808.492,00 merupakan sisa dan BOS tahun 2014 yang belum dibelanjakan.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4.7 PENJELASAN – PENJELASAN ATAS DANA-DANA NON APBD KOTA SEMARANG

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari dana-dana non APBD Kota Semarang yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sedangkan Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah (lingkup PNPM-MP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.168 /PMK.07/2009. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun 2014 yang berasal dari Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama adalah sebagai berikut :

4.7.1 Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana Dekonsentrasi Pemerintah Kota Semarang terdapat pada DIPA Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Pelaksana atau tim dan lokasi target sasaran adalah Pemerintah Kota Semarang. Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi, realisasi anggarannya sebagai berikut:

No	SKPD	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	SISA	REALISASI 2013
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Dinas Pendidikan	2,955,217,705,00	2,951,412,876,00	3,804,829,00	0,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	239.940.000,00	191.521.500,00	48.418.500,00	220.870.000,00
3	Dinas Koperasi dan UKM	37.945.000,00	37.945.000,00	0,00	48.618.000,00
Jumlah		3.233.102.705,00	3.180.879.376,00	52.223.329,00	269.488.000,00

Dana Dekonsentrasi dengan target anggaran tahun 2014 sebesar Rp 3.233.102.705,00 terealisasi sebesar Rp3.180.879.376,00 terdapat pada SKPD : Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi dan UKM

a. Dinas Pendidikan

Pada tahun 2013 tidak terdapat alokasi Dana Dekonsentrasi namun pada tahun 2014 terdapat alokasi dengan anggaran Rp. 2.955.217.705,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.951.412.876,00 atau mencapai 99,87%



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Disnakertrans

Pada tahun 2013 Dana Dekonsentrasi yang telah terealisasi pada Disnakertrans Kota Semarang sebesar Rp. 220.870.000,00 dan pada tahun 2014 terdapat alokasi Dana Dekonsentrasi dengan Target Anggaran Rp239.940.000,00 terealisasi Rp191.521.500,00 atau mencapai 90,98% alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai:

- 1) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jamsostek :
 - a) Penyuluhan Pembentukan PP, PKB, LKS-Bipartite, Kopkar, Jamsostek dan Revitalisasi LKS Tripartite untuk Kota Semarang
 - b) Sinergitas Pendataan HI dan Jamsos untuk Kota Semarang
 - c) Administrasi kegiatan
 - d) Verifikasi keanggotaan Sarikat Pekerja (SP) / Sarikat Buruh (SB)
- 2) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja melalui kegiatan:
 - a) Administrasi kegiatan
 - b) Penyusunan Program rencana kerja/tehnis/program
 - c) Pengawasan/pemeriksaan ketenagakerjaan

c. Dinas Koperasi dan UKM

Tahun 2013 dana Dekonsentrasi yang telah terealisasi pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp. 48.618.000,00 dan pada tahun 2014 alokasi dana Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi dan UKM terealisasi sebesar Rp. 37.945.000,00 dengan anggaran sebesar Rp. 37.945.000,00 maka dana dekonsentrasi pada Dinas Koperasi dan UKM terealisasi 100%. Dana tersebut digunakan untuk Program Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan NRB (Nilai Realisasi Bersih)
- 2) Kegiatan Fasilitasi Efektifitas Pembiayaan KUMKM
- 3) Pengendalian dan Pengawasan Koperasi
- 4) Kegiatan Fasilitasi Penilaian Kesehatan
- 5) Kegiatan Penilaian Kesehatan

4.7.2 Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Penyelenggaraan atas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan atas desentralisasi dan atas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan Instruksi Presiden berkaitan dengan penghematan anggaran , di beberapa Kementerian / Lembaga melakukan rasionalisasi pada beberapa kegiatan Tugas Pembantuan di daerah. Kota Semarang dikenakan rasionalisasi sebesar Rp.565.735.000,- pada DIPA yang berasal dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sehingga jumlah alokasi dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama bersumber dana APBN yang diselenggarakan di Pemerintah Kota Semarang menjadi sebesar Rp 21.899.895.000,- yang terdiri

- a. Dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp.7.293.645.000,-
- b. Dana Urusan Bersama (UB) sebesar Rp.14.606.250.000,-

Namun kemudian pada bulan Oktober 2014, secara nasional Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri memberikan penugasan untuk melaksanakan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Untuk Kota Semarang pelaksanaan Program ini dianggarkan sebesar Rp.1.209.994.000,- sehingga secara keseluruhan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kota Semarang pada tahun 2014 sebesar Rp.23.109.889.000,-yang terdiri :

- a. Dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp.8.503.639.000,-
- b. Dana Urusan Bersama (UB) sebesar Rp.14.606.250.000,-

Sampai dengan akhir tahun 2014, anggaran tersebut mempunyai realisasi fisik sebesar 95,79 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.22.065.932.400,- atau sebesar 95,48% dari pagu sebesar Rp.23.109.889.000,-. Kesemuanya terbagi dalam 7 (tujuh) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama, Target Anggaran dan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

No	SKPD	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	SISA	REALISASI 2013
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1 DANA URUSAN BERSAMA					
1	Dinas Tata Kota dan Perumahan	14.606.250.000,00	14.535.000.000,00	71.250.000,00	
2 DANA TUGAS PEMBANTUAN					
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	633.795.000,00	626.290.800	7.504.200,00	567.080.500,00
2	Dinas Pertanian	1.058.300.000,00	996.557.800,00	61.742.200,00	1.251.758.595,00
3	Dinas Kesehatan	3.401.550.000,00	3.347.211.500,00	54.338.500,00	1.882.263.175,00
4	BPBD	1.000.000.000,00	941.826.200,00	58.173.800,00	0,00
5	Bappeda	1.200.000.000,00	882.645.500,00	317.354.500	727.645.250,00
6	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	1.209.994.000,00	736.400.600,00	473.593.400	0,00
Jumlah		8.503.639.000,00	7.530.932.400,00	972.706.600,00	4.428.747.520,00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Dana Tugas Pembantuan Tahun 2014 yang dilaksanakan dan dialokasikan pada Kota Semarang berada pada beberapa SKPD sebagai berikut:

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

Target Anggaran Rp633.795.000,00 terealisasi 626.290.800,00 terdapat sisa Rp7.504.200,00 atau mencapai 98,82% digunakan untuk membiayai Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. Sebelumnya di tahun 2013 Disnakertrans telah merealisasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 567.080.500,00

b. Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2014 Dinas Pertanian Kota Semarang memperoleh Dana Tugas Pembantuan dengan target anggaran Rp1.058.300.000,00 terealisasi Rp996.557.800,00 terdapat sisa sebesar Rp 61.742.200,00 atau mencapai 94,17% digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan melalui kegiatan:

- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan.
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayur dan Tanaman Obat Berkelanjutan;
- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Pada tahun 2013 Dana Tugas Pembantuan yang direalisasikan sebesar Rp. 1.251.758.595,00

c. Dinas Kesehatan Kota Semarang (DKK).

Target Anggaran Dana Tugas Pembantuan 2014 Rp3.401.550.000,00 terealisasi Rp3.347.211.500,00 terdapat sisa sebesar Rp54.338.500,00 atau mencapai 98,40% dana tersebut digunakan untuk membiayai Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).Pada tahun 2013 Dinas Kesehatan Kota Semarang telah merealisasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.882.263.175,00

d. Badan Perencana Daerah Kota Semarang (BAPPEDA)

Alokasi Dana Tugas Pembantuan tahun 2014 dengan target anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp882.645.500,00 atau 73,55% sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 317.354.500,00, yang dikarenakan tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Dana Tugas Pembantuan tersebut digunakan untuk membiayai Program Bina Pembangunan Daerah melalui kegiatan Fasilitasi/Pembinaan/Monev Kegiatan Bidang Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup yang mana keseluruhan kegiatan tersebut dihibahkan pada masyarakat.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Tugas Pembantuan yang diterima BPBD Kota Semarang tahun 2014 dari anggaran Rp. 1.000.000.000,00 terealisasi Rp 941.826.200,00 atau 94,18% terdapat sisa sebesar Rp. 58.173.800,00 digunakan untuk Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana yaitu pembangunan fisik berupa gedung kantor BPBD yang menjadi asset daerah Kota Semarang. Di tahun 2013 BPBD tidak mendapat dana Tugas Pembantuan.

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (DisPendukCapil)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2014 memperoleh Dana Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 1.209.994.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 736.400.600,00 atau sebesar 80,4% dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

Dari Dana Tugas Pembantuan tersebut yang menjadi aset tetap Tahun 2014 sebesar Rp941.826.200,00 dengan rincian :

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp86.300.000,00

Dana aset tetap ini sudah diserahkan pada Pemerintah Kota Semarang.

4.7.3 Dana Urusan Bersama

Dana Urusan Bersama tahun 2014 dilaksanakan dan dialokasikan pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang dengan target anggaran sebesar Rp14.606.250.000,00 terealisasi sebesar Rp14.535.000,00 mencapai 99,51%. Dana tersebut digunakan untuk membiayai Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman dalam kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung & Rumah Negara. Pada tahun 2013 Dana Urusan Bersama yang telah direalisasikan DTKP Kota Semarang sebesar Rp. 18.456.250,00.

4.7.4 Dana Jamkesmas, Jampsal dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan

a. RSUD Kota Semarang

Pada akhir tahun 2013 RSUD mempunyai saldo Jamkesmas sebesar Rp. 157.379.294,00 dan pada tahun 2014 RSUD Kota Semarang mendapat total dana luncuran Jamkesmas sebesar Rp. 9.905.450.429,00, jasa Giro sebesar Rp. 11.761.016,00. Dari Dana Jamkesmas tersebut, pada tahun 2014 RSUD Kota Semarang dapat menyerap sebesar Rp. 9.905.450.429,00 dan setor jasa giro sebesar Rp. 26.846.140,00, sehingga saldo/sisa dana luncuran Jamkesmas pada tahun 2014 sebesar Rp. 142.294.170,00. Sisa Dana Luncuran tahun 2014 tersebut sudah disetor kembali ke Kas Negara. Sehingga saldo kas di Bank BRI pada tahun 2014 sebesar Rp. 0,00. Adapun perhitungannya sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

DANA LUNCURAN JAMKESMAS DAN PENYERAPAN 2014 :

	LUNCURAN	JASA GIRO	PENYERAPAN	Setor Jagir / Setor Kembali	Saldo Akhir
SALDO AWAL					157.379.294,00
	160.398,00				157.539.692,00
				14.726.671,00	142.813.021,00
	423.957,00				143.236.978,00
				942.809,00	142.294.169,00
	572.402,00				142.866.571,00
	9.905.450.429,00				10.048.317.000,00
			9.905.450.429,00		142.866.571,00
		10.604.259,00			153.470.830,00
				11.176.660,00	142.294.170,00
JUMLAH	9,905,450,429,00	11,761,016,00	9.905.490.429	26,846,140,00	0,00
Setor kembali ke kas negara				1	142,294,170,00

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Saldo Akhir 2012	Rp	1.629.598.047
2	Luncuran 1	Rp	5.376.190.000
3	Luncuran 2	Rp	8.058.020.000
4	Luncuran 3	Rp	6.197.600.000
5	Penyerapan 1	Rp	(6.179.037.953)
6	Penyerapan 2	Rp	(8.718.307.308)
7	Penyerapan 3	Rp	(6.219.283.825)
8	Jasa Giro	Rp	44.053.225
9	Setor Jasa Giro	Rp	31.452.892
	Saldo Akhir 2013	Rp	157.379.294

Saldo/sisa dana luncuran Jamkesmas sebesar Rp157.379.294,00 tersebut masih berada di BRI Cabang Pandanaran pada no.rekening. 0000325.01.000.485.30.3 an. Rekening RSUD Kota Semarang yang digunakan untuk cadangan pembayaran klaim Jamkesmas bulan Agustus sampai dengan Desember 2013.

b. Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2014 memperoleh dana-dana non APBD Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah penerimaan Dana Alokasi Khusus Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk Tahun 2009 sebesar Rp 7.018.000.000,- untuk TA 2010 sebesar Rp 7,077,426,500,- pada Tahun 2011 sebesar Rp 7,191,673,135,-, tahun 2012 sebesar Rp 6,627,115,500,- Tahun 2013 sebesar Rp 5,041,585,131,- dan Tahun 2014 sebesar Rp 5,151,851,620,-



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No	Uraian	DAK	Pendamping	Jml
1	Obat	4,811,660,000	617,715,800	5,557,005,800
2	Belanja Modal			
a.	Tabung pemadam kebakaran	26.400.000	2,800,000	29,200,000
b.	Pengadaan Lemari Es	54,285,620	5,480,000	59,765,620
c.	Pengadaan konstruksi/pembelian	180,000,000	25,904,380	205,904,380
d.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	79,506,000	58,120,560	137,626,560
h.	Pengadaan konstruksi/pembelian gedung	296,000,000	30,630,000	326,630,000
JUMLAH		5,447,851,620	740,650,740	6,316,133,360

2. Dana APBN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	<i>PROGRAM PENINGKATAN IMMUNISASI, Bidang P2P</i>			
1.	Supervisi Suportive	7,150,000	7,150,000	0
2.	Lima Imunisasi Dasar Lengkap	11,250,000	11,250,000	0
3.	PTM	12,000,000	12,000,000	0
	Jumlah	30,400,000	30,400,000	0

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	<i>PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT), Bidang Kesga</i>			
1.	Analisis Audit Maternal Perinatal (AMP)	19,636,000	18,197,000	1.439.000
2.	Supervisi Fasilitatif	4,210,000	4,210,000	
3.	Analisis Audit Maternal Perinatal (AMP) dg kematian maternal tertinggi	39,272,000	34,624,000	4.648.000
4.	Penguatan Pelayanan ANC-PNC terpadu dan SOP kegawat daruratan obstetri neonatal	60,396,000	60.396.000	
	Jumlah	123.514.000	117.427.000	6.087.000



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	<i>ProgramKesehatan Anak dan Balita (Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak), Bidang Kesga</i>			
1.	Pengkajian Kasus AMP	13.220.000	10.832.000	2.388.000
2.	Peningkatan Kemampuan Nakes dlm Tatalaksana Neonatus	19.060.000	18.860.300	199.700
3.	Peningkatan Kemampuan Nakes dlm Penanganan dan Pelayanan Kekerser thdp Perempuan dan Anak	100.340.000	91.049.500	9.290.500
	Jumlah	132.620.000	120.741.800	11.878.200

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	<i>ProgramKesehatan Anak dan Balita (Gizi masyarakat), Bidang Kesga</i>			
1.	Operasional Pelaksanaan Surveilans Gizi kab/Kota	4.200.000	4.100.000	100.000
2.	Pelaksanaan PSG	18.900.000	18.900.000	-
3.	Sinkronisasi Program Gizi Kesga di Kab/Kota	93.925.000	93.925.000	-
4.	Pembekalan Teknis Surveilans GAKI	34.950.000	34.585.000	365.000
5.	Analisa Masalah Kretin dan Gizi Buruk dlm Surveilans GAKI	42.220.000	39.220.000	3.000.000
	Jumlah	194.195.000	190.730.000	3.465.000

Keterangan :

Secara umum, kegiatan pada Program Imunisasi, PTM, *Program Bina Gizi dan KIA*, dapat terlaksana sesuai target

3. Dana WHO

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	PE AFP	3.150.000	3.150.000	-
2.	Pengiriman Bio Farma	2.200.000	2.200.000	-
3.	Surveilans Aktif RS	4.920.000	4.920.000	-
	Jumlah	10.270.000	10.270.000	-



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4. KEGIATAN GLOBAL FUND KOMP.AIDS

NO	KEGIATAN	ALOKASI 2014	REALISASI 2014
1	Fee Services MMT / Clinic running cost for MMT services	19.170.000,00	6.720.000,00
2	Office and Lab Cost - MMT	12.528.000,00	4.623.600,00
3	Family Discussion on IDU issue - MMT	1.800.000,00	745.000,00
	Clinical mentoring Metadon	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Insentive STI Team / Clinic running cost for STI services	157.795.000,00	167.762.500,00
5	Office and Lab Cost STI	55.780.000,00	59.535.000,00
6	Mobile STI - Transport of STI Team (5 persons per activity)	18.000.000,00	12.600.000,00
	Quaterly Meeting Layanan (VCT ,IMS , CST/ART dan PMTCT	2.660.000,00	
7	Service Fee - VCT / Clinic running cost for VCT services	185.350.000,00	104.262.500,00
8	Office and Lab Cost - VCT	65.795.000,00	30.365.000,00
9	Mobile clinic VCT - Transport of VCT Team (5 persons per activity)	52.500.000,00	13.200.000,00
	Clinical mentoring VCT	1.500.000,00	1.500.000,00
10	Kegiatan LKB / CoC at Distrik Level	10.000.000,00	9.625.000,00
11	Incentive for AIDS Team leader / Clinic running cost for ART services	211.170.000,00	122.703.750,00
12	Incentive - PMTCT / Clinic running cost for PMTCT services	1.275.000,00	257.500,00
13	Support for PMTCT services - Nutrisi	2.400.000,00	
14	Insetif - SSR Level	34.925.000,00	34.925.000,00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

15	Stationaries - SSR/IU (Paper, Odner, Calculator, Punch Holder, Staples, Inkjet, Pen, Book, Exc.)	3.427.386,00	2.726.500,00
16	Other Office Expense - SSR/IU (Bank Charge, Stamp duty, Stamp, Gasoline, Photocopy, Document expedition including distribution of Reagent & Drugs, Others)	2.844.852,00	1.647.837,73
17	Communication - SSR/IU (Telephone, Faxes, Internet, Speedy)	3.214.128,00	2.630.714,00
18	Electronic Maintenance - SSR / IU (Preparing for AC, Dispenser, Printer, Desktop, Laptop)	2.441.058,00	465.000,00
19	Preparatory Meetings to Develop Program Planning and Set up SSR (Meeting at Central to develop Program Planning & Evaluation Quarterly/Semi Anually Report in Provinces/District Levels) - District Levels	15.000.000,00	13.430.000,00
20	Supervision District's Level to Implementer's Level (SSR'S To IMPLEMENTER'S)	15.840.000,00	15.840.000,00
	TOTAL	Rp 876.915.424,00	Rp 607.064.901,73

5. SUMBER DANA Netherlands Leprosy Relief (NLR)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Surveilans Kusta (Bintek ke Puskesmas dengan kasus)	2,700,000	2,700,000	-
	Jumlah	2,700,000	2,700,000	-



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

6. DANA HIV CORPORATION PROGRAM INDONESIA (HCPI)

Organisasi: **DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG**
Nama Program: Program HR Khususnya Terapi Rumatan Metadondi Kota Semarang Tahun 2014
Periode Kontrak: 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014
Total Dana Rp 42.395.000

No. Anggaran	Pos Anggaran	Total Anggaran (Rp)	Pengeluaran Kwartal 1	Pengeluaran Kwartal 2	Pengeluaran Kwartal 3	Pengeluaran Kwartal 4	Total Pengeluaran	Sisa Anggaran	% Pengeluaran
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 1 - 6)	(8)=(6)/(1)
Kegiatan 1.1	Materi KIE	2.700.000	900.000	900.000			1.800.000	900.000	200%
Kegiatan 1.2	Pembelian Reagen Spot Check	2.250.000	562.500	562.500			1.125.000	1.125.000	100%
Kegiatan 1.3	Bantuan Teknis Tim RS Pengampu Kariadi	4.800.000	-				-	4.800.000	0%
Kegiatan 1.4	Pertemuan ODHA /Penasun dan Keluarga	900.000	150.000				150.000	750.000	20%
Kegiatan 1.5	Transportasi Lokal untuk Home Visit (2 org)	1.920.000	640.000	480.000		160.000	1.280.000	640.000	200%
Kegiatan 1.6	Jasa Libur PTRM	15.525.000					-	15.525.000	0%
Kegiatan 1.7	Bahan Habis Pakai untuk pasien metadon	3.300.000	1.100.000	825.000	825.000	550.000	3.300.000	-	
Kegiatan 1.8	Insentif Kepala Puskesmas Sebagai Penanggung Jawab	2.400.000	800.000	600.000	600.000	400.000	2.400.000	-	
Kegiatan 2.1	Pertemuan Koordinasi Stakeholder	3.800.000	-					3.800.000	0%
Kegiatan 2.2	Insentif Penanggungjawab pelaporan kegiatan & keuangan dinas kesehatan	2.400.000	800.000	600.000	600.000	400.000	2.400.000	-	
Kegiatan 4.1	Bantuan ATK & Telp. Unt kegiatan HR di Puskesmas Poncol	1.200.000	400.000	300.000	300.000	200.000	1.200.000	-	
Kegiatan 4.2	Bantuan ATK & Telp utk kgrn HR di DKK	1.200.000	400.000	300.000	300.000	200.000	1.200.000	-	
	TOTAL	42.395.000	5.752.500	4.567.500	2.625.000	1.910.000	14.855.000	27.540.000	54%



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

7. APBD (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)

Anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 40,606,500,- untuk menunjang kegiatan Imunisasi di Bidang P2P Rp.2,100,000,- Program Bina Gizi dan KIA (Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak) di Bidang Kesga Rp.6,008,500,- Prog. Bina Gizi dan KIA (Kesehatan Ibu dan Lansia) di Bidang Kesga 7.018,000 Prog. Bina Gizi dan KIA (Perbaikan Gizi Masyarakat) di Bidang Kesehatan Warga (Kesga)

Rp 14,940,600,- dan kegiatan Penyehatan Lingkungan bidang PKPKL Rp.25.480.000.

Adapun realisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	<i>Kegiatan Imunisasi, Bidang P2P</i>			
1.	Supervisi Suportive	2,100,000	2,100,000	0
	Jumlah	2,100,000	2,100,000	0

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	<i>Program Bina Gizi dan KIA (Gizi Masyarakat), Bidang Kesga</i>			
1.	Pertemuan Pemantauan Komsumsi Garam ber Iodium	4,690,600	4,490,600	200,000
2	Bulan Penimbangan Penentuan Status Gizi dan Pengukuran Stunting	3,900,000	3,900,000	0
3	Evaluasi Hasil Bulan Penimbangan Penentuan Status Gizi dan Pengukuran Stunting	6,350,000	5,850,000	500,000
	Jumlah	14,940,600	14,240,600	700,000

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	<i>Program Bina Gizi dan KIA Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak, Bidang Kesga</i>			
1.	Peningkatan Asuhan Bayi Baru Lahir dan penalaksanaan Balita	6,008,500	5,961,000	47,500
	Jumlah	6,008,500	5,961,000	47,500



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	<i>Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Kesehatan Ibu dan Lansia), Bidang Kesga</i>			
1.	Pertemuan Perencanaan Program Lansia	7,018,000	7,018,000	0
	Jumlah	7,018,000	7,018,000	0

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	<i>Kegiatan penyehatan Lingkungan, Bidang PKPKL</i>			
1.	Pertemuan Fasilitasi STBM se Karesidenan Semarang	4.434.000	4.434.000	0
2.	Pertemuan Koordinasi Pasar Sehat	5.455.000	5.455.000	0
3	Rakor Kota Sehat	4.455.000	4.455.000	0
4	Surveilans Kualitas Air	4.911.000	4.911.000	0
5.	Fasilitasi Klinik Sanitasi	460.000	460.000	0
6.	Pemetaan Surveilans Kualitas Higiene Sanitasi Pangan	5.765.000	5.765.000	0
	Jumlah	25.480.000	25.480.000	0

Keterangan :

Pada Bidang P2P, Kesga, PKPKL dapat teralisasi hampir 100%, yang artinya bahwa Dinas Kesehatan Kota Semarang mampu melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

8. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tahun 2014 Dana Bantuan Operasional Keuangan (BOK) di Puskesmas Kota Semarang Tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp 2.997.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.979.569.000,00 sisa Rp 17.431.000,00. Realisasi Dana ini didistribusikan pada 37 Puskesmas se-kota dengan rincian sebagai berikut :

No.	PUSKESMAS	BOK	NEW INISIATIF	JUMLAH	Serapan Anggaran
1	PONCOL	91.071.000	6.100.000	97.171.000	97.171.000
2	MIROTO	69.108.000		69.108.000	69.108.000
3	BANDARHARJO	82.426.000	25.360.000	107.786.000	107.786.000
4	BULU LOR	78.484.000	11.655.000	90.139.000	90.139.000
5	HALMAHERA	74.745.000		74.745.000	74.745.000
6	BUGANGAN	46.996.000		46.996.000	46.996.000
7	KARANGDORO	59.817.000	6.500.000	66.317.000	66.317.000
8	PANDANARAN	90.946.000	6.500.000	97.446.000	97.446.000



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

9	LAMPER TENGAH	53.950.000		53.950.000	53.950.000
10	KARANG AYU	52.951.000	5.500.000	58.451.000	58.451.000
11	LEBDOSARI	65.691.000		65.691.000	65.691.000
12	MANYARAN	62.072.000		62.072.000	62.072.000
13	KROBOKAN	45.087.000		45.087.000	45.087.000
14	NG.SIMONGAN	44.538.000	6.300.000	50.838.000	50.838.000
15	GAYAMSARI	98.662.000	7.500.000	106.162.000	106.162.000
16	CANDI LAMA	64.438.000		64.438.000	64.438.000
17	KAGOK	65.721.000		65.721.000	65.721.000
18	PEGANDAN	95.230.000	6.500.000	101.730.000	101.730.000
19	GENUK	84.623.000	12.900.000	97.523.000	97.523.000
20	BANGET AYU	89.852.000	13.968.000	103.820.000	103.820.000
21	TLOGOSARI WETAN	111.462.000		111.462.000	103.862.000
22	TLOGOSARI KULON	110.609.000		110.609.000	110.609.000
23	KEDUNGMUNDU	130.450.000		130.450.000	130.450.000
24	ROWOSARI	78.152.000	25.260.000	103.412.000	103.362.000
25	NGESREP	64.845.000		64.845.000	64.845.000
26	PADANGSARI	60.432.000	5.700.000	66.132.000	62.812.000
27	SRONDOL	65.810.000	7.700.000	73.510.000	73.510.000
28	PUDAK PAYUNG	52.810.000	9.000.000	61.810.000	61.810.000
29	GUNUNG PATI	117.359.000	21.686.000	139.045.000	139.045.000
30	SEKARAN	69.878.000	20.000.000	89.878.000	89.878.000
31	MIJEN	115.247.000		115.247.000	115.247.000
32	KARANGMALANG	50.177.000		50.177.000	50.177.000
33	TAMBAKAJI	70.973.000		70.973.000	70.973.000
34	PURWOYOSO	52.069.000	9.000.000	61.069.000	54.608.000
35	NGALIAN	96.836.000	8.600.000	105.436.000	105.436.000
36	MANGKANG	62.643.000	6.271.000	68.914.000	68.914.000
37	KARANGANYAR	48.840.000		48.840.000	48.840.000
JUMLAH		2.775.000.000	222.000.000	2.997.000.000	2.979.569.000

9. Program Jamkesmas dan Jampersal

Program Jamkesmas untuk tahun 2010 pada periode 31 Desember 2010 sejumlah Rp1,600,389,480,- dan total penggunaan dana mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 sebesar Rp 1,148,214,599,- sisa dana sebesar Rp 452,174,881,- dikembalikan ke Kas Negara. Untuk Tahun 2012 mendapatkan Dana Jamkesmas dan Jampersal sebesar Rp 13,560,147,000,- yang telah diserap sebesar Rp 7,567,448,000,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5,992,699,000,- dikembalikan ke Kas Negara. Pada tahun 2014 tidak ada lagi dana untuk jampersal.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4.7.5 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tahun 2014 Dinas Pendidikan Kota Semarang memperoleh Dana BOS dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp97.901.355.000,00 yang diberikan kepada SD,SMP dan SMA/SMK Negeri. Anggaran BOS tersebut yang digunakan untuk operasional sekolah sebesar Rp86.304.680.042,00 dan untuk pembelian barang modal sebesar Rp6.594.845.221,00 yang nilainya menambah Aset Dinas Pendidikan Kota Semarang. Rincian Dana BOS tersebut adalah sebagai berikut:

NO	TINGKAT	DROPPING (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	SD	60,894,973,130,00	58,291,235,790,00	2,603,737,340,00
2	SMP	25,938,861,398,00	23,571,015,028,00	2,367,846,370,00
3	SMA	16,959,000,000,00	16,959,000,000,00	-
4	SMK	15,903,500,000,00	15,903,500,000,00	-
JUMLAH		97.901.355.000,00	114.724.750.818,00	4.971.583.710,00

Belanja Aset tersebut telah dimasukkan dalam laporan neraca tahun 2014
MENUNGGU DARI DIKNAS

4.7.6 Dana Blockgrant.

Blockgrant adalah sejumlah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu forum atau insitusi tertentu dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2014 Dinas Pendidikan Kota Semarang mendapat dana blockgrant dengan rincian sebagai berikut :

No	Tingkat	Dropping (Rp)	Belanja Non Aset	Belanja Aset	Sisa (Rp)
1	SD	3,045,521,680	-	3,045,521,680	-
2	SMP	2,336,994,000	-	2,336,994,000	-
3	SMA/SMK	3,327,329,850	-	1,915,284,700	1,412,045,150
JUMLAH		8.709.845.530	-	7.297.800.380	1,412,045,150

4.7.7 Dana Komite Sekolah / Dana Sumbangan Dari Orang Tua

Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

TINGKAT	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA
SD	26.528.000	26.528.000	-
SMP	122.995.000	37.176.000	85.819.000
SMA	8.322.321.348	7.055.099.000	1.267.222.348
SMK	1.647.743.739	1.223.832.185	423.911.554
JUMLAH	10.119.588.087	8.342.635.185	1.776.952.902



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan APBD tahun 2014 sangat dipengaruhi oleh Kondisi umum perekonomian Kota Semarang tahun 2014, berdasarkan data Semarang Dalam Angka 2013, secara makro dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Investasi, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
2. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan Kebijakan Pendapatan Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
 - b. Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun propinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Propinsi.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.
3. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang maka perlu diambil kebijakan Belanja Daerah. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut :
 - a. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pelaksanaan urusan pada tahun 2014 terdiri atas 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.
 - b. Banyaknya Kebutuhan pembangunan maka belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2014 dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015, capaian *Millenium Development Goals* (MDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dijabarkan dalam RKPD 2014.
4. Kebijakan Pembiayaan Daerah :
 - a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2014 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 - b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2014 berasal dari Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.
5. Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban APBD Tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah Neraca, LRA, LO, LAK, LPE, Laporan Perubahan Silpa, dan CALK.

6. Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014 target dan realisasinya sebagai berikut:

Target Pendapatan sebesar	Rp 2.865.509.578.000,00
Realisasi Pendapatan sebesar	Rp <u>3.166.016.041.565,00</u>
Selisih Lebih Pendapatan sebesar	Rp 300.506.463.565,00

7. Belanja APBD Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014 target dan realisasinya sebagai berikut :

Target Belanja sebesar	Rp 3.737.509.710.000,00
Realisasi Belanja sebesar	Rp <u>2.957.432.639.078,00</u>
Kurang Belanja sebesar	Rp (780.077.070.922,00)

8. Realisasi Belanja APBD Tahun 2014 target dan realisasi terdiri atas :

a. Belanja Pegawai	Rp 1.306.934.922.575,00
b. Belanja Barang	Rp 727.399.487.313,00
c. Belanja Bunga	Rp 250.000.000,00
d. Belanja Hibah	Rp 113.718.345.363,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp 6.301.500.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan	Rp 870.104.900,00
g. Belanja Modal	Rp 800.181.230.907,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp 1.777.048.020,00

Surplus pada laporan realisasi sebesar Rp208.583.402.487,00 merupakan pengurang realisasi pendapatan Rp3.166.016.041.565,00 dengan realisasi belanja Rp2.957.432.639.078,00.

9. Realisasi Pembiayaan APBD Tahun 2014 terdiri atas :

Penerimaan pembiayaan	Rp 912.721.021.842,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 48.095.579.353,00
Pembiayaan netto	Rp 864.625.442.489,00

10. Saldo anggaran lebih awal tahun 2013 Rp 912.721.021.842,00 dan saldo anggaran lebih akhir tahun 2014 Rp1.073.208.844.976,00

11. Realisasi Pendapatan operasional (LO) tahun 2014 mencapai sebesar Rp3.395.725.361.822,00

Realisasi Beban Operasional (LO) tahun 2014	Rp 2.560.159.333.173,00
Surplus dari operasi (LO)	Rp 835.566.028.649,00
Surplus dari non operasi (LO)	Rp 15.000,00
Pos luar biasa (LO)	Rp 0,00
Total Surplus (LO)	Rp 835.566.043.649,00

12. Total Aset pada Laporan Neraca Pemerintah Kota Semarang tahun 2014 sebesar Rp8.748.541.137.379,00 terdiri dari:

a. Aset Lancar	Rp 1.210.460.200.788,00
b. Investasi Jangka Panjang	Rp 78.105.882.735,00
c. Aset Tetap	Rp 13.717.885.116.131,00
d. Dana Cadangan	Rp 75.671.777.153,00
e. Aset Lainnya	Rp 92.404.780.977,00

13. Total Beban Penyusutan tahun 2014 Rp206.083.547.868,00. Akumulasi Penyusutan Aset tetap sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp1.537.847.035.780,00



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

14. Total Kewajiban Pemerintah Kota Semarang tahun 2014 Rp27.069.052.431,00 terdiri atas :
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Kewajiban jangka pendek | Rp 27.067.052.431,00 |
| b. Kewajiban jangka panjang | Rp 2.000.000,00 |
15. Saldo Ekuitas awal tahun 2014 Rp7.402.393.039.253,00 dan Saldo Ekuitas akhir tahun 2014 Rp15.147.458.705.353,00
16. Arus kas tahun 2014 terdiri dari :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Arus kas masuk aktivitas operasi sebesar | Rp 3.051.562.399.695,00 |
| b. dan arus kas keluar aktivitas operasi sebesar | Rp 2.068.758.178.978,00 |
| c. Arus kas masuk aktivitas investasi sebesar | Rp 795.290.500,00 |
| d. dan arus kas keluar aktivitas investasi sebesar | Rp 841.578.282.598,00 |
| e. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan | Rp 1.816.665.353,00 |
| f. Arus masuk kas aktivitas transitoris sebesar | Rp 81.556.478.940,00 |
| g. & arus keluar kas aktivitas transitoris sebesar | Rp 81.997.445.408,00 |
| h. Saldo akhir kas tahun 2014 sebesar | Rp 1.086.300.120.262,00 |
17. Alokasi Dana-dana baik dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi pada Pemerintah Kota Semarang realisasi tahun 2014 sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Dana Dekonsentrasi tahun 2014 sebesar | Rp 3.180.879.376,00 |
| b. Dana Tugas Pembantuan tahun 2014 sebesar | Rp 8.530.932.400,00 |
| c. Dana Urusan Bersama tahun 2014 sebesar | Rp 14.535.000,00 |
| d. RSU mempunyai saldo dana Jamkesmas tahun 2013 sebesar Rp157.379.294,00 dan dana Jamkesmas yang diserap pada tahun 2014 sebesar Rp 9.905.450.429,00 dan setor jasa giro sebesar Rp. 26.846.140,00. Saldo/sisa dana luncuran Jamkesmas pada tahun 2014 sebesar Rp. 142.294.170,00. Sisa Dana Luncuran tahun 2014 tersebut sudah disetor kembali ke Kas Negara | |
| e. Dana- dana diluar APBD Kota Semarang yang diperoleh Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2014 adalah sebagai berikut : | |
| - Dana WHO | Rp 10.270.000,- |
| - Dana Global fund | Rp 876.915.424,- |
| - Dana APBN | Rp 480.729.000,- |
| - Dana APBD PROVINSI | Rp 40.606.500,- |
| - BOK | Rp 2.997.000.000,- |
| - NLR (Netherlands Leprosy Relief) | Rp 2.700.000,- |
| - HCPI (HIV Coporation Program Indonesia) | Rp 42.395.000,- |





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2014**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

**Nomor : 36B/LHP/XVII.SMG/05/2015
Tanggal : 19 Mei 2015**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	v
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	1
1. Akun R/K Kasda - R/K Dinas dan R/K Aset - Dinas Aset Tidak Menunjukkan Hubungan Timbal Balik	1
2. Pengendalian Pengelolaan Kas pada UPTD Kasda Lemah.....	4
3. Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 untuk SD dan SMP Untuk Sekolah Swasta Sebesar Rp2.645.506.927,00 Dianggarkan pada Belanja Modal.....	9
4. Belanja Premi Asuransi Kendaraan Bermotor dan Gedung Bangunan Tidak Didasarkan pada Data Yang Valid	11
5. Dasar Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah, Hotel, Restauran, Hiburan dan Parkir Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah serta Pajak Restoran Tidak Dikenakan kepada Usaha Jasa Boga dan Katering.....	13
6. Pengendalian DPKAD Terhadap Laporan Akta/Risalah Lelang Notaris Lemah	16
7. Penatausahaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Kas Bendahara Pengeluaran di Seluruh Dinas Pemkot Semarang Belum Memadai	19
8. Pengelolaan Aset Tetap Kurang Memadai.....	22
9. Pengendalian dan Pengelolaan Kendaraan Pinjam Pakai Tidak Memadai	28
10. Pemerintah Kota Semarang Belum Memiliki Sistem dan Prosedur Pelaporan Dana BOS	31
11. Belanja Bahan Bakar Kendaraan dan Pelumas (Oli) Tidak Dilengkapi Bukti <i>Print Out</i> dari SPBU.....	32
12. Tarif Sewa Tanah eks Bengkok Dilakukan Berdasarkan Lelang dan Bukan Berdasarkan Pada Perda 3 Tahun 2012	34
13. Penyetoran Bunga/Bagi Hasil dan Pendapatan dari Biaya Administrasi Dana Bergulir Tidak Tertib	37
14. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan pada Tiga SKPD Kurang Memadai.....	39
15. Pemberian Hibah Berupa Barang Kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga Belum Didukung NPHD dan SK Walikota	43
16. Biaya Langsung Non Personil pada 3 Kegiatan Jasa Konsultansi di Dua SKPD Belum Diperhitungkan Secara at Cost dan Besarnya Biaya Langsung Non Personil Melebihi 40% Nilai Kontrak	45
17. Pemberian Honorarium Bagi PNS di Lingkungan Pemkot Semarang Melebihi Standar Satuan Harga Walikota	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hubungan RK Kasda dan RK Dinas.....	3
Tabel 2 Hubungan RK Aset dan RK Dinas Aset	3
Tabel 3 Rekening Giro Pemda per 31/12/2014.....	5
Tabel 4 LHP BPK Yang Berkaitan Dengan Kas Daerah.....	5
Tabel 5 Perjanjian/MOU Kepala DPKAD dengan Bank.....	6
Tabel 6 Layanan <i>Pick Up Service</i> Tahun 2014.....	7
Tabel 7 Daftar SD dan SMP Negeri dan/ atau Swasta Penerima Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013	10
Tabel 8 Premi Ganda Atas Kendaraan Bermotor.....	12
Tabel 9 Tanah dengan Luas 0 m ²	22
Tabel 10 Data PSU yang Sudah Diserahkan s.d. Tahun 2014	23
Tabel 11 Perbedaan Nilai Peralatan dan Mesin Antara Neraca dan KIB B	24
Tabel 12 Jumlah Kendaraan Bermotor Milik Pemda.....	24
Tabel 13 Perbedaan Nilai Gedung dan Bangunan Antara Neraca dan KIB C	25
Tabel 14 Perbedaan Aset Tetap Lainnya Antara Neraca dan KIB E	25
Tabel 15 Daftar Perjanjian Pinjam Pakai yang Telah Habis Jangka Waktunya	29
Tabel 16 Kendaraan Pinjam Pakai yang Diasuransikan	30
Tabel 17 Rekapitulasi Dana BOS	31
Tabel 18 Pembelian BBM Tidak Dilengkapi Bukti <i>Print Out</i> dari SPBU.....	33
Tabel 19 Selisih Lebih Penggunaan Solar Pertamina Dex.....	33
Tabel 20 Perhitungan Selisih Pengenaan Sewa dengan Sistem Lelang dan dengan Perda35	
Tabel 21 Perhitungan Pendapatan Petani Dalam Setahun Apabila Menggunakan Tarif Perda	35
Tabel 22 Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Pasar Klithikan Penggaron Tahap II.....	40
Tabel 23 Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Rejomulyo.....	40
Tabel 24 Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan GOR Tri Lomba Juang	42
Tabel 25 Rincian Biaya Non Personil.....	46
Tabel 26 Biaya Non Personil Melebihi 40% dari Nilai Kontrak	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hubungan Antara Jurnal dan Laporan Keuangan	1
Gambar 2 Hubungan R/K Kasda, R/K Dinas dan R/K Dinas Aset.....	2
Gambar 2 Mekanisme Penerimaan Daerah dan Pengembalian Belanja	6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Jurnal Saldo Awal Berdasarkan Akun Level 3
Lampiran 2	Rekapitulasi Jurnal LO Berdasarkan Akun Level 3
Lampiran 3	Rekapitulasi Jurnal Penyesuaian Berdasarkan Akun Level 3
Lampiran 4	Rekapitulasi Jurnal Penyesuaian Berdasarkan Akun Level 3
Lampiran 5	Transaksi RK Kasda di Jurnal LO dan Jurnal Penyesuaian
Lampiran 6	Transaksi RK Dinas pada Jurnal Penyesuaian PPKD
Lampiran 7	Transaksi RK Dinas Aset pada Jurnal Penyesuaian
Lampiran 8	Daftar Gedung dan Bangunan yang Diasuransikan Berbeda Dengan Data Dinas Pendidikan
Lampiran 9	Pajak Restoran Yang Dibayar Secara Konstan Setiap Bulannya
Lampiran 10	Pengusaha Jasa Boga/Katering yang Mendapat Pemesanan dari Sekretariat Daerah
Lampiran 11	Notaris/PPAT yang Tidak Melaporkan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah
Lampiran 12	Jumlah SP2D GU yang Nilainya Melebihi SP2D UP
Lampiran 13	SP2D UP Diberikan Lebih dari Satu Kali
Lampiran 14	Daftar Penyewa Tanah Eks Bengkok Tahun 2014



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan Atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 36A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 36C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015 tanggal 19 Mei 2015.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Semarang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Akun R/K Kasda - R/K Dinas dan R/K Aset - Dinas Aset Tidak Menunjukkan Hubungan Timbal Balik;
2. Pengendalian Pengelolaan Kas pada UPTD Kasda Lemah;
3. Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 untuk SD dan SMP Untuk Sekolah Swasta Sebesar Rp.2.645.506.927,00 Dianggarkan pada Belanja Modal;
4. Belanja Premi Asuransi Kendaraan Bermotor dn Gedung Bangunan Tidak Didasarkan pada Data Yang Valid;
5. Dasar Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah, Hotel, Restauran, Hiburan dan Parkir Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah yang Telah Ditetapkan serta Pajak Restoran Tidak

- Dikenakan kepada Usaha Jasa Boga dan Katering;
6. Pengendalian DPKAD Terhadap Laporan Akta/Risalah Lelang Notaris Lemah;
 7. Penatausahaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Kas Bendahara Pengeluaran di Seluruh Dinas Pemkot Semarang Belum Memadai;
 8. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Kurang Memadai;
 9. Pengendalian dan Pengelolaan Kendaraan Pinjam Pakai Tidak Memadai;
 10. Pemerintah Kota Semarang Belum Memiliki Sistem dan Prosedur Pelaporan Dana BOS;
 11. Belanja Bahan Bakar Kendaraan dan Pelumas (Oli) Tidak Dilengkapi Bukti Print Out dari SPBU;
 12. Tarif Sewa Tanah eks Bengkok Dilakukan Berdasarkan Lelang dan Bukan Berdasarkan Pada Perda 3 Tahun 2012;
 13. Penyetoran Bunga/Bagi Hasil dan Pendapatan dari Biaya Administrasi Dana Bergulir Tidak Tertib;
 14. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan pada Tiga SKPD Kurang Memadai;
 15. Pemberian Hibah Berupa Barang Kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga Belum Didukung NPHD dan SK Walikota;
 16. Biaya Langsung Non Personil pada 3 Kegiatan Jasa Konsultansi di Dua SKPD Belum Diperhitungkan Secara at Cost dan Besarnya Biaya Langsung Non Personil Melebihi 40% Nilai Kontrak;
 17. Pemberian Honorarium Bagi PNS di Lingkungan Pemkot Semarang Melebihi Standar Satuan Harga Walikota

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota agar :

1. Memerintahkan Kepala DPKAD supaya memperbaiki sistem dan prosedur pencatatan akun timbal balik RK Dinas - RK Kasda dan RK Dinas Aset/RK Aset;
2. Memerintahkan Kepala DPKAD untuk :
 - a. Meninjau kembali perjanjian dengan bank terkait jaminan keamanan layanan *pick up* kas tunai; dan
 - b. Meninjau kembali keberadaan layanan kas yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kas Daerah.
3. Memerintahkan TAPD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk tidak menganggarkan hibah barang kepada sekolah swasta di dalam belanja modal;
4. Memerintahkan Kepala DPKAD:
 - a. Melakukan peninjauan kembali atas kontrak asuransi terkait penamaan gedung sekolah;
 - b. Untuk menegur tim penyediaan jaminan BMD supaya lebih cermat dalam melakukan inventarisasi dan validasi BMD yang diasuransikan.
5. memerintahkan Kepala DPKAD untuk :
 - a. Melakukan meterisasi air kepada pelanggan secara bertahap;
 - b. Menginstruksikan Pemeriksa Pajak agar menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. Melakukan inventarisasi pengusaha jasa boga dan katering dan menetapkannya sebagai wajib pajak

6. Memerintahkan Kepala DPKAD untuk
 - a. Melakukan pemantauan terhadap ketertiban penyampaian laporan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang yang disampaikan oleh PPAT/Notaris; dan
 - b. Menagih denda atas keterlambatan penyampaian laporan senilai Rp171.000.000,00 dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah.
7. Menginstruksikan Kepala DPKAD untuk melaksanakan penatausahaan uang persediaan dan ganti uang persediaan sesuai dengan ketentuan;
8. Memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang untuk membuat surat edaran kepada Pengguna dan Pengurus Barang supaya melengkapi
 - 1) informasi di dalam KIB terkait kondisi dan luasan;
 - 2) membuat SOP terkait penyimpanan bukti kepemilikan kendaraan bermotor
 - b. Kepala DTKP untuk melakukan inventarisasi atas pengembang perumahan yang mempunyai kewajiban menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Semarang.
9. Memerintahkan Pengguna Barang untuk melakukan proses pinjam pakai sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan tidak menganggarkan asuransi *all risk* atas aset yang dipinjampaikan;
10. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala DPKAD membuat sistem dan prosedur pelaporan dana BOS.
11. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk membuat edaran yang mengatur mekanisme pembelian BBM yang menyertakan *print out* dari SPBU sebagai pertanggungjawaban;
12. Meninjau kembali Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha supaya mencerminkan harga sewa yang wajar
13. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk lebih tertib menyetorkan saldo yang tersimpan di dalam rekening penampungan bunga/bagi hasil ke kas daerah;
14. Memerintahkan Kepala Dinas Pasar, Direktur RSUD dan Kepala Dinas Tata Kota dan perumahan selaku Pengguna Anggaran untuk :
 - a. Menginstruksikan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan supaya lebih cermat dalam melaksanakan pemeriksaan pekerjaan yang diserahterimakan;
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan ketentuan.
15. Memerintahkan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan mempedomani dokumen kelengkapan hibah yang diatur dalam berbagai peraturan;
16. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dan Badan Keuangan Daerah untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban biaya langsung non personil; dan

- 17 Menginstruksikan kepada Kepala Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemkot Semarang dalam memberikan honorarium bagi Pegawai memedomani Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 19 Mei 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.A., C.I.A., C.F.E.
Akuntan, Register Negara No. D-17.698

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran (TA) 2014 mengungkapkan sebanyak tujuh belas temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut:

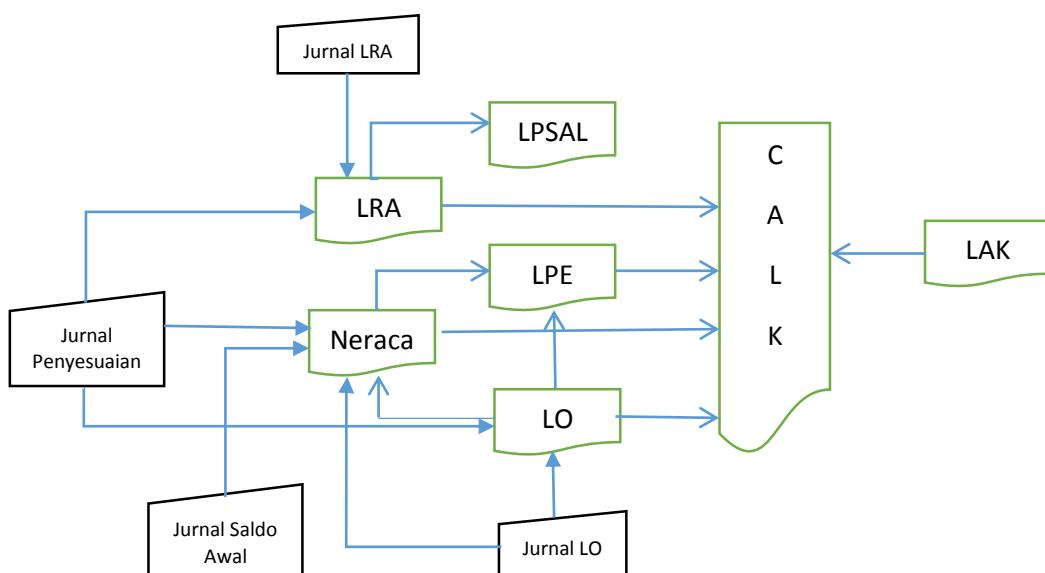
1. Akun R/K Kasda - R/K Dinas dan R/K Aset - Dinas Aset Tidak Menunjukkan Hubungan Timbal Balik

Dalam menyusun laporan keuangan akrual *unaudited*, Pemerintah Kota Semarang telah menggunakan empat jenis jurnal di luar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu :

- Jurnal Saldo Awal terdiri dari 1.285 transaksi. Rekapitulasi Jurnal Saldo Awal berdasarkan akun Level 3 dengan total nilai transaksi jurnal debet sebesar Rp10.470.858.168.662,00 dan kredit sebesar Rp10.470.858.168.662,00 dapat dilihat dalam lampiran 1;
- Jurnal LO terdiri dari 221.913 transaksi. Rekapitulasi Jurnal LO berdasarkan akun Level 3 dengan total nilai transaksi jurnal debet sebesar Rp23.136.784.770.627,00 dan kredit sebesar Rp23.136.784.770.627,00 dapat dilihat dalam lampiran 2;
- Jurnal LRA terdiri dari 102.509 transaksi. Rekapitulasi Jurnal LRA berdasarkan akun Level 3 dengan total nilai transaksi jurnal debet sebesar Rp5.875.961.859.556,00 dan kredit sebesar Rp5.875.961.859.556,00 dapat dilihat dalam lampiran 3; dan
- Jurnal Penyesuaian terdiri dari 2.061 transaksi. Rekapitulasi Jurnal LRA berdasarkan akun Level 3 dengan total nilai transaksi jurnal debet sebesar Rp36.939.281.890.875,00 dan kredit sebesar Rp36.939.281.890.875,00 dapat dilihat dalam lampiran 4.

Hubungan antar jurnal dan laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat dari gambar dibawah ini

Gambar 1 Hubungan Antara Jurnal dan Laporan Keuangan

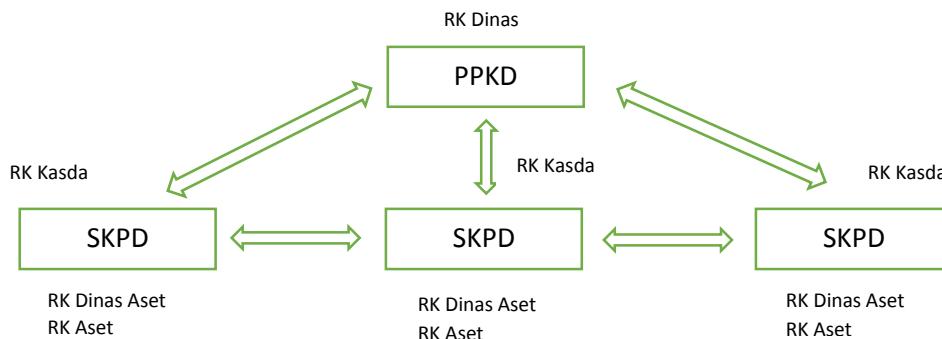


Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi Pemerintah Kota Semarang adalah struktur *home office* dan *branch office* (*hobo*). Struktur hubungan *hobo* ini menggambarkan transaksi antara PPKD dan SKPD yang mencerminkan satu kesatuan entitas dan diantara keduanya tidak terjadi transfer pendapatan.

Entitas akuntansi terdiri dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Antara PPKD dan SKPD dihubungkan dengan menggunakan akun *reciprocal* yaitu R/K Kasda (akun ekuitas di SKPD), akun R/K Dinas (akun aset di PPKD), dan RK Aset/RK Dinas Aset (akun aset di SKPD dan ekuitas di SKPD). Laporan Keuangan konsolidasi yang dibuat pada akhir tahun akan mengeliminasi semua akun *reciprocal* sehingga saldo RK Dinas, RK Kasda dan RK Dinas Aset seharusnya adalah Rp0,00.

Hubungan antara R/K Kasda - R/K Dinas dan R/K Aset - RK Dinas Aset dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 2 Hubungan R/K Kasda, R/K Dinas dan R/K Dinas Aset



Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Keluaran Jurnal Saldo awal tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Audited TA. 2013

Pemeriksaan atas jurnal saldo awal menunjukkan ada dua akun yang berbeda dengan laporan keuangan (audited) TA.2013 yaitu :

- 1) Saldo awal R/K Dinas Aset di kelompok akun Neraca per 31/12/2014 sebesar Rp5.570.181.011,00 sedangkan pada Neraca per 31/12/2013 saldonya Rp0,00;
- 2) Saldo awal Beban Barang dan Jasa di kelompok akun Laporan Operasional sebesar Rp5.456.550,00 yang terdiri dari Beban Bahan Pakai Habis sebesar Rp4.421.550,00 dan Beban Cetak dan Penggandaan sebesar Rp1.035.000,00 sedangkan saldo awal semua akun pada Laporan Operasional seharusnya Rp0,00.

b. Akun R/K Kasda dan R/K Dinas tidak menunjukkan hubungan timbal balik (*reciprocal*)

- 1) Transaksi RK Kasda dicatat pada Jurnal LO dan Jurnal Penyesuaian. RK Kasda digunakan untuk mencatat :
 - a) Debet sebesar Rp13.846.663.448.134,00 yang terdiri atas :
 - Setor pendapatan;
 - Setor sisa uang ke kas daerah;
 - Koreksi realisasi belanja/aset; dan

- Penyesuaian karena kesalahan saldo 2013.
- b) Kredit sebesar Rp3.182.658.923.699,00 yang terdiri atas :
- Terima SP2D UP/GU/TU/LS;
 - Koreksi setor pendapatan; dan
 - Penyesuaian giro bulan Februari 2014.
- 2) Transaksi RK Dinas dicatat hanya pada Jurnal Penyesuaian. RK Dinas digunakan untuk mencatat :
- a) Debet sebesar Rp17.354.794.592.029,00 yang terdiri atas :
 - Penerimaan kasda;
 - Pencairan SP2D UP/GU/TU;
 - Pencairan Giro dan penyesuaian jasa giro; dan
 - Pencairan Deposito.
 - b) Kredit sebesar Rp17.408.808.368.718,00 yang terdiri atas :
 - Penerimaan deposito;
 - Penerimaan giro; dan
 - Penerimaan STS.

Tidak adanya hubungan *reciprocal* antara RK Kasda dan RK Dinas dapat dianalisis dengan tabel di bawah ini.

Tabel 1 Hubungan RK Kasda dan RK Dinas

No	Akun	Nilai (Rp)
a.	RK Kasda (Debet)	13.846.663.448.134,00
	RK Dinas (Kredit)	(17.408.808.368.718,00)
	Selisih	(3.562.144.920.584,00)
b.	RK Kasda (Kredit)	3.182.658.923.699,00
	RK Dinas (Debet)	(17.354.794.592.029,00)
	Selisih	(14.172.135.668.330,00)

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran 5 dan lampiran 6

c. Akun R/K Aset dan RK Dinas Aset tidak menunjukkan hubungan timbal balik (*reciprocal*)

R/K Dinas Aset merupakan akun untuk mencatat mutasi masuk dan keluar aset tetap antar SKPD. Tidak ada adanya hubungan reciprocal antara RK Aset dan RK Dinas Aset dapat dianalisis dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2 Hubungan RK Aset dan RK Dinas Aset

Akun	Nilai (Rp)
RK Dinas Aset (Debet)	23.337.842.550
RK Dinas Aset (Kredit)	(13.766.120.450)
RK (Kredit)	(5.570.181.011)
Selisih	27.339.383.639

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran 7.

d. Penyesuaian Eliminasi RK Dinas dan RK Kasda di dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dijelaskan

LPE Pemerintah Kota Semarang tahun 2014 menunjukkan terdapat penyesuaian eliminasi R/K Dinas dan R/K Kasda sebesar Rp1.959.062.115,00. Atas penyesuaian eliminasi tersebut sampai dengan pemeriksaan berakhir belum dapat dijelaskan.

Kesalahan entry jurnal tersebut telah disadari DPKAD sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang TA.2014 dibuat dengan mengabaikan akun *reciprocal*. Selisih antara buku besar kas daerah yang dihasilkan dari jurnal di bidang akuntansi DPKAD dengan pencatatan kas secara fisik oleh UPTD Kasda dieliminasikan dengan selisih R/K

Dinas dan R/K Kasda di ekuitas. Namun eliminasi tersebut masih menyisakan selisih R/K Dinas dan R/K Kasda sebesar Rp1.959.062.115,00 di ekuitas.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.12 PSAP 11 – 2 baris 17 yang menyatakan bahwa Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Permasalahan tersebut mengakibatkan rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar di dalam Laporan Perubahan Ekuitas tidak wajar.

Hal ini disebabkan karena kesalahan *entry jurnal* pada SKPD dan PPKD.

Atas permasalahan tersebut Kabid Akuntansi menyatakan setuju RK Kasda, RK Dinas dan RK Dinas Aset belum menunjukkan hubungan timbal balik. Hasil penelusuran sementara menunjukkan beberapa kesalahan jurnal sehingga yang masih belum dapat ditelusuri sebesar Rp1.959.062.115,00 di Laporan Perubahan Ekuitas.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD supaya memperbaiki sistem dan prosedur pencatatan akun timbal balik RK Dinas - RK Kasda dan RK Dinas Aset/RK Aset.

2. Pengendalian Pengelolaan Kas pada UPTD Kasda Lemah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 11 mengatur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Salah satu wewenang PPKD dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 7 ayat 2 huruf j adalah melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi. Pemerintah Kota Semarang mendelegasikan tugas PPKD ini kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tanggal 1 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. DPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu organ di dalam DPKAD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kas Daerah. UPTD Kas Daerah ini yang melaksanakan wewenang untuk menempatkan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi sesuai Peraturan Walikota No. 88 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kas Daerah Kota Semarang, yaitu pada pasal 5 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kas Daerah mempunyai fungsi sebagaimana diungkapkan dalam huruf f, yaitu pelaksanaan keseimbangan likuiditas dan pemberdayaan kas.

Berikut ini disajikan saldo Rekening Koran Giro Kasda per 31 Desember 2014 beserta fungsi dan statusnya.

Tabel 3 Rekening Giro Pemda per 31/12/2014

No	Bank	Saldo 31/12/2014 (Rp)	Fungsi	Status
1	BPD Jateng 1-021-0006-8 PAD	306.478.765.918,00	Penerimaan daerah, Pengembalian belanja, Pengeluaran SP2D	Aktif
2	Bank Mandiri 135-00-0205417-7	2.211.512,00	Penerimaan PAD	Aktif
3	Bank Muamalat 5-010-011710	0,00	-	Tutup rekening 06/06/2014
4	Bank CIMB Niaga 015-01-0075-009	0,00	-	Tutup rekening 20/03/2014
5	BRI Patimura 0000083-01-000503-30-1	0,00	-	Tutup rekening 10/10/2014
6	BTN Cab. Smg 00013-01-30-000419-5	972.000,00	-	Aktif
7	BNI Cab. Karangayu 29045202	8.893.950,00	Penerimaan PAD	Aktif
8	BTPN 3863000028	0,00	-	Aktif
9	Bank Syariah Mega 10000024890	0,00		Tutup rekening 20/02/2014

Banyaknya rekening kasda yang mempunyai fungsi seperti Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) menjadi permasalahan sebagaimana diungkapkan di dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah T.A.2009 s.d. T.A. 2013. Berikut disajikan LHP BPK yang berkaitan dengan pengelolaan rekening kas daerah.

Tabel 4 LHP BPK Yang Berkaitan Dengan Kas Daerah

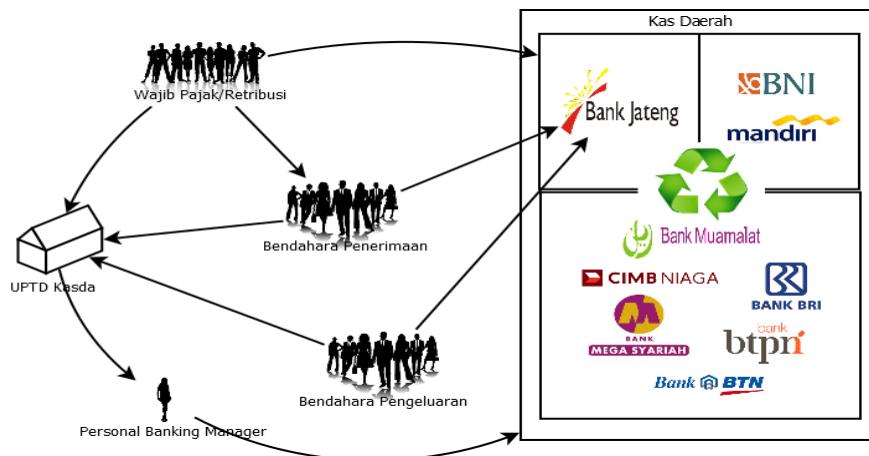
No	LHP BPK	Judul	Rekomendasi
1	No.121B/R/LHP/XVIII.SMG/05/2010 Tanggal 27 Mei 2010	Rekening Bank Milik Pemerintah Kota Semarang Terlalu Banyak	Walikota Semarang agar memerintahkan BUD untuk menempatkan dana kas milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	No.56B/LHP/XVIII.SMG/05/2011 Tanggal 24 Mei 2011	Pengendalian Atas Pengelolaan Kas Oleh BUD Kurang Memadai Sub judul : Pengelolaan Rekening Kas Daerah Belum Tertib	Walikota Semarang agar memerintahkan BUD melakukan evaluasi atas pelaporan dan pencataan rekening kas daerah dan melaporkannya kepada Walikota
3	36B/LHP/XVIII/SMG/5/2014 Tanggal 10 Mei 2014	Implementasi Treasury Single Account (TSA) Dalam Pengelolaan Kas Belum Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan	Walikota Semarang agar <ol style="list-style-type: none"> Menutup rekening-rekening yang bersifat seperti RKUD sehingga hanya ada satu rekening RKUD yang ditetapkan oleh Walikota Memerintahkan Kepala DPKAD untuk mengevaluasi perjanjian kerjasama dengan Bank atas pengelolaan rekening penerimaan perdapatannya sehingga seluruh penerimaan disetor setiap hari ke RKUD

UPTD Kas Daerah telah membentuk pelayanan penerimaan kas secara tunai untuk menampung berbagai penerimaan daerah dan pengembalian belanja. Mekanisme penerimaan daerah dan pengembalian belanja adalah :

- Wajib pajak dan retribusi daerah menyetorkan langsung ke RKUD;
- Wajib pajak dan retribusi daerah menyetorkan ke Bendahara Penerimaan kemudian Bendahara Penerimaan menyetorkan langsung ke RKUD;
- Wajib pajak dan retribusi daerah menyetorkan ke Bendahara Penerimaan kemudian Bendahara Penerimaan menyetorkan ke kasir UPTD Kas Daerah DPKAD lalu UPTD Kas Daerah menyetorkan ke RKUD;
- Wajib pajak dan retribusi daerah menyetorkan ke kasir UPTD Kas Daerah DPKAD kemudian UPTD Kas Daerah menyetorkan ke RKUD;
- Bendahara Pengeluaran menyetorkan langsung ke RKUD; dan

- f. Bendahara Pengeluaran menyetorkan ke kasir UPTD Kas Daerah DPKAD lalu UPTD Kas Daerah menyetorkan ke RKUD.

Gambar 3 Mekanisme Penerimaan Daerah dan Pengembalian Belanja



Hasil pemeriksaan atas pengelolaan kas menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. **Treasury Single Account belum diterapkan**

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang mempunyai 9 rekening giro pada 9 bank yang berbeda. Semua rekening mempunyai fungsi sebagai RKUD diantaranya :

- Penerimaan daerah dari wajib pajak/retribusi masih mengendap di rekening-rekening giro; dan
- UPTD Kas Daerah masih menyetor penerimaan yang diterimanya ke rekening-rekening giro.

b. **Tidak ada tanda validasi dari mesin terhadap slip setoran tunai dari UPTD Kas Daerah ke rekening giro Pemda**

Slip setoran dari UPTD Kas Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala UPTD Kasda atau yang mewakili dengan petugas bank yang datang melalui layanan *cash pick up*.

c. **Tidak ada klausul adanya cash pick up di Perjanjian atau MOU antara Kepala DPKAD dengan Bank**

Pemerintah Daerah dalam hal ini DPKAD telah melakukan perjanjian atau MOU dengan bank tempat penampungan uang kas daerah yaitu :

Tabel 5 Perjanjian/MOU Kepala DPKAD dengan Bank

No	Bank	Perjanjian/MOU
1	BPD Jateng 1-021-0006-8 PAD	019.6/2731/2013 atau 0009/HT.01.02/021/2013
2	Bank Mandiri 135-00-0205417-7	900/4645/2014 atau CBC.SMG/0246/2014
3	BRI Patimura 0000083-01-000503-30-1	900/5647/2014 atau B.8613/KC-VIII/PEM/12/2014
4	BTN Cab. Smg 00013-01-30-000419-5	900/4648/2014 atau 16/PKS SM.UT/CMFU/XII/2014
5	BNI Cab. Karangayu 29045202	900/4646/2014 atau KRU/05/015/214
6	BTPN 3863000028	027/832/2011 atau 13/DPG/PK/VI/2011
7	Bank Syariah Mega 10000024890	900/4650/2014 atau SD165/RSMG/14

Setiap hari UPTD Kas Daerah melakukan penyetoran uang yang diterimanya ke bank melalui layanan *cash pick up* dimana pihak bank mendatangi kantor UPTD Kasda

untuk melakukan transaksi. Transaksi dilakukan dengan mengisi slip setoran dan diterima oleh petugas bank.

Tabel 6 Layanan *Pick Up Service* Tahun 2014

No	Bank	Frekuensi	Total (Rp)	Tanggal Terakhir
1	BPD Jateng 1-021-0006-8 PAD	246	235.483.367.696,00	31/12/2014
2	Bank Mandiri 135-00-0205417-7	14	2.700.000.000,00	07/05/2014
3	Bank Muamalat 5-010-011710	7	1.350.000.000,00	10/04/2014
4	Bank Niaga 015-01-0075-009	1	200.000.000,00	06/02/2014
5	BRI Patimura 0000083-01-000503-30-1	11	2.150.000.000,00	18/03/2014
6	BTN Cab. Smg 00013-01-30-000419-5	19	5.450.000.000,00	29/04/2014
7	BNI Cab. Karangayu 29045202	13	3.850.000.000,00	05/05/2014
8	BTPN 3863000028	7	2.000.000.000,00	06/05/2014
9	Bank Syariah Mega 10000024890	2	531.812.136,00	13/02/2014

Perjanjian/MOU antara Kepala DPKAD dengan bank hanya mengatur tentang pembukaan rekening giro sebagai penerimaan setoran tunai dan pemindahbukuan, pengiriman uang/transfer kepada pihak ketiga atau rekening pemkot yang ditunjuk, layanan pengiriman informasi saldo dan pencetakan salinan koran kas umum, dan penempatan dana deposito berjangka satu bulan dan dapat diperpanjang. Sedangkan layanan *cash pick up* tidak diatur dalam perjanjian/MOU.

d. Layanan penerimaan kas secara tunai dilakukan oleh UPTD Kas Daerah, bukan oleh Bendahara Penerimaan

Pada setiap awal tahun anggaran, Walikota Semarang mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. UPTD Kas Daerah melaksanakan layanan penerimaan kas tunai yang berasal dari wajib pajak maupun wajib retribusi dan pengembalian belanja dari Bendahara Pengeluaran di kantor UPTD Kasda. Penerimaan kas tunai dilakukan oleh kasir di *front office* kemudian diverifikasi dan ditatausahakan oleh pegawai di sub bagian tata usaha. Setiap hari uang yang telah terkumpul disetorkan ke bank. Fungsi penerimaan, penyimpanan, penyetoran kas tunai sebenarnya merupakan tugas dari Bendahara Penerimaan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pada :

a. Pasal 1

- angka 5 Rekening Kas Umum Daerah yang menyatakan bahwa rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- angka 11 Bendahara Penerima yang menyatakan bahwa orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah;

b. Pasal 18

- Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penunjukkan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan; dan
- Ayat (4) yang menyatakan bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup
 - 1) Jenis pelayanan yang diberikan;
 - 2) Mekanisme pegeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - 3) Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - 4) Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - 5) Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - 6) Kewajiban menyampaikan laporan;
 - 7) Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - 8) Tata cara penyelesaian perselisihan.

c. Pasal 19

- Ayat (1) yang menyatakan bahwa BUD/Kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah; dan
- Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimannya dilimpahkan ke RKUD sekurang-kurangnya sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan :

- a. Proses penerimaan kas tunai pada UPTD Kas Daerah memerlukan waktu lebih lama daripada melalui bendahara penerimaan atau langsung ke kas daerah; dan
- b. Tidak adanya jaminan dari bank terkait layanan *cash pick up* berpotensi dapat merugikan Pemerintah Daerah.

Hal ini disebabkan :

- a. Kepala DPKAD selaku BUD belum menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait banyaknya rekening giro bank yang berfungsi sebagai RKUD;
- b. Perjanjian antara BUD dan bank tidak lengkap dan jelas, khususnya layanan cash pick up; dan
- c. Layanan penerimaan kas yang dilakukan UPTD Kas Daerah tidak efisien.

Atas permasalahan tersebut Kepala DPKAD menyatakan sebagai berikut.

- a. Secara bertahap akan dilakukan penihilan saldo pada tahun 2014, sedangkan mulai tanggal 9 Mei 2014 Kasda hanya menyertorkan penerimaan Rekening Kas Umum Daerah ke Bank Jateng;
- b. Melakukan tindak lanjut atas Layanan *cash pick up* dengan mitra kerja Pemerintah Kota Semarang dan MoU antara DPKAD dengan Bank Jateng;
- c. Fungsi penerima, penyimpanan, penyetoran kas tunai yang menjadi tanggungjawab Sub Bagian Tata Usaha akan dialih fungsikan ke Bendahara Penerimaan;

- d. Adanya loket pembayaran di UPTD Kasda diharapkan untuk mempercepat transaksi dari Wajib Pajak karena laporan harian dari Bank Jateng seringkali terlambat dan kurang jelas peruntukannya sehingga menyulitkan dalam menyusun laporan keuangan. Atas permasalahan tersebut kami masih dalam proses melakukan rapat MoU dengan bank terkait dengan pemindahbukuan dapat dilakukan tidak setiap hari dan bisa mengendap selama satu bulan dari bank mitra Pemerintah Kota dan segera dibuatkan Perwal; dan
- e. Terkait dengan loket pembayaran di Kas Daerah yang menyerupai bank menjadi nilai positif bagi Pemerintah Kota Semarang dan banyak kabupaten/kota yang melakukan studi komparasi untuk membentuk UPTD Kasda.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk :

- a. meninjau kembali perjanjian dengan bank terkait jaminan keamanan layanan *pick up* kas tunai; dan
- b. meninjau kembali keberadaan layanan kas yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kas Daerah.

3. Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 untuk SD dan SMP Untuk Sekolah Swasta Sebesar Rp2.645.506.927,00 Dianggarkan pada Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan menganggarkan Belanja Modal berupa buku teks pelajaran kurikulum 2013 untuk SD dan SMP sebesar Rp6.793.167.577,00 dan telah direalisasikan seluruhnya. Alokasi dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2014. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar TA 2014 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4520/C/P/PP/2013.

Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB salah satunya adalah untuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru SD (tidak termasuk SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (tidak termasuk SMPLB). Apabila masih tersisa alokasi dana maka sisa dana DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB, SMP/ SMPLB dapat digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pengadaan peningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan rentang proporsi 35% s.d. 65% untuk mencapai 100% sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota.

Pengadaan buku tersebut mempergunakan kontrak payung antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Buku/ Jasa Pemerintah, yaitu :

- a. PT TSPM Nomor: 565 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014; dan
- b. PT MG Nomor: 900/7970 Tahun 2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Selanjutnya untuk pengadaan buku dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang mempergunakan kontrak dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pengadaan Buku Kurikulum SD melalui Surat Perjanjian Pembelian Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp4.252.981.915,00. Kontrak tersebut sudah dibayar dengan SP2D Nomor: 0126/LS/2014 tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp4.252.981.915,00; dan
- b. Pengadaan Buku Kurikulum SMP dengan Surat Perjanjian Pembelian Nomor 900/7970 Tahun 2014 tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp2.540.185.662,00. Kontrak

tersebut sudah dibayar dengan SP2D Nomor 0125/LS/2014/DAK tanggal 29 Desember 2014.

Buku tersebut didistribusikan kepada masing-masing sekolah penerima dengan bukti pendukung berupa Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa daftar sekolah penerima buku teks pelajaran kurikulum 2013 untuk SD dan SMP tidak hanya sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7 Daftar SD dan SMP Negeri dan/ atau Swasta Penerima Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013

No	Sekolah	Nilai (Rp)
1.	SD Negeri	2.965.735.168,00
2.	SD Swasta	1.287.246.747,00
3.	SMP Negeri	1.181.925.482,00
4.	SMP Swasta	1.358.260.180,00
	Jumlah	6.793.167.577,00

Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 yang diperuntukan bagi SD dan SMP Swasta melalui Belanja Modal sebesar Rp2.645.506.927,00 (Rp1.287.246.747,00 + Rp1.358.260.180,00) tidak tepat.

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan:

- a. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - 1) Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah”;
 - 2) “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan”.
- b. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diatur dalam Pasal 11 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD”.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan realisasi belanja modal sebesar Rp2.645.506.927,00 (Rp1.287.246.747,00 + Rp1.358.260.180,00) tidak menggambarkan substansi yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan dan TAPD dalam penyusunan anggaran kurang cermat dan tidak memedomani Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan temuan dari tim pemeriksa dan selanjutnya untuk pencatatan Aset Tetap Lainnya pada KIB E kami usulkan dalam koreksi atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2014.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan TAPD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk tidak menganggarkan hibah barang kepada sekolah swasta di dalam belanja modal.

4. Belanja Premi Asuransi Kendaraan Bermotor dan Gedung Bangunan Tidak Didasarkan pada Data Yang Valid

DPKAD Kota Semarang telah menganggarkan belanja premi asuransi untuk pengamanan kendaraan bermotor dan gedung bangunan. Belanja premi asuransi atas kendaraan bermotor direalisasikan melalui Biaya Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Milik Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.527.442.520,00 melalui SP2D No.8626/LS/2014/RT tanggal 23 Desember 2014 dan Biaya Premi Asuransi Pengadaan Jasa Asuransi Gedung dan Pasar Milik Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.628.966.357,00 melalui SP2D No.7219/LS/2014/RT tanggal 4 Desember 2014.

Kepala DPKAD telah membentuk Tim Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 2014 denga SK No.30/2078 tanggal 16 Mei 2014. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab tim adalah

- a. menginventarisasi dan memvalidasi barang milik daerah yang akan diasuransikan;
- b. melakukan penelitian atas nilai barang milik daerah yang akan diasuransikan; dan
- c. membuat pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan kepada Kepala DPKAD Kota Semarang.

Pemeriksaan atas dokumen perencanaan asuransi kendaraan bermotor dan gedung menunjukkan :

a. Premi ganda asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp23.077.700,00

Asuransi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, bekerjasama dengan PT AR Tbk dengan polis No. 4002211400116, harga pertanggungan sebesar Rp62.298.000.000,00, total premi sebesar Rp1.527.442.520,00, dan jangka waktu pertanggungan 25 Nopember 2014 s.d. 25 Nopember 2015 untuk kendaraan sebanyak 530 unit. Jaminan yang diberikan oleh penanggung meliputi tanggung jawab hukum tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor sebagai akibat risiko yang meliputi tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok, dan kebakaran, termasuk kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kebakaran akibat sambaran petir, kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, serta dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

Berdasarkan pemeriksaan atas data kendaraan ditemukan permasalahan bahwa atas polis tersebut terdapat premi ganda atas sembilan kendaraan dengan total premi sebesar Rp23.077.700,00.

Tabel 8 Premi Ganda Atas Kendaraan Bermotor

Norut	No Polisi	No Rangka	No Mesin	Jumlah Premi (Rp)
227	H 9523 JS	MHF11KF8030077851	FK.0576250	3.101.350,00
411	H 9567 RS	MR0AW12GX90016188	1TR6743877	1.679.400,00
660	H 9594 BG	MHF31KF6030025716	7K0632743	3.101.350,00
672	H 9540 QS	MHFC1JU43B5029655	W04DTRJ34507	2.532.600,00
673	H 9541 QS	MHFC1JU43B5029115	W04DTRJ34052	2.532.600,00
674	H 9545 QS	MHFC1JU43B5031215	W04DTRJ35897	2.532.600,00
675	H 9546 QS	MHFC1JU43B5031210	W04DTRJ35887	2.532.600,00
676	H 9547 QS	MHFC1JU43B5031352	W04DTRJ36056	2.532.600,00
677	H 9548 QS	MHFC1JU43B5030459	W04DTRJ35046	2.532.600,00
			Jumlah	23.077.700,00

b. Gedung sekolah yang diasuransikan tidak sesuai dengan data sekolah Dinas Pendidikan

Premi Asuransi Pengadaan Jasa Asuransi Gedung dan pasar Milik Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan PT AJI (Persero) dengan jangka waktu satu tahun (19 Desember 2014 s.d. 19 Desember 2015). Atas premi ini telah dibayarkan sebesar Rp1.628.966.357,00 dengan SP2D No. 8626/LS/2014/RT tanggal 23 Desember 2014.

Premi gedung bangunan dan pasar terbagi atas empat polis, yaitu :

- 1) *Property All Risks Insurance* (Ritel Business) dengan Nomor Polis 407.229.200.14.00015/000/000 atas pertanggungan sebesar Rp802.341.490.103,00 dan nilai premi sebesar Rp672.204.733,00.
 - 2) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (Risiko Pasar) Nomor Polis 407.205.200.14.00021/000/000 atas pertanggungan sebesar Rp34.226.290.249,00 dan nilai premi sebesar Rp902.753.194,00.
 - 3) *Property All Risks Insurance (Corporate Business)* dengan Nomor Polis 407.297.200.14.00019/000/000 atas pertanggungan sebesar Rp12.517.671.615,00 dan nilai premi sebesar Rp29.008.430,00.
- Terrorism & Sabotage Policy* dengan Nomor Polis 407.227.200.14.00001/000/000 atas pertanggungan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan nilai premi sebesar Rp25.000.000,00.

Pemeriksaan atas dokumen pelelangan diketahui bahwa terdapat 88 gedung sekolah dengan premi asuransi sebesar Rp180.205.991,00 yang penamaannya tidak mutakhir dan tidak sesuai dengan data sekolah menurut Dinas Pendidikan. Adapun rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran 8

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 :

- 1) Ayat 1 yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan
 - 2) Ayat 2 yang menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- b Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Ketiga tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 :
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp23.077.700,00 atas premi ganda terhadap kendaraan bermotor.

Permasalahan tersebut disebabkan Tim Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah Tahun 2014 tidak cermat dalam melakukan inventarisasi dan validasi Barang Milik Daerah yang akan diasuransikan.

Atas permasalahan tersebut Kepala DPKAD menyatakan bahwa atas 9 kendaraan bermotor yang *double* premi dengan total premi Rp23.077.700,00 telah dikonfirmasi ke perusahaan asuransi dan pihak asuransi menyatakan setuju dan siap untuk melakukan pengembalian. Pengembalian dari ke kas daerah telah dilakukan secara transfer dari PT AR pada 21 Mei 2015 sebesar Rp23.077.700,00.

- BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD:
- a. melakukan peninjauan kembali atas kontrak asuransi terkait penamaan gedung sekolah;
 - b. untuk menegur tim penyediaan jaminan BMD supaya lebih cermat dalam melakukan inventarisasi dan validasi BMD yang diasuransikan.

5. Dasar Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah, Hotel, Restauran, Hiburan dan Parkir Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah serta Pajak Restoran Tidak Dikenakan kepada Usaha Jasa Boga dan Katering

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp791.509.586.089,00 atau sebesar 123,15% apabila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp642.700.000.000,00. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak membagi Pajak Daerah berdasarkan pemungutan yaitu dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*) dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*).

Self Assesment memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB. Pajak ini ditetapkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD tersebut merupakan dasar bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain wajib pajak kurang bayar atau tidak bayar maka kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah pembayaran konsumen yang dibayar kepada wajib pajak.

Sedangkan pada *Official Assesment*, sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assesment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada pajak jenis ini Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), kemudian SPOP tersebut menjadi dasar bagi Walikota untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau SKPD. Dasar pengenaan pajaknya adalah NJOP untuk PBB, perolehan air tanah untuk pajak air tanah dan nilai sewa reklame untuk pajak reklame. Apabila sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak kurang atau tidak bayar maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pajak Air Bawah Tanah, Hotel, Restauran, Hiburan, dan Parkir diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Pajak air bawah tanah dibayar secara konstan setiap bulannya

Berdasarkan data aplikasi pendapatan atau SIMPAD, diketahui bahwa pembayaran pajak air bawah tanah pada beberapa Wajib Pajak Daerah (WPD) memiliki nilai yang konstan/*flat* selama satu tahun. Nilai tersebut dihitung berdasarkan SKPD yang didasarkan pengisian formulir pemakaian air bawah tanah yang telah diisi oleh WP.

Dari hasil pemeriksaan diketahui :

- 1) tidak ada meteran air terpasang di tempat WP;
- 2) meteran air terpasang namun rusak; dan
- 3) WPD tidak mengetahui bahwa dasar pembayaran pajak adalah berdasarkan meteran yang terpasang.

WPD yang membayar pajak air tanah secara konstan setiap bulannya dapat dilihat dalam lampiran 9.

b. Penetapan SKPD KB pada pajak Hotel, Restauran, Hiburan dan Parkir berdasarkan asumsi/judgement pemeriksa pajak.

DPKAD secara berkala melakukan pemeriksaan pajak daerah yang pungutanya melalui *self assessment* diantaranya Pajak Hotel, Restauran, Hiburan dan Parkir. Setelah dilakukan pemeriksaan apabila terdapat pajak yang kurang bayar maka diterbitkan SKPD KB. Penentuan SKPD KB dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam asumsi. Asumsi tersebut dilakukan oleh pemeriksa pajak karena wajib pajak tidak dapat memperlihatkan nota bukti penjualan pada saat pemeriksaan pajak dilakukan.

Asumsi tersebut antara lain:

- 1) Okupansi minimum menurut PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) yang memperhitungkan batas pendapatan hotel agar memiliki kelangsungan usaha adalah 40% dari total kamar terjual; dan
- 2) Estimasi rata-rata pendapatan ketika *peak session* dan *low session*.

c. Usaha Jasa Katering belum dikenakan Pajak Restoran

Pemeriksaan terhadap daftar WPD menunjukkan bahwa DPKAD belum pernah menerbitkan NPWPW terhadap WPD yang bergerak di bidang jasa boga dan katering. Hasil uji petik terhadap transaksi pembelian konsumsi melalui penyedia jasa katering pada Sekretaris Daerah dengan nilai transaksi minimal Rp15.000.000,00 diketahui bahwa atas penjualan dari jasa katering belum dikenakan pajak restoran. Rincian pengusaha katering yang belum dikenakan Pajak Restoran dapat dilihat dalam lampiran 10.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah pada Pasal 5 ayat (5) yang menyatakan bahwa untuk mengetahui volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan secara objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, maka diwajibkan untuk menyediakan meteran air yang pemasangan dan pembayarannya menjadi tanggung jawab wajib pajak;
- b. Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 33
 - ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka pengawasan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penungguan atau menempatkan peralatan manual maupun program aplikasi *online* sistem pada objek pajak;
 - ayat (2) yang menyatakan bahwa Penungguan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka pemantauan dan penghitungan potensi Objek Pajak secara nyata; dan
 - ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam rangka penghitungan potensi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak harus menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran pada pasal 1 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan (5) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, pedagang kaki lima bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk Dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, pada

- pasal 1, yang menyatakan bahwa Pengertian Jasa Boga atau Katering adalah : jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- pasal 2, yang menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering adalah penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung/pesanan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Semarang berpotensi kehilangan pendapatan dari Pajak Air Bawah Tanah, Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir.

Permasalahan tersebut disebabkan :

- a. WPD ABT tidak memperoleh pemahaman tentang dasar pengenaan pajak ABT;
- b. Petugas pemeriksa pajak tidak menaati ketentuan yang berlaku; dan
- c. Kurangnya sosialisasi pajak restoran kepada pengusaha jasa boga dan katering.

Atas permasalahan tersebut Kepala Bidang Pajak Daerah DPKAD menyatakan sependapat dengan temuan dari tim pemeriksa, selanjutnya kami tindaklanjuti dengan :

- a. Memberikan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan meteran air guna mengetahui volume air yang diambil dan dimanfaatkan;
- b. Akan dilakukan pemberian terkait dengan kualitas SDM pemeriksa pajak pada DPKAD melalui Bimtek dan Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak; dan
- c. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pengusaha jasa katering tentang pengenaan pajak restoran terhadap jasa katering.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk :

- a. Melakukan meterisasi air kepada seluruh pelanggan secara bertahap;
- b. Menginstruksikan Pemeriksa Pajak supaya menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan; dan
- c. Melakukan inventarisasi pengusaha jasa boga dan katering dan menetapkannya sebagai wajib pajak.

6. Pengendalian DPKAD Terhadap Laporan Akta/Risalah Lelang Notaris Lemah

Realisasi pendapatan Pajak Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2014 pada Kota Semarang adalah sebesar Rp254.085.540.258,00 atau sebesar 135,15% dari anggaran sebesar Rp188.000.000.000,00 BPHTB merupakan jenis pajak *Self Assesment* dimana pemungutan atas pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB). Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Perda No. 2 Tahun 2011 tentang BPHTB dan khusus untuk mekanisme pemungutannya telah dikeluarkan Peraturan Walikota Semarang No. 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.2 tahun 2011.

Pemungutan BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara tidak langsung melibatkan PPAT/Notaris, kepala kantor bidang pertanahan dan pelayanan lelang negara dimana :

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak;
- b. Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak; dan
- c. Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara memiliki kewajiban melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Selain itu PPAT/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara mempunyai tugas :

- a. menerima SSPD-BPHTB dari DPPKAD;
- b. menghitung nilai BPHTB terutang setelah kelengkapan dan kebenaran data objek pajak terpenuhi;
- c. mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir SSPD-BPHTB; dan
- d. menyerahkan SSPD BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak. Selanjutnya Wajib Pajak membayar BPHTB kepada DPPKAD.

Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan apabila nilai NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB. Selanjutnya BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Jumlah PPAT di Kota Semarang menurut BPN adalah 193 orang dan jumlah notaris menurut website Kementerian Hukum dan HAM adalah 39 orang. Berdasarkan agenda surat masuk DPKAD diketahui terdapat 57 PPAT dan Notaris yang belum melaporkan kepada Walikota Semarang selama tahun 2014. Rincian Notaris/PPAT yang tidak menyampaikan laporan dapat dilihat pada lampiran 11.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada :
 - 1). Pasal 92
 - Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan

- Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 2). Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- b. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pada :
- 1). Pasal 1
 - angka 9 yang menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - angka 10 yang menyatakan bahwa Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 - 2). Pasal 28
 - Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak;
 - Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak; dan
 - Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
 - 3). Pasal 29
 - Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
 - Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Permasalahan tersebut mengakibatkan denda atas ketidaktertiban penyampaian laporan PPAT/Notaris belum terpungut sebesar Rp171.000.000,00 (57 x 12 x Rp250.000,00).

Hal tersebut disebabkan Kepala DPPKAD tidak melakukan pemantauan secara maksimal tentang ketertiban penyampaian laporan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang yang disampaikan oleh PPAT/Notaris.

Atas permasalahan tersebut Kepala Bidang Pajak Daerah DKPAD menyatakan sependapat dengan temuan dari tim pemeriksa, selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan :

- a. Melakukan penatausahaan *database* notaris/PPAT se-Kota Semarang dengan meminta data rinci nama dan alamat di SK Pengangkatan sebagai Notaris/PPAT di Kota Semarang; dan
- b. Penyampaian surat kepada KPKNL, Notaris dan PPAT perihal instruksi untuk memberikan seluruh laporan risalah lelang setiap bulan. Apabila ada keterlambatan penyampaian akan dikenakan denda sebesar Rp250.000,00 setiap laporan.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk

- a. melakukan pemantauan terhadap ketertiban penyampaian laporan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang yang disampaikan oleh PPAT/Notaris; dan
- b. menagih denda atas keterlambatan penyampaian laporan senilai Rp171.000.000,00 dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah.

7. Penatausahaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Kas Bendahara Pengeluaran di Seluruh Dinas Pemkot Semarang Belum Memadai

Pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014, saldo kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp9.135.385.241,00, yang terdiri dari Utang Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp86.858.996,00, sisa dana Jaminan Kesehatan Nasional Rp4.865.498.553,00 dan sisa kas/GU di bendahara pengeluaran sebesar Rp3.762.770.920,00.

Mekanisme pengajuan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) menurut Peraturan Walikota Semarang No. 50 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 adalah :

- a. Bendahara Pengeluaran mengajukan UP pertama kali sebesar 1/12 dari anggaran yang telah disetujui dalam APBD sebagai pembayaran kegiatan, selanjutnya jika dana tersebut habis maka diajukan ganti uang persediaan (GU);
- b. UP bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; dan
- c. GU digunakan sebagai pengganti uang persediaan dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Hasil *walkthrough* pada bagian perpendaharaan dan verifikasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pengendalian yang telah dilakukan bagian perpendaharaan DPKAD adalah menerbitkan SPP GU apabila bendahara pengeluaran sudah mempertanggungjawabkan minimal 75% dari dana yang diambil sebelumnya; dan
- b. SPP GU diajukan oleh Bendahara Pengeluaran bukan untuk pengganti uang persediaan yang sudah digunakan, melainkan diajukan jika kegiatan akan dilaksanakan. Dengan demikian jika pada bulan-bulan tertentu akan dilaksanakan kegiatan bersamaan, maka nominal GU akan melebihi UP yang ditentukan.

Hasil pemeriksaan diketahui sebagai berikut:

a. Jumlah SPP GU lebih besar dari jumlah SPP-UP.

Pada saat pengajuan SPP-UP, SKPD harus mengisi mata anggaran kegiatan yang diajukan sehingga apabila mata anggaran kegiatan belum diajukan pada saat

UP maka SKPD harus mengajukan lagi pada saat permintaan SPP-GU. Hasil penelusuran rekening koran bendahara pengeluaran beberapa SKPD diketahui bahwa SPP-GU lebih besar nilainya daripada SPP-UP sebagaimana pada lampiran 12.

GU merupakan pengisian kembali (*revolving*) atas UP, sehingga seharusnya pengisian kembali tidak lebih besar dari pengisian pertama (UP).

b. Uang Persediaan diberikan dua kali.

Berdasarkan realisasi SP2D diketahui bahwa masing-masing SKPD telah mendapatkan realisasi uang persediaan sebanyak dua kali terdiri dari UP rutin dan UP kegiatan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran 13.

c. Bukti pembayaran lebih banyak dari pada UP/GU yang dimiliki bendahara

Berdasarkan pemeriksaan *cash opname* pada Dinas Kesehatan Kota (DKK) dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTKP) diketahui terdapat SPJ/Bukti pembayaran yang lebih banyak dari pada kas yang diperoleh bendahara selama tahun 2015. Hal tersebut disebabkan SKPD harus mengejar target realisasi GU lebih dari 75% untuk pengajuan GU berikutnya sehingga melampirkan SPJ yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai pengajuan GU. Selain itu, kelebihan SPJ disebabkan bendahara menggunakan uang pribadi sebelum GU yang diajukan disetujui.

d. SPJ GU akhir tahun masih belum dipertanggungjawabkan

Menurut data verifikasi perpendaharaan, diketahui bahwa Kelurahan Miroto, Bulu Lor dan Rejosari hingga tanggal pemeriksaan berakhir belum mempertanggungjawabkan UP/GU yang telah diterima. Di samping itu saat tim BPK melakukan pemeriksaan pendahuluan diketahui bahwa SPJ kegiatan reses anggota DPRD pada Sekretariat DPRD belum diverifikasi oleh PPK SKPD. Pemeriksaan lebih lanjut atas pertanggungjawaban biaya reses diketahui bahwa pertanggungjawaban senilai Rp405.074.500,00 belum didukung dengan bukti yang memadai yaitu :

- 1) Sewa gedung beserta perlengkapannya sebesar Rp145.225.000,00;
- 2) Jamuan makan sebesar Rp175.999.500,00;
- 3) Alat tulis kantor sebesar Rp47.950.000,00;
- 4) Cetak dan penggandaan sebesar Rp24.250.000,00; dan
- 5) Dokumentasi sebesar Rp11.650.000,00.

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah seluruhnya pada tanggal 12 Maret 2015 dengan nilai total sebesar Rp379.570.000,00 dan 13 Maret 2015 dengan nilai total sebesar Rp25.504.500,00.

e. SPP-GU digunakan untuk pembayaran langsung (LS)

Pada Dinas PSDA diketahui terdapat pembayaran langsung yang pembayarannya berasal dari GU, dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Bendahara Pengeluaran telah membayar pembebasan lahan kali tenggang tahap I pada tanggal 4 April 2014 sebesar Rp2.309.723.032,00 sedangkan SP2D untuk tujuan tersebut baru dicairkan melalui kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran pada tanggal 14 April 2014; dan
- 2) Bendahara Pengeluaran telah membayar pembebasan lahan kali tenggang tahap I pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp1.677.457.000,00 sedangkan SP2D

untuk tujuan tersebut baru dicairkan melalui kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran pada tanggal 22 Desember 2014.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No. 50 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 BAB III Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengajuan SPP-GU; bagian B. Penatausahaan Bendahara Pengeluaran:

- a. Huruf a) pengajuan SPP-UP angka 1) yang menyatakan bahwa SPP-UP diajukan untuk pengisian uang persediaan yang ditujukan bukan sebagai pembayaran langsung, diberikan sekali dalam setahun dan belum membebani pagu anggaran; dan
- b. Huruf b) pengajuan SPP-GU angka 1) yang menyatakan bahwa Setelah Dana Uang Persediaan digunakan, untuk belanja beberapa kegiatan dan untuk mendapatkan dana selanjutnya, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU sebagai pengganti dana sebelumnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya potensi penyalahgunaan saldo kas di bendahara pengeluaran.

Permasalahan tersebut disebabkan DPKAD belum menerapkan sistem pengajuan UP dan GU sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No. 50 tahun 2013.

Atas permasalahan tersebut Kepala Bidang Perbendaharaan DPKAD menyatakan bahwa:

- a. Bidang Perbendaharaan mengadakan sosialisasi dengan mengundang seluruh Bendahara SKPD/UPTD pada tanggal 13 s.d. 14 April 2015 perihal penyerapan anggaran melalui SPP-UP/GU untuk mencermati yang diatur dalam Perwal Nomor: 2 Tahun 2015 sehingga diharapkan ke depan tidak terulang kembali;
- b. UP diberikan dua kali karena sesuai Peraturan Walikota Semarang No. 50 tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD TA 2014 Romawi III huruf B yaitu Penatausahaan Bendahara Pengeluaran point a tentang pengajuan SPP-UP disebutkan bahwa UP setinggi-tingginya 1/12 dari pagu anggaran untuk pengeluaran yang bersifat tetap. Sedangkan untuk kegiatan yang segera akan dilaksanakan dapat diajukan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, sehingga diasumsikan bahwa pengajuan UP rutin (tetap) diajukan terpisah dengan UP Kegiatan;
- c. Tupoksi seksi verifikasi yaitu melakukan penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja yang terdiri dari BKU, Ringkasan Pengeluaran Per Rincian Obyek serta bukti pengeluaran, Bukti atas penyetoran PPn/PPh ke Kas Negara dan Register Penutupan Kas. Apabila kelengkapan tersebut di atas sudah saling sesuai maka tugas dari seksi verifikasi sudah terselesaikan;
- d. Bukti pembayaran yang melebihi pengambilan UP/GU yang dimiliki bendahara dan belum dimintakan penelitian ke Seksi Verifikasi maka sepenuhnya diserahkan kepada bendahara SKPD yang bersangkutan; dan
- e. Bidang Perbendaharaan membuat dan mengedarkan Surat Peringatan Keterlambatan SPJ kepada SKPD/UPTD yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Apabila masih ada SKPD yang belum mengirimkan

pertanggungjawaban keuangan kepada Seksi Verifikasi dan Evaluasi maka diserahkan sepenuhnya kepada bendahara SKPD/UPTD yang bersangkutan.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar menginstruksikan Kepala DPKAD untuk melaksanakan penatausahaan uang persediaan dan ganti uang persediaan sesuai dengan ketentuan.

8. Pengelolaan Aset Tetap Kurang Memadai

Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Semarang menyajikan nilai Aset Tetap sebesar Rp13.717.885.116.131,00. Nilai tersebut terdiri atas tanah sebesar Rp10.809.811.533.805,00., peralatan dan mesin sebesar Rp957.835.854.744,00, gedung dan bangunan sebesar Rp1.656.851.392.286,00,, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1.654.555.357.306,00, aset tetap lainnya sebesar Rp73.945.990.040,00, konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp102.732.023.730,00, dan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.537.847.035.780,00.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap Kartu Inventaris Barang menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

a. Tanah

- 1) Nilai tanah untuk jalan berbeda pengakuan dengan SK Jalan tentang Walikota Keputusan Walikota No.61151/0644/2014 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di Wilayah Kota Semarang berisikan 9.172 ruas jalan dengan panjang 2.677.257 m, akan tetapi berdasarkan kolom tanah pada KIB A disebutkan 47 ruas jalan. Pada tanggal 15 Mei 2015 dilakukan perubahan atas SK Jalan tentang Keputusan Walikota No.61151/0644/2014 melalui SK Walikota No,611.51/481/2015 merubah ruas jalan menjadi 498 dan panjang jalan menjadi 722.454 m.
- 2) Terdapat 693 item tanah dengan luas 0 m²

Tabel 9 Tanah dengan Luas 0 m²

SKPD	Jumlah
Dinas Bina Marga	30
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	6
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2
Dinas Kelautan dan Perikanan	2
Dinas Kesehatan Kota	4
Dinas PSDA dan ESDM	99
Dinas Pasar	5
Dinas Pendidikan	57
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	121
Dinas Pertanian	4
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga	3
Dinas Tata Kota dan Perumahan	34
Kantor Ketahanan Pangan	1
Kantor Pendidikan dan Pelatihan	1
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1
Kecamatan Banyumanik	87
Kecamatan Candisari	15
Kecamatan Gajah Mungkur	29

SKPD	Jumlah
Kecamatan Genuk	27
Kecamatan Gunungpati	2
Kecamatan Mijen	29
Kecamatan Ngaliyan	19
Kecamatan Pedurungan	33
Kecamatan Semarang Barat	5
Kecamatan Semarang Selatan	12
Kecamatan Semarang Tengah	11
Kecamatan Semarang Timur	12
Kecamatan Semarang Utara	7
Kecamatan Tembalang	18
Kecamatan Tugu	16
Sekretariat DPRD	1
Total	693

- 3) Pemerintah Kota Semarang belum memiliki data pengembang perumahan yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan PSU.

Pengembang Perumahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang memiliki kewajiban untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (PSU) kepada Pemerintah Daerah dengan prosentase tertentu. Sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Semarang telah menerima penyerahan dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 10 Data PSU yang Sudah Diserahkan s.d. Tahun 2014

No	Tahun	Pengembang
1	2009	1
2	2010	1
3	2011	11
4	2012	4
5	2013	3
6	2014	3
Jumlah		23

Pembangunan perumahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu diberikan ruang untuk PSU dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyak pengembang yang belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Semarang. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak bagi masyarakat dan pemerintah. Dari sisi masyarakat mereka akan terbebani biaya pemeliharaan PSU atau bahkan PSU yang dimiliki tidak terpelihara sedangkan dari sisi Pemerintah adalah tidak bisa menjamin penyediaan dan pemeliharaan fasilitas publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, pada pasal 9 disebutkan bahwa Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk Provinsi DKI membentuk Tim Verifikasi untuk mempercepat proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. Tugas tim verifikasi salah satunya adalah melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang. Akan tetapi, sampai dengan saat ini tidak ada data tentang daftar pengembang perumahan yang sedang melaksanakan dan atau telah selesai tetapi belum menyerahkan PSU. Terhadap aset PSU yang telah diserahkan, Pemerintah Kota Semarang belum dapat melakukan pencatatan dan penilaian secara lengkap terkait dengan aset apa saja dari PSU tersebut yang ada

di dalamnya karena bisa jadi di atas tanah yang diserahkan terdapat bangunan atau jaringan dengan nilai tertentu.

b. Peralatan dan Mesin

1) Perbedaan nilai Peralatan dan Mesin antara Neraca dengan KIB B.

Berdasarkan pemeriksaan atas CALK dan KIB diketahui bahwa nilai peralatan dan mesin di CALK disajikan sebesar Rp1.142.641.767.237,00, sedangkan di KIB B sebesar Rp1.142.563.368.718,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp78.398.519,00 yang terdiri atas :

Tabel 11 Perbedaan Nilai Peralatan dan Mesin Antara Neraca dan KIB B

SKPD	Neraca	KIB B	Selisih
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.009.698.726	4.007.929.110	1.769.616
Dinas Kesehatan Kota	54.788.571.442	54.794.541.443	(5.970.001)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.123.876.586	2.124.275.586	(399.000)
Dinas Pendidikan	437.317.848.025	437.166.154.819	151.693.206
DPKAD	18.642.854.888	18.787.354.888	(144.500.000)
Kec. Mijen	2.814.965.426	2.817.715.426	(2.750.000)
Kec. Ngaliyan	2.762.362.554	2.762.462.554	(100.000)
Kec. Pedurungan	2.929.293.158	2.928.443.158	850.000
Kec. Semarang Selatan	2.667.185.327	2.667.610.327	(425.000)
Kec. Semarang Utara	2.557.820.604	2.604.793.604	(46.973.000)
Sekretariat Daerah	51.834.888.261	51.709.685.563	125.202.698
Jumlah	582.449.364.997	582.370.966.478	78.398.519

2) Informasi tentang kondisi aset dinyatakan tidak seragam

- a) 110.335 item sebesar Rp809.012.017.542,24 tidak disebutkan kondisinya
- b) 43.348 item sebesar Rp331.170.707.214,74 kondisinya baik
- c) 945 item sebesar Rp1.410.925.132,00 kondisinya kurang baik
- d) 182 item senlai Rp969.718.829,40 kondisinya rusak berat

3) Penyimpanan BPKB asli kendaraan bermotor tidak jelas

Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang telah menyimpan 2.699 unit BPKB asli kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 milik Pemerintah Kota Semarang namun dari data KIB Kendaraan Bermotor jumlah kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Semarang adalah 3.758 item

Tabel 12 Jumlah Kendaraan Bermotor Milik Pemda

Kendaraan Bermotor	Jumlah	No BPKB Tidak Diisi	Jumlah BPKB Setda
Roda 4	1.254	834	
Roda 2	2.504	1.337	890
Jumlah	3.758	2.171	890

c. Gedung dan Bangunan

1) Perbedaan nilai Gedung dan Bangunan antara Neraca dengan KIB C.

Berdasarkan pemeriksaan atas CALK dan KIB diketahui bahwa nilai gedung dan bangunan di CALK disajikan sebesar Rp1.655.964.545.795,00, sedangkan di KIB sebesar Rp1.654.744.476.510,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.220.069.285,00 yang terdiri dari :

Tabel 13 Perbedaan Nilai Gedung dan Bangunan Antara Neraca dan KIB C

SKPD	Neraca	KIB C	Selisih
Dinas Pasar	203.253.251.227	204.359.851.227	(1.106.600.000)
Dinas Pendidikan	679.038.004.863	677.570.162.044	1.467.842.819
Kec. Gajah Mungkur	5.981.238.382	6.094.244.916	(113.006.534)
Kec. Pedurungan	10.054.633.717	9.385.817.717	668.816.000
Sekretariat Daerah	127.471.379.773	127.168.362.773	303.017.000
Jumlah	1.025.798.507.962	1.024.578.438.677	1.220.069.285

- 2) Terdapat 2.645 item gedung dengan luas 0 m²
- 3) Informasi tentang kondisi aset dinyatakan beragam
 - a) 229 item sebesar Rp46.290.464.044 tidak disebutkan kondisinya;
 - b) 3.927 item sebesar Rp1.287.601.607.880,76 kondisinya bagus;
 - c) 260 item sebesar Rp136.425.212.629,00 kondisinya kurang bagus;
 - d) 16 item sebesar Rp1.404.312.848,00 kondisinya kurang baik;
 - e) 1 item sebesar Rp60.000.000,00 kondisinya rusak ringan; dan
 - f) 56 item sebesar Rp5.382.494.813,00 kondisinya rusak berat.

d. Jalan, Irigasi dan Jembatan

- 1) Terdapat perbedaan pengakuan ruas jalan antara KIB dengan SK Walikota tentang Jalan di Lingkungan Kota Semarang

Berdasarkan SK Walikota No. 611.51/0644/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya sebagai Jalan Lokal dan Jalan lingkungan di Wilayah Kota Semarang, disebutkan bahwa jumlah ruas jalan di lingkungan Kota Semarang adalah sebanyak 9.172 ruas dan panjang 2.677.257 m. Sedangkan menurut KIB yang tercantum sebanyak 1.226 ruas jalan. Pada tanggal 15 Mei 2015 dilakukan perubahan atas SK Jalan tentang Keputusan Walikota No.61151/0644/2014 melalui SK Walikota No,611.51/481/2015 merubah ruas jalan menjadi 498 dan panjang jalan menjadi 722.454 m.
- 2) Informasi tentang kondisi aset dinyatakan beragam
 - a) 2.087 item sebesar Rp281.027.504.589,00 tidak disebutkan kondisinya;
 - b) 3.986 item sebesar Rp853.350.211.076,00 kondisinya baik;
 - c) 2.087 item sebesar Rp519.429.429.641,00 kondisinya kurang baik;
 - d) 5 item sebesar Rp689.313.000,00 kondisinya rusak berat.

e. Aset Tetap Lainnya

- 1) Perbedaan nilai Aset Tetap Lainnya antara Neraca dengan KIB E

Berdasarkan pemeriksaan atas CALK dan KIB diketahui bahwa nilai gedung dan bangunan di CALK disajikan sebesar Rp76.166.424.067,00, sedangkan di KIB sebesar Rp76.138.564.726,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp27.859.341,00 yang terdiri dari :

Tabel 14 Perbedaan Aset Tetap Lainnya Antara Neraca dan KIB E

SKPD	Neraca	KIB C	Selisih
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.226.934.812	1.229.134.812	(2.200.000)
Dinas Pendidikan	57.958.258.546	57.928.199.205	30.059.341
Jumlah	59.185.193.358	59.157.334.017	27.859.341

- 2) Informasi tentang kondisi aset dinyatakan beragam
 - a) 52.392 item sebesar Rp55.979.838.153,00 tidak disebutkan kondisinya;
 - b) 19.036 item sebesar Rp19.864.137.302,00 kondisinya baik;
 - c) 210 item sebesar Rp266.375.741,00 kondisinya kurang baik; dan
 - d) 23 item sebesar Rp28.213.530,00 kondisinya rusak berat.
- 3) Pengelolaan buku pada Kantor Perpustakaan dan Arsip tidak tertib
 - a) Barang selain buku banyak yang belum diberi label barang. Kalaupun ada, label barang tersebut belum *diupdate* sehingga tidak bisa ditelusuri dengan catatannya;
 - b) KIR tidak seluruhnya dilengkapi dengan catatan tahun, nilai, no serta kode barang;
 - c) Saat dilakukan uji petik atas barang yang dicatat di KIR, terdapat beberapa barang yang telah dipindahkan ke Gudang Arsip yang terletak di Kecamatan Banyumanik, akan tetapi catatan/daftar barang yang dipindahkan tidak ada;
 - d) Terdapat beberapa barang yang berbeda penyebutannya antara di KIB dan KIR, demikian juga dengan penulisan nilai barangnya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 25 :
 - Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
 - Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F; dan
 - Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, pada :
 - Pasal 9 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk Provinsi DKI membentuk Tim Verifikasi untuk mempercepat proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; dan
 - Pasal 12 butir a yang menyatakan bahwa Tugas tim verifikasi salah satunya adalah melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan :

- a. Aset Tetap berupa tanah, peralatan mesin, gedung, jalan irigasi jembatan dan aset tetap lainnya belum dapat diyakini kewajarannya; dan
- b. Keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman tidak terjamin.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Pengurus Barang belum melakukan *update* secara memadai terhadap KIB melalui aplikasi Simbada *Online*;
- b. Tim Verifikasi belum melakukan inventarisasi atas pengembang perumahan mempunyai kewajiban menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Semarang; dan
- c. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2004 tentang kebijakan akuntansi tidak sesuai dengan SAP.

Atas hal tersebut Kepala Bidang Aset DPKAD menyatakan bahwa :

- a Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap
Walikota telah mengeluarkan Perwal No.10 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No.32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang.
- b Nilai tanah untuk jalan berbeda pengakuan dengan SK Jalan tentang Walikota Kami setuju. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Semarang belum mencatat jalan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Semarang. Selanjutnya Pemerintah Kota Semarang akan menerbitkan revisi SK Walikota Semarang tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kota dan mencatat jalan yang telah ditetapkan sebagai aset tanah. Selanjutnya atas bangunan jaringan jalan permukiman yang tercatat pada Dinas Bina Marga akan dicatat pada CALK. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan penilaian terhadap tanah tersebut dan telah mencantumkannya di neraca.
- c Terdapat 693 item tanah, 2.645 item gedung dengan luas 0 m²
Kami setuju, akan tetapi kami belum bisa menindaklanjuti temuan ini karena dibutuhkan cek lapangan per masing-masing lokasi untuk proses pengukuran. Hal tersebut akan segera ditindaklanjuti pada tahun 2015.
- d Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman belum disertai dengan rincian nilai aset yang diserahkan
Setuju, pencatatan ini belum bisa dilakukan karena perlu verifikasi lapangan dan akan ditindaklanjuti Tahun 2015.
- e Perbedaan nilai Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan antara Neraca dengan KIB B, serta Aset Tetap Lainnya
Perbedaan antara neraca dan KIB pada aplikasi Simbada Online disebabkan karena kelemahan sistem yang mana sistem Simbada online mulai dikembangkan tahun 2014. Terjadi perbedaan antara neraca dan KIB, antara lain :
 - 1) Ada satu barang aset yang di lakukan 2 (dua) transaksi yaitu dimutasi dan diusulkan penghapusan. Pada neraca Simbada *Online* akan dihitung pengurangan sebanyak 2 kali yang seharusnya tidak boleh terjadi transaksi seperti ini yang menyebabkan perbedaan jumlah dengan KIB.
 - 2) Ada beberapa transaksi setelah di cek ternyata tidak ada item transaksi pada KIB. Meskipun terjadi perbedaan nilai antara Neraca Aset dan KIB, namun nilai yang dijadikan dasar laporan neraca aset Pemerintah Kota Semarang adalah nilai yang ada pada neraca, hal ini kami dasarkan pada penyusunan neraca aset secara sistem maupun secara manual yang tertuang pada Kertas Kerja Rekonsiliasi SKPD se-Kota Semarang.
- f Selisih sudah dapat di jelaskan dan telah dikoreksi kedalam Simbada Online.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kami mengakui adanya perbedaan BPKB asli yang tersimpan pada Bagian Rumah Tangga dengan KIB B. Hal ini terjadi karena:

- 1) Pengadaan kendaraan bermotor saat ini dilakukan sendiri oleh SKPD se-Kota Semarang. Sehingga BPKB yang disimpan pada Bagian Rumah Tangga hanya yang diserahkan saja;
 - 2) Terjadi dobel catat pada KIB sehingga tidak sama dengan jumlah BPKB asli.
 - 3) Adapun Jumlah BPKB yang disimpan pada Bagian Rumah Tangga adalah sejumlah 2.699 unit dengan perincian sebagai berikut :
- BPKD Roda 2 (Dua) & 3 (Tiga) = 1.865 unit
 - BPKD Roda 4 (Empat) & 6 (Enam) = 834 unit

Untuk menertibkan hal ini akan kami lakukan validasi pada Tahun 2015.

- g Terdapat perbedaan pengakuan ruas jalan antara KIB dengan SK Walikota tentang jalan di Lingkungan Kota Semarang :

Hal ini terjadi karena pengakuan KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Bina Marga didasarkan pada anggaran yang dikeluarkan Pemkot Semarang untuk perbaikan jalan permukiman, sehingga tidak sama ruas jalan yang telah diakui Pemkot Semarang dicatat dalam KIB D dan sebaliknya. Sehingga terjadi perubahan jumlah antara keduanya. Atas hal tersebut selanjutnya kami catat pada CALK.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Tata Kota dan Perumahan menyatakan mengingat pentingnya data pengembang, maka langkah-langkah ke depannya adalah :

- a. Selama ini data pengembang perumahan tercampur secara acak/tidak ada pembedaan antara permohonan ijin untuk pengembang perumahan maupun ijin lainnya, untuk itu langkah kami akan memberikan identitas unik/pembedaan dalam formulir perijinan terhadap pengembangan perumahan serta disyaratkan untuk mencantumkan nama perumahannya sehingga permohonan untuk perumahan dapat dilakukan filterisasi, sehingga data pengembang dapat secara otomatis tersimpan.
- b. Memulai pendataan pengembang perumahan secara keseluruhan untuk perumahan yang sedang melaksanakan dan atau telah selesai tetapi belum menyerahkan PSU.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang untuk membuat surat edaran kepada Pengguna dan Pengurus Barang supaya melengkapi :
 - 1) informasi di dalam KIB terkait kondisi dan luasan;
 - 2) membuat SOP terkait penyimpanan bukti kepemilikan kendaraan bermotor; dan
- b. Kepala DTKP untuk melakukan inventarisasi atas pengembang perumahan yang mempunyai kewajiban menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Semarang..

9. Pengendalian dan Pengelolaan Kendaraan Pinjam Pakai Tidak Memadai

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 meminjamkan kendaraan roda dua dan roda empat kepada beberapa instansi dan DPRD di lingkungan Kota Semarang. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pinjam pakai diketahui permasalahan sebagai berikut.

- a Perjanjian pinjam pakai tidak menyebutkan jangka waktu peminjaman secara spesifik**

Berdasarkan pemeriksaan atas Surat Perjanjian No. 024/28 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pinjam Pakai Sementara Kendaraan Dinas Operasional Milik pemerintah

Kota Semarang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, diketahui bahwa surat perjanjian ini tidak secara spesifik menyebutkan tentang jangka waktu peminjaman kendaraan roda empat. Di dalam pasal 3 ayat (1) hanya dinyatakan bahwa Surat perjanjian ini dibuat bersifat sementara berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan diserahkannya kendaraan dinas operasional yang diperuntukkan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

b Perjanjian pinjam pakai sudah habis jangka waktu peminjaman tetapi belum diperbarui atau belum ada berita acara pengembalian asetnya

Berdasarkan dokumen perjanjian pinjam pakai, diketahui bahwa terdapat lima perjanjian yang sudah habis jangka waktu peminjamannya dan belum dilakukan perpanjangan maupun pengembalian kendaraan roda empat, yaitu :

Tabel 15 Daftar Perjanjian Pinjam Pakai yang Telah Habis Jangka Waktunya

No	No. Perjanjian	Peminjam	Kendaraan yang Dipinjam	Jangka Waktu Peminjaman
1	024/74	Kejaksaan Negeri Semarang	Suzuki G Vitara JLX AT/JB420 (H 9529 YA)	16 Juni 2011 s.d. 14 Juni 2013
2	027/27	Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang	Toyota Avanza (H 9518 QS) dan Toyota Avanza (H 9519 QS)	29 Juni 2009 s.d. 28 Juni 2010
3	024/38	Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang	Toyota Avanza (H 9523 RS)	24 Agustus 2009 s.d. 23 Agustus 2010
4	024/72	Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Suzuki G Vitara JLX AT/JB420 (9523 YA)	16 Juni 2011 s.d. 14 Juni 2013
5	024/73	Komandan Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Suzuki G Vitara JLX AT/JB420 (9523 YA)	16 Juni 2011 s.d. 14 Juni 2013

c Kendaraan bermotor yang dipinjampakaikan belum dikembalikan

Berdasarkan pemeriksaan atas BAST Pinjam Pakai Kendaraan Bermotor No. 927/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 diketahui bahwa sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 19 Mei 2015 terdapat tiga unit kendaraan bermotor roda dua beserta kelengkapannya yang belum dikembalikan. Kendaraan tersebut seluruhnya tercatat di Kantor Satpol PP dengan peminjam atas nama Sdr Kdr yang merupakan Sekretaris Komisi DPRD Kota Semarang. Dokumen BAST Pinjam Pakai tersebut tidak menyebutkan jangka waktu peminjaman. Jenis kendaraan yang dipinjam seluruhnya adalah Suzuki TS 125/2002 (H 9982 LS, H 9983 LS, H 9987 LS). Berdasarkan KIB diketahui bahwa dari ketiga kendaraan tersebut, hanya satu yang dalam kondisi baik, sisanya dalam kondisi kurang baik dan umur ekonomi sudah habis. Menurut keterangan dari pengurus barang, saat ini kendaraan-kendaraan tersebut sudah diperbaiki dan dimodifikasi oleh peminjam. Akan tetapi, untuk kepentingan penginventarisasi barang milik daerah, terutama untuk pengusulan penghapusan, diperlukan penarikan barang milik daerah. Upaya penagihan/penarikan kembali kendaraan sudah dilakukan sebanyak dua kali akan tetapi tidak berhasil. Upaya penagihan pertama dilaksanakan dengan berdasar Surat Kepala Satpol PP kepada yang bersangkutan dengan No. Surat 027/862 tanggal 9 September 2014 tentang pengembalian Inventaris Barang Satpol PP Kota Semarang dan Surat No. 024/494 tanggal 20 April 2015 tentang Penarikan Kendaraan Dinas.

d Kendaraan Pinjam Pakai sebanyak delapan unit dengan premi sebesar Rp27.740.015,00

Tabel 16 Kendaraan Pinjam Pakai yang Diasuransikan

Jenis Kendaraan	No. Polisi	Premi (Rp)	Peminjam
Toyota Innova	H 22 A	3.446.215,00	Deninteldam IV Diponegoro Semarang
Toyota Rush	H 9521 QS	2.888.800,00	KPU Kota Semarang
G Vitara JLX AT/JB420	H 9529 YA	3.718.000,00	Kejaksaan Negeri Semarang
Toyota Avanza	H 9518 QS	3.417.000,00	Polrestabes Semarang
Toyota Avanza	H 9519 QS	3.417.000,00	Polrestabes Semarang
G Vitara JLX AT/JB420	H 9523 YA	3.718.000,00	Polrestabes Semarang
Toyota Avanza	H 9523 RS	3.417.000,00	Polrestabes Semarang
G Vitara JLX AT/JB420	H 9527 YA	3.718.000,00	Kodim 0733/BS Semarang

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat delapan unit kendaraan bermotor yang sampai dengan saat ini masih dipinjamkan tetapi kendaraan tersebut juga diasuransikan oleh pemerintah Kota Semarang.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 30 :

- a ayat (2) yang menyatakan bahwa Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- b ayat (3) yang menyatakan bahwa Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - 2) jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - 3) tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - 4) hak dan kewajiban para pihak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan Pemerintah Kota Semarang untuk memanfaatkan aset pinjam pakai secara optimal.

Hal tersebut disebabkan Pengguna Barang tidak melaksanakan prosedur pinjam pakai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Kepala Kantor Satpol PP menyatakan sependapat dan Kepala Bagian Rumah Tangga dan Santel Setda Kota Semarang menyatakan :

- a. Pinjam pakai tidak menyebutkan jangka waktu peminjaman secara spesifik
KPU sudah mengirim surat kepada Walikota No. 105/KPU Kota-012.329521/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 perihal Mohon Fasilitasi Pinjam Pakai. Saat ini Surat Pinjam Pakai masih dalam proses penyelesaian; dan
- b. Pinjam pakai sudah habis jangka waktu peminjaman tetapi belum diperbarui
Surat Pinjam pakai dengan Kejaksaan Negeri, Polrestabes, dan Kodim 0733/BS masih dalam proses penyelesaian.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Pengguna Barang untuk melakukan proses pinjam pakai sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan tidak menganggarkan asuransi *all risk* atas aset yang dipinjam-pakaikan.

10. Pemerintah Kota Semarang Belum Memiliki Sistem dan Prosedur Pelaporan Dana BOS

Realisasi penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari dana BOS yang terdiri dari:

Tabel 17 Rekapitulasi Dana BOS

No	Dinas	Jumlah (Rp)
1	Sisa Kas 31/12/2013	4.124.207.531
2	Penerimaan 2014	114.195.927.500
3	Penggunaan tahun 2014	(112.341.792.401)
4	Sisa Kas 31/12/2014	5.978.342.630

Program BOS secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Pelaksanaan BOS diatur dengan 3 peraturan menteri yaitu

- Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya. Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah. Permendagri telah mengeluarkan Permendagri No.62 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Operasional Sekolah.

Program BOS diharapkan ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. untuk SD/SDLB adalah Rp580.000,-/peserta didik/tahun minimal 80 peserta didik, dan untuk SMP/SMPLB/SMPT/Satap adalah Rp710.000,-/peserta didik/tahun dengan jumlah peserta didik minimal 120.Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sebagai berikut:

- Beban BOS disajikan di dalam Laporan Operasional (LO) secara total dan tidak dirinci berdasarkan jenis beban
Pemerintah Kota Semarang mencatat penerimaan dana BOS kedalam Pendapatan BOS dan penggunaan kedalam Beban BOS pada LO. Beban BOS disajikan secara total dan tidak dapat di rinci menurut jenis bebannya.
- Saldo awal BOS tidak sama dengan saldo Neraca tahun 2013.
Pada Neraca 31 Desember 2013 saldo sisa dana BOS 2013 tercatat sebesar Rp5.001.829.739,00. Nilai tersebut tidak sama dengan rincian data penerimaan dan pengeluaran dana BOS Dinas Pendidikan Kota Semarang yang memiliki saldo awal sebesar Rp4.124.207.531,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No.62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pasal 20 ayat (1) Laporan

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota.

Hal tersebut mengakibatkan informasi penerimaan dan penggunaan dana BOS tidak akurat.

Hal tersebut disebabkan belum adanya Sistem Operasi Prosedur (SOP) pertanggungjawaban dana BOS yang disampaikan ke Walikota Semarang.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa ketidaksesuaian data akhir tahun 2013 dan data awal tahun 2014 disebabkan kekurangcermatan dalam memantau laporan dana BOS per sekolah pada tahun 2013.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala DPKAD membuat sistem dan prosedur pelaporan dana BOS.

11. Belanja Bahan Bakar Kendaraan dan Pelumas (Oli) Tidak Dilengkapi Bukti *Print Out* dari SPBU

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp797.972.204.629,00 atau sebesar 85,90% dari anggaran sebesar Rp928.942.801.796,00. Realisasi tersebut antara lain dipergunakan untuk belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor yang meliputi belanja penggantian suku cadang/*sparepart*, belanja pembelian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (oli), sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Belanja bahan bakar minyak dan Pelumas (Oli) yang dipergunakan untuk operasional kendaraan di SKPD bekerjasama dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) antara lain SPBU Sisingamangaraja, SPBU Pengapon dan PT CSS. Sedangkan jenis bahan bakar yang dibeli berupa Pertamax, Solar (Dex), Solar (industri) dan Premium.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada 15 SKPD terkait dengan pengelolaan BBM untuk kendaraan operasional dan *system folder* pompa drainase diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Pembelian BBM tidak dilengkapi bukti *print out* dari SPBU/pihak ketiga

Mekanisme pengadaan Bahan Bakar Minyak dan pelumas (oli) yang bekerjasama dengan SPBU adalah:

- 1) Pegawai yang ditunjuk untuk mengelola Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap bulan menyusun perencanaan kebutuhan BBM untuk kendaraan operasional;
- 2) Kebutuhan BBM untuk kendaraan operasional sudah diatur dalam Standar Satuan Harga dengan rincian:
 - a) Sepeda motor sebanyak satu liter/hari dikalikan hari kerja;
 - b) Mobil sebanyak tujuh liter/hari dikalikan hari kerja;
 - c) Truk sebanyak 15 liter/hari dikalikan hari kerja atau kalender;
Untuk kendaraan yang dipergunakan pelayanan kepada masyarakat/publik, maka BBM disesuaikan dengan hari kalender bukan hari kerja.
- 3) PPKom membayar sejumlah uang kepada SPBU untuk membeli kupon/*voucher* atau sebagai pembayaran di muka; dan

- 4) Pembelian BBM dilakukan SKPD yang menggunakan kupon dengan menukar kupon/voucher dan untuk SKPD yang menggunakan pembayaran di muka menggunakan kupon yang dibuat oleh SKPD dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Pemeriksaan terhadap surat pertanggungjawaban pada 15 SKPD diketahui bahwa pembelian bbm tidak disertai oleh *print out* dari SPBU

Tabel 18 Pembelian BBM Tidak Dilengkapi Bukti *Print Out* dari SPBU

No	SKPD	BBM	Oli	Nilai (Rp)
1	Dinas kebakaran	746.780.900,00	-	746.780.900,00
2	DPKAD	667.944.850,00	44.010.000	711.954.850,00
3	Bina Marga	2.614.000.000,00	-	2.614.000.000,00
4	PSDA dan ESDM	14.976.533.500,00	-	14.976.533.500,00
5	Setwan	448.503.750,00	-	448.503.750,00
6	Setda	1.423.872.800,00	-	1.423.872.800,00
7	Dishubkominfo	500.413.600,00	-	500.413.600,00
8	DKP	12.508.431.000,00	45.990.000	12.554.421.000,00
9	Dinkes	374.356.750,00	-	374.356.750,00
10	Disdik	239.925.000,00	-	239.925.000,00
11	PJPR	797.894.900,00	-	797.894.900,00
12	Bapermas dan KB	363.184.800,00	-	363.184.800,00
13	Satpol PP	848.268.700,00	-	848.268.700,00
14	Dinas Pasar	218.500.000,00	-	218.500.000,00
15	BPBD	215.980.000,00	-	215.980.000,00
	Jumlah		90.000.000,00	37.034.590.550,00
	Total			37.124.590.550,00

b. Pengelolaan BBM *Operasional System Folder Pompa Drainase Belum Memadai dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Senilai Rp15.235.800,00 Pada Pengelolaan BBM Operasional Sistem Pompa Drainase*

Pada Tahun Anggaran 2014 PSDA dan ESDM melaksanakan pengadaan belanja BBM jenis Solar Pertamina Dex sebanyak 659.558 (liter) sebesar Rp7.555.290.000,00 yang bekerjasama dengan SPBU Pengapon dan SPBU Cendrawasih didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Solar pertamina dex didistribusikan pada 38 pompa yang tersebar di Kota Semarang yang dikelola oleh petugas operator yang bertugas di rumah pompa dengan menggunakan jerigen yang berukuran 25 s.d. 30 liter. Petugas operator diberikan blangko/bon kosong yang dikeluarkan oleh Dinas PSDA & ESDM untuk ditukar dengan struk/print out dari SPBU tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan cek fisik diketahui terdapat selisih lebih atas penggunaan solar pertamina dex sebesar Rp15.235.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19 Selisih Lebih Penggunaan Solar Pertamina Dex

Bulan	Volume		Selisih	Harga/Lit er	Nilai (Rp)
	Pemakaian	Bon			
1	2	3	4=2-3	5	6=4x5
Januari	150.470	150.270	200	5.500,00	1.100.000,00
Februari	60.665	60.025	640	12.950,00	8.288.000,00
Maret	69.405	69.105	300	12.950,00	3.885.000,00
Juli	41.620	41.520	100	13.100,00	1.310.000,00
September	29.505	29.455	50	13.100,00	655.000,00
	Jumlah		1.290		15.238.000,00

Penelusuran lebih lanjut terhadap SPJ menunjukkan bahwa bukti pengeluaran hanya didukung dengan bon dari PSDA dan ESDM tanpa didukung dengan print out/struk dari SPBU, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti jumlah pembelian

solar oleh para petugas operator. Selanjutnya tim melakukan konfirmasi kepada PPTK diperoleh penjelasan bahwa petugas operator tidak sempat meminta *print out*/struk dari petugas SPBU, hal ini karena keterbatasan kendaraan untuk mengambil BBM, kondisi rumah pompa yang jauh dari lokasi SPBU dan tidak tersedianya tangki-tangki penampungan untuk menyimpan bahan bakar. Atas kelebihan pembayaran Solar Pertamina Dex sebesar Rp15.238.000,00 sudah disetor ke kas daerah tanggal 15 Mei 2015.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 jo Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam:

- a. Pasal 13 ayat 2 yang menyatakan bahwa PPK SKPD mempunyai tugas huruf b yang berbunyi meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- b. Pasal 132 yang berbunyi :
 - 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
 - 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja bahan bakar minyak dan pelumas (oli) sebesar Rp37.124.590.550,00 belum dapat diyakini kewajarannya.

Hal ini disebabkan tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang pembelian BBM.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Bina Marga, Dinas Kebakaran, Dinas Kesehatan, DKP, PSDA dan ESDM, PJPR, Dinas Pasar, Dishubkominfo, DPKAD, Dinas Pendidikan, BPBD, Sekretariat DPRD, Satpol PP, Bapermas dan KB dan Kepala Bagian Rumah Tangga dan Santel (Setda) menyatakan sependapat dengan temuan dari tim pemeriksa, selanjutnya akan kami tingkatkan dalam pengawasan dan akan dilengkapi dengan struk/*print out* dari SPBU.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk membuat edaran yang mengatur mekanisme pembelian BBM yang menyertakan *print out* dari SPBU sebagai pertanggungjawaban.

12. Tarif Sewa Tanah eks Bengkok Dilakukan Berdasarkan Lelang dan Bukan Berdasarkan Pada Perda 3 Tahun 2012

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2014 adalah sebesar Rp15.735.082.557,00 atau 73,33% dari anggaran sebesar Rp 21.459.102.405,00. Salah satu bentuk retribusi ini adalah sewa lahan eks bengkok milik Pemerintah Kota Semarang. Pada tahun 1997 Pemerintah Kota Semarang melakukan inventarisasi dan mengakui tanah eks bengkok menjadi aset tetap. Pengelolaan aset tanah eks bengkok yang digarap oleh masyarakat tersebut mulai menggunakan sistem lelang dengan harga pasar setempat. Pelaksanaan sewa dengan sistem lelang ini sudah sejak sekitar tahun 1991 dan sebagai pelaksana lelang adalah Kecamatan, dalam hal ini Camat bisa berkoordinasi

dengan Lurah. Jadwal lelang disusun oleh Tim Pembantu Pengawas Lahan Garapan, akan tetapi jadwal tersebut menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Saat lelang dilaksanakan, pihak yang hadir terdiri dari unsur Bidang Aset DPKAD, Bagian kerjasama Setda, Dinas Pertanian (PPL), dan masyarakat yang hendak menyewa. Pada tahun 2014 tanah eks bengkok telah disewakan kepada 405 penyewa dengan luas tanah terpakai 3.987.102 m² sebesar Rp415.459.561,00. Rincian penyewa tanah eks bengkok dapat dilihat didalam lampiran 14.

Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Perda tersebut mengatur tarif sewa lahan yaitu untuk sewa lahan tanah kosong/hari untuk non komersial dengan rumus = luas lahan terpakai x NJOP PBB x 0,1 %. Perbedaan yang cukup signifikan antara nilai sewa antara lelang dan tarif Perda yaitu sebagai berikut :

Tabel 20 Perhitungan Selisih Pengenaan Sewa dengan Sistem Lelang dan dengan Perda

No	Kelurahan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	NJOP PBB			Harga Tarif Perda	Hasil lelang	Selisih
				NJOP PBB	Faktor Pengali	Hari dalam Satu Tahun			
1	Bubakan	Bengkok Bekel I	6.370	82.000,00	0,1‰	365	19.065.410,00	675.000,00	18.390.410,00
2	Ngadirgo	Bengkok lebean	4.096	64.000,00	0,1‰	365	9.568.256,00	525.000,00	9.043.256,00
3	Pesantren	Bengkok Jl. Dilem Persil 12/SIII	3.300	82.000,00	0,1‰	365	9.876.900,00	325.000,00	9.551.900,00
6	Polaman	Bengkok	2.500	27.000,00	0,1‰	365	2.463.750,00	300.000,00	2.163.750,00
4	Tambakaji	Bengkok Desa Kp. Beringin Kulon	3.290	103.000,00	0,1‰	365	12.368.755,00	600.000,00	11.768.755,00
5	Gondoriyo	Bengkok	7.540	64.000,00	0,1‰	365	17.613.440,00	325.000,00	17.288.440,00
						Jumlah	70.956.511,00	2.750.000,00	68.206.511,00

Apabila dilakukan perhitungan atas penerimaan retrbusi jasa usaha dengan menggunakan tarif berdasarkan perda pada lima lokasi selama satu tahun didapatkan potensi penerimaan sebesar Rp70.956.511,00. Penerimaan dengan menggunakan lelang sebesar Rp2.750.000,00 sehingga terdapat potensi yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp68.206.511,00.

Perhitungan hasil pendapatan yang diperoleh petani atas pengolahan tanah eks bengkok menunjukkan bahwa dalam satu tahun petani akan memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 21 Perhitungan Pendapatan Petani Dalam Setahun Apabila Menggunakan Tarif Perda

No	Kelurahan	Lokasi	Harga Tarif Perda	Pendapatan petani					Pendapatan Petani Setelah Sewa
				Luas	Produktivitas per Hektar	Harga Gabah Kering Giling Rata-Rata	Qty Panen per Tahun	Hasil panen per tahun	
1	Bubakan	Bengkok Bekel I	19.065.410	6.370	5,68	4.684.761	2	33.911.029	14.845.619
2	Ngadirgo	Bengkok lebean	9.568.256	4.096	5,68	4.684.761	2	21.805.271	12.237.015

No	Kelurahan	Lokasi	Harga Tarif Perda	Pendapatan petani					Pendapatan Petani Setelah Sewa
				Luas	Produktivitas per Hektar	Harga Gabah Kering Giling Rata-Rata	Qty Panen per Tahun	Hasil panen per tahun	
3	Pesantren	Bengkok Jl. Dilem Persil 12/SIII	9.876.900	3.300	5,68	4.684.761	2	17.567.723	7.690.823
6	Polaman	Bengkok	2.463.750	2.500	5,68	4.684.761	2	13.308.881	10.845.131
4	Tambakaji	Bengkok Desa Kp. Beringin Kulon	12.368.755	3.290	5,68	4.684.761	2	17.533.196	5.164.441
5	Gondoriyo	Bengkok	17.613.440	7.540	5,68	4.684.761	2	40.182.462	22.569.022
			70.956.511						73.352.051

* Semarang Dalam Angka Tahun 2013.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerapan tarif sewa eks bengkok akan mengurangi pendapatan petani dengan jumlah yang signifikan.

Kondisi tersebut tidak sesuai UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang meliputi huruf d. dapat dilaksanakan
- Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas huruf g. keadilan

Permasalahan tersebut mengakibatkan :

- Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak dapat diterapkan khususnya tarif lahan kosong untuk tanah eks bengkok;
- Berpotensi penyalahgunaan dalam pelelangan dengan memanfaatkan tarif sewa lahan berdasarkan Perda yang tidak realistik; dan
- Ketidakpastian hukum atas potensi pendapatan dari penyewaan lahan.

Hal tersebut disebabkan harga sewa lahan kosong untuk tanah eks bengkok terlalu tinggi.

Atas permasalahan tersebut Kepala Bidang Aset menyatakan sebagai berikut:

- Pemkot Semarang sejak tahun 1997 sampai sekarang telah melaksanakan pemanfaatan tanah bekas bengkok/bondo desa melalui lelang garapan yang diikuti warga masyarakat;
- Pelaksanaan lelang garapan dilaksanakan dengan penetapan tarif tidak berdasarkan Perda Nomor: 3 Tahun 2012 karena dalam ketentuan tersebut untuk rumus penetapan nilai sewa lahan kosong tidak dapat diaplikasikan untuk jenis usaha pertanian karena terlalu tinggi, tidak realistik dan tidak sesuai harga pasar, sedangkan pengawasan pelaksanaan lelang dan simulasi berdasarkan Perda. Atas permasalahan tersebut Pemkot telah mengajukan perubahan Perda tersebut.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang untuk meninjau kembali Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha supaya mencerminkan harga sewa yang wajar.

13. Penyetoran Bunga/Bagi Hasil dan Pendapatan dari Biaya Administrasi Dana Bergulir Tidak Tertib

Investasi non permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan akan digulirkan kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana bergulir dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) melalui lembaga perantara. Lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling agency*) mempunyai tanggung jawab dalam hal penyaluran dana dan tidak berwenang dalam proses menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir. Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.700.000.000,00 terdiri dari :

a. Bank Pasar (BP)

Pemerintah Kota menempatkan dana bergulir kepada Bank Pasar sebesar Rp2.700.000.000,00. Kerjasama antara kedua belah pihak diatur dalam Surat Perjanjian No.510.72/1104 tanggal 19 April 2013 tentang Kerjasama Pelaksanaan Program No.17/BPSMG/IV/2013 Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Semarang. DiskopUKM telah membuka enam rekening giro sebagai tempat penampungan pengelolaan dana bergulir yaitu Rekening Penampungan Pokok UKM, Rek. Penampungan Pokok LKM, Rekening Penampungan Pokok Koperasi, Rekening Penampungan Bunga UKM, Rekening Penampungan Bunga LKM, dan Rekening Penampungan Bunga Koperasi.

b. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Pemerintah Kota Semarang menempatkan dana bergulir BMI sebesar Rp1.000.000.000,00. Kerjasama antara antara kedua belah pihak diatur dalam Surat Perjanjian No.050/2910 tanggal 13 September 2013 tentang Program Pengelolaan Dana Bergulir Syariah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Semarang. DiskopUKM telah membuka dua rekening giro sebagai tempat penampungan pengelolaan dana bergulir yaitu Rekening Penampungan Pokok dan Rekening Penampungan Bagi Hasil.

c. Bank Jateng

Pemerintah Kota menempatkan dana bergulir Bank Jateng Rp1.000.000.000,00. Kerjasama antara kedua belah pihak diatur dalam Surat Perjanjian No.518/4123 tentang Program Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi, No.005/HT.01.01/021/2014 Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Semarang, pada tanggal 10 November 2014. DiskopUKM telah membuka tiga rekening giro sebagai tempat penampungan pengelolaan dana bergulir yaitu Rekening Penampungan Pokok, Rekening Penampungan Bunga dan Rekening Penampungan Pembinaan dan Penagihan Kredit Non Lancar.

Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan dana bergulir diketahui :

- a. Tidak semua bunga/bagi hasil yang berasal dari rekening penampungan maupun bunga/bagi hasil dari pinjaman disetorkan ke kas daerah.

DiskopUKM secara berkala telah menyetorkan bunga/bagi hasil pengelolaan dana bergulir ke Kasda namun tidak semua bunga/bagi hasil disetorkan ke Kasda. Dari masing-masing rekening penampungan per 31 Desember 2014 diketahui masih terdapat saldo pada rekening penampungan bunga/bagi hasil yaitu :

- Bank Pasar rek no. 001.10.00147 Rp5.237.088,54
- Bank Pasar rek no. 001.10.00148 Rp677.502,57
- Bank Pasar rek no. 001.10.00145 Rp2.113.646,51

Disamping itu bunga/bagi hasil yang berasal dari rekening penampungan pokok belum di setorkan ke kas daerah.

- b. Pendapatan dari biaya administrasi sebesar 1% setiap pencairan kredit belum diterima Pemkot Semarang

Bank Jateng telah menggulirkan dana lagi kepada koperasi pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp600.000.000,00. Terhadap perguliran kembali tersebut belum disetor biaya administrasi 1% yang merupakan bagian hak Pemerintah Kota Semarang ke kasda sebesar Rp6.000.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Surat Perjanjian Nomor: 050/2910 Nomor: 229/BMI/SMG/IX/2013 antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang tentang Program Pengelolaan Dana Bergulir Syariah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Semarang, pada tanggal 13 September 2013. Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Rekening-rekening tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku pada saat ini dan bagi hasil yang ditampung dalam rekening tersebut disetor ke Kas Umum Daerah Kota Semarang setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- b. Surat Perjanjian No. 510.72/1104 No. 17/BPSMG/IV/2013 antara Pemerintah Kota Semarang dengan PD Bank Pasar Kota Semarang tentang Kerjasama Pelaksanaan Program Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Semarang, pada tanggal 19 April 2013 pasal 5 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang sebesar 3% (tiga perseratus) yang disetor ke Kas Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Pihak kedua.
- c. Surat Perjanjian No. 518/4123 No. 005/HT.01.01/021/2014 antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang tentang Program Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Semarang, pada tanggal 10 November 2014. Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap pencairan kredit kepada penerima kredit dibebankan biaya administrasi sebesar 2% (dua perseratus) dari plafond kredit dengan perincian sebagai berikut: a. Biaya administrasi kredit 1% (satu perseratus) untuk pihak kedua; b. Biaya pembinaan dan penagihan kredit non lancar 1% (satu perseratus) dimasukkan dalam rekening tersendiri atas nama Pihak Pertama untuk disetorkan ke Kas Daerah Kota Semarang.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Semarang tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan atas bunga bagi hasil dan pendapatan dari biaya administrasi.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM tidak tertib dalam melakukan penyetoran seluruh bunga/bagi hasil dana dari pengelolaan dana bergulir serta pendapatan dari biaya administrasi.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan penjelasan bahwa saldo pada rekening penampungan bunga/bagi hasil tersebut karena:

- a. Saldo pada rekening Bank Pasar merupakan saldo posisi akhir tahun 2014 yang belum disetor ke Kas Daerah sebagai PAD dan telah disetorkan pada tanggal 7 April 2015 sebesar Rp17.145.000,00; dan
- b. Pendapatan biaya administrasi 1% sebesar Rp6.000.000,00 merupakan hak Pemkot Semarang yang belum disetorkan ke Kas Daerah karena terjadi kesalahan administrasi di Bank Jateng dan sudah disetorkan ke rekening Kas Daerah Nomor: 1.021.00066.8 pada tanggal 15 Mei 2015.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang untuk memerintahkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk lebih tertib menyetorkan saldo yang tersimpan di dalam rekening penampungan bunga/bagi hasil ke kas daerah.

14. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan pada Tiga SKPD Kurang Memadai

Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Semarang menganggarkan kegiatan Belanja Modal (*unaudited*) sebesar Rp.1.310.439.327.122 dan direalisasikan sebesar Rp800.181.230.907,00 atau 61%. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi Belanja Modal pada tiga SKPD diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan pada Dinas Pasar

Kegiatan belanja modal pada Dinas Pasar Kota Semarang diantaranya digunakan untuk Pembangunan Pasar Klithikan Penggaron Tahap II dan Pembangunan Pasar Tradisional Terpadu Modern Pasar Rejomulyo. Pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pembangunan Pasar Klithikan Penggaron Tahap II

Pekerjaan Pembangunan Pasar Klithikan Pasar Penggaron Tahap II dilaksanakan oleh PT.Ark berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.4/3049/2014 tanggal 8 Agustus 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp9.068.884.000,00. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 135 hari kalender, dari 8 Agustus – 20 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) Nomor 602.4/3050/2014 tanggal 8 Agustus 2014. Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan untuk yang pertama kali (PHO) pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 602.52/5396/2014.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut;

- a) Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sesuai SP2D Nomor 4659/LS/2014/RT tgl 08/09/2014 sebesar Rp1.921.776.800,00;
- b) Pembayaran *Termyn I* sesuai SP2D Nomor 6275/LS/2014/RT tgl 05/11/2014 sebesar Rp2.690.487.520,00;
- c) Pembayaran *Termyn II* sesuai SP2D Nomor 8191/LS/2014/RT tgl 19/12/2014 sebesar Rp2.306.132.160,00;

- d) Pembayaran *Termyn III* sesuai SP2D Nomor 9661/LS/2014/RT tgl 30/12/2014 sebesar Rp2.690.487.520,00;

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada 16 April 2015 bersama PPK, PPTK, Kontraktor Pelaksana, dan didampingi staf Inspektorat Kota Semarang, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp7.549.090,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan

Pasar Klithikan Penggaron Tahap II

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume			Kelebihan Pembayaran (Rp)
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4x7
	Blok II Lantai I						
1	Pekerjaan Tanah Sirtu t.40	M3	134.250,00	2.925,46	2.897	28,46	3.820.755,00
	Pekerjaan Kusen dan Aluminium						
	<i>Handrail railing tangga</i>	M'	500.000,00	34,80	33,65	1,15	575.000,00
	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding						
	<i>Keramik lantai 40x40cm polish</i>	M2	165.965,00	811	792	19	3.153.335,00
				JUMLAH			7.549.090,00

2) Pembangunan Pasar Modern Rejomulyo Tahap II

Pekerjaan Pembangunan Pasar Rejomulyo dilaksanakan oleh PT. BEST berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.4/2291/2014 tanggal 9 Juni 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp15.149.650.000,00. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 hari kalender, dari tanggal 9 Juni - 5 Desember 2014 berdasarkan SPMK Nomor 602.4/2292/2014 tanggal 9 Juni 2014. Dilakukan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 sehingga hari kontrak menjadi 204 hari kalender. Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan untuk yang pertama kali (PHO) pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Pekerjaan Pertama No. 602.52/5370/2014.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut;

- a) Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sesuai SP2D Nomor 3280/LS/2014/RT tgl 15/07/2014 sebesar Rp3.029.930.000,00; dan
- b) Pembayaran sesuai SP2D Nomor 9749/LS/2014/RT tgl 31/12/2014 sebesar Rp12.119.720.000,00;

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada 6 Mei 2015 bersama PPK, PPTK, Kontraktor Pelaksana, dan didampingi staf Inspektorat Kota Semarang, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp12.985.115,03 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Rejomulyo

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume			Kelebihan Pembayaran (Rp)
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4x7
1	<i>Keramik Lantai 40x40cm Lantai 1</i>	M2	147.715,03	2.569,06	2.557,08	11,98	1.770.069,20
2	<i>Septictank</i>	Bh	6.109.775,43	2	1	1	6.109.775,43

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume			Kelebihan Pembayaran (Rp)
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih	
3	Kusen dan pintu double teakwood	Unit	1.701.756,80	6	3	3	5.105.270,40
				JUMLAH			12.985.115,03

b. Kelebihan pembayaran atas kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Ruang Terapi pada Rumah Sakit Umum Daerah Semarang

Kegiatan belanja modal pada Rumah Sakit Umum Daerah Semarang diantaranya digunakan untuk Pembangunan Gedung Terapi. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. TMS berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027.2/1680/2014, tanggal 17 Juni 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp8.848.000.000,00. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 hari kalender, mulai dari 17 Juni – 13 Desember 2014. Bertindak sebagai konsultan pengawas adalah CV. AK.

Pekerjaan telah selesai, dan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 027.2/4085/2014, tanggal 20 Desember 2014, serta telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pembayaran *Termyn I* sesuai SP2D Nomor 3712/LS/2014/RT tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp1.327.200.000,00;
- 2) Pembayaran *Termyn II* sesuai SP2D Nomor 5186/LS/2014/RT tanggal 25 September 2014 sebesar Rp1.880.200.000,00;
- 3) Pembayaran *Termyn III* sesuai SP2D Nomor 6587/LS/2014/RT tanggal 19 November 2014 sebesar Rp1.880.200.000,00;
- 4) Pembayaran *Termyn IV* sesuai SP2D Nomor 8974/LS/2014/RT tanggal 29 Desember 2014 tanggal sebesar Rp3.318.000.000,00; dan
- 5) Pembayaran *Termyn V* sesuai SP2D Nomor 8974/LS/2014/RT tanggal 29 Desember 2014 tanggal sebesar Rp3.318.000.000,00.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada 21 April 2015 bersama perwakilan dari RSUD, Kontraktor Pelaksana, dan didampingi pegawai Inspektorat Kota Semarang, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan untuk pagar railing tangga utama sebesar Rp5.400.000,00.

c. Kelebihan pembayaran atas kegiatan Pelaksanaan Pembangunan GOR Tri Lomba Juang pada Dinas Tata Kota dan Perumahan

Kegiatan belanja modal pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang diantaranya digunakan untuk Pembangunan GOR Tri Lomba Juang. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. SCS dan PT. AS, KSO berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 050/670 tanggal 2 September 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp31.945.458.000,00. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 118 hari kalender, mulai dari 3 September - 29 Desember 2014, berdasarkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) Nomor 050/680 tanggal 3 September 2014.

Pekerjaan telah selesai, dan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 050/4883 tanggal 30 Desember 2014, serta telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Pembayaran *Termyn I* sesuai SP2D Nomor 5177/LS/2014/RT, tanggal 25 September 2014 sebesar Rp6.389.091.600,00;
- 2) Pembayaran *Termyn II* sesuai SP2D Nomor 7297/LS/2014/RT, tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp14.567.128.848,00; dan

- 3) Pembayaran *Termyn III* sesuai SP2D Nomor 9697/LS/2014/RT, tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp10.989.237.552,00.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada 13 April 2015 bersama PPK, PPTK, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan didampingi pegawai dari Inspektorat Kota Semarang, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp74.680.000,00 dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 24 Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan GOR Tri Lomba Juang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume			Kelebihan Pembayaran (Rp)
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4x7
1	Railing tangga stainless steel	M'	800.000,00	33,60	20,60	13	10.400.000,00
2	Railing pagar tribun stainless steel	M'	800.000,00	98,30	49,20	49,10	39.280.000,00
3	SDP Hydrant	Unit	25.000.000,00	1	0	1	25.000.000,00
JUMLAH							74.680.000

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah pada;
 - 1) Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
 - c) Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) Pasal 89 ayat (4) beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan sebesar pekerjaan yang telah terpasang.
- b. Surat Perjanjian (Kontrak) masing-masing pekerjaan yang menyatakan bahwa Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- c. Pasal 95 Ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp100.614.205,00 atas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kontraktor Pelaksana tidak mematuhi kontrak dalam melaksanakan pekerjaan;

- b. Kepala Dinas Pasar, Kepala RSUD, dan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Belanja Modal;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan masing-masing kegiatan tidak cermat dalam menguji tagihan dari penyedia jasa; dan
- d. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) masing-masing kegiatan tidak cermat dalam menyetujui MC-100 dan melaksanakan pengujian pada saat serah terima pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pasar menyatakan bahwa Pelaksana pembangunan Pasar Klithikan dan Penggaron Tahap II memberikan perhitungan backup volume tanah urugan 2.879 m³ dan Pelaksana pembangunan Pasar Tradisional Terpadu Modern Rejomulyo tahap II untuk kekurangan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan pada masa pemeliharaan.

Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp100.614.205,00 tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp100.614.205,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a pembangunan Pasar Klitikan Penggaron tahap II Kota Semarang sebesar Rp7.549.090,00 tanggal 19 Mei 2015;
- b pembangunan pasar tradisional terpadu modern Pasar Rejomulyo sebesar Rp12.985.115,03 tanggal 19 Mei 2015;
- c pekerjaan pembangunan ruang terapi pada RSUD Semarang sebesar Rp5.400.000,00 pada 20 Mei 2015; dan
- d pekerjaan GOR Tri Lomba Juang sebesar Rp74.680.000,00 pada tanggal 19 Mei 2015.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala Dinas Pasar, Direktur RSUD dan Kepala Dinas Tata Kota dan perumahan selaku Pengguna Anggaran untuk :

- a. Menginstruksikan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan supaya lebih cermat dalam melaksanakan pemeriksaan pekerjaan yang diserahterimakan;
- b. Memberikan teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan ketentuan.

15. Pemberian Hibah Berupa Barang Kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga Belum Didukung NPHD dan SK Walikota

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2014 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp928.942.801.796,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp797.972.204.629,00 atau sebesar 85,90 %. Realisasi tersebut antara lain digunakan untuk belanja barang dan jasa yang dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebesar Rp70.120.478.660,00. Pengelolaan pemberian hibah berupa barang antara lain diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penunjukkan SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota No. 900/180 dan No. 978/0632/2014, akan tetapi di luar SK tersebut terdapat SKPD yang mengelola hibah berupa barang, yaitu Kecamatan. Adapun tugas dari SKPD pengelola hibah dan bantuan sosial sebagai berikut.

- a. Menerima usulan/proposal dari pemohon untuk disampaikan kepada Walikota, khusus usulan/proposal bantuan sosial dapat secara kolektif;
- b. Melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal yang diajukan oleh pemohon;
- c. Membuat rekomendasi hasil evaluasi terhadap usulan/proposal untuk disampaikan kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- d. Menyusun perencanaan hibah dan bantuan sosial dalam Rencana Kerja;
- e. Menyusun Keputusan Walikota tentang penetapan penerima hibah dan/atau bantuan sosial; dan
- f. Menyiapkan dokumen administrasi berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima.

Mekanisme pengajuan hibah barang dari masyarakat atau pihak ketiga diawali dari penerima hibah mengajukan usulan/proposal kepada Walikota melalui SKPD teknis. SKPD teknis melakukan evaluasi usulan/proposal yang hasilnya berupa rekomendasi dari Kepala SKPD teknis kepada Walikota melalui TAPD. TAPD kemudian memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. Selanjutnya Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan adanya hibah barang kepada masyarakat atau pihak ketiga yang dikelola oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan sebesar Rp68.075.718.560,00 yang belum dilengkapi dengan dokumen administrasi yang dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2012.

Pemberian hibah tersebut berasal dari hasil Musrenbang, pengajuan proposal dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran anggota Dewan. Sedangkan kelengkapan administrasi atas hibah belum lengkap karena hanya didukung dengan BAST tanpa Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan SK Walikota penerima hibah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang diatur dalam:

- a. Pasal 4 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa SKPD pengelola hibah menyiapkan dokumen administrasi berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima;
- b. Pasal 16:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah;
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa NPHD ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah dengan pendeklegasian pendatangan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a) Penyaluran hibah diatas Rp200.000.000,00 ditandatangani oleh Walikota;
 - b) Penandatangan hibah diatas Rp100.000.000,00 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c) Penyaluran hibah sampai dengan Rp100.000.000,00 ditandatangani oleh SKPD/ unit kerja yang ditunjuk sebagai pengelola hibah.

- c. Pasal 17 ayat (5) yang menyatakan bahwa penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara serah terima barang;
- d. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa realisasi hibah berupa barang/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban para pihak tidak jelas.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan belum mematuhi ketentuan pemberian hibah barang kepada masyarakat/pihak ketiga yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012.

Atas permasalahan tersebut Kepala DTKP menyatakan akan melengkapi dokumen administrasi dengan pembuatan NPHD dan SK Walikota Penerima Hibah.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang untuk memerintahkan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan mempedomani dokumen kelengkapan hibah yang diatur dalam berbagai peraturan.

16. Biaya Langsung Non Personil pada 3 Kegiatan Jasa Konsultansi di Dua SKPD Belum Diperhitungkan Secara *at Cost* dan Besarnya Biaya Langsung Non Personil Melebihi 40% Nilai Kontrak

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Semarang TA 2014 adalah sebesar Rp797.972.204.629,00 atau sebesar 85,90% dari sebesar Rp928.942.801.796,00. Belanja barang dan jasa tersebut diantaranya dianggarkan dan direalisasikan untuk belanja jasa konsultansi. Sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rincinya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa Konsultansi yang terdiri dari komponen Biaya Langsung Personil (*Remuneration*), Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kegiatan jasa konsultasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Biaya Langsung Non Personil pada 3 Kegiatan Jasa Konsultansi pada Dua SKPD Belum Diperhitungkan Secara *at Cost*

Berdasarkan pemeriksaan terhadap pekerjaan jasa konsultansi pada 43 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang diketahui sebanyak 40 SKPD sudah mempertanggungjawabkan biaya langsung non personil (*at cost*) sedangkan sebanyak tiga SKPD, yaitu Disbudpar, Dinsospora dan BKD belum mempertanggungjawabkan biaya langsung non personil. Biaya langsung non personil yang belum dipertanggungjawabkan secara *at cost* yaitu sebesar Rp36.917.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Biaya Non Personil

No	SKPD	Kegiatan	Rekanan	Nilai kontrak + PPN	Biaya Langsung	
					Biaya Personil	Biaya Non Personil
1	Disospora	Penyusunan Bahan dan Konsep Draft Raperda	DRD	49.090.909,00	30.000.000,00	15.000.000,00
2	BKD	Kajian Sistem Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)/ Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah (TKPD)	CV CSI	53.714.300,00	30.400.000,00	13.417.500,00
		Jasa Pembuatan Aplikasi CPNS	CV CE	32.727.273,00	21.500.000,00	8.500.000,00
	Jumlah			135.116.482,00	81.900.000,00	36.917.500,00

b. Besarnya Biaya Langsung Non Personil Melebihi 40% Nilai Kontrak

Pemeriksaan terhadap surat perjanjian kerja/kontrak jasa konsultansi menunjukkan bahwa di lima SKPD terhadap 9 kontrak yang biaya langsung non personilnya melebihi 40% dari nilai kontrak sebesar Rp12.590.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26 Biaya Non Personil Melebihi 40% dari Nilai Kontrak

No	SKPD	Kegiatan	Rekanan	Nilai Kontrak	Non Personil	Melebihi 40%	Selisih
1	2	3	4	5	6	7=(6x40%)	8=(6-7)
1	Kantor Diklat	Peningkatan gedung kantor	CV GL	26.125.000,00	12.150.000,00	10.450.000,00	1.700.000,00
2	Kecamatan Banyumanik	Pekerjaan pengawasan pemeliharaan jalan masyarakat	CV Jy	35.000.000,00	20.154.000,00	14.000.000,00	6.154.000,00
3		pekerjaan pengawasan pemeliharaan saluran air	CV GL	21.725.000,00	10.418.500,00	8.690.000,00	1.728.500,00
4		pekerjaan pengawasan pemeliharaan talud	CV TD	13.575.000,00	5.550.500,00	5.430.000,00	120.500,00
5		pekerjaan pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	CV AK	2.600.000,00	1.531.000,00	1.040.000,00	491.000,00
6	Kecamatan Mijen	Konsultasi pengawasan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman	CV Pr	20.825.000,00	8.657.000,00	8.330.000,00	327.000,00
7	Kecamatan Pedurungan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor)	CV CD	32.380.000,00	13.105.000,00	12.952.000,00	153.000,00
8	Kecamatan Tugu	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum (Perencanaan jalan jembatan dan kualitas kehidupan)	CV CD	19.757.000,00	8.861.250,00	7.902.800,00	958.450,00
9		Penyelenggaraan dan pengelolaan	CV CAK	19.757.000,00	8.861.250,00	7.902.800,00	958.450,00

No	SKPD	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum (Perencanaan fasilitasi hasil musrenbang)	Rekanan	Nilai Kontrak	Non Personil	Melebihi 40%	Selisih
	Jumlah						12.590.900,00

Atas permasalahan tersebut sudah disetorkan ke kasda sebesar Rp12.590.900,00 pada bulan Mei 2015.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran IV-A yang berbunyi Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha – A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada huruf (i) yang menyatakan bahwa:

- a. Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain; dan
- b. Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara survai lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran biaya langsung non personil sebesar Rp36.917.500,00 belum dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan pengendalian PPKom dan PPTK atas pekerjaan jasa konsultansi tersebut kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyatakan sependapat dengan temuan dari tim pemeriksa, hal tersebut dikarenakan kami mengasumsikan bahwa belanja jasa non konsultansi pada BKD berupa kajian sehingga keseluruhan biaya yang dikeluarkan menjadi tanggungjawab rekanan. Pada tanggal 27 Mei 2015 telah disampaikan bukti pertanggungjawaban atas biaya non personil yang sudah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan. Untuk bukti pertanggungjawaban biaya non personil Dinsospora bukti pertanggungjawaban telah disampaikan pada tanggal 26 Mei 2015.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang untuk memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dan Badan Keuangan Daerah untuk melakukan verifikasi pertanggungjawaban biaya langsung non personil.

17. Pemberian Honorarium Bagi PNS di Lingkungan Pemkot Semarang Melebihi Standar Satuan Harga Walikota

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Semarang Tahun 2014 menganggarkan belanja senilai Rp3.737.509.710.000 direalisasikan senilai Rp2.957.852.895.850 atau 79,14%. Realisasi tersebut antara lain dipergunakan untuk pemberian honor bagi PNS di lingkungan Pemkot Semarang yang terlibat dalam tim dan atau susunan kepanitian. Pembentukan tim dan atau kepanitian diatur dengan SK Walikota, SK Sekda maupun SK kepala Dinas/Kantor/Badan tergantung dengan jumlah anggota yang terlibat dalam susunan tim dan atau kepanitian. Standarisasi pemberian honor kepada PNS disesuaikan dengan jabatan dalam tim dan atau panitia sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga yang mengatur antara lain bahwa setiap PNS/CPNS hanya diperbolehkan menerima honor dalam satu bulan paling banyak sepuluh tim/sub tim pada SKPD yang bersangkutan.

Penelusuran lebih lanjut terhadap penerimaan honorarium bagi PNS di 24 SKPD diketahui sebanyak 16 SKPD memberikan honor tim/sub tim kepada pegawai lebih dari sepuluh tim/sub tim senilai Rp272.375.554,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga dilingkungan Pemkot Semarang Tahun 2014 yang diatur dalam Lampiran III Angka 3 yang berbunyi “Setiap PNS/CPNS hanya diperbolehkan menerima honor dalam satu bulan paling banyak 10 Tim/ Sub Tim pada SKPD yang bersangkutan”;

Hal tersebut mengakibatkan Pemkot Semarang tidak dapat memanfaatkan dana pemberian honorarium yang melebihi SSH untuk kegiatan lainnya.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dalam melakukan penyusunan belum memedomani Perwal Nomor 24 Tahun 2013.

Kepala DPKAD, Setda Bagian Organisasi, PSDA dan ESDM, Bapermas dan KB, Bappeda, BKD, BLH, BPPT, Dinas Pertanian, Disbudpar, Disperindag, DKP, Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pasar, Satpol PP dan PJPR menyatakan sependapat dengan temuan dari tim pemeriksa.

Atas permasalahan tersebut sudah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp272.375.554,00 pada bulan Mei 2015.

BPK merekomendasikan kepada Walikota agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemkot Semarang dalam memberikan honorarium bagi Pegawai memedomani Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 1

Rekapitulasi Jurnal Saldo Awal Berdasarkan Akun Level 3

Akun	DR	CR
Neraca		
Akumulasi Penyusutan	5.357.440.948	1.336.412.639.299
Aset Lain-lain	111.899.208.027	118.852.286
Aset Tetap Lainnya	61.724.987.787	-
Aset Tidak Berwujud	17.163.199.615	-
Belanja Dibayar Dimuka	3.170.117.701	-
Cadangan Kerugian Investasi	-	1.080.620.762
Dana Cadangan	47.183.424.649	-
Gedung dan Bangunan	1.416.872.465.950	-
Investasi Non Permanen	4.700.000.000	-
Investasi Permanen	62.846.543.502	-
Jalan, Jaringan dan instalasi	1.283.254.650.817	-
Kas	911.095.611.635	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	66.053.931.000	-
Konstruksi Dalam Penggerjaan	109.911.348.104	-
Penyisihan Piutang	-	249.334.957.061
Peralatan dan Mesin	870.129.460.956	5.000.000
Persediaan	41.258.985.521	9.019.037
Piutang	280.698.011.322	-
Piutang Lain-lain	4.390.829.834	-
RK Dinas	-	-
RK Dinas Aset	5.570.181.011	-
Tanah	3.561.798.824.539	-
	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	1.816.665.353
Pendapatan Diterima Dimuka	-	1.928.887.805
Utang Belanja	-	10.146.944.477
Utang Bunga	-	62.604.529
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	757.089.657
Utang Pajak	-	4.278.558
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	4.438.359.705
EKUITAS DANA	1.605.773.489.194	8.864.742.250.133
Laporan Operasional		
Belanja Barang Dan Jasa	5.456.550	-
Jumlah	10.470.858.168.662	10.470.858.168.662

Lampiran 2

Rekapitulasi Jurnal LO Berdasarkan Akun Level 3

Akun	DR	CR
Aset Tetap Lainnya	8.850.992.477	-
Dana Cadangan	25.439.914.000	-
Gedung dan Bangunan	172.957.696.910	273.541.155
Investasi Permanen	20.839.000.000	-
Jalan, Jaringan dan instalasi	364.448.911.371	1.035.500
Kas	5.098.278.273.041	15.625.124.025.447
Peralatan dan Mesin	124.092.911.106	10.220.000
Piutang	1.323.269.286.237	243.825.036.765
Tanah	66.807.547.024	900.000
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.816.665.353	-
Utang Pajak	107.750.013.006	107.836.872.002
RK Kasda	13.773.896.064.617	3.038.183.861.111
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Dae	-	399.557.971.017
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	140.790.952.279
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah d	-	69.405.952.776
Dana Alokasi Khusus	-	29.236.965.000
Dana Alokasi Umum	-	1.104.739.473.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	283.917.499.000
Hasil Pajak Daerah	-	1.872.593.782.878
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	8.036.099.560
Hasil Retribusi Daerah	435.843.850	101.115.542.326
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.894.500.363	105.875.056.544
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota Da	870.104.900	-
Belanja Bantuan Sosial	6.301.500.000	-
Belanja Barang Dan Jasa	707.518.648.856	3.257.920.130
Belanja Bunga	250.000.000	-
Belanja Hibah	44.933.676.000	1.335.809.297
Belanja Pegawai	1.280.316.847.991	1.626.929.335
Belanja Tidak Terduga	1.816.373.525	39.325.505
Jumlah	23.136.784.770.627	23.136.784.770.627

Rekapitulasi Jurnal Penyesuaian Berdasarkan Akun Level 3

Akun	DR	CR
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Dae	-	399.557.971.017
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	140.790.952.279
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah d	-	69.405.952.776
Dana Alokasi Khusus	-	29.236.965.000
Dana Alokasi Umum	-	1.104.739.473.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	283.917.499.000
Hasil Pajak Daerah	-	791.509.586.089
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	8.036.099.560
Hasil Retribusi Daerah	435.843.850	102.755.489.643
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.894.500.363	105.875.056.544
	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota Da	870.104.900	-
Belanja Bantuan Sosial	6.301.500.000	-
Belanja Barang Dan Jasa	707.518.648.856	3.257.920.130
Belanja Bunga	250.000.000	-
Belanja Hibah	44.933.676.000	1.335.809.297
Belanja Modal	737.158.058.888	285.696.655
Belanja Pegawai	1.280.316.847.991	1.626.929.335
Belanja Tidak Terduga	1.816.373.525	39.325.505
Penggunaan SILPA	-	-
Pembayaran Pokok Hutang	1.816.665.353	-
Pembentukan Dana Cadangan	25.439.914.000	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.839.000.000	-
SILPA	3.042.370.725.830	2.833.591.133.726
	5.875.961.859.556	5.875.961.859.556

Rekapitulasi Jurnal Penyesuaian Berdasarkan Akun Level 3

Akun	DR	CR
Akumulasi Penyusutan	105.173.561.398	361.612.409.397
Aset Lain-lain	2.854.842.730	40.185.430.573
Aset Tetap Lainnya	7.162.231.393	2.092.361.110
Aset Tidak Berwujud	534.515.500	869.000
Belanja Dibayar Dimuka	4.481.574.951	3.170.117.701
Cadangan Kerugian Investasi	171.603.449	-
Dana Cadangan	3.048.438.504	-
Gedung dan Bangunan	80.483.750.770	69.158.575.926
Investasi Permanen	1.059.011.543	10.418.052.936
Jalan, Jaringan dan instalasi	15.587.623.315	15.569.968.610
Kas	17.707.001.323.251	17.568.438.725.118
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	54.997.100.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	35.920.053.268	45.671.686.935
Penyisihan Piutang	913.398.379	25.897.395.429
Peralatan dan Mesin	30.960.412.104	47.510.585.903
Persediaan	72.137.143.615	84.910.361.031
Piutang	11.368.427.442	6.090.448.350
Piutang Lain-lain	38.528.429.574	654.170.894
RK Dinas	17.354.794.592.029	17.408.808.368.718
RK Dinas Aset	17.767.661.539	-
Tanah	651.722.891.200	2.061.630.958
Pendapatan Diterima Dimuka	1.698.887.805	1.481.454.679
Utang Belanja	10.146.944.477	11.970.121.335
Utang Bunga	62.604.529	874.741
Utang Jangka Pendek Lainnya	757.089.657	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	213.120.499	205.998.800
EKUITAS DANA	178.469.952.061	845.546.613.547
Hasil Pajak Daerah	3.797.821.212	9.392.401.010
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	418.052.936	224.818.315
Hasil Retribusi Daerah	1.724.197.979	11.991.127.229
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	654.170.894	53.514.554.574
Pendapatan Hibah Aset	-	162.541.894.142
Beban Penyusutan Aset Tetap	478.515.729.204	1.105.146.422
Belanja Barang Dan Jasa	120.897.198.927	92.929.457.983
Belanja Bunga	874.741	62.604.529
Belanja Pegawai	253.760.000	1.066.564.980
Jumlah	36.939.281.890.875	36.939.281.890.875

Lampiran 5

Transaksi RK Kasda di Jurnal LO dan Jurnal Penyesuaian

Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai
Jurnal LO			
[06] Koreksi realisasi belanja/aset (Modal)	285.696.655	[01] Terima SP2D UP/GU/TU/LS Gaji	1.942.026.027.651
[07] Setor sisa uang ke kas daerah	207.089.940.733	[02] Terima SP2D LS Barang Jasa (Modal)	647.253.498.219
[1] Setor pendapatan	13.566.520.427.229	[03] Terima SP2D LS Barang Jasa (Barang Jasa)	442.573.991.028
Jumlah Jurnal LO	13.773.896.064.617	[2] Koreksi setor pendapatan	6.330.344.213
Jurnal Penyesuaian			
Penyesuaian karena setor sisa belanja th 2013	26.819.500	Koreksi	350.000
Penyesuaian pengakuan pendapatan dana kapitasi januari s/d april	7.874.087.000	Jurnal Penyesuaian Giro Bln Februari 2014	144.474.712.588
saldo kas bendahara pengeluaran	664.031.000		
Setor Kasda sisa kas tahun 2013	551.068		
CPA tahun 2013	2.455.525		
Penerimaan Desember 2013 yang disetorkan Januari 2014	2.777.500		
Setor kas bendahara pengeluaran awal tahun	9.563.989		
penyesuaian saldo awal	1.500.000		
setor kasda penerimaan pendptan cibubur	61.020.000		
penyesuaian saldo awal	48.565.500		
Penyesuaian Giro Bln Januari 2014	64.064.000.000		
Penyesuaian setor kas bendahara pengeluaran	2.879.670		
penyesuaian saldo awal	2.739.541		
tpp	1.350.000		
penyesuaian saldo kas di bendahara pengeluran	3.873.161		
penyesuaian saldo awal	345.063		
Setor ke Kasda	825.000		
Jumlah Jurnal Penyesuaian	72.767.383.517		144.475.062.588
Jumlah Jurnal LO dan Jurnal Penyesuaian	13.846.663.448.134		3.182.658.923.699

Transaksi RK Dinas pada Jurnal Penyeuaian PPKD

Lampiran 6

NOBUKU	DEBET Keterangan	Nilai	NOBUKU	KREDIT KETERANGAN		Sum of JUMLAH
1.20.05-J073	Penerimaan Kasda Bln Januari 2014	315.525.287.412	1.20.05-J074	Penerimaan Deposito Kasda Bln Januari 2014		460.000.000.000
1.20.05-J075	Pencairan SP2D UP/GU/TU Bln Januari 2014	10.947.544.052	1.20.05-J077	Pencairan TPU Bln Januari 2014		232.142.028.459
1.20.05-J076	Pencairan SP2D LS Bln Januari 2014	76.719.771.819	1.20.05-J078	Penerimaan Giro Kasda Bln Februari 2014		62.309.726.912
1.20.05-J079	Penerimaan Deposito Kasda Bln Februari 2014	19.500.000.000	1.20.05-J082	Pencairan STS Bln Februari 2014		387.082.708.763
1.20.05-J080	Pencairan SP2D UP/GU/TU Bln Februari 2014	49.237.230.090	1.20.05-J084	Penerimaan Giro di Kasda Bln Maret 2014		50.353.755.173
1.20.05-J081	Pencairan SP2D LS Bln Februari 2014	150.561.039.173	1.20.05-J085	Deposito di Kasda Bln Maret 2014		20.000.000.000
1.20.05-J083	Penyeuaian Februari 2014	331.759.152.088	1.20.05-J088	Pencairan TPU Bln Maret 2014		599.462.227.331
1.20.05-J086	Pencairan SP2D UP/GU/TU Bln Maret 2014	95.364.399.800	1.20.05-J102	Pencairan STS di Kasda Bulan April 2014		849.532.718.369
1.20.05-J087	Pencairan SP2D LS Bln Maret 2014	246.459.632.858	1.20.05-J108	Pencairan DEPOSIRO di Kasda Bulan Mei 2014		10.000.000.000
1.20.05-J089	Penyeuaian Giro di Kasda Bln Maret 2014	257.638.194.673	1.20.05-J111	Penerimaan STS di Kasda Bulan Mei 2014		1.094.280.033.531
1.20.05-J098	Pencairan Giro di Kasda Bulan April 2014	253.138.194.673	1.20.05-J127	Pencairan STS Bln Juni 2014		1.412.912.011.661
1.20.05-J099	Pencairan Deposito di Kasda Bulan April 2014	4.500.000.000	1.20.05-J142	Penerimaan STS Bulan Juli 2014		1.520.303.397.003
1.20.05-J100	Pencairan SP2D UP/GU/TU di Kasda Bulan April 2014	130.260.252.507	1.20.05-J156	Penerimaan STS Bulan Agustus 2014		1.758.064.509.517
1.20.05-J101	Pencairan SP2D LS di Kasda Bulan April 2014	342.743.310.659	1.20.05-J158	Penerimaan Deposito di Kasda Bulan Agustus 2014		25.000.000.000
1.20.05-J107	Pencairan GIRO di Kasda Bulan Mei 2014	91.978.097.328	1.20.05-J172	Bln September 2014		290.964.283.541
1.20.05-J109	Pencairan SP2D UP/GU/TU di Kasda Bulan Mei 2014	157.680.565.381	1.20.05-J179	Penerimaan STS Bln Oktober 2014		2.424.968.523.759
1.20.05-J110	Pencairan SP2D LS di Kasda Bulan Mei 2014	458.092.215.619	1.20.05-J190	Penerimaan Deposito Bulan Oktober 2014		174.000.000.000
1.20.05-J112	Jurnal Penyeuaian Giro di Kasda Bulan Mei 2014	294.551.057.875	1.20.05-J195	Penerimaan Giro Bulan Nopember 2014		14.399.511.897
1.20.05-J125	Pencairan SP2D UP/GU/TU Bln Juni 2014	189.334.830.912	1.20.05-J199	Penerimaan STS Bln Nopember 2014		2.738.208.378.156
1.20.05-J126	Pencairan SP2D LS Bln Juni 2014	614.571.431.777	1.20.05-J201	Penyeuaian Deposito Bulan Nopember 2014		39.009.468.122
1.20.05-J128	Penyeuaian Kasda Jasa Giro Bln Juni 2014	558.917.965.119	1.20.05-J217	Pencairan STS Bulan Desember 2014		3.245.815.086.524
1.20.05-J138	Penerimaan Giro Bank Bulan Juli 2014	342.064.073.090				
1.20.05-J140	Pencairan SP2D UP/GU/TU Bulan Juli 2014	239.342.698.418				
1.20.05-J141	Pencairan SP2D LS Bulan Juli 2014	960.019.022.703				
1.20.05-J143	Penyeuaian GIRO di Kasda Bln Juli 2014	320.941.675.882				
1.20.05-J154	Pencairan SP2D UP/GU/TU Bulan Agustus 2014	269.273.920.869				
1.20.05-J155	Pencairan SP2D LS Bulan Agustus 2014	1.076.676.547.831				
1.20.05-J157	Penerimaan Giro Bank di Kasda Bulan Agustus 2014	345.941.675.882				
1.20.05-J177	Pencairan SP2D UP/GU/TU Bulan Oktober 2014	576.789.163.809				
1.20.05-J178	Pencairan SP2D LS Bulan Oktober 2014	1.377.695.077.380				
1.20.05-J189	Penerimaan Giro Bank Bulan Oktober 2014	823.078.324.356				
1.20.05-J197	Pencairan SP2D UP/GU/TU Bulan Nopember 2014	646.294.983.843				
1.20.05-J198	Pencairan SP2D LS Bulan Nopember 2014	1.570.453.830.335				
1.20.05-J200	Penyeuaian Giro Bulan Nopember 2014	521.459.563.978				
1.20.05-J213	Pencairan Giro Bank di Kasda Bulan Desember 2014	164.870.255.905				

NOBUKU	Keterangan	DEBET		KREDIT	
		Nilai	NOBUKU	KETERANGAN	Sum of JUMLAH
1.20.05-J214	Pencairan Deposito di Kasda Bulan Desember 2014	224.869.999,991			
1.20.05-J215	Pencairan SP2D UP/GU/TU Bulan Desember 2014	699.256.120,435			
1.20.05-J216	Pencairan SP2D LS Bulan Desember 2014	2.414.839.658,016			
1.20.05-J218	Penyesuaian Giro di Kasda Bulan Desember 2014	131.447.825,491			
	Jumlah	17.354.794.592,029			17.408.808.368,718

Lampiran 7

Transaksi RK Dinas Aset dan RK Aset

RK Dinas Aset (Aset)	DEBET	KREDIT
BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	142.289.898	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SEMARANG	312.720.000	
DINAS PASAR	195.689.000	
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME	12.822.000	
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.605.469.171	
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	508.450.698	
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	8.663.585.000	
SEKRETARIAT DAERAH	4.896.816.783	
RK Dinas Aset (Ekuitas)		
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		5.570.181.011
	23.337.842.550	
RK Aset (Aset)		
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		62.453.212
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		29.834.190
BAPPEDA		15.070.770
DINAS BINA MARGA		30.300.506
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		442.420.968
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SEMARANG		215.604.369
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		14.683.937
DINAS KESEHATAN KOTA		69.946.889
DINAS KOPERASI UMKM		244.487.008
DINAS PASAR		356.581.853
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME		15.150.253
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		45.450.759
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		14.683.937
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		243.624.836
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA		30.300.506
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN		30.300.506
INSPEKTORAT		17.108.446
KANTOR PENDIDIKAN DAN LATIHAN		8.663.585.000
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		91.452.142
KECAMATAN BANYUMANIK		214.918.110
KECAMATAN CANDISARI		183.644.009
KECAMATAN GAJAH MUNGKUR		152.919.498
KECAMATAN GAYAMSARI		140.741.751
KECAMATAN GENUK		264.187.499
KECAMATAN GUNUNGPATI		229.218.050
KECAMATAN MIJEN		251.079.917
KECAMATAN NGALIYAN		161.740.269
KECAMATAN PEDURUNGAN		211.031.689
KECAMATAN SEMARANG BARAT		232.499.679
KECAMATAN SEMARANG SELATAN		176.065.028
KECAMATAN SEMARANG TENGAH		230.714.755
KECAMATAN SEMARANG TIMUR		156.135.918
KECAMATAN SEMARANG UTARA		152.698.906
KECAMATAN TEMBALANG		225.588.190
KECAMATAN TUGU		149.897.095
Jumlah	46.675.685.100	19.336.301.461

Daftar Gedung dan Bangunan yang Diasuransikan Berbeda Dengan Data Dinas Pendidikan

No	No Urut	Nama Gedung/Bangunan	Harga Pertanggungan	Jumlah Premi
1	162	GEDUNG SDN JOMBLANG 06	605.100.000,00	519.176,00
2	163	GEDUNG SDN JOMBLANG 07	566.900.000,00	486.400,00
3	164	GEDUNG SDN JOMBLANG 08	1.304.500.000,00	1.119.261,00
4	166	GEDUNG SDN CANDI 05	602.000.000,00	516.516,00
5	167	GEDUNG SDN CANDI 06	592.434.195,00	508.309,00
6	168	GEDUNG SDN CANDI 07	237.633.229,00	203.889,00
7	171	GEDUNG SDN KARANGANYAR GUNUNG 05	1.606.400.000,00	1.378.291,00
8	173	GEDUNG SDN JATINGALEH 04	631.750.000,00	542.042,00
9	177	GEDUNG SDN TEGALSARI 05	385.478.931,00	330.741,00
10	232	SDN GENUKSARI 0	1.481.450.000,00	1.271.084,00
11	244	SDN BANGETAYU WETAN 03	1.000.320.288,00	858.275,00
12	245	SDN BANGETAYU WETAN 04	491.000.000,00	421.278,00
13	247	SDN GEBANGSARI 02	616.286.000,00	528.773,00
14	287	SDN SUKOREJO 05	750.000.000,00	643.500,00
15	293	SD BUBAKAN 01	772.179.694,00	662.540,00
16	349	SD PEDURUNGAN TENGAH 01	683.859.371,00	586.751,00
17	364	SDN PEDURUNGAN LOR 03	390.476.886,00	335.029,00
18	366	SDN PEDURUNGAN 01	656.196.391,00	563.017,00
19	367	SDN PEDURUNGAN 02	519.060.238,00	445.354,00
20	368	SDN PEDURUNGAN 03	335.000.000,00	287.430,00
21	369	SDN PEDURUNGAN 04	667.000.000,00	572.286,00
22	370	SDN PEDURUNGAN 07	548.709.536,00	470.793,00
23	371	SDN PEDURUNGAN 08	308.000.000,00	264.264,00
24	380	SD GISIKDRONO 04	300.279.936,00	257.640,00
25	386	SD KARANGAYU 04	428.600.000,00	367.739,00
26	394	SD KALIBANTENG KULON 02	909.400.000,00	780.265,00
27	395	SDN LEBDOSARI 02	435.500.000,00	373.659,00
28	397	SDN BOJONG SALAMA 03	319.500.000,00	274.131,00
29	403	SDN JATISARI 02	612.580.000,00	525.594,00
30	405	SDN PERUMNAS KRASYAK 02	263.500.000,00	226.083,00
31	406	SDN PERUMNAS KRASYAK 03	597.600.000,00	512.741,00
32	408	SDN KEMBANGARUM 05	355.600.000,00	305.105,00
33	431	SDN MIROTO 03	752.000.000,00	645.216,00
34	432	SDN KEMBANGSARI	604.400.000,00	518.575,00
35	433	SDN KEMBANGPAES	502.041.671,00	430.752,00
36	434	SDN GABAHAN	344.000.000,00	295.152,00
37	435	SDN JAGALAN	434.300.000,00	372.629,00
38	436	SDN TAMAN PEKUNDEN	10.000.000.000,00	8.580.000,00
39	437	SDN KARANGSARI 01	360.000.000,00	308.880,00
40	438	SDN KARANGSARI 02	360.000.000,00	308.880,00
41	439	SDN PENDRIKAN UTARA 01	452.445.819,00	388.199,00
42	440	SDN PENDRIKAN UTARA 02	335.000.000,00	287.430,00
43	441	SDN PENDRIKAN UTARA 03	620.000.000,00	531.960,00
44	442	SDN PENDRIKAN UTARA 04	430.000.000,00	368.940,00
45	443	SDN PENDRIKAN TENGAH 01	551.631.000,00	473.299,00
46	444	SDN BULU 01	485.000.000,00	416.130,00
47	445	SDN SEKAYU 01	624.657.000,00	535.956,00
48	447	SD KARTINI 01	1.278.400.000,00	1.096.867,00
49	449	SD KEMIJEN 05	930.200.000,00	798.112,00
50	450	SD CITARUM 01	2.840.900.000,00	2.437.392,00
51	451	SD PANCAKARYA	1.596.000.000,00	1.369.368,00
52	452	SD TAMAN MALUKU	650.000.000,00	557.700,00
53	453	SD TIRTOYOSO 02	360.100.000,00	308.966,00
54	454	SD MLATIHARJO 03	842.600.000,00	722.951,00
55	460	KTR UPTD PENDIDIKAN KEC SEMARANG UTARA	313.950.000,00	251.788,00
56	463	SDN BOOM LAMA 01	370.300.000,00	317.717,00
57	464	SDN BOOM LAMA 02	376.760.000,00	323.260,00

No	No Urut	Nama Gedung/Bangunan	Harga Pertanggungan	Jumlah Premi
58	465	SDN BULU LOR 01	1.343.700.000,00	1.152.895,00
59	466	SDN BULU LOR 02	785.809.957,00	674.225,00
60	467	SDN DADAPSARI 01	552.810.000,00	474.311,00
61	468	SDN DADAPSARI 02	524.648.784,00	450.149,00
62	469	SDN DARAT LASIMIN	435.000.000,00	373.230,00
63	470	SDN KIP KUNINGAN	418.500.000,00	359.073,00
64	471	SDN PANGGUNG KIDUL 01	888.100.000,00	761.990,00
65	472	SDN PANGGUNG KIDUL 02	562.000.000,00	482.196,00
66	474	SDN PURWOGONDO 01A	1.198.100.000,00	1.027.970,00
67	475	SDN PURWOGONDO 02A	1.151.600.000,00	988.073,00
68	476	SDN TAMAN DELTA MAS 01	500.000.000,00	429.000,00
69	477	SDN TANJUNG MAS 01	533.700.000,00	457.915,00
70	478	SDN TANJUNG MAS 02	476.064.368,00	408.463,00
71	484	SDN SENDANGMULYO 05	1.569.000.000,00	1.346.202,00
72	486	GEDUNG KANTOR JL TAMAN KINIBALU	379.055.000,00	325.229,00
73	516	SDN BENDAN NGISOR 01	375.000.000,00	321.750,00
74	517	SDN BENDAN NGISOR 02	450.000.000,00	386.100,00
75	520	SDN SAMPANGAN 03	572.700.000,00	491.377,00
76	521	SDN SAMPANGAN 04	627.400.000,00	538.309,00
77	524	SDN PETOMPON 05	1.011.400.000,00	867.781,00
78	525	SDN PETOMPON 06	575.000.000,00	493.350,00
79	526	SDN PETOMPON 07	366.500.000,00	314.457,00
80	527	SDN BENDUNGAN 01	2.899.647.868,00	2.487.898,00
81	528	SDN BENDUNGAN 02	2.800.000.000,00	2.402.400,00
82	529	SDN LEMPONGSARI 01	540.000.000,00	463.320,00
83	530	SDN LEMPONGSARI 02	455.000.000,00	390.390,00
84	534	SDN GAJAHMUNGKUR 05	766.275.302,00	657.464,00
85	537	TK NEGERI BERTARAF INTERNASIONAL JL. KLIPANG RAYA	12.610.000.000,00	108.199.380,00
86	538	SD BERTARAF INTERNASIONAL JL KLIPANG RAYA	6.812.300.000,00	5.844.953,00
87	542	KANTOR DINAS PENDIDIKAN	6.109.117.300,00	4.899.512,00
88	543	GEDUNG PKL KOKROSONO	2.434.606.000,00	1.952.554,00
		Jumlah	97.112.014.764,00	180.205.991,00

Pajak Air Tanah Yang Dibayar Secara Konstan Setiap Bulannya

Pengusaha Jasa Boga/Katering yang Mendapat Pemesanan dari Sekretariat Daerah

Pengusaha Jasa Boga/Katering	Omset (Rp)
PT sktj	35.000.000
CV brh	29.800.000
CV ps	123.588.000
CV atn	23.500.000
CV kni	54.300.000
CV um	39.444.000
Sslr	44.875.000
Yc	2.807.287.500
UD asr	65.862.500
Srn	32.475.000
Ac	226.475.000
Sds	19.875.000
Idc	548.705.000
CV ss	179.975.000
Aly	283.289.772
Hjy	33.575.000
Tgh	17.500.000
Ays	21.062.500
Ssj	25.592.000
Dsyc	20.950.000
Ryd	42.200.000
Gm	15.800.000
Smc	90.720.000
Dkc	21.587.500
Src	174.345.000
Total	4.977.783.772
Potensi Pajak Restoran	497.778.377

**Notaris / PPAT yang Tidak Melaporkan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah**

No	Nama Notaris/PPAT	Denda/bulan	Jumlah denda
1	Endah Ratnawati, SH	250.000	3.000.000
2	Kusmijati Halim, SH, M.Kn	250.000	3.000.000
3	Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM (Prof. DR.)	250.000	3.000.000
4	Mustari Sawilin, SH	250.000	3.000.000
5	Niken Puspitarini, SH, M.Kn	250.000	3.000.000
6	Santoso, SH	250.000	3.000.000
7	Sri Asih Sudarmi, SH, M.Kn	250.000	3.000.000
8	Agnes Maria Lanny Widjaja, SH	250.000	3.000.000
9	Andi Mulyono,SH	250.000	3.000.000
10	anna kurniawati,SH	250.000	3.000.000
11	Annie Sudarsih PN Sitanggang, SH	250.000	3.000.000
12	Aris Budiono, SH. MH	250.000	3.000.000
13	Ari Djoko Santoso, SH.MM	250.000	3.000.000
14	B. Purnomo Adhi H, Drs.MM	250.000	3.000.000
15	Bambang Pramusinto, SH	250.000	3.000.000
16	Bambang Riyadi, SH	250.000	3.000.000
17	Damar Susilowati, SH	250.000	3.000.000
18	Dewi Kusuma, SH	250.000	3.000.000
19	Dewi Padusi Daeng Muri, SH., MKn	250.000	3.000.000
20	Dian Ardiati, SH	250.000	3.000.000
21	Djoko Yogyanto, SH	250.000	3.000.000
22	Dwi Fratmawati, SH., MKn	250.000	3.000.000
23	Elisabeth irawati Hidajat, SH	250.000	3.000.000
24	Endang Murdiningrum, SH	250.000	3.000.000
25	FX Bambang Suranggono, S.Sos	250.000	3.000.000
26	Happy Christianto, SH	250.000	3.000.000
27	Hendri Kurniawan, SH	250.000	3.000.000
28	Heni Ratnawati, SH	250.000	3.000.000
29	HM Yenuarso, SIP, MM	250.000	3.000.000
30	Ida Widiyanti, SH	250.000	3.000.000
31	Indah melani Wibowo, SH	250.000	3.000.000
32	Kadar Yugo, SH	250.000	3.000.000
33	Kukuh Sudarmanto, Ssos,SH.,MM	250.000	3.000.000
34	Mariana. SH. SpN	250.000	3.000.000
35	Masita Harumawarti, SH, MKn	250.000	3.000.000
36	Mohammad Turman, SH	250.000	3.000.000
37	Muhammad Hafidh, SH	250.000	3.000.000
38	Mukhammad Khadhika, Drs, Msi	250.000	3.000.000
39	Mustadjab, SH., Mkn	250.000	3.000.000

40	R Aj Siti Awalijah Rini Andrijani, SH	250.000	3.000.000
41	R. Bambang Sabdo Nugroho, SH	250.000	3.000.000
42	Rita Handajani, SH	250.000	3.000.000
43	RM. Soetomo Soeprapto, SH	250.000	3.000.000
44	Sigit Suroso, Drs	250.000	3.000.000
45	Soemaesono, Drs	250.000	3.000.000
46	Sekar Dyah Titisari, SH	250.000	3.000.000
47	Soewondo Raharjo, SH	250.000	3.000.000
48	Sri Endahening, SH	250.000	3.000.000
49	Sri Subekti, SH,.MM., SpN., MH	250.000	3.000.000
50	Stefanus YuwonoST,SH, MBA	250.000	3.000.000
51	Sudardjo, SH	250.000	3.000.000
52	Sudarmadji Muljono, Drs	250.000	3.000.000
53	Sumarjo, SH	250.000	3.000.000
54	Sukron, SH	250.000	3.000.000
55	Tan Bian Tjong, SH	250.000	3.000.000
56	Titiek Setianingrum, SH	250.000	3.000.000
57	Wijaya Trikoranto, Drs	250.000	3.000.000
			171.000.000

Jumlah SP2D GU yang Nilainya Melebihi SP2D UP

No	SKPD	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3
3	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	9
4	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	4
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2
6	BAGIAN HUKUM	-
7	BAGIAN HUMAS	4
8	BAGIAN KERJASAMA	6
9	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4
10	BAGIAN ORGANISASI	4
11	BAGIAN OTONOMI DAERAH	2
12	BAGIAN PEMBANGUNAN	1
13	BAGIAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK	2
14	BAGIAN PEREKONOMIAN	4
15	BAGIAN PERLENGKAPAN	4
16	BAGIAN RUMAH TANGGA DAN SANTEL	-
17	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	4
18	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	-
19	BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	6
20	BAPPEDA	6
21	DINAS BINA MARGA	6
22	DINAS KEBAKARAN	8
23	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	2
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	11
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SEMARANG	4
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1
27	DINAS KESEHATAN KOTA	16
28	DINAS KOPERASI UMKM	8
29	DINAS PASAR	9
30	DINAS PENDIDIKAN	8
31	DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME	10
32	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6
33	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19
34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5
35	DINAS PERTANIAN	11
36	DINAS PSDA DAN ESDM	6
37	DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	9
38	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	8
39	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11
40	INSPEKTORAT	5
41	KANTOR KETAHANAN PANGAN	3
42	KANTOR PENDIDIKAN DAN LATIHAN	11
43	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	21
44	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12
45	KECAMATAN BANYUMANIK	3
46	KECAMATAN CANDISARI	4
47	KECAMATAN GAJAH MUNGKUR	2

No	SKPD	Jumlah
48	KECAMATAN GAYAMSARI	5
49	KECAMATAN GENUK	1
50	KECAMATAN GUNUNGPATI	1
51	KECAMATAN MIJEN	12
52	KECAMATAN NGALIYAN	1
53	KECAMATAN PEDURUNGAN	-
54	KECAMATAN SEMARANG BARAT	8
55	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	6
56	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	8
57	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	4
58	KECAMATAN SEMARANG UTARA	1
59	KECAMATAN TEMBALANG	8
60	KECAMATAN TUGU	5
61	KELURAHAN BANGETAYU KULON	2
62	KELURAHAN BANYUMANIK	5
63	KELURAHAN BENDAN NGISOR	4
64	KELURAHAN BENDUNGAN	2
65	KELURAHAN BUGANGAN	-
66	KELURAHAN BULU LOR	2
67	KELURAHAN CANDI	4
68	KELURAHAN GAJAH MUNGKUR	1
69	KELURAHAN GAYAMSARI	3
70	KELURAHAN GEBANGSARI	1
71	KELURAHAN GEMAH	5
72	KELURAHAN GISIKDRONO	2
73	KELURAHAN JATINGALEH	1
74	KELURAHAN JATISARI	2
75	KELURAHAN KALIBANTENG KULON	2
76	KELURAHAN KALIPANCUR	2
77	KELURAHAN KALISEGORO	1
78	KELURAHAN KARANGROTO	3
79	KELURAHAN KARANGTEMPEL	1
80	KELURAHAN KEDUNGUNDU	6
81	KELURAHAN MANGKANG KULON	4
82	KELURAHAN MANGKANG WETAN	2
83	KELURAHAN METESEH	1
84	KELURAHAN MIROTO	4
85	KELURAHAN MUGASSARI	2
86	KELURAHAN NGALIYAN	1
87	KELURAHAN PALEBON	5
88	KELURAHAN PANGGUNG LOR	1
89	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	4
90	KELURAHAN PEKUNDEN	7
91	KELURAHAN PETERONGAN	4
92	KELURAHAN PLALANGAN	2
93	KELURAHAN PLEBURAN	-
94	KELURAHAN PLOMBOKAN	3
95	KELURAHAN POLAMAN	3
96	KELURAHAN REJOSARI	1
97	KELURAHAN SALAMAN MLOYO	3

No	SKPD	Jumlah
98	KELURAHAN SAMBIREJO	2
99	KELURAHAN SEKAYU	8
100	KELURAHAN SIWALAN	2
101	KELURAHAN SRONDOL WETAN	-
102	KELURAHAN SUMURBOTO	5
103	KELURAHAN SUMURREJO	5
104	KELURAHAN TAMBAKAJI	6
105	KELURAHAN TEGALSARI	2
106	KELURAHAN TEMBALANG	1
107	KELURAHAN TUGUREJO	4
108	KELURAHAN WONOLOPO	2
109	PUSKESMAS BANDARHARJO	2
112	PUSKESMAS BULU LOR	5
113	PUSKESMAS CANDILAMA	2
114	PUSKESMAS GAYAMSARI	4
115	PUSKESMAS GENUK	9
116	PUSKESMAS GUNUNGPATI	2
117	PUSKESMAS HALMAHERA	2
118	PUSKESMAS KAGOK	3
119	PUSKESMAS KARANGANYAR	1
120	PUSKESMAS KARANGAYU	2
121	PUSKESMAS KARANGDORO	1
122	PUSKESMAS KARANGMALANG	3
123	PUSKESMAS KEDUNGMUNDU	1
124	PUSKESMAS KROBOKAN	4
125	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	2
126	PUSKESMAS LEBDOSARI	2
127	PUSKESMAS MANGKANG	7
128	PUSKESMAS MANYARAN	6
129	PUSKESMAS MIJEN	-
130	PUSKESMAS MIROTO	4
131	PUSKESMAS NGALIYAN	4
132	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	2
133	PUSKESMAS NGESREP	6
134	PUSKESMAS PADANGSARI	2
135	PUSKESMAS PANDANARAN	3
136	PUSKESMAS PEGANDAN	-
137	PUSKESMAS PONCOL	5
138	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	1
139	PUSKESMAS PURWOYOSO	1
140	PUSKESMAS ROWOSARI	1
141	PUSKESMAS SEKARAN	1
142	PUSKESMAS SRONDOL	4
143	PUSKESMAS TAMBAKAJI	8
144	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	4
145	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	2
146	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	3
147	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA SEMARANG	2
148	SEKRETARIAT DAERAH	11
149	SEKRETARIAT DPRD	2

No	SKPD	Jumlah
150	SMA NEGERI 1 KOTA SEMARANG	5
151	SMA NEGERI 10 KOTA SEMARANG	6
152	SMA NEGERI 11 KOTA SEMARANG	8
153	SMA NEGERI 12 KOTA SEMARANG	9
154	SMA NEGERI 13 KOTA SEMARANG	7
155	SMA NEGERI 14 KOTA SEMARANG	7
156	SMA NEGERI 15 KOTA SEMARANG	6
157	SMA NEGERI 16 KOTA SEMARANG	6
158	SMA NEGERI 2 KOTA SEMARANG	10
159	SMA NEGERI 3 KOTA SEMARANG	9
160	SMA NEGERI 4 KOTA SEMARANG	6
161	SMA NEGERI 5 KOTA SEMARANG	5
162	SMA NEGERI 6 KOTA SEMARANG	5
163	SMA NEGERI 7 KOTA SEMARANG	7
164	SMA NEGERI 8 KOTA SEMARANG	8
165	SMA NEGERI 9 KOTA SEMARANG	6
166	SMK NEGERI 1 KOTA SEMARANG	6
167	SMK NEGERI 10 KOTA SEMARANG	6
168	SMK NEGERI 11 KOTA SEMARANG	9
169	SMK NEGERI 2 KOTA SEMARANG	7
170	SMK NEGERI 3 KOTA SEMARANG	6
171	SMK NEGERI 4 KOTA SEMARANG	7
172	SMK NEGERI 5 KOTA SEMARANG	7
173	SMK NEGERI 6 KOTA SEMARANG	4
174	SMK NEGERI 7 KOTA SEMARANG	8
175	SMK NEGERI 8 KOTA SEMARANG	7
176	SMK NEGERI 9 KOTA SEMARANG	4
177	SMP NEGERI 1 KOTA SEMARANG	1
178	SMP NEGERI 10 KOTA SEMARANG	-
179	SMP NEGERI 11 KOTA SEMARANG	1
180	SMP NEGERI 12 KOTA SEMARANG	-
181	SMP NEGERI 13 KOTA SEMARANG	3
182	SMP NEGERI 14 KOTA SEMARANG	1
183	SMP NEGERI 15 KOTA SEMARANG	-
184	SMP NEGERI 16 KOTA SEMARANG	2
185	SMP NEGERI 17 KOTA SEMARANG	2
186	SMP NEGERI 18 KOTA SEMARANG	2
187	SMP NEGERI 19 KOTA SEMARANG	2
188	SMP NEGERI 2 KOTA SEMARANG	-
189	SMP NEGERI 20 KOTA SEMARANG	-
190	SMP NEGERI 21 KOTA SEMARANG	-
191	SMP NEGERI 22 KOTA SEMARANG	-
192	SMP NEGERI 23 KOTA SEMARANG	2
193	SMP NEGERI 24 KOTA SEMARANG	2
194	SMP NEGERI 25 KOTA SEMARANG	1
195	SMP NEGERI 26 KOTA SEMARANG	1
196	SMP NEGERI 27 KOTA SEMARANG	1
197	SMP NEGERI 28 KOTA SEMARANG	1
198	SMP NEGERI 29 KOTA SEMARANG	2
199	SMP NEGERI 3 KOTA SEMARANG	2

No	SKPD	Jumlah
200	SMP NEGERI 30 KOTA SEMARANG	1
201	SMP NEGERI 31 KOTA SEMARANG	2
202	SMP NEGERI 32 KOTA SEMARANG	2
203	SMP NEGERI 33 KOTA SEMARANG	1
204	SMP NEGERI 34 KOTA SEMARANG	2
205	SMP NEGERI 35 KOTA SEMARANG	1
206	SMP NEGERI 36 KOTA SEMARANG	2
207	SMP NEGERI 37 KOTA SEMARANG	2
208	SMP NEGERI 38 KOTA SEMARANG	2
209	SMP NEGERI 39 KOTA SEMARANG	1
210	SMP NEGERI 4 KOTA SEMARANG	1
211	SMP NEGERI 40 KOTA SEMARANG	1
212	SMP NEGERI 41 KOTA SEMARANG	2
213	SMP NEGERI 5 KOTA SEMARANG	2
214	SMP NEGERI 6 KOTA SEMARANG	1
215	SMP NEGERI 7 KOTA SEMARANG	2
216	SMP NEGERI 8 KOTA SEMARANG	-
217	SMP NEGERI 9 KOTA SEMARANG	2
218	TK NEGERI KINTELAN KOTA SEMARANG	-
219	TK NEGERI PEMBINA KOTA SEMARANG	-
220	TK NEGERI SENDANGMULYO	-
221	UPTD PENDIDIKAN KEC. BANYUMANIK	10
222	UPTD PENDIDIKAN KEC. CANDISARI	7
223	UPTD PENDIDIKAN KEC. GAJAHMUNGKUR	9
224	UPTD PENDIDIKAN KEC. GAYAMSARI	9
225	UPTD PENDIDIKAN KEC. GENUK	9
226	UPTD PENDIDIKAN KEC. GUNUNGPATI	7
227	UPTD PENDIDIKAN KEC. MIJEN	8
228	UPTD PENDIDIKAN KEC. NGALIYAN	9
229	UPTD PENDIDIKAN KEC. PEDURUNGAN	9
230	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG BARAT	10
231	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG SELATAN	11
232	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG TENGAH	4
233	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG TIMUR	1
234	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG UTARA	-
235	UPTD PENDIDIKAN KEC. TEMBALANG	2
236	UPTD PENDIDIKAN KEC. TUGU	1
		947

SP2D UP Diberikan Lebih dari Satu Kali

No	SKPD	UP 1	UP 2	UP3
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	199.030.000	725.131.300	
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	268.894.500	1.277.869.700	
3	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	111.730.700	273.868.675	
4	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	224.555.000	54.107.500	
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	401.172.500	531.527.000	
6	BAGIAN HUKUM	650.974.750		
7	BAGIAN HUMAS	306.000.000		
8	BAGIAN KERJASAMA	151.260.000		
9	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	263.295.550		
10	BAGIAN ORGANISASI	105.269.500		
11	BAGIAN OTONOMI DAERAH	167.208.150		
12	BAGIAN PEMBANGUNAN	744.950.550		
13	BAGIAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK	139.889.750		
14	BAGIAN PEREKONOMIAN	203.414.346		
15	BAGIAN PERLENGKAPAN	76.125.000		
16	BAGIAN RUMAHTANGGA DAN SANTEL	72.773.000		
17	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	231.158.650		
18	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	217.300.900		
19	BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	389.169.300	1.227.236.450	
20	BAPPEDA	409.402.150	236.356.000	
21	DINAS BINA MARGA	366.370.000	3.824.287.000	
22	DINAS KEBAKARAN	231.200.000	252.285.000	
23	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	429.929.030	88.764.050	
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	387.787.700	397.357.000	
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SEMARANG	233.512.000	287.785.975	
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	265.470.000	128.913.500	
27	DINAS KESEHATAN KOTA	184.972.000	813.444.880	
28	DINAS KOPERASI UMKM	99.650.000	1.759.303.500	
29	DINAS PASAR	419.139.273	58.675.250	
30	DINAS PENDIDIKAN	190.000.000	1.124.247.870	739.986.000
31	DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME	143.275.500	20.843.300	
32	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	399.000.000	964.580.300	
33	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	162.810.592	646.963.750	
34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	238.344.700	1.675.850.050	
35	DINAS PERTANIAN	128.491.000	256.579.100	
36	DINAS PSDA DAN ESDM	221.090.000	2.047.400.000	
37	DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	318.573.000	1.412.230.400	
38	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	167.580.000	1.275.195.125	
39	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	175.000.000	10.821.150	101.254.150
40	INSPEKTORAT	360.000.000	160.755.000	
41	KANTOR KETAHANAN PANGAN	112.411.000	706.409.000	
42	KANTOR PENDIDIKAN DAN LATIHAN	27.170.000	849.132.600	
43	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	40.988.085	49.476.000	
44	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	280.000.000	281.121.302	
45	KECAMATAN BANYUMANIK	468.874.800	182.889.900	
46	KECAMATAN CANDISARI	135.167.500	276.490.000	
47	KECAMATAN GAJAH MUNGKUR	502.920.000	630.800.000	
48	KECAMATAN GAYAMSARI	176.970.000	8.400.000	
49	KECAMATAN GENUK	329.814.050	31.519.000	
50	KECAMATAN GUNUNGPATI	300.798.000	25.700.000	
51	KECAMATAN MIJEN	63.830.000	112.763.000	
52	KECAMATAN NGALIYAN	457.304.659	64.640.000	
53	KECAMATAN PEDURUNGAN	470.248.800	30.000.000	
54	KECAMATAN SEMARANG BARAT	78.300.000	195.400.000	
55	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	167.405.500	18.310.000	
56	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	93.777.000	228.295.000	
57	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	339.401.250	63.807.500	
58	KECAMATAN SEMARANG UTARA	481.074.000	107.293.500	
59	KECAMATAN TEMBALANG	168.445.600	483.315.000	
60	KECAMATAN TUGU	110.025.500	86.260.000	
61	KELURAHAN BANGETAYU KULON	6.898.700	6.015.000	
62	KELURAHAN BANYUMANIK	4.960.000		
63	KELURAHAN BENDAN NGISOR	6.690.000		
64	KELURAHAN BENDUNGAN	10.400.000		
65	KELURAHAN BUGANGAN	21.500.000	9.450.650	
66	KELURAHAN BULU LOR	4.595.000	3.300.000	
67	KELURAHAN CANDI	4.525.000	10.800.000	
68	KELURAHAN GAJAH MUNGKUR	7.880.000		
69	KELURAHAN GAYAMSARI	10.800.000		
70	KELURAHAN GEBANGSARI	8.784.000	5.300.000	
71	KELURAHAN GEMAH	5.820.000		
72	KELURAHAN GISIKDRONO	6.010.000	8.800.000	
73	KELURAHAN JATINGALEH	8.750.000	10.800.000	
74	KELURAHAN JATISARI	4.350.000	3.220.000	
75	KELURAHAN KALIBANTENG KULON	10.550.000	7.600.000	
76	KELURAHAN KALIPANCUR	7.575.000	5.000.000	
77	KELURAHAN KALISEGORO	4.370.000	3.000.000	
78	KELURAHAN KARANGGROTO	6.312.500	5.228.000	
79	KELURAHAN KARANGTEMPEL	7.200.400	17.500.000	

No	SKPD	UP 1	UP 2	UP3
80	KELURAHAN KEDUNGMUNDU	4.440.000	9.035.000	
81	KELURAHAN MANGKANG KULON	3.740.000	4.490.000	
82	KELURAHAN MANGKANG WETAN	7.500.000	3.100.000	
83	KELURAHAN METESEH	5.290.000	8.710.000	
84	KELURAHAN MIROTO	1.150.000	2.000.000	
85	KELURAHAN MUGASSARI	7.285.000	3.600.000	
86	KELURAHAN NGALIYAN	5.050.000	4.050.000	
87	KELURAHAN PALEBON	6.900.000		
88	KELURAHAN PANGGUNG LOR	8.310.000	5.050.000	
89	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	5.820.000		
90	KELURAHAN PEKUNDEN	2.609.500	543.500	
91	KELURAHAN PETERONGAN	7.440.000	4.650.000	
92	KELURAHAN PLALANGAN	3.790.000	4.225.000	
93	KELURAHAN PLEBURAN	10.070.000	2.550.000	
94	KELURAHAN PILOMBOKAN	4.981.000	4.750.000	
95	KELURAHAN POLAMAN	4.075.000	2.000.000	
96	KELURAHAN REJOSARI	9.700.650	21.500.000	
97	KELURAHAN SALAMAN MILOYO	4.385.000	3.604.000	
98	KELURAHAN SAMBIREJO	10.800.000		
99	KELURAHAN SEKAYU	770.190	2.375.000	
100	KELURAHAN SIWALAN	10.800.000		
101	KELURAHAN SRONDOL WETAN	9.760.000		
102	KELURAHAN SUMURBOTO	3.200.000	5.560.000	
103	KELURAHAN SUMURREJO	2.380.000	4.280.000	
104	KELURAHAN TAMBAKAJI	5.138.227	2.500.000	
105	KELURAHAN TEGALSARI	4.575.000	12.500.000	
106	KELURAHAN TEMBALANG	6.650.000	6.230.000	
107	KELURAHAN TUGUREJO	3.500.000	4.000.000	
108	KELURAHAN WONOLOPO	4.185.000	2.000.000	
109	PUSKESMAS BANDARHARJO	22.267.242		
112	PUSKESMAS BULU LOR	11.600.000		
113	PUSKESMAS CANDILAMA	22.702.803		
114	PUSKESMAS GAYAMSARI	18.103.875		
115	PUSKESMAS GENUK	13.825.000		
116	PUSKESMAS GUNUNGPATI	39.400.000		
117	PUSKESMAS HALMAHERA	51.167.000		
118	PUSKESMAS KAGOK	16.079.000		
119	PUSKESMAS KARANGANYAR	19.691.676		
120	PUSKESMAS KARANGAYU	24.621.642		
121	PUSKESMAS KARANGDORO	65.248.136		
122	PUSKESMAS KARANGMALANG	24.035.300		
123	PUSKESMAS KEDUNGmundu	54.971.000		
124	PUSKESMAS KROBOKAN	18.572.719		
125	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	19.139.000		
126	PUSKESMAS LEBDOSARI	28.039.915		
127	PUSKESMAS MANGKANG	23.630.477		
128	PUSKESMAS MANYARAN	18.807.500		
129	PUSKESMAS MIJEN	52.125.000		
130	PUSKESMAS MIROTO	16.000.000		
131	PUSKESMAS NGALIYAN	34.379.386		
132	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	19.982.000		
133	PUSKESMAS NGESREP	21.495.328		
134	PUSKESMAS PADANGSARI	17.485.916		
135	PUSKESMAS PANDANARAN	23.855.060		
136	PUSKESMAS PEGANDAN	25.767.609		
137	PUSKESMAS PONCOL	16.312.000		
138	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	22.068.811		
139	PUSKESMAS PURWOYOSO	22.405.000		
140	PUSKESMAS ROWOSARI	21.501.022		
141	PUSKESMAS SEKARAN	26.295.814		
142	PUSKESMAS SRONDOL	16.675.720		
143	PUSKESMAS TAMBAKAJI	13.570.042		
144	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	30.978.995		
145	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	40.735.167		
146	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	40.304.000		
147	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA SEMARANG	15.000.000	6.000.000	
148	SEKRETARIAT DAERAH	1.523.340.000		
149	SEKRETARIAT DPRD	3.548.582.500		
150	SMA NEGERI 1 KOTA SEMARANG	79.000.000	104.800.000	50.000.000
151	SMA NEGERI 10 KOTA SEMARANG	20.310.000	50.115.000	70.000.000
152	SMA NEGERI 11 KOTA SEMARANG	25.000.000	71.000.000	7.500.000
153	SMA NEGERI 12 KOTA SEMARANG	20.000.000	80.000.000	50.000.000
154	SMA NEGERI 13 KOTA SEMARANG	17.000.000	60.575.000	92.440.000
155	SMA NEGERI 14 KOTA SEMARANG	21.600.103	71.615.000	33.700.000
156	SMA NEGERI 15 KOTA SEMARANG	24.250.000	80.000.000	50.000.000
157	SMA NEGERI 16 KOTA SEMARANG	21.000.000	61.000.000	100.000.000
158	SMA NEGERI 2 KOTA SEMARANG	52.464.000	65.800.000	81.400.000
159	SMA NEGERI 3 KOTA SEMARANG	71.800.000	110.000.000	50.000.000
160	SMA NEGERI 4 KOTA SEMARANG	26.000.000	112.000.000	90.000.000
161	SMA NEGERI 5 KOTA SEMARANG	30.329.000	108.000.000	
162	SMA NEGERI 6 KOTA SEMARANG	36.000.000	160.000.000	
163	SMA NEGERI 7 KOTA SEMARANG	28.700.000	99.300.000	7.500.000
164	SMA NEGERI 8 KOTA SEMARANG	19.005.000	99.998.000	82.998.000

No	SKPD	UP 1	UP 2	UP3
165	SMA NEGERI 9 KOTA SEMARANG	29.976.000	86.663.600	50.000.000
166	SMK NEGERI 1 KOTA SEMARANG	39.240.000	136.000.000	149.900.000
167	SMK NEGERI 10 KOTA SEMARANG	38.000.000	145.000.000	50.000.000
168	SMK NEGERI 11 KOTA SEMARANG	61.000.000	152.000.000	50.000.000
169	SMK NEGERI 2 KOTA SEMARANG	56.010.000	106.850.000	185.415.150
170	SMK NEGERI 3 KOTA SEMARANG	43.000.000	159.455.000	57.500.000
171	SMK NEGERI 4 KOTA SEMARANG	47.832.600	90.800.000	99.470.000
172	SMK NEGERI 5 KOTA SEMARANG	38.176.855	162.949.100	69.050.000
173	SMK NEGERI 6 KOTA SEMARANG	48.160.000	114.165.000	50.000.000
174	SMK NEGERI 7 KOTA SEMARANG	69.800.000	141.820.500	150.000.000
175	SMK NEGERI 8 KOTA SEMARANG	23.979.265	110.372.000	100.000.000
176	SMK NEGERI 9 KOTA SEMARANG	26.685.000	163.650.000	17.410.000
177	SMP NEGERI 1 KOTA SEMARANG	54.130.500	43.100.000	
178	SMP NEGERI 10 KOTA SEMARANG	46.000.000	37.200.000	
179	SMP NEGERI 11 KOTA SEMARANG	43.384.000	36.750.000	
180	SMP NEGERI 12 KOTA SEMARANG	45.527.000	30.450.400	
181	SMP NEGERI 13 KOTA SEMARANG	34.754.000	40.700.000	
182	SMP NEGERI 14 KOTA SEMARANG	50.342.750	39.800.000	
183	SMP NEGERI 15 KOTA SEMARANG	50.000.000	42.900.000	
184	SMP NEGERI 16 KOTA SEMARANG	37.500.000	36.550.000	
185	SMP NEGERI 17 KOTA SEMARANG	38.545.608	38.450.000	
186	SMP NEGERI 18 KOTA SEMARANG	42.979.024	37.950.000	
187	SMP NEGERI 19 KOTA SEMARANG	35.966.000	37.550.000	
188	SMP NEGERI 2 KOTA SEMARANG	61.500.000	34.150.000	
189	SMP NEGERI 20 KOTA SEMARANG	48.814.000	40.900.000	
190	SMP NEGERI 21 KOTA SEMARANG	51.500.000	35.800.000	
191	SMP NEGERI 22 KOTA SEMARANG	45.250.000	39.150.000	
192	SMP NEGERI 23 KOTA SEMARANG	65.659.180	53.350.000	
193	SMP NEGERI 24 KOTA SEMARANG	40.500.000	37.200.000	
194	SMP NEGERI 25 KOTA SEMARANG	45.000.000	37.100.000	
195	SMP NEGERI 26 KOTA SEMARANG	44.000.000	38.550.000	
196	SMP NEGERI 27 KOTA SEMARANG	39.583.000	37.200.000	
197	SMP NEGERI 28 KOTA SEMARANG	47.018.939	37.600.000	
198	SMP NEGERI 29 KOTA SEMARANG	43.438.500	36.350.000	
199	SMP NEGERI 3 KOTA SEMARANG	38.310.000	37.750.000	
200	SMP NEGERI 30 KOTA SEMARANG	48.000.000	39.850.000	
201	SMP NEGERI 31 KOTA SEMARANG	44.981.713	36.800.000	
202	SMP NEGERI 32 KOTA SEMARANG	40.496.000	35.850.000	
203	SMP NEGERI 33 KOTA SEMARANG	43.002.297	37.450.000	
204	SMP NEGERI 34 KOTA SEMARANG	48.000.000	39.600.000	
205	SMP NEGERI 35 KOTA SEMARANG	27.844.479	25.900.000	
206	SMP NEGERI 36 KOTA SEMARANG	41.667.636	40.050.000	
207	SMP NEGERI 37 KOTA SEMARANG	37.650.000	34.600.000	
208	SMP NEGERI 38 KOTA SEMARANG	24.395.000	21.550.000	
209	SMP NEGERI 39 KOTA SEMARANG	55.796.100	44.400.000	
210	SMP NEGERI 4 KOTA SEMARANG	43.185.206	38.300.000	
211	SMP NEGERI 40 KOTA SEMARANG	47.000.000	38.050.000	
212	SMP NEGERI 41 KOTA SEMARANG	35.000.000	32.650.000	
213	SMP NEGERI 5 KOTA SEMARANG	45.220.000	37.600.000	
214	SMP NEGERI 6 KOTA SEMARANG	46.000.000	35.000.000	
215	SMP NEGERI 7 KOTA SEMARANG	50.000.000	39.250.000	
216	SMP NEGERI 8 KOTA SEMARANG	51.689.237	39.100.000	
217	SMP NEGERI 9 KOTA SEMARANG	45.486.525	35.750.000	
218	TK NEGERI KINTELAN KOTA SEMARANG	6.500.000	2.500.000	10.850.000
219	TK NEGERI PEMBINA KOTA SEMARANG	7.500.000	30.000.000	
220	TK NEGERI SENDANGMULYO	17.877.100	4.950.000	
221	UPTD PENDIDIKAN KEC. BANYUMANIK	11.591.200	179.543.400	275.970.000
222	UPTD PENDIDIKAN KEC. CANDISARI	10.700.000	110.000.000	172.320.000
223	UPTD PENDIDIKAN KEC. GAJAHMUNGKUR	8.700.000	88.000.000	125.430.000
224	UPTD PENDIDIKAN KEC. GAYAMSARI	9.800.000	122.600.000	166.410.000
225	UPTD PENDIDIKAN KEC. GENUK	10.599.660	111.096.650	193.410.000
226	UPTD PENDIDIKAN KEC. GUNUNGPATI	9.855.300	87.364.837	145.544.000
227	UPTD PENDIDIKAN KEC. MIJEN	11.833.769	90.033.213	156.270.000
228	UPTD PENDIDIKAN KEC. NGALIYAN	12.800.000	140.000.000	266.220.000
229	UPTD PENDIDIKAN KEC. PEDURUNGAN	10.999.942	192.999.032	301.740.000
230	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG BARAT	13.593.477	197.576.467	317.220.000
231	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG SELATAN	14.000.000	90.000.000	140.310.000
232	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG TENGAH	22.500.000	125.000.000	130.230.000
233	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG TIMUR	106.000.000	11.000.000	164.340.000
234	UPTD PENDIDIKAN KEC. SEMARANG UTARA	10.261.850	80.571.000	133.350.000
235	UPTD PENDIDIKAN KEC. TEMBALANG	12.000.000	210.000.000	276.630.000
236	UPTD PENDIDIKAN KEC. TUGU	50.040.000	10.341.000	72.690.000

DAFTAR PENYEWA TANAH EKS BENGKOK TAHUN 2014

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PENYEWA	NILAI LELANG (Rp)	LUAS TANAH (m ²)
1	GUNUNGPATI	PONGANGAN	6	3.358.000,00	35.953
2	GUNUNGPATI	KALISEGORO	6	1.350.000,00	48.337
3	GUNUNGPATI	MANGUNSARI	10	9.650.000,00	66.912
4	GUNUNGPATI	NGIJO	3	2.500.000,00	9.830
5	GUNUNGPATI	NONGKOSAWIT	4	1.500.000,00	28.000
6	GUNUNGPATI	KANDRI	4	1.230.000,00	11.519
7	GUNUNGPATI	PATEMON	3	4.050.000,00	28.894
8	GUNUNGPATI	CEPOKO	14	5.305.140,00	175.900
9	GUNUNGPATI	SUMUREJO	19	19.756.000,00	169.638
10	GUNUNGPATI	GUNUNGPATI	12	17.800.000,00	102.891
11	GUNUNGPATI	PLALANGAN	14	7.225.000,00	91.707
12	NGALIAN	WATES	9	7.800.000,00	94.880
13	NGALIAN	GONDORIYO	2	2.250.000,00	11.640
14	NGALIYAN	TAMBAKAJI	2	1.400.000,00	11.700
15	NGALIYAN	BRINGIN	2	900.000,00	8.945
16	NGALIYAN	PODOREJO	26	36.500.000,00	138.538
17	MIJEN	WONOPLUMBON	4	2.400.000,00	30.309
18	MIJEN	JATISARI	4	2.362.500,00	17.312
19	MIJEN	NGADIRGO	5	4.400.000,00	62.083
20	MIJEN	KEDUNG PANDE	10	4.250.000,00	47.305
21	MIJEN	POLAMAN	20	14.000.000,00	154.208
22	MIJEN	KARANGMALANG	18	19.209.590,00	142.679
23	MIJEN	JATIBARANG	17	8.317.672,00	120.429
24	MIJEN	BUBAKAN	9	10.085.000,00	55.048
25	MIJEN	CANGKIRAN	10	26.293.000,00	125.284
26	MIJEN	PESANTREN	6	2.150.000,00	30.956
27	MIJEN	WONOLOPO	8	14.000.000,00	92.032
28	MIJEN	PURWOSARI	8	37.872.000,00	305.447
29	MIJEN	TAMBANGAN	17	21.000.000,00	167.420
30	MIJEN	MIJEN	4	3.180.000,00	18.439
31	TEMBALANG	ROWOSARI	6	3.003.750,00	105.845
32	TEMBALANG	SENDANGMULYO	2	1.400.000,00	12.804
33	GENUK	KARANGROTO	4	1.900.000,00	30.687
34	GENUK	BANJARDOWO	13	12.600.000,00	153.318
35	GENUK	SEMBUNGHARJO	4	2.098.125,00	78.011
36	BANYUMANIK	JABUNGAN	5	3.509.954,00	26.150
37	TUGU	MANGUNHARJO	26	27.785.500,00	278.052
38	TUGU	MANGKANG WETAN	14	25.975.000,00	301.163
39	TUGU	RANDUGARUT	1	450.000,00	12.572
40	TUGU	TUGUREJO	13	4.220.000,00	52.172
41	TUGU	KARANGANYAR	6	4.700.000,00	93.341
42	TUGU	MANGKANG KULON	12	19.700.000,00	244.429
43	PEDURUNGAN	PENGGARON KIDUL	20	13.913.330,00	159.705
44	PEDURUNGAN	PEDURUNGAN LOR	1	1.300.000,00	11.618
45	PEDURUNGAN	TLOGOSARI WETAN	2	810.000,00	23.000
		Jumlah	405	415.459.561,00	3.987.102



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2014**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Nomor : 36C/LHP/XVIII.SMG/05/2015
Tanggal : 19 Mei 2015**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	iv
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	1
1. Ketekoran Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang Minimal Sebesar Rp22.109.541.062,00	1
2. Enam Satuan Kerja Perangkat Daerah Merealisasikan Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan Modal Sebesar Rp377.923.594,00 Melebihi Anggaran yang Ditetapkan Dalam APBD	4
3. Pajak Penghasilan atas Tali Asih Peraih Medali Porprov Jateng Tahun 2013 Sebesar Rp774.692.001,00 Belum Disetorkan ke Kas Negara	6
4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Rumah Dinas, Tanah Bengkok dan Puskesmas yang Digunakan Untuk Melayani Kepentingan Umum pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Menggunakan Dana APBD	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Saldo Rekening Giro dan Deposito di BTPN	2
Tabel 2 Setoran Tunai oleh DAK yang Tidak Sampai ke BTPN.....	3
Tabel 3 Aplikasi Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan	4
Tabel 4 Realisasi Rincian Objek Belanja Melebihi Anggaran.....	4
Tabel 5 Pembayaran PBB atas Aset Daerah.....	7

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Perbandingan Rekening BTPN No.3863000028 Asli dan Palsu |
| Lampiran 2 | Setoran Tunai UPTD Kas Daerah Pemkot Semarang ke BTPN |
| Lampiran 3 | Realisasi Belanja Melebihi Anggaran |
| Lampiran 4 | Pajak Penghasilan atas Tali Asih Peraih Medali Porprov Jateng 2013
Yang Telah Dipungut |



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan Atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 36A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Nomor 36B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015 tanggal 19 Mei 2015.

Sebagai bahan pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Kota Semarang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tidak dirancang khusus untuk menyatakan opini atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini seperti itu. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Semarang. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut:

1. Ketekoran Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang Minimal Sebesar Rp22.109.541.062,00;
2. Enam Satuan Kerja Perangkat Daerah Merealisasikan Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan Modal Sebesar Rp377.923.594,00 Melebihi Anggaran yang Ditetapkan Dalam APBD
3. Pajak Penghasilan atas Tali Asih Peraih Medali Porprov Jateng Tahun 2013 Sebesar Rp774.692.001,00 Belum Disetorkan ke Kas Negara; dan
4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Rumah Dinas, Tanah Bengkok dan Puskesmas yang Digunakan Untuk Melayani Kepentingan Umum pada Dinas

Kesehatan dan Dinas Pertanian Menggunakan Dana APBD Ditetapkan Dalam APBD.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Semarang agar:

1. mengajukan proses tuntutan perbendaharaan terhadap pihak-pihak terkait sesuai ketentuan;
2. memerintahkan Kepala DPKAD untuk mengintegrasikan semua sistem aplikasi yang berkaitan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah;
3. memerintahkan Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak terhadap PPh yang telah terpungut oleh bendahara KONI namun belum disetorkan ke kas negara; dan
4. memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pertanian untuk tidak menganggarkan belanja pembayaran PBB atas aset daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 19 Mei 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.A., C.I.A., C.F.E.
Akuntan, Register Negara No. D-17.698

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 mengungkapkan sebanyak empat temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketekoran Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang Minimal Sebesar Rp22.109.541.062,00

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 11 mengatur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Salah satu wewenang PPKD dalam PP 58/2005 pasal 7 ayat 2 huruf j adalah melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi. Pemerintah Kota Semarang mendelegasikan tugas PPKD ini kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.12 Tahun 2008 tanggal 1 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. DPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu organ di dalam DPKAD adalah UPTD Kas Daerah. UPTD Kas Daerah ini yang melaksanakan wewenang untuk menempatkan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi sesuai Peraturan Walikota No. 88 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kas Daerah Kota Semarang pasal 5 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kas Daerah mempunyai fungsi huruf f. Pelaksanaan keseimbangan likuiditas dan pemberdayaan kas.

Bank BTPN melalui surat tanpa nomor tanggal 6 November 2007 kepada Pemerintah Kota Semarang menawarkan kerjasama dalam hal penempatan dana dan jasa perbankan. *Contact person* BTPN dalam penawaran itu ditunjuk Sdr. DAK. Setelah melalui berbagai pembahasan secara berjenjang maka Bank BTPN Cabang Semarang ditunjuk sebagai salah satu Bank Penyimpan Uang Kas Daerah, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota No. 580/296 Tahun 2007 tanggal 04 Desember 2007 perihal Penunjukkan Bank Tabungan Pensiun Nasional Cabang Semarang Sebagai Bank Penyimpan Uang Kas Daerah Kota Semarang. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kas Daerah selanjutnya menindaklanjuti dengan membuka rekening giro pada BTPN Cabang Semarang dengan No. 0180000100001808 a.n. Pemerintah Kota Semarang. Pada tanggal 1 Mei 2008 Bank BTPN mengalami pergantian sistem yang menyebabkan rekening giro No. 0180000100001808 berubah menjadi No. 3863000028. Seluruh transaksi perbankan baik penyetoran, penarikan maupun transfer dilakukan di kantor UPTD Kas Daerah dengan Sdri. DAK sebagai penghubung sampai dengan akhir Desember 2014. Pemerintah Kota Semarang dan Bank BTPN tidak mempunyai perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak ketika setoran tunai dilakukan di kantor UPTD Kasda melalui petugas yang ditunjuk Bank BTPN.

BPK telah melakukan konfirmasi saldo kepada seluruh bank yang menjadi tempat penempatan kas daerah melalui DPKAD pada tanggal 21 Januari 2015. DPKAD menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat No. 580/208 (tanpa tanggal) perihal Konfirmasi Saldo per 31 Desember 2014 dan Permintaan Rekening Koran dari Pemerintah Kota Semarang ke seluruh bank dimana kas daerah ditempatkan. Dari jawaban konfirmasi BTPN yang ditandatangani oleh Sdri. DAK sebagai *Personal Banking Manager* diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang mempunyai sertifikat deposito No. DG 199586 sebesar Rp22.705.769.509,00 berjangka waktu 1 bulan (*revolving*) mulai tanggal 10 November 2014. Sedangkan sertifikat deposito yang disimpan UPTD Kas Daerah dengan No. DG199515.

BPK mengirimkan kembali surat ke BTPN dengan No. 03/LKPD.KOTA.SMG/1/205 tanggal 28 Januari 2015 untuk klarifikasi jawaban konfirmasi. Surat balasan dari Bank BTPN yang ditandatangani *Business Manager* Kantor Cabang Sinaya Pandanaran-Semarang no.11/PDNR/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- Bank BTPN tidak pernah menerima surat No. 580/208 perihal Konfirmasi Saldo per 31 Desember 2014 dan Permintaan Rekening Koran dari Pemerintah Kota Semarang dhi DPKAD;
- Sdri. DAK bukan lagi karyawan Bank BTPN karena sejak Januari 2011 yang bersangkutan sudah mengundurkan diri; dan
- Pemerintah Kota Semarang tidak pernah membuka rekening deposito berjangka No. DG 199515 dan DG 199586 a.n. Walikota cq. Kas Umum Daerah Pemuda 148 Sekayu Semarang sebesar Rp22.705.769.509,00.

Hasil pengujian lebih lanjut diketahui :

- Saldo rekening giro dan deposito BTPN per 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 Saldo Rekening Giro dan Deposito di BTPN

No	Jenis	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
		Palsu (Rp)	Asli(Rp)	Palsu (Rp)	Asli (Rp)
1	Rekening Giro	-	82.228.447	19.823.711.539	47.931.342
2	Deposito	22.705.769.509	514.000.000	0	514.000.000

Selisih antara saldo rekening giro dan deposito per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp22.109.541.062,00 dan Rp19.261.780.197,00

Perbandingan rekening giro BTPN asli dan yang dipalsukan dapat dilihat di dalam lampiran 1.

- Setoran pendapatan oleh DAK yang tidak sampai ke BTPN sebesar Rp23.871.076.074,00 (Rp38.881.299.200,00 – Rp15.010.223.126,00) yang terdiri dari tahun 2008 sebesar Rp300.000.000,00, tahun 2009 sebesar Rp3.376.776.774,00, tahun 2010 sebesar Rp5.214.750.000,00, tahun 2011 sebesar Rp3.639.549.300,00, tahun 2012 sebesar Rp4.540.000.000,00, tahun 2013 sebesar Rp4.800.000.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00.

Tabel 2 Setoran Tunai oleh DAK yang Tidak Sampai ke BTPN
Periode 1 Januari 2007 s.d. 31 Desember 2014

Transaksi	Uraian	Setoran Tunai Pemda ke DAK	Setoran tunai DAK ke BTPN
113	Setoran Tunai dari Pemda Disetor Seluruhnya ke BTPN	9.974.999.200	9.974.999.200
156	Setoran Tunai dari Pemda Tidak Disetor Seluruhnya ke BTPN	22.945.000.000	-
40	Setoran Tunai dari Pemda Disetor Sebagian ke BTPN	5.861.300.000	2.530.550.700
30	Tidak Ada Setoran Tunai dari Pemda Namun Ada Setoran Tunai ke BTPN	-	2.334.673.226
1	Setoran Tunai dari Pemda Disetorkan Lebih Besar ke BTPN	100.000.000	170.000.000

Rincian dapat dilihat di dalam lampiran 2.

- c. DAK menutupi perbuatannya tersebut dengan memalsukan slip setoran dan rekening giro. Slip setoran yang dipalsukan tidak ditemukan adanya tanda validasi dari bank dan hanya berisi paraf/tanda tangan *teller*. Untuk menutupi selisih bunga deposito, jasa giro dan lain-lain maka telah dibayarkan secara berkala kepada rekening kas daerah di bank jateng dengan total sebesar Rp247.535.012,00
- d. Dana yang ada di rekening giro asli dipergunakan untuk membentuk berbagai macam deposito. Deposito-deposito tersebut berbeda dengan catatan mutasi deposito yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang di BTPN.
- e. Pada tanggal 28 Desember 2011 diketahui terdapat transfer masuk/setoran tunai dari orang yang tidak jelas sebesar Rp1.000.000.000,00.
- f. Dari analisis atas mutasi rekening giro asli diketahui masih terdapat deposito atas nama Pemerintah Kota Semarang yang masih *outstanding* yaitu deposito dengan nomor bilyet DEP0005593DH sebesar Rp100.000.000,00, DEP00055940DH sebesar Rp400.000.000,00 dan DEP00055941DH sebesar Rp14.000.000,00. Deposito tersebut tidak ada di dalam catatan pembukuan DPKAD.
- g. Saldo deposito BTPN sebesar Rp22.705.769.509,00 berasal dari setoran tunai DAK yang tidak sampai BTPN sebesar Rp23.871.076.074,00 dikurangi jumlah bunga/jasa giro yang disetorkan ke kasda sebesar Rp247.535.012,00 dan dikurangi jumlah transfer ke BTPN dari orang yang tidak jelas sebesar Rp1.000.000.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah minimal sebesar Rp22.109.541.062,00 atas tindakan pencurian uang tunai.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala UPTD Kas Daerah dan Bendahara Umum Daerah periode tahun 2008 s.d. November 2014 lalai dalam pengamanan aset berupa kas.

Atas permasalahan tersebut Kepala DPKAD menyatakan bahwa terkait dengan masalah penggelapan setoran tunai Pemkot Semarang oleh oknum pegawai BTPN sudah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum dhi. Polrestabes Semarang. Pemerintah Kota Semarang sepenuhnya sudah menyerahkan masalah tersebut ke pihak penegak hukum dan secara Perdata sudah melakukan gugatan ke Bank BTPN.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang untuk mengajukan proses tuntutan perbendaharaan terhadap pihak-pihak terkait sesuai ketentuan.

2. Enam Satuan Kerja Perangkat Daerah Merealisasikan Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan Modal Sebesar Rp377.923.594,00 Melebihi Anggaran yang Ditetapkan Dalam APBD

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan, maka Pemerintah Kota Semarang mempergunakan sistem aplikasi antara lain:

Tabel 3 Aplikasi Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan

No	Nama Aplikasi	Unit Pengampu	Fungsi
1	Sistem Manual (belum ada aplikasi)	Bidang Anggaran DPKAD	Membuat dokumen RKA, APBD, dan DPA
2	SPP-SPM	Bidang Perpendaharaan DPKAD	Membuat dokumen SPP dan SPM
3	SP2D	Bidang Perpendaharaan DPKAD	Membuat dokumen SP2D
4	e-reporting	Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPKAD	Membuat laporan keuangan SKPD

Aplikasi di atas belum terhubung/ terintegrasi secara *realtime* satu dengan yang lainnya dan masih mengandalkan proses *export-import* data secara manual. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang dilakukan pada enam SKPD, menunjukkan adanya realisasi belanja melebihi anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yaitu sebesar Rp377.923.594,00 yaitu :

Tabel 4 Realisasi Rincian Objek Belanja Melebihi Anggaran

No	SKPD	Rincian Objek Belanja			
		Jumlah Rincian	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Dinas Pendidikan	40	681.684.000,00	1.020.298.046,00	(338.614.046,00)
2	Dinas Kesehatan	12	395.041.400,00	413.127.500,00	(18.086.100,00)
3	Dinas Pasar	2	51.964.000,00	52.720.530,00	(756.530,00)
4	Dinas Tata Kota dan Perumahan	1	10.552.100,00	10.993.700,00	(441.600,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	3.825.000,00	4.500.000,00	(675.000,00)
6	Kantor Satpol PP	10	1.435.020.000,00	1.454.370.318,00	(19.350.318,00)
Jumlah			2.578.086.500,00	2.956.010.094,00	(377.923.594,00)

Rincian lebih lanjut dapat dilihat di dalam lampiran 3.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa

- Realisasi melebihi anggaran dikarenakan adanya kesalahan input kode rekening jenis belanja ke dalam e-reporting sebesar Rp376.922.564,00; dan
- Adanya kelebihan belanja sebesar Rp1.001.030,00, atas kelebihan tersebut sudah disetorkan ke Kasda.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 jo Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Pasal 52:

- Ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD; dan
- Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah,

efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan informasi anggaran belanja pada setiap dokumen anggaran SKPD berbeda-beda.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang (SPP-SPM, SP2D dan *e-reporting*) belum terintegrasi dan memungkinkan kesalahan *input data*;
- b. Sistem aplikasi *e-reporting* belum dilengkapi dengan sistem yang dapat menolak hasil *input data* yang tidak sesuai dengan kode rekening belanja.

Atas permasalahan tersebut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan temuan dari tim pemeriksa, permasalahan tersebut dikarenakan terjadinya kesalahan inputting data e reporting pada kegiatan kantor dan UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
- b. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sependapat dengan temuan dari tim pemeriksa, permasalahan tersebut dikarenakan:
 - 1) Adanya kesalahan penunjukkan kode rekening belanja saat input e-reporting menyebabkan realisasi belanja terlihat melebihi anggaran, namun berdasarkan aplikasi SPP-SPM realisasi tidak melebihi anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
 - 2) Adanya pengambilan SPP-SPM yang dilakukan sebelum perubahan anggaran, sehingga setelah perubahan anggaran menjadi melebihi. Atas kelebihan tersebut sudah disetorkan ke Kas Daerah pada Bulan Desember sebesar Rp244.500,00.

Untuk selanjutnya kami akan meningkatkan verifikasi terhadap realisasi belanja tiap rincian objek belanja dari masing-masing kegiatan di Dinas Kesehatan

- c. Kepala Dinas Pasar menyatakan sependapat dengan temuan dari tim pemeriksa, permasalahan tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam permintaan pengambilan GU bulan Nopember 2014 dan sudah kami laporan ke DPKAD Bidang Akuntansi, sedangkan kelebihan GU sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp756.530,00;
- d. Kepala DTKP menyatakan atas kelebihan tersebut sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp441.600,00;
- e. Kepala BPBD menyatakan bahwa realisasi belanja makan dan minum rapat telah sesuai dengan anggaran yang tertera dalam DPA TA 2014;
- f. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan sependapat dengan temuan dari tim pemeriksa, permasalahan tersebut dikarenakan belum sempurnanya system *e-reporting* sehingga tidak dapat mengontrol data yang melebihi anggaran dan kesalahan *input* kode rekening.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk mengintegrasikan semua sistem aplikasi yang berkaitan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah.

3. Pajak Penghasilan atas Tali Asih Peraih Medali Porprov Jateng Tahun 2013 Sebesar Rp774.692.001,00 Belum Disetorkan ke Kas Negara

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan induk organisasi cabang olahraga yang dibentuk masyarakat berdasarkan UU 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. KONI merupakan satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh olahraga prestasi di seluruh Indonesia. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan olahraga, bidang pemberdayaan dan pembudayaan olahraga, serta bidang olahraga prestasi dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 25 tahun 2008 Pasal 31. Kepengurusan KONI Kota Semarang Masa Bhakti 2011-2015 disyahkan oleh Surat Keputusan (SK) Ketua KONI Provinsi Jawa Tengah No.20/S.K/III/2011 tanggal 28 Maret 2011. Pada tanggal 15 April 2013, SK tersebut diperbarui dengan SK No.40/S.K/2013 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Personalia Pengurus KONI Kota Semarang Masa Bhakti 2011-2015.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Semarang telah merealisasikan hibah kepada KONI sebesar Rp14.335.000.000,00. Hibah tersebut dicairkan dengan SP2D No. 0758/LS/14/RT tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp11.680.498.400,00 dan SP2D No. 2265/LS/14/RT tanggal 17 Juni 2014 sebesar Rp2.654.501.600,00. KONI telah dipertanggungjawabkan dana hibah tersebut sebesar Rp13.867.393.405,00 dan telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp467.606.595,00.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2014 diketahui Pajak Penghasilan yang telah dipungut sebesar Rp774.692.001,00 belum disetorkan ke kas negara. Berdasarkan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2014 diantaranya sebesar Rp10.423.000.000,00 digunakan sebagai tali asih bagi atlet dan pelatih peraih medali Pekan Olahraga Provinsi Jateng Tahun 2013. Atas pengeluaran tersebut telah dipotong pajak penghasilan oleh Bendahara KONI sebesar Rp774.692.001,00 namun sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 19 Mei 2015 belum disetorkan ke Kas Negara. Rincian PPh 21 yang belum disetorkan ke kas negara dapat dilihat dalam lampiran 4.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pada Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp774.692.001,00.

Hal ini disebabkan Bendahara KONI tidak segera menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipungutnya ke kas negara.

Atas permasalahan ini Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga menyatakan sependapat dengan temuan dari tim pemeriksa dan telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat teguran kepada KONI, yaitu:

- a. Surat Nomor: 900/577 tanggal 10 Februari 2015 perihal teguran laporan pertanggungjawaban keuangan hibah; dan
- b. Surat Nomor: 460/1716 tanggal 8 Mei 2015 perihal teguran ke II laporan pertanggungjawaban keuangan hibah.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak terhadap PPh yang telah terpungut oleh bendahara KONI namun belum disetorkan ke kas negara.

4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Rumah Dinas, Tanah Bengkok dan Puskesmas yang Digunakan Untuk Melayani Kepentingan Umum pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Menggunakan Dana APBD

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pemerintah Kota Semarang telah menganggarkan belanja untuk membayar PBB atas aset daerah yang dikelola dalam belanja barang. Pada tahun 2014 belanja iuran PBB tersebut telah direalisasikan sebesar Rp43.130.506,00. Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja iuran PBB menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian telah membayar ke kas daerah PBB atas aset daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum yaitu sebagai berikut :

Tabel 5 Pembayaran PBB atas Aset Daerah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan disetor tanggal 19 dan 30 September 2014		
1	Rumah dinas puskesmas/sudarmi srondol wetan 2014	280.105,00
2	Rumah dinas puskesmas/ sudarmi srondol wetan 2013	352.932,00
3	Rumah dinas dokter/sukimin srondol wetan 2013	353.682,00
4	Rumah dinas dokter/sukimin srondol wetan 2014	280.700,00
5	Rumah dinas dokter/eko mijiuono srondol wetan 2014	374.132,00
6	Rumah dinas dokter/eko mijiuono srondol wetan 2013	471.406,00
7	Puskesmas Ngemplak	53.040,00
8	Puskesmas Bulu Lor 2010	67.488,00
9	Puskesmas Bulu Lor 2009	67.488,00
10	Puskesmas Bulu Lor 2012	64.528,00
11	Puskesmas Bulu Lor 2011	67.488,00
12	Puskesmas Bulu Lor 2013	66.830,00
13	Puskesmas Bulu Lor 2014	53.040,00
Dinas Pertanian: disetor pada tanggal 25 September 2014		
1	Bengkok Gunung Pati NOP.0044.0	982.800,00
2	Bengkok gunung pati NOP.0026.0	801.920,00
3	Bengkok petengan mijen NOP.0006.0	378.000,00
4	Kebayan II Mijen NOP..0068.0	459.000,00
5	Asrori Mijen NOP.0002.0	145.341,00
6	Asrori mijen NOP.0171.0	89.100,00
7	Bengkok Gunungpati NOP.0001.0	2.794.752,00
8	Bengkok Banyan II Mijen NOP.0008.0	448.164,00
9	Kemitua II Mijen NOP.00027.0	1.777.248,00
10	Puskeswan Mijen NOP.0074.0	110.520,00
		10.539.704,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada pasal 3

- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan; dan
- b. ayat (3) yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp10.539.704,00.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas pertanian kurang cermat dalam menganggarkan APBD belanja untuk pembayaran PBB atas tanah/bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Kesehatan menyatakan akan berkoordinasi dengan DPKAD untuk tidak menerbitkan SPPT PBB bagi Puskesmas dan Rumah Dinas dan Kepala Dinas Pertanian menyatakan seharusnya DPKAD tidak mengeluarkan SPPT PBB atas tanah yang dikelola oleh SKPD.

BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pertanian untuk tidak menganggarkan belanja pembayaran PBB atas aset daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perbandingan Rekening BTPN No.3863000028 Asli dan Palsu

Asli			Keterangan	Palsu		
Debet	Kredit	Transaksi		Transaksi	Debet	Kredit
-	45.107.859.310,59	1	Transfer In Bank Agroniaga	1	-	45.107.859.310,59
-	15.010.223.126,00	184	Setoran Tunai	310	-	38.881.299.200,00
-	45.000.000.000,00	2	Transfer In dari Bank BRI	2	-	45.000.000.000,00
-	10.000.000.000,00	1	Transfer In dari Bank Muamalat		-	-
5.481.972.674	-	109	Transfer Out ke Bank Jateng untuk bunga	4	428.115.970,00	-
51.000.000.000		5	Transfer Out ke Bank Jateng untuk pokok	2	16.000.000.000,00	
7.000.000.000	-	2	Transer Out ke BNI Karangayu	2	1.000.000.000,00	-
10.000.000.000	-	1	Transer Out ke BNI Syariah		-	-
4.000.000.000	-	1	Transer Out ke Bank Danamon		-	-
2.000.000.000	-	1	Transer Out ke Bank Pundi		-	-
-	466.359.826,00	85	Jasa Giro	84	-	1.791.164.549,00
1.935.000	-	85	Administrasi	83	1.880.000,00	-
-	8.074.788.447,41	74	Bunga Deposito	7	-	1.305.442.419,41
297.440.000.000	-	31	Pembukaan Deposito BTPN	22	165.705.769.509,00	-
-	252.339.205.479,00	22	Pencairan Deposito Jatuh Tempo	7	-	51.000.000.000,00
-	7.500.000,00	2	Sponsorship	1	-	50.000.000,00
-	5.000,00	1	Koreksi transfer		-	-
-	194.932,00	1	Lain-Lain		-	-
-	1.000.000.000,00	1	Transfer In dari orang tak dikenal		-	-
376.923.907.674	377.006.136.121,00	Jumlah			183.135.765.479,00	183.135.765.479,00
	82.228.447,00	Saldo 31 Desember 2014				

Lampiran 2

Setoran Tunai UPTD Kas Daerah Pemkot Semarang ke BTPN

No	Tanggal	Setoran Tunai Penda ke DAK	Setoran tunai DAK ke BTPN
Setoran Tunai dari Pemda Disetor Seluruhnya ke BTPN			
1	16-Jan-08	300.000.000,00	300.000.000,00
2	18-Jan-08	200.000.000,00	200.000.000,00
3	22-Jan-08	300.000.000,00	300.000.000,00
4	24-Jan-08	300.000.000,00	300.000.000,00
5	25-Jan-08	200.000.000,00	200.000.000,00
6	08-Feb-08	200.000.000,00	200.000.000,00
7	12-Feb-08	200.000.000,00	200.000.000,00
8	14-Feb-08	200.000.000,00	200.000.000,00
9	19-Feb-08	150.000.000,00	150.000.000,00
10	22-Feb-08	100.000.000,00	100.000.000,00
11	06-Mar-08	100.000.000,00	100.000.000,00
12	10-Mar-08	200.000.000,00	200.000.000,00
13	12-Mar-08	52.000.000,00	52.000.000,00
14	17-Mar-08	45.000.000,00	45.000.000,00
15	26-Mar-08	60.000.000,00	60.000.000,00
16	02-Apr-08	100.000.000,00	100.000.000,00
17	03-Apr-08	60.000.000,00	60.000.000,00
18	07-Mei-08	100.000.000,00	100.000.000,00
19	09-Mei-08	48.000.000,00	48.000.000,00
20	13-Mei-08	58.099.200,00	58.099.200,00
21	02-Jun-08	100.000.000,00	100.000.000,00
22	05-Jun-08	55.200.000,00	55.200.000,00
23	17/06/2008	52.000.000,00	52.000.000,00
24	20/06/2008	50.000.000,00	50.000.000,00
25	04/07/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
26	11/07/2008	32.500.000,00	32.500.000,00
27	22/07/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
28	11/08/2008	33.600.000,00	33.600.000,00
29	15/08/2008	50.000.000,00	50.000.000,00
30	09/09/2008	25.000.000,00	25.000.000,00
31	11/09/2008	33.600.000,00	33.600.000,00
32	17/09/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
33	18/09/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
34	24/09/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
35	25/09/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
36	08/10/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
37	13/10/2008	32.500.000,00	32.500.000,00
38	14/10/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
39	15/10/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
40	20/10/2008	1.900.000,00	1.900.000,00
41	29/10/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
42	06/11/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
43	11/11/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
44	17/11/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
45	27/11/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
46	28/11/2008	100.000.000,00	100.000.000,00

No	Tanggal	Setoran Tunai Penda ke DAK	Setoran tunai DAK ke BTPN
47	03/12/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
48	05/12/2008	25.200.000,00	25.200.000,00
49	09/12/2008	50.000.000,00	50.000.000,00
50	10/12/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
51	12/12/2008	10.500.000,00	10.500.000,00
52	16/12/2008	100.000.000,00	100.000.000,00
53	18/12/2008	50.000.000,00	50.000.000,00
54	18/12/2008	3.900.000,00	3.900.000,00
55	24/12/2008	1.000.000,00	1.000.000,00
56	09/01/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
57	12/01/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
58	14/01/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
59	23/01/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
60	30/01/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
61	04/02/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
62	06/02/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
63	11/02/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
64	17/02/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
65	24/02/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
66	26/02/2009	25.000.000,00	25.000.000,00
67	27/02/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
68	03/03/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
69	04/03/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
70	10/03/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
71	16/03/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
72	19/03/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
73	23/03/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
74	01/04/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
75	06/04/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
76	21/04/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
77	30/04/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
78	04/05/2009	30.000.000,00	30.000.000,00
79	11/05/2009	25.000.000,00	25.000.000,00
80	14/05/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
81	02/06/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
82	10/06/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
83	23/06/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
84	25/06/2009	30.000.000,00	30.000.000,00
85	02/07/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
86	06/07/2009	25.000.000,00	25.000.000,00
87	21/07/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
88	27/07/2009	75.000.000,00	75.000.000,00
89	05/08/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
90	19/08/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
91	21/08/2009	200.000.000,00	200.000.000,00
92	24/08/2009	200.000.000,00	200.000.000,00
93	28/08/2009	25.000.000,00	25.000.000,00
94	04/09/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
95	28/09/2009	60.000.000,00	60.000.000,00
96	05/10/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
97	07/10/2009	50.000.000,00	50.000.000,00

No	Tanggal	Setoran Tunai Pemda ke DAK	Setoran tunai DAK ke BTPN
98	09/10/2009	100.000.000,00	100.000.000,00
99	12/10/2009	200.000.000,00	200.000.000,00
100	02/11/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
101	24/11/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
102	11/12/2009	50.000.000,00	50.000.000,00
103	17/02/2010	50.000.000,00	50.000.000,00
104	17/03/2010	100.000.000,00	100.000.000,00
105	22/03/2010	100.000.000,00	100.000.000,00
106	05/04/2010	50.000.000,00	50.000.000,00
107	13/04/2010	100.000.000,00	100.000.000,00
108	19/04/2010	100.000.000,00	100.000.000,00
109	21/04/2010	50.000.000,00	50.000.000,00
110	27/04/2010	100.000.000,00	100.000.000,00
111	07/05/2010	100.000.000,00	100.000.000,00
112	17/05/2010	200.000.000,00	200.000.000,00
113	21/05/2010	50.000.000,00	50.000.000,00
Setoran Tunai dari Pemda Tidak Disetor Seluruhnya ke BTPN			
1	22/12/2008	25.000.000,00	
2	23/12/2008	25.000.000,00	
3	30/12/2008	50.000.000,00	
4	31/12/2008	100.000.000,00	
5	20/01/2009	50.000.000,00	
6	21/01/2009	200.000.000,00	
7	02/02/2009	100.000.000,00	
8	13/02/2009	100.000.000,00	
9	06/03/2009	50.000.000,00	
10	12/03/2009	100.000.000,00	
11	23/03/2009	50.000.000,00	
12	25/03/2009	50.000.000,00	
13	07/04/2009	50.000.000,00	
14	16/04/2009	100.000.000,00	
15	29/04/2009	50.000.000,00	
16	07/05/2009	50.000.000,00	
17	13/05/2009	50.000.000,00	
18	18/05/2009	100.000.000,00	
19	19/05/2009	30.000.000,00	
20	20/05/2009	100.000.000,00	
21	25/05/2009	100.000.000,00	
22	26/05/2009	100.000.000,00	
23	27/05/2009	40.000.000,00	
24	03/06/2009	20.000.000,00	
25	08/06/2009	75.000.000,00	
26	15/06/2009	100.000.000,00	
27	17/06/2009	100.000.000,00	
28	07/07/2009	50.000.000,00	
29	15/07/2009	50.000.000,00	
30	17/07/2009	50.000.000,00	
31	30/07/2009	25.000.000,00	
32	03/08/2009	100.000.000,00	
33	10/08/2009	100.000.000,00	
34	25/08/2009	50.000.000,00	

No	Tanggal	Setoran Tunai Penda ke DAK	Setoran tunai DAK ke BTPN
35	01/09/2009	100.000.000,00	
36	08/09/2009	100.000.000,00	
37	10/09/2009	100.000.000,00	
38	11/09/2009	100.000.000,00	
39	14/10/2009	100.000.000,00	
40	26/10/2009	100.000.000,00	
41	04/11/2009	100.000.000,00	
42	12/11/2009	110.000.000,00	
43	17/11/2009	50.000.000,00	
44	20/11/2009	50.000.000,00	
45	02/12/2009	100.000.000,00	
46	04/12/2009	25.000.000,00	
47	10/12/2009	120.000.000,00	
48	21/12/2009	25.000.000,00	
49	22/12/2009	50.000.000,00	
50	06/01/2010	25.000.000,00	
51	11/01/2010	100.000.000,00	
52	19/01/2010	100.000.000,00	
53	08/02/2010	100.000.000,00	
54	11/02/2010	100.000.000,00	
55	12/05/2010	25.000.000,00	
56	15/02/2010	50.000.000,00	
57	22/02/2010	100.000.000,00	
58	24/02/2010	100.000.000,00	
59	01/03/2010	200.000.000,00	
60	03/03/2010	100.000.000,00	
61	05/03/2010	200.000.000,00	
62	29/03/2010	50.000.000,00	
63	29/03/2010	25.000.000,00	
64	01/04/2010	100.000.000,00	
65	08/04/2010	100.000.000,00	
66	16/04/2010	50.000.000,00	
67	15/04/2010	50.000.000,00	
68	23/04/2010	20.000.000,00	
69	23/04/2010	25.000.000,00	
70	05/05/2010	50.000.000,00	
71	24/05/2010	50.000.000,00	
72	25/05/2010	50.000.000,00	
73	31/05/2010	100.000.000,00	
74	01/06/2010	60.000.000,00	
75	02/06/2010	100.000.000,00	
76	07/06/2010	150.000.000,00	
77	11/06/2010	200.000.000,00	
78	14/06/2010	100.000.000,00	
79	16/06/2010	100.000.000,00	
80	17/06/2010	50.000.000,00	
81	18/06/2010	25.000.000,00	
82	21/06/2010	50.000.000,00	
83	23/06/2010	100.000.000,00	
84	05/07/2010	200.000.000,00	
85	08/07/2010	150.000.000,00	

No	Tanggal	Setoran Tunai Penda ke DAK	Setoran tunai DAK ke BTPN
86	15/07/2010	100.000.000,00	
87	22/07/2010	100.000.000,00	
88	16/08/2010	200.000.000,00	
89	31/08/2010	200.000.000,00	
90	22/09/2010	200.000.000,00	
91	27/09/2010	250.000.000,00	
92	12/10/2010	250.000.000,00	
93	22/10/2010	70.000.000,00	
94	05/11/2010	100.000.000,00	
95	16/11/2010	150.000.000,00	
96	06/12/2010	200.000.000,00	
97	17/12/2010	100.000.000,00	
98	12/01/2011	100.000.000,00	
99	10/02/2011	150.000.000,00	
100	22/02/2011	200.000.000,00	
101	29/03/2011	200.000.000,00	
102	25/04/2011	300.000.000,00	
103	18/05/2011	100.000.000,00	
104	01/06/2011	200.000.000,00	
105	22/06/2011	150.000.000,00	
106	28/07/2011	250.000.000,00	
107	12/08/2011	200.000.000,00	
108	13/09/2011	300.000.000,00	
109	11/10/2011	200.000.000,00	
110	07/11/2011	250.000.000,00	
111	14/11/2011	200.000.000,00	
112	02/12/2011	200.000.000,00	
113	22/12/2011	50.000.000,00	
114	25/01/2012	200.000.000,00	
115	08/02/2012	300.000.000,00	
116	15/03/2012	250.000.000,00	
117	18/04/2012	300.000.000,00	
118	01/05/2012	300.000.000,00	
119	16/05/2012	300.000.000,00	
120	01/06/2012	300.000.000,00	
121	13/06/2012	250.000.000,00	
122	06/07/2012	200.000.000,00	
123	30/07/2012	200.000.000,00	
124	08/08/2012	250.000.000,00	
125	06/09/2012	350.000.000,00	
126	26/09/2012	200.000.000,00	
127	10/10/2012	350.000.000,00	
128	08/11/2012	200.000.000,00	
129	05/12/2012	300.000.000,00	
130	18/12/2012	150.000.000,00	
131	10/01/2013	200.000.000,00	
132	30/01/2013	100.000.000,00	
133	11/02/2013	200.000.000,00	
134	28/02/2013	250.000.000,00	
135	08/03/2013	250.000.000,00	
136	09/04/2013	250.000.000,00	

No	Tanggal	Setoran Tunai Penda ke DAK	Setoran tunai DAK ke BTPN
137	15/04/2013	250.000.000,00	
138	02/05/2013	250.000.000,00	
139	31/05/2013	350.000.000,00	
140	21/06/2013	300.000.000,00	
141	01/07/2013	350.000.000,00	
142	05/07/2013	250.000.000,00	
143	21/08/2013	200.000.000,00	
144	24/09/2013	200.000.000,00	
145	09/10/2013	300.000.000,00	
146	25/10/2013	250.000.000,00	
147	06/11/2013	300.000.000,00	
148	04/12/2013	250.000.000,00	
149	24/12/2013	300.000.000,00	
150	09/01/2014	250.000.000,00	
151	22/01/2014	300.000.000,00	
152	04/02/2014	250.000.000,00	
153	19/02/2014	300.000.000,00	
154	12/03/2014	250.000.000,00	
155	17/04/2014	200.000.000,00	
156	06/05/2014	450.000.000,00	
Setoran Tunai dari Penda Disetor Sebagian ke BTPN			
1	12/11/2008	36.300.000,00	33.600.000,00
2	01/12/2008	200.000.000,00	100.000.000,00
3	16/01/2009	100.000.000,00	50.000.000,00
4	19/01/2009	55.000.000,00	4.000.000,00
5	28/01/2009	55.000.000,00	4.000.000,00
6	18/02/2009	100.000.000,00	4.000.000,00
7	20/02/2009	100.000.000,00	78.600.000,00
8	18/03/2009	100.000.000,00	3.600.000,00
9	20/04/2009	100.000.000,00	95.000.000,00
10	27/04/2009	50.000.000,00	1.600.000,00
11	19/06/2009	25.000.000,00	20.000.000,00
12	29/06/2009	50.000.000,00	45.000.000,00
13	07/08/2009	150.000.000,00	100.000.000,00
14	13/08/2009	100.000.000,00	90.000.000,00
15	15/09/2009	50.000.000,00	25.000.000,00
16	30/09/2009	200.000.000,00	100.000.000,00
17	16/10/2009	100.000.000,00	50.000.000,00
18	11/11/2009	100.000.000,00	95.000.000,00
19	18/11/2009	100.000.000,00	50.000.000,00
20	12/01/2010	100.000.000,00	50.000.000,00
21	27/01/2010	300.000.000,00	200.000.000,00
22	24/03/2010	100.000.000,00	50.000.000,00
23	29/04/2010	50.000.000,00	25.000.000,00
24	03/05/2010	100.000.000,00	70.000.000,00
25	10/05/2010	200.000.000,00	100.000.000,00
26	20/05/2010	40.000.000,00	30.000.000,00
27	03/06/2010	100.000.000,00	20.000.000,00
28	18/01/2011	100.000.000,00	25.000.000,00
29	16/02/2011	200.000.000,00	100.000.000,00
30	17/02/2011	300.000.000,00	100.000.000,00

No	Tanggal	Setoran Tunai Pemda ke DAK	Setoran tunai DAK ke BTPN
31	18/02/2011	300.000.000,00	100.000.000,00
32	23/02/2011	300.000.000,00	100.000.000,00
33	01/03/2011	200.000.000,00	50.000.000,00
34	02/03/2011	200.000.000,00	50.000.000,00
35	07/04/2011	300.000.000,00	100.000.000,00
36	02/05/2011	200.000.000,00	50.000.000,00
37	01/07/2011	250.000.000,00	1.150.700,00
38	12/07/2011	200.000.000,00	100.000.000,00
39	10/10/2011	350.000.000,00	200.000.000,00
40	13/01/2012	200.000.000,00	60.000.000,00
Tidak Ada Setoran Tunai dari Pemda Namun Ada Setoran Tunai ke BTPN			
1	17/11/2008		2.700.000,00
2	29/01/2009		51.000.000,00
3	18/02/2009		96.100.000,00
4	19/02/2009		1.300.000,00
5	18/03/2009		95.100.000,00
6	19/03/2009		1.200.000,00
7	27/03/2009		1.200.000,00
8	27/03/2009		45.200.000,00
9	31/03/2009		4.200.000,00
10	20/04/2009		5.700.000,00
11	22/04/2009		100.000.000,00
12	28/04/2009		30.000.000,00
13	30/04/2009		4.900.000,00
14	08/05/2009		41.000.000,00
15	16/07/2009		50.000.000,00
16	04/08/2009		35.000.000,00
17	28/08/2009		523.226,00
18	02/09/2009		50.000.000,00
19	05/11/2009		100.000.000,00
20	13/11/2009		50.000.000,00
21	02/03/2010		75.000.000,00
22	04/03/2010		50.000.000,00
23	06/05/2010		30.000.000,00
24	12/05/2010		50.000.000,00
25	09/06/2010		30.000.000,00
26	18/08/2010		250.000.000,00
27	02/05/2011		1.000.000.000,00
28	10/10/2011		250.000.000,00
29	19/10/2011		60.500.000,00
30	10/11/2011		23.800.000,00
Setoran Tunai dari Pemda Disetorkan Lebih Besar ke BTPN			
1	09/06/2010	100.000.000,00	170.000.000,00
Jumlah		38.881.299.200,00	15.010.223.126,00

REALISASI BELANJA MELEBIHI ANGGARAN**Dinas Pendidikan**

No	Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Belanja Pegawai	Uang Lembur PNS	9.273.000	11.448.000	(2.175.000)
2		Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	1.200.000	1.970.000	(770.000)
3		Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.620.000	13.840.000	(12.220.000)
4		Honorarium Tenaga/Tukang	14.450.000	16.000.000	(1.550.000)
5		Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.550.000	6.010.000	(4.460.000)
6		Honorarium panitia pelaksana kegiatan	50.400.000	53.080.000	(2.680.000)
7		Honorarium panitia pelaksana kegiatan	10.899.000	14.475.000	(3.576.000)
8		Honorarium panitia pelaksana kegiatan	23.840.000	26.810.000	(2.970.000)
9		Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.525.000	2.000.000	(475.000)
		Jumlah	114.757.000	145.633.000	(30.876.000)
10	Belanja Barang	Belanja telepon	6.000.000	6.368.927	(368.927)
11		Belanja air	120.000	312.386	(192.386)
12		Belanja Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat Bantu	46.208.500	56.408.500	(10.200.000)
13		Belanja pemeliharaan mebeluaair (meja, rak, kursi dll)	31.880.000	32.775.000	(895.000)
14		Pemberian jasa pengajar/instruktur/ narasumber/penceramah/moderator	8.000.000	13.400.000	(5.400.000)
15		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.341.000	6.979.000	(638.000)
16		Belanja telepon	8.400.000	8.894.633	(494.633)
17		Belanja surat kabar/majalah	4.200.000	4.839.500	(639.500)
18		Belanja alat listrik dan elektronik	10.356.000	17.810.000	(7.454.000)
19		Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.750.000	7.500.000	(750.000)
20		Belanja makanan dan minuman rapat	10.200.000	10.860.000	(660.000)
21		Belanja pemeliharaan atap	13.536.000	19.251.000	(5.715.000)
22		Belanja pemeliharaan dinding	14.577.500	15.477.500	(900.000)
23		Belanja peralatan dan perlengkapan olahraga	14.560.000	20.818.000	(6.258.000)
24		Belanja cetak	50.312.500	50.438.500	(126.000)
25		Belanja surat kabar/majalah	4.188.000	4.865.500	(677.500)
26		Belanja foto copy dan penjilidan	3.000.000	3.004.000	(4.000)
27		Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000	13.700.000	(200.000)
28		Belanja surat kabar/majalah	3.360.000	3.804.900	(444.900)
29		Belanja alat tulis kantor	63.171.000	64.071.000	(900.000)
30		Belanja surat kabar/majalah	10.800.000	11.563.000	(763.000)
31		Belanja pemeliharaan komputer dan komponennya	12.000.000	12.800.000	(800.000)
32		Belanja pemeliharaan komputer dan komponennya	1.400.000	3.650.000	(2.250.000)
33		Belanja pemeliharaan komputer dan komponennya	10.000.000	11.235.000	(1.235.000)
34		Belanja alat tulis kantor	60.226.500	92.882.700	(32.656.200)
35		Belanja pemeliharaan mebeluaair (meja, rak, kursi dll)	-	1.500.000	(1.500.000)
36		Belanja Bahan peraga/pelatihan/praktek/pameran/alat bantu/ketrampilan di SMKN 5	145.920.000	273.336.000	(127.416.000)
37		Belanja perjalanan dinas dalam kota	2.750.000	88.550.000	(85.800.000)
38		Belanja cetak	170.000	570.000	(400.000)
		Jumlah	561.927.000	857.665.046	(295.738.046)
39	Belanja Modal	Belanja modal pengadaan sound system	15.000.000	16.038.000	(1.038.000)
40		Belanja modal pengadaan printer	5.000.000	17.000.000	(12.000.000)
		Jumlah	5.000.000	17.000.000	(12.000.000)
		Total	681.684.000	1.020.298.046	(338.614.046)

Dinas Kesehatan

No	Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Belanja Pegawai	Honorarium Bendahara	18.240.000	21.200.000	(2.960.000)
2		Honorarium Bendahara	17.520.000	18.470.000	(950.000)
3		Honorarium Pengelola Kegiatan	7.200.000	8.150.000	(950.000)
		Jumlah	42.960.000	47.820.000	(4.860.000)
4	Belanja Barang	Belanja makanan dan minuman rapat	2.875.000	3.187.500	(312.500)
5		Belanja cetak	7.045.000	7.289.500	(244.500)
6		Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.600.000	10.475.000	(875.000)
7		Belanja perjalanan dinas dalam kota	4.600.000	5.220.000	(620.000)
8		Belanja alat listrik dan elektronik	1.278.500	1.547.000	(268.500)
9		Belanja bahan perlengkapan/peralatan kesehatan/kedokteran	3.000.000	3.600.000	(600.000)
10		Belanja alat tulis kantor	1.954.500	2.054.500	(100.000)
11		Belanja Perawatan/ Pelayanan/Pengobatan/ Kesehatan Karang Doro	172.947.600	182.953.200	(10.005.600)
12		Belanja Perawatan/ Pelayanan/Pengobatan/ Kesehatan	148.780.800	148.980.800	(200.000)
		Jumlah	352.081.400	365.307.500	(13.226.100)
		Total	395.041.400	413.127.500	(18.086.100)

Dinas Pasar

No	Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Belanja Pegawai	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000	5.250.000	(750.000)
2	Belanja Barang	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	47.464.000	47.470.530	(6.530)
		Jumlah	51.964.000	52.720.530	(756.530)

Dinas Tata Kota dan Perumahan

No	Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Belanja Pegawai	Belanja alat tulis kantor	10.552.100	10.993.700	(441.600)
		Jumlah	10.552.100	10.993.700	(441.600)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	SKPD	Belanja	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Belanja Barang	Belanja makanan dan minuman rapat	3.825.000	4.500.000	(675.000)
		Jumlah	3.825.000	4.500.000	(675.000)

Kantor Satuan Polisi Pamong Pemerintah

No	SKPD	Belanja	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Belanja Barang	Belanja makanan dan minuman rapat	18.750.000	19.725.000	(975.000)
2		Belanja alat tulis kantor	75.000	1.053.600	(978.600)

No	Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih
3		Belanja Foto copy dan penjilidan	385.000	1.114.300	(729.300)
4		Belanja penggantian sparepart/suku cadang	138.690.000	138.839.868	(149.868)
5		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	270.320.000	276.367.250	(6.047.250)
6		Belanja Foto copy dan penjilidan	90.000	180.000	(90.000)
7		Belanja cetak dan penggandaan	560.000	1.120.000	(560.000)
8		Belanja Foto copy dan penjilidan	400.000	522.800	(122.800)
9		Biaya penggantian uang transport dalam kota non PNS	954.000.000	961.750.000	(7.750.000)
10		Belanja makanan dan minuman peserta kegiatan	70.500.000	73.422.500	(2.922.500)
		Jumlah	1.435.020.000	1.454.370.318	(19.350.318)

Total 6 SKPD	2.578.086.500	2.956.010.094	(377.923.594)
--------------	---------------	---------------	---------------

Pajak Penghasilan atas Tali Asih Peraih Medali Porprov Jateng 2013 Yang Telah Dipungut

No	Penandatangan kwitansi	Cabang Olah Raga	Nilai kwitansi	PPh Pasal 21
1	Hn	Federasi Aerosport Indonesia (FASI)	502.000.000,00	52.662.000,00
2	Nr	Persatuan Angkat Besi, Bina Raga, dan Angkat beban Seluruh Indonesia (PABBSI)	1.340.000.000,00	121.560.000,00
3	H A	Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI)	152.000.000,00	9.120.000,00
4	-	PersatuanAtletik Seluruh Indonesia (PASI)	318.000.000,00	19.764.000,00
5	Ap	Federasi Olah Raga Balap Motor Indonesia (FOBM)	95.000.000,00	5.700.000,00
6	RG	Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)	207.000.000,00	12.420.000,00
7	EP	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)	144.000.000,00	8.640.000,00
8	PR	PBVSI	46.000.000,00	2.760.000,00
9	AU	Persatuan Olahraga Biliar Indonesia (POBSI)	40.000.000,00	2.400.000,00
10	TK	Pengurus Kota Gabsi Semarang	91.000.000,00	5.460.000,00
11	RW	Persatuan Bulu Tangkis Indonesia	85.000.000,00	5.100.000,00
12	Sg	Catur (PERCASI)	237.000.000,00	14.220.000,00
13	ED	Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI)	270.000.000,00	18.120.000,00
14	PW	Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)	145.000.000,00	8.700.000,00
15	AB	Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)	280.000.000,00	16.800.000,00
16	AS	Persatuan Golf Indonesia (PGI)	230.000.000,00	13.800.000,00
17	RH	Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)	440.000.000,00	28.680.000,00
18	S A	Persatuan Judo Indonesia (PJSI)	232.000.000,00	13.920.000,00
19	Sr	Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI)	10.000.000,00	600.000,00
20	AASP	Perkemi Kota Semarang	537.000.000,00	33.828.000,00
21	IM	Pengkot Perbakin Kota Semarang	433.000.000,00	32.892.000,00
22	Spr	Pengkot Perpani Kota Semarang	82.000.000,00	4.920.000,00
23	Km	FPTI	65.000.000,00	3.900.000,00
24	EBH	IPSI	152.000.000,00	9.120.000,00
25	Mj	PRSI	357.000.000,00	38.364.000,00
26	NH	POSSI	290.000.000,00	18.960.000,00
27	A Pt	PERSANI	710.000.000,00	57.828.000,00
28	AMH	PSSI	16.000.000,00	960.000,00
29	-	PSSI (Futsal)	36.000.000,00	2.160.000,00
30	Nrh	PSTI	156.000.000,00	9.360.000,00
31	ZZ	PORSEROXI	786.000.000,00	79.640.001,00
32	RR	PSI	262.000.000,00	15.824.000,00
33	LA	Taekwondo Indonesia (TI)	491.000.000,00	29.460.000,00
34	Sn	Kodrat	180.000.000,00	10.800.000,00
35	Rh	PELTI	141.000.000,00	8.460.000,00
36	EBU	PTMSI	178.000.000,00	13.094.000,00
37	AT	PERTINA	160.000.000,00	9.600.000,00
38	HS	WI	527.000.000,00	35.096.000,00
		TOTAL	10.423.000.000,00	774.692.001,00